BAB I
PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 232 ayat (5) yang mewajibkan entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020 akan tetapi baru dipublikasikan pada bulan Februari 2021.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan secara spesifik, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas sumber daya yang dikelola.

Secara lebih rinci, tujuan spesifik dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
b. Laporan Finansial (*financial reports*), yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan SAL akhir.

Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas (LAK), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kaspada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
q. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014.
s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.

I.3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu,memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah Tahun 2019.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian manapun dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Daftar Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

II.1. EKONOMI MAKRO, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

a. Umum

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat bagi hampir seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia. Bencana internasional berupa pandemi Covid-19 yang mulai mewabah sejak akhir Desember 2019 telah memicu terjadinya krisis multidimensional. Hampir seluruh sektor kehidupan menerima pukulan yang cukup berat dari pandemi COVID-19, tidak hanya di sektor kesehatan akan tetapi sektor ekonomi juga mengalami tekanan yang cukup berat. Banyak lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal mencatatkan sejarah kontraksi terdalam sejak Depresi Besar atau masa Perang Dunia II.

Kondisi ini melanjutkan *trend* perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun 2019 akibat terjadinya berbagai macam gejolak ekonomi seperti perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, perang geopolitik, dan perlambatan ekonomi di berbagai negara, dan gejolak ekonomi lainnya. Di tahun 2019, Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,3 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,0 persen Dalam publikasi berjudul *Global Economic Prospects* yang diterbitkan di Januari 2021, Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan mengalami kontraksi sebesar 4,3 persen sedangkan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terkontraksi sebesar 2,2 persen.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) dalam *Economic Outlook* No 108 Desember 2020 memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan mengalami kontraksi sampai 4,18 persen sedangkan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terkontraksi sebesar 2,43 persen.

International Monetary Fund (IMF) dalam laporan yang bertajuk *World Economic Outlook* January 2021 memperkirakan bahwa ekonomi dunia tahun 2020 akan terkontraksi sampai dengan 3,5 persen sedangkan ekonomi Indonesia akan terkontraksi sebesar 1,9 persen sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.

Sumber: OECD Economic Outlook December 2020, IMF World Economic Outlook January 2021, World Bank Global Economic Prospect January 2021

Gambar 2.1. Realisasi, Estimasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2021

Beberapa negara bahkan sampai mengalami resesi atau penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Beberapa negara yang mengalami resesi di tahun 2020 diantaranya Selandia Baru, Amerika Serikat, Jerman, Hongkong, Singapura, Korea Selatan, Australia, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris, Filipina, Thailand, Malaysia, Polandia, dan Singapura. Resesi antara lain ditandai dengan produk domestik bruto yang negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan ritel, ukuran pendapatan, dan manufaktur yang berkontraksi untuk periode waktu yang panjang. China merupakan salah satu negara di dunia yang diproyeksikan masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2020 yaitu sebesar 1,78 persen menurut OECD dan 2,0 persen menurut Bank Dunia.

Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup berat, akan tetapi di tahun 2021 perekonomian dunia termasuk Indonesia diperkirakan secara perlahan akan mulai membaik dan perlahan akan menguat di tahun 2022.

Sumber: World Bank, Global Economic Prospect January 2021

Gambar 2.2. Realisasi, Estimasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara di Dunia Tahun 2019-2021

Secara khusus, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali naik ke level 4,4 persen pada 2021 yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta. Perkiraan ini juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat, dan hilangnya pendapatan rumah tangga tetap rendah berkat hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik dan bantuan sosial yang memadai. Didorong konsumsi yang lebih kuat dan investasi, pertumbuhan akan menguat ke 4,8 persen pada 2022 seiring meningkatnya kepercayaan dengan syarat bahwa vaksin yang efektif dan aman akan tersedia bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Tabel 2.3. Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2022

		2019	2020e	2021f	2022f
Pertumbuhan PDB Riil	(Perubahan Persen Tahunan)	5,0	-2,2	4,4	4,8
Indeks Harga Konsumen	(Perubahan Persen Tahunan)	2,8	2,0	2,3	2,8
Neraca Akun Berjalan	(Persen PDB)	-2,7	-0,7	-1,4	-2,0
Neraca Anggaran Pemerintah	(Persen PDB)	-2,2	-6,0	-5,5	-4,3
Utang Publik	(Persen PDB)	30,2	37,5	40,9	43,0

Sumber: World Bank, Indonesia Economic Prospect Desember 2020.
Catatan: Angka tahun 2020-2022 adalah angka estimasi dan perkiraan

Secara umum, pandemi Covid-19 sekurang-kurangnya memberikan 3 dampak besar bagi perekonomian yang membuat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar, yaitu (i) membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data

dari BPS [1] yang menunjukkan bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III 2020 secara *y-on-y* mengalami penurunan sebesar 4,04 persen dibandingkan tahun 2019. Kemudian dampak yang kedua (ii) adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Sedangkan dampak yang ketiga (iii) seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Hal ini dapat dilihat dari total ekspor Indonesia sampai dengan triwulan III/2020 secara *y-on-y* mengalami penurunan sebesar 19,36 persen. [2]

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah diharuskan mengeluarkan kebijakan yang mampu memberikan stimulus terhadap perekonomian agar dapat bangkit dari keterpurukan. Kebijakan pemulihan ekonomi tersebut dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Secara lebih riil, kebijakan pemulihan ekonomi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang diterbitkan oleh Presiden pada tanggal 9 Mei 2020.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2020 adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN dilaksanakan dengan cara:

1. Memberikan Penyertaan Modal Negara pada BUMN

   Pemberian PMN kepada BUMN dimaksudkan untuk memperbaiki struktur modal BUMN atau anak usahanya yang terdampak virus corona. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau anak usahanya dalam menjalankan penugasan khusus pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.

2. Penempatan Dana khusus di bank peserta yang nantinya ditetapkan menteri yang kriterianya ditetapkan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK.

   Penempatan dana tersebut dimaksudkan untuk menyangga likuiditas bank pelaksana yang membutuhkan uang untuk melakukan resturukturisasi kredit atau pembiayaan, serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal.

3. Investasi Pemerintah;

[1] Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 127 Desember 2020.
[2] *Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi November 2020*

4. Penjaminan.

   Yaitu melakukan penjaminan secara langsung oleh Pemerintah yang diberikan kepada BUMN maupun melalui badan usaha penjaminan.

5. Belanja Negara

   Pelaksanaan program PEN melalui belanja negara termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Untuk membiayai program PEN tersebut di atas, pemerintah sampai harus melakukan perubahan anggaran sebanyak 2 (dua) kali melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu, proyeksi pendapatan tahun 2020 yang mengalami penurunan sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 juga memaksa pemerintah untuk melakukan revisi target pendapatan dalam APBN.

Realisasi pendapatan negara tahun 2020 mencapai Rp1.633,6 triliun (96,1 persen dari target Perpres 72 Tahun 2020)[3]. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tersebut mengalami penurunan sebesar 16,7 persen. Penerimaan pajak yang paling terpukul dampak dari pandemi di sisi lain karena pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada UMKM dan dunia usaha yang terimbas pandemi Covid-19. Insentif diberikan dalam bentuk a.l. PPh 21 DTP; Pengurangan PPh Ps 25; Restitusi PPN dipercepat; dan PPh final UMKM DTP. Realisasi penerimaan perpajakan hanya tercapai sebesar Rp1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target APBD-P TA-2020 sebesar 1.198,8 triliun sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp212,8 triliun atau 103,5 persen dari target APBD-P TA-2020 sebesar Rp205,7 triliun.

Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020), atau meningkat sebesar 12,2 persen dari realisasi di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi. Refokusing dan realokasi belanja negara yang dilakukan oleh Pemerintah, cukup efektif dalam rangka penanggulangan dampak pandemi covid-19 dan menggerakkan perekonomian serta mengurangi kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020.

Dari total realisasi belanja negara tersebut, sebesar Rp937,42 triliun merupakan realisasi belanja negara dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19[4]. Sedangkan dari belanja daerah berjumlah Rp86,36 triliun serta dari sektor moneter sebesar Rp6,50 triliun. Kemudian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 4,02 triliun, sedangkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 320 miliar. Terakhir, dari dana hibah dan masyarakat senilai Rp625 miliar. Sedangkan realisasi program PEN tahun 2020 mencapai Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun yang

[3] *Konferensi Pers Menteri Keuangan RI tentang Realisasi Pelaksanaan APBN TA-2020 tanggal 6 Januari 2021.*
[4] *Media Workshop BPK RI tanggal 29 Desember 2020.*

meliputi (i) belanja bidang kesehatan sebesar Rp63,51 triliun; (ii) perlindungan sosial Rp220,39 triliun; (iii) dukungan UMKM sebesar Rp112,44 triliun; (iv) pembiayaan korporasi sebesar Rp60,73 triliun dan insentif usaha sebesar Rp56,12 triliun.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah di tahun 2020 secara perlahan cukup efektif untuk menjaga perekonomian dari dampak yang lebih parah akibat pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia dan global terdampak parah selama kuartal kedua tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas dan kebijakan kesehatan publik lainnya yang diberlakukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global mulai membaik seiring pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara parsial di beberapa negara dan dukungan kebijakan yang sangat signifikan untuk memerangi resesi akibat pandemi.

Ekonomi Indonesia juga tampak mulai pulih perlahan yang diindikasikan dengan kontraksi ekonomi mengecil menjadi 3,5 persen *yoy* (tahun-ke-tahun) pada kuartal ketiga dibandingkan kontraksi 5,3 persen *yoy* pada kuartal kedua) yang didorong oleh pemulihan konsumsi parsial–termasuk peningkatan belanja publik yang signifikan–, investasi dan ekspor bersih. Namun dampak dari krisis masih membayangi dengan permintaan domestik yang masih lebih lemah secara signifikan dibandingkan sebelum krisis (2,8 persen di bawah level 2019, pada September).

b. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana banyak terjadi di daerah lain di wilayah Jawa Tengah maupun Indonesia, luas lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga juga semakin berkurang, terutama karena terjadinya alih fungsi menjadi lahan non pertanian sejalan dengan semakin berkembangnya industrialisasi dan taraf hidup masyarakat.

Jika di tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai petani sebanyak 141.839 orang maka di tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi hanya 127.145 orang. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh industri, di tahun 2012 baru sebanyak 87.714 orang maka di tahun 2015 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 105.254 orang.

Demikian juga jika ditinjau dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor usaha, peran atau kontribusi sektor pertanian selama rentang tahun 2016-2019 semakin menurun. Jika pada tahun 2015 sektor pertanian masih memberikan kontribusi sebesar 29,27 persen, maka di 2016 menurun menjadi 28,56 persen, turun menjadi 27,39 persen pada tahun 2017, 27,05 persen di tahun 2018 dan kembali menurun menjadi 26,22 persen di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2015, maka sampai dengan tahun 2019, secara agregat kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 3,05 persen.

Di sisi lain, sektor usaha yang terus menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun adalah sektor industri pengolahan (*manufacturing*) serta informasi dan komunikasi (*information and communication*). Pada tahun 2015, angka kontribusi sektor industry pengolahan baru mencapai 25,85 persen akan tetapi di tahun 2019 meningkat menjadi 27,24 persen atau selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan agregat sebesar 1,39 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,27	28,56	27,39	27,25	26,22
Pertambangan dan Penggalian	5,04	4,85	4,64	4,62	4,54
Industri Pengolahan	25,85	26,55	26,88	26,81	27,24
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	5,72	5,74	5,97	6,13	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,38	12,59	12,58	12,74
Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,13	3,14	3,08	3,19
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,27	2,27	2,30	2,39
Informasi dan Komunikasi	1,52	1,53	1,71	1,78	1,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,20	2,25	2,30	2,28	2,23
Real Estat	1,05	1,05	1,07	1,07	1,06
Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,18	0,20	0,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajid	2,84	2,83	2,78	2,68	2,63
Jasa Pendidikan	5,52	5,65	5,93	6,01	6,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,04	1,08	1,10	1,12
Jasa Lainnya	1,78	1,85	1,92	1,96	2,00
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu proses produksi dapat diketahui dari data PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Sebagaimana dialami oleh seluruh negara di dunia dan juga Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 diproyeksikan juga mengalami pertumbuhan negatif. Padahal jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sampai 2019, perekonomian Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga cenderung meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 mengalami percepatan dibandingkan tahun 2018 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 tahun 2019 sebesar 5,41 persen yang meningkat dari tahun 2018 sebesar 5,31 persen sebagaimana terlihat dari grafik di bawah. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih lebih baik

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Persen)

Tahun 2015-2019

Secara khusus di wilayah eks Karesidenan Banyumas, nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Purbalingga mempati urutan ketiga setelah Cilacap dan Banyumas sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6 Perbandingan PDRB ADHK Tahun 2010
Kabupaten Se-eks Karesidenan Banyumas (Rp Miliar)
Tahun 2016-2019

Kabupaten	2016	2017	2018 *	2019 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cilacap	92.858,65	95.254,59	98.159,05	100.445,73
Banyumas	33.051,05	35.147,31	37.414,50	39.779,32
Purbalingga	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,94
Banjarnegara	12.932,88	13.663,27	14.438,15	15.246,87

*Catatan: *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020

Sedangkan apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 Kabupaten Purbalingga mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, terlihat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi dari semula 5,42 persen di tahun 2018 menjadi 5,65 persen di tahun 2019 atau naik sebesar 0,23 persen. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Purbalingga sebagai satu-satunya kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas yang mengalami laju pertumbuhan positif, sedangkan 3 kabupaten lainnya mengalami perlambatan.

Ekonomi Kabupaten Banyumas melambat di tahun 2019 menjadi 6,32 persen dari semula 6,45 persen di tahun 2018 sedangkan pertumbuhan ekonomi Banjarnegara melambat dari

semula 5,67 persen di tahun 2018 menjadi 5,65 persen di tahun 2019 dan ekonomi Cilacap melambat cukup besar dari semula 3,05 persen di tahun 2018 menjadi 2,33 persen di tahun 2019 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.

*Catatan: *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 eks Karesidenan Banyumas (Rp Miliar) Tahun 2016-2019

Laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2010 Kabupaten Purbalingga sebesar 5,65 persen masih didominasi oleh sektor Informasi dan Komunikasi dengan kontribusi mencapai 11,65 persen sedangkan kontribusi tekecil berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi hanya sebesar 1,54 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Besarnya kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa di era millennium sekarang ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi menjadi hal yang semakin penting bagi masyarakat. Demikian juga dengan semakin kecilnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa sektor tersebut saat ini semakin kurang menarik bagi masyarakat.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	3,05	2,53	3,67	1,54
Pertambangan dan Penggalian	0,55	0,24	0,54	3,24	4,52
Industri Pengolahan	6,01	5,24	5,86	5,94	**7,33**
Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	3,95	4,63	4,79	5,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,62	2,10	6,80	6,73	5,38
Konstruksi	6,39	7,63	8,68	5,03	6,25
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19	4,91	6,44	5,42	6,50
Transportasi dan Pergudangan	8,37	5,56	6,31	5,04	9,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	5,79	6,46	6,34	10,06
Informasi dan Komunikasi	8,77	8,35	15,95	12,80	11,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,50	8,93	5,27	4,02	3,63
Real Estat	7,52	6,73	6,08	6,08	5,69
Jasa Perusahaan	8,34	10,42	9,13	9,42	10,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajid	5,30	2,39	1,97	4,01	3,74
Jasa Pendidikan	7,56	7,70	8,61	8,67	7,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	9,70	9,29	9,35	6,99
Jasa Lainnya	3,23	8,53	9,25	9,61	9,23
Produk Domestik Regional Bruto	**5,47**	**4,85**	**5,37**	**5,42**	**5,65**

Sumber: Kabupaten Purbalingga Purbalingga dalam Angka 2020

c. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik para produsen sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi

Ketidakpastian global yang terjadi selama tahun 2019 telah memberikan pengaruh pada perekonomian dunia baik pada pertumbuhan ekonomi maupun harga komoditas. Harga komoditas global cenderung relatif stabil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Berdasarkan data dari IMF, inflasi dunia tahun 2019 sebesar 3,6 persen atau sama dengan angka inflasi tahun 2018.

Namun demikian, gejolak kondisi perekonomian telah menyebabkan terjadinya penurunan harga beberapa komoditas dunia yang penting. Beberapa komoditas dunia yang mengalami penurunan diantaranya logam, batu bara dan minyak dunia. Penurunan

harga logam dunia disebabkan oleh melemahnya investasi karena masih tingginya eskalasi hubunga dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Harga batu bara juga mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan batu bara di tingkat global karena terpengaruh adanya kampanye ekonomi hijau di beberapa negara. Sementara itu, harga harga minyak dunia mengalami penurunan yang cukup tajam akibat dari melemahnya permintaan global dan penurunan suplai minyak dunia oleh negara-negara anggota OPEC.

Secara umum, inflasi negara-negara di dunia tahun 2019 juga mengalami penurunan termasuk Indonesia mengalami penurunan 2,22 persen dari semula 3,82 persen di tahun 2018 menjadi 1,60 persen di tahun 2019. Turunnya nilai inflasi terjadi di hampir seluruh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada, Korea, Australia dan rata-rata negara maju di Kawasan Eropa. Hanya Belanda yang mencatatkan adanya peningkatan laju inflasi dari 1,6 persen pada tahun 2018 menjadi 2,7 persen di tahun 2019.

Sementara itu, inflasi di negara berkembang menunjukkan adanya peningkatan laju inflasi. Secara umum laju inflasi negara berkembang mencapai 5,0 persen atau meningkat sekitar 0,2 poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,8 persen. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan laju inflasi di seluruh kawasan kecuali Kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah. Kawasan yang mengalami kenaikan laju inflasi cukup tinggi yaitu Kawasan Amerika Latin dan Karibia yang naik sebesar 0,9 poin menjadi 7,1 persen dan Kawasan Asia yang naik sebesar 0,6 poin menjadi 3,2 persen. Sementara itu, laju inflasi yang menurun hanya terjadi di Kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah yaitu turun sekitar 1,4 poin persen menjadi 8,5 persen. Walaupun demikian, Kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah masih menjadi kawasan dengan laju inflasi tertinggi di negara berkembang. Hal ini disebabkan kenaikan harga masih terjadi akibat masih terjadinya ketegangan geopolitik di kawasan ini.

Mewakili negara dengan tingkat populasi terbesar di dunia adalah Cina dan India. Tingkat inflasi di Cina selama tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dari semula 2,1 persen menjadi 2,9 persen. Sementara itu, inflasi di India meningkat cukup tinggi dari 3,4 persen pada tahun 2018 menjadi 4,5 persen pada tahun 2019.

Perbandingan tingkat inflasi dunia, negara maju, negara berkembang serta negara-negara kawasan ASEAN dapat dilihat pada grafik di bawah.

Sumber: BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2020

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara di Dunia (%)
Tahun 2015-2019

Inflasi di kawasan ASEAN mengalami penurunan dari 2,6 persen pada tahun 2018 menjadi 2,1 persen pada tahun 2019. Penurunan laju inflasi disebabkan hampir di seluruh negara di Kawasan ASEAN mengalami penurunan kecuali Singapura yang justru mengalami kenaikan. Singapura mencatatkan terjadinya kenaikan inflasi dari 0,4 persen pada tahun 2018 menjadi 0,6 persen di tahun 2019.

Inflasi di Filipina mengalami penurunan dari 5,2 persen di tahun 2018 menjadi 2,5 persen di tahun 2019. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh penurunan harga beras karena stoknya yang melimpah. Di Vietnam, inflasi turun dari 3,5 persen pada tahun 2018 menjadi 2,8 persen di tahun 2019. Menurunnya inflasi di Vietnam disebabkan oleh pengaruh harga bahan bakar global yang menurun. Selain itu, kuatnya ekonomi Vietnam dan semakin kuatnya aliran masuk modal asing turut menekan adanya peningkatan laju inflasi. Sementara itu, inflasi di Malaysia tercatat sebesar 0,7 persen atau menurun sedikit dibandingkan inflasi 2018 sebesar 1,0 persen, penurunan ini lebih disebabkan oleh tren deflasi yang terus terjadi sejak tahun 2018 hingga kuartal pertama tahun 2019, serta penurunan harga di sektor transportasi. Negara berikutnya yaitu Thailand mencatatkan penurunan inflasi sebesar 0,4 poin persen menjadi 0,7 persen pada tahun 2019. Seperti di Vietnam, penurunan laju inflasi di Thailand diduga dipengaruhi oleh rendahnya harga minyak dunia.

Selanjutnya, inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2,7 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi 2018 yang sebesar 3,1 persen. Angka inflasi ini masih berada di kisaran target pemerintah antara 2,5-4,5 persen. Pencapaian ini juga meneruskan pencapaian yang terus menerus berada di kisaran target selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.10 Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia (%)
Tahun 2015-2019

	Kelompok Negara	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Dunia [1)]	2,8	2,8	3,2	3,6	3,6
B.	Negara-negara maju [1)]	0,3	0,8	1,7	2,0	1,4
	Amerika Serikat	0,1	1,3	2,1	2,4	1,8
	Jepang	0,8	(0,1)	0,5	1,0	0,5
	Inggris	-	0,7	2,7	2,5	1,8
	Korea	0,7	1,0	1,9	1,5	0,4
	Kanada	1,1	1,4	1,6	2,3	1,9
	Australia	1,5	1,3	2,0	1,9	1,6
	Kawasan Eropa	0,2	0,2	1,5	1,8	1,2
	Jerman	0,7	0,4	1,7	2,0	1,3
	Perancis	0,1	0,3	1,2	2,1	1,3
	Italia	0,1	(0,1)	1,3	1,2	0,6
	Spanyol	(0,5)	(0,2)	2,0	1,7	0,7
	Belanda	0,2	0,1	1,3	1,6	2,7
C.	Negara-negara berkembang [1)]	4,7	4,3	4,3	4,8	5,0
	Sub-Sahara Afrika	6,9	10,7	10,7	8,3	8,4
	Asia	2,7	2,8	2,4	2,6	3,2
	Cina	1,4	2,0	1,6	2,1	2,9
	India	4,9	4,5	3,6	3,4	4,5
	Amerika Latin dan Karibia	5,5	5,6	6,0	6,2	7,1
	Timur Tengah dan Asia Tengah	5,5	5,5	6,7	9,9	8,5
	Eropa	10,5	5,5	5,4	6,1	6,5
D.	ASEAN [2)]	2,7	2,0	2,8	2,6	2,1
	Malaysia	2,1	2,1	3,8	1,0	0,7
	Filipina	0,7	1,3	2,9	5,2	2,5
	Singapura	(0,5)	(0,5)	0,6	0,4	0,6
	Thailand	(0,9)	-	0,7	1,1	0,7
	Indonesia	**3,35**	**3,02**	**3,61**	**3,13**	**2,72**
	Vietnam	0,6	2,7	3,5	3,5	2,8

Sumber: BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2020

Relatif rendahnya tingkat inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasinya nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan. Hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya untuk komoditas-komoditas yang pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga-harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Terjaganya daya beli dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angka inflasi Indonesia secara konsisten terus mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Pada tahun 2015, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,35 persen, terus menurun sampai menyentuh angka 1,68 persen di tahun 2020. Sedangkan Indeks Harga Konsumen di tahun 2020 rata-rata berada pada angka 104,91 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia Tahun 2016-2020

Bulan	2016		2017		2018		2019		2020[1)]	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	123,62	0,51	127,94	0,97	132,10	0,62	135,83	0,32	104,33	0,39
Februari	123,51	-0,09	128,24	0,23	132,32	0,17	135,72	-0,08	104,62	0,28
Maret	123,75	0,19	128,22	-0,02	132,58	0,20	135,87	0,11	104,72	0,10
April	123,19	-0,45	128,33	0,09	132,71	0,10	136,47	0,44	104,80	0,08
Mei	123,48	0,24	128,83	0,39	132,99	0,21	137,40	0,68	104,87	0,07
Juni	124,29	0,66	129,72	0,69	133,77	0,59	138,16	0,55	105,06	0,18
Juli	125,15	0,69	130,00	0,22	134,14	0,28	138,59	0,31	104,95	-0,10
Agustus	125,13	-0,02	129,91	-0,07	134,07	-0,05	138,75	0,12	104,90	-0,05
September	125,41	0,22	130,08	0,13	133,83	-0,18	138,37	-0,27	104,85	-0,05
Oktober	125,59	0,14	130,09	0,01	134,2	0,28	138,4	0,02	104,92	0,07
November	126,18	0,47	130,35	0,2	134,56	0,27	138,6	0,14	105,21	0,28
Desember	126,71	0,42	131,28	0,71	135,39	0,62	139,07	0,34	105,68	0,45
Tingkat Inflasi		**3,02**		**3,61**		**3,13**		**2,72**		**1,68**

Sumber: BPS, diolah

Pergerakan inflasi umum sepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dengan nilai inflasi terendah ada di bulan Juli, Agustus dan September dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang-barang di bulan tersebut tidak mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya akan tetapi justru relatif menurun. Kondisi tersebut salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat daya beli masyarakat berkurang cukup signifikan. Pergerakan nilai inflasi bulan Januari sampai dengan Desember 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.12 Perkembangan Inflasi Indonesia
Periode Januari - Desember 2020

Dilihat dari kelompok pengeluaran, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahun 2020 adalah kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan nilai 5,80 persen sedangkan kelompok pengeluaran terkecil adalah kelompok Transportasi yang tertekan cukup besar hingga hanya memberikan kontribusi 0,85 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.13 Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2020

Kelompok Pengeluaran	Nilai
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,63
Pakaian dan Alas Kaki	1,01
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,35
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,03
Kesehatan	2,79
Transportasi	(0,85)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0,35)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,73
Pendidikan	1,40
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	2,26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,80
Umum	1,68

Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan laju inflasi nasional, tingkat inflasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga relatif menurun meskipun tidak sebesar penurunan inflasi nasional. Di tahun 2019, inflasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,81 persen atau mengalami penurunan sebeasr 0,01 persen dibandingkan nilai tahun 2018 sebesar 2,82 persen sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.

Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.14 Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

Sedangkan untuk inflasi di Kabupaten Purbalingga, sejak tahun 2020 tidak dilakukan lagi pengukuran inflasi karena Kabupaten Purbalingga bukan termasuk kota inflasi. Namun sebagai pembanding, dapat dilihat tingkat inflasi di beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Purbalingga di antaranya adalah Cilacap dan Purwokerto.

Tingkat inflasi di Cilacap tahun 2019 sebesar 2,19 persen, mengalami penurunan 1,02 persen dibandingkan nilai inflasi taun 2018 sedangkan di Purwokerto, inflasi tahun 2019 sebesar 2,28 persen, mengalami penurunan 0,70 persen dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.15 Tingkat Inflasi Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2016-2019

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019
Cilacap	2,77	4,41	3,21	2,19
Purwokerto	2,42	3,91	2,98	2,28
Kudus	2,32	4,17	3,11	3,02
Surakarta	2,15	3,10	2,45	2,94
Semarang	2,32	3,64	2,76	2,93
Tegal	2,71	4,03	3,08	2,56

Sumber: BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2020

d. Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks sebagai potensi SDM, penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan dan fungsi penduduk dalam pembangunan akan optimal apabila memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berjumlah 1.003.246 yang terdiri dari 508.036 laki-laki atau 50,64 persen dan 495.210 perempuan atau 49,36 persen. Dengan komposisi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2019 adalah sebesar 102,59 artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan banyaknya rumah tangga mencapai 232.453 atau rata-rata per rumah tangga 4 (empat) orang. Data rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga menurut umur tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.16 Rasio Jenis Kelamin Purbalingga Menurut Umur
Tahun 2019

Umur	Jumlah Penduduk			*Sex Rasio*
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	36.884	34.466	71.350	107,02
5-9	41.661	39.002	80.663	106,82
10-14	41.083	38.535	79.618	106,61
15-19	32.188	31.611	63.799	101,83
20-24	40.440	39.049	79.489	103,56
25-29	40.516	38.424	78.940	105,44
30-34	38.538	36.560	75.098	105,41
35-39	41.358	40.466	81.824	102,20
40-44	38.114	37.362	75.476	102,01
45-49	34.212	33.960	68.172	100,74
50-54	29.427	30.836	60.263	95,43
55-59	26.273	27.967	54.240	93,94
60-64	20.444	21.241	41.685	96,25
65+	46.898	45.731	92.629	102,55
Jumlah	**508.036**	**495.210**	**1.003.246**	**102,59**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Rasio ketergantungan Purbalingga pada tahun 2019 sebesar 47,75 yang berarti bahwa dari setiap seratus penduduk berusia produktif, harus menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya sebesar 51,52 turun yang menunjukkan bahwa beban ketergantungan yang diterima oleh penduduk pada usai produktif semakin berkurang.

Semakin tinggi angka rasio ketergantungan berarti semakin tinggi angka beban ketergantungan, dan semakin besarnya angka beban ketergantungan akan menurunkan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Dari sisi distribusi jumlah penduduk di tahun 2019, wilayah Kecamatan Bukateja menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Purbalingga yaitu 78.920 jiwa sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu yaitu 27.290 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk per Kecamatan
Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk (ribu)	
	2010	2019
(1)	(2)	(3)
Kemangkon	52,26	64,68
Bukateja	65,38	78,92
Kejobong	42,24	51,52
Pengadegan	35,25	41,23
Kaligondang	55,34	66,34
Purbalingga	55,62	59,19
Kalimanah	49,35	57,18
Padamara	38,70	45,51
Kutasari	54,28	64,49
Bojongsari	54,87	62,57
Mrebet	65,04	78,06
Bobotsari	46,59	55,07
Karangreja	39,09	45,06
Karangjambu	23,42	27,29
Karanganyar	34,17	41,12
Kertanegara	30,18	37,65
Karangmoncol	49,79	58,57
Rembang	57,38	68,82
Purbalingga		
Hasil Registrasi		1.003,25
Hasil Proyeksi	848,95	933,99

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Meskipun Kecamatan Bukateja merupakan wilayah dengan tingkat populasi tertinggi, akan tetapi dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, Kecamatan Purbalingga menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 4.021 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Karangjambu Kembali menjadi wilayah dengan populasi terkecil sekaligus kepadatan penduduk terkecil yaitu 592 jiwa/km².

Tabel 2.18 Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Tahun 2019

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km²	
	2010	2019
(1)	(2)	(3)
Kemangkon	1.158,00	1.433,00
Bukateja	1.542,00	1.861,00
Kejobong	1.056,00	1.288,00
Pengadegan	844,00	988,00
Kaligondang	1.095,00	1.313,00
Purbalingga	3.778,00	4.021,00
Kalimanah	2.192,00	2.540,00
Padamara	2.241,00	2.635,00
Kutasari	1.026,00	1.219,00
Bojongsari	1.876,00	2.139,00
Mrebet	1.358,00	1.630,00
Bobotsari	1.443,00	1.706,00
Karangreja	525,00	605,00
Karangjambu	508,00	592,00
Karanganyar	1.119,00	1.346,00
Kertanegara	794,00	990,00
Karangmoncol	826,00	972,00
Rembang	627,00	751,00
Purbalingga		
Hasil Registrasi		1.290,00
Hasil Proyeksi	1.092,00	1.201,00

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

e. Ketenagakerjaan

Terkait dengan kondisi ketenagakerjaan, berdasarkan hasil Sakernas tahun 2019, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 476.896 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 225.637 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 454.098 orang yang terdiri dari 265.829 laki-laki dan 188.269 perempuan sedangkan sisanya sebanyak 22.798 orang berstatus sebagai pengangguran terbuka sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	280.027	196.869	476.896
Bekerja	*265.829*	*188.269*	*454.098*
Pengangguran Terbuka	14.198	8.600	22.798
Angkatan Kerja	62.832	162.805	225.637
Sekolah	20.418	17.873	38.291
Mengurus Rumah Tangga	16.063	131.293	147.356

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lainnya	26.351	13.639	39.990
Jumlah	**342.859**	**359.674**	**702.533**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**81,67**	**54,74**	**67,88**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5,07**	**4,37**	**4,78**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Sedangkan ditinjau dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), secara keseluruhan TPAK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan angka TPAK tahun 2018, yaitu dari semula 70,33 persen di tahun 2018 menjadi 67,88 persen di tahun 2019.

Nilai TPAK memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, begitu pula sebaliknya. Nilai TPAK tahun 2019 sebesar 67,88 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 68 orang yang siap bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka secara tidak langsung dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingkat pengangguran persentase individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga secara umum mengalami kecenderungan yang terus menurun di mana pada tahun 2019 tingkat penganggurannya sebesar 4,78 persen lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 6,06 persen.

TPT sebesar 4,78 persen menunjukkan bahwa sebanyak 95,22 persen angkatan kerja dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Industri pengolahan menjadi sektor yang menyerap angkatan kerja terbesar di tahun 2019 yaitu sebanyak 129.250 orang atau 28,46 persen disusul dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 96.441 orang atau 21,24 persen, sedangkan sektor pertambahan, energi, informasi, dan real estate menjadi sektor yang paling sedikit penyerap angkatan kerja yaitu hanya sebanyak 3.635 orang atau 0,80 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	71.726	24.715	96.441
Pertambangan dan Penggalian	5.009	1.004	6.013
Industri Pengolahan	49.575	79.675	129.250
Konstruksi	34.215	-	34.215
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.456	38.093	85.549
Transportasi dan Pergudangan	14.086	-	14.086

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.929	10.737	20.666
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.694	2.310	5.004
Jasa Perusahaan	3.345	2.641	5.986
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajid	3.977	1.903	5.880
Jasa Pendidikan	6.718	11.784	18.502
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.128	3.933	8.061
Jasa Lainnya	10.135	10.675	20.810
Pertambangan, energi, informasi, real estate	2.836	799	3.635
Jumlah	**265.829**	**188.269**	**454.098**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja sejumlah 454.098 orang, mayoritas merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi Sekolah Dasar yaitu sebanyak 233.911 orang atau 51,51 persen sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan merupakan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 30.107 orang atau hanya 6,63 persen dari total angkatan kerja yang bekerja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.21 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	233.911	5.163	239.074	97,84
1	108.782	5.410	114.192	95,26
2	81.298	9.774	91.072	89,27
3	30.107	2.451	32.558	92,47
Jumlah	**454.098**	**22.798**	**476.896**	**95,22**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020
Keterangan:
0.≤ Sekolah Dasar
1.Sekolah Menengah Pertama
2.Sekolah Menengah Atas
3.Perguruan Tinggi

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga hanya merupakan lulusan SD sementara untuk tingkat Jawa Tengah, persentase angkatan kerja lulusan SD sudah berada di bawah angka 50 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.22 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Purbalingga			Jawa Tengah		
	Bekerja (persen)	Pengangguran (persen)	Anggatan Kerja (persen)	Bekerja (persen)	Pengangguran (persen)	Angkatan Kerja (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	51,51	22,65	50,13	46,04	20,77	44,91
1	23,96	23,73	23,94	19,91	20,90	19,95
2	17,90	42,87	19,10	25,13	48,18	26,16
3	6,63	10,75	6,83	8,92	10,15	8,98
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Dari sisi besaran tingkat upah, secara umum Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada tahun 2020, UMK Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp1.940.800,00. Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, UMK Kabupaten Purbalingga berada pada posisi 17 dari 35 Kabupaten/Kota yang lain dan jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Banyumas, nilai UMK Kabupaten Purbalingga ada di posisi kedua di bawah Kabupaten Cilacap sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.23 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Semarang	2.310.088,00	2.498.587,53	2.715.000,00
Kabupaten Demak	2.065.490,00	2.240.000,00	2.432.000,00
Kabupaten Kendal	1.929.458,00	2.084.393,48	2.261.775,00
Kabupaten Semarang	1.896.990,00	2.055.000,00	2.229.880,50
Kabupaten Kudus	1.892.532,00	2.044.467,75	2.218.451,95
Kabupaten Cilacap	1.841.209,00	1.989.058,08	2.158.327,00
Kota Pekalongan	1.765.179,00	1.906.922,47	2.072.000,00
Kabupaten Batang	1.742.621,00	1.900.000,00	2.061.700,00
Kabupaten Magelang	1.706.747,00	1.882.000,00	2.042.200,00
Kabupaten Jepara	1.739.360,00	1.879.031,00	2.040.000,00
Kota Salatiga	1.735.012,00	1.875.325,24	2.034.915,42
Kabupaten Pekalongan	1.721.638,00	1.859.885,05	2.018.161,27
Kabupaten Karanganyar	1.695.876,00	1.833.000,00	1.989.000,00
Kota Surakarta	1.668.682,00	1.802.700,00	1.956.200,00
Kabupaten Klaten	1.661.632,00	1.795.061,43	1.947.821,16
Kabupaten Boyolali	1.651.619,00	1.790.000,00	1.942.500,00
Kabupaten Purbalingga	**1.655.110,00**	**1.788.500,00**	**1.940.800,00**
Kabupaten Sukoharjo	1.644.782,00	1.783.500,00	1.938.000,00
Kota Tegal	1.630.106,00	1.762.000,00	1.925.000,00
Kabupaten Banyumas	1.588.688,00	1.750.000,00	1.900.000,00
Kabupaten Tegal	1.616.518,00	1.747.000,00	1.896.000,00

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Pati	1.543.682,00	1.742.000,00	1.891.000,00
Kabupaten Pemalang	1.587.166,00	1.718.000,00	1.865.000,00
Kabupaten Wonosobo	1.584.013,00	1.712.500,00	1.859.000,00
Kota Magelang	1.579.556,00	1.707.000,00	1.853.000,00
Kabupaten Purworejo	1.570.860,00	1.700.000,00	1.845.000,00
Kabupaten Blora	1.563.359,00	1.690.000,00	1.834.000,00
Kabupaten Kebumen	1.558.793,00	1.686.000,00	1.835.000,00
Kabupaten Grobogan	1.559.989,00	1.685.500,00	1.830.000,00
Kabupaten Temanggung	1.556.184,00	1.682.027,10	1.825.200,00
Kabupaten Sragen	1.546.493,00	1.673.500,00	1.815.914,85
Kabupaten Brebes	1.541.617,00	1.665.850,00	1.807.614,00
Kabupaten Rembang	1.530.637,00	1.660.000,00	1.802.000,00
Kabupaten Wonogiri	1.523.027,00	1.655.000,00	1.797.000,00
Kabupaten Banjarnegara	1.490.000,00	1.610.000,00	1.748.000,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020.

Dengan tingkat UMK yang relatif cukup tinggi di wilayah eks-karesidenan Banyumas dan juga cukup banyaknya Penanaman Modal Asing yang masuk ke Kabupaten Purbalingga, sektor industri Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Di tahun 2018, jumlah realisasi proyek PMA di Kabupaten Purbalingga sebanyak 91 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp12,36 miliar dan penyerapan tenaga kerja mencapai kurang lebih 5.843 orang.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbaikan kualitas ekonomi tidak hanya ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam kualitas pembangunan manusia. Dengan dasar tersebut dipergunakan suatu ukuran pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni (i) umur panjang dan hidup sehat (a long *and healthy life*), (ii) pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) standar hidup layak (*decent standard of living*). Meskipun IPM adalah indeks yang dikembangkan oleh UNDP namun Terdapat perbedaan antara indikator yang digunakan oleh UNDP dan BPS untuk mengukur indeks IPM sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}) x100$		Rata-rata Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	

Gambar 2.24 Perbandingan Metodologi Penghitungan IPM UNDP dan BPS

Selain digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari BPS, nilai IPM Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Jika mengacu pada *Human Development Report 2020* yang dirilis oleh *United Nation Development Program (UNDP)*, IPM Indonesia tahun 2019 berada pada posisi 107 dengan nilai sebesar 0,718, sama dengan IPM Bolivia dan Filipina. Sedangkan menurut BPS, IPM Indonesia tahun 2019 adalah 71,92.

Jika dibandingkan IPM negara-negara ASEAN, IPM Indonesia berada pada posisi ke-5 di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.25 Perkembangan IPM Negara-Negara ASEAN
Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Singapura	0,933	0,936	0,938
Brunei Darussalaam	0,838	0,836	0,838
Malaysia	0,805	0,805	0,810
Thailand	0,765	0,772	0,777
Indonesia	**0,707**	**0,712**	**0,718**
Filipina	0,708	0,711	0,718
Vietnam	0,696	0,700	0,704
Laos	0,608	0,609	0,613
Kamboja	0,582	0,585	0,594
Myanmar	0,572	0,579	0,583

Sumber: UNDP. Human Development Report 2020

Sedangkan nilai IPM Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 71,87 atau berada pada peringkat 13 dari seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IPM tersebut mengalami peningkatan 0,14 poin atau 0,20 persen dibandingkan nilai IPM tahun 2019 sebesar 71,73. Nilai ini masih sedikit di bawah rata-rata IPM Indonesia tahun 2020 sebesar 71,94.

Provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 80,77 sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua dengan nilai hanya sebesar 60,44 relatif jauh di bawah rata-rata IPM nasional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.26 Perkembangan IPM Nasional Per Provinsi
Tahun 2018-2020

No	Provinsi	2020	2019	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	80,77	80,76	80,47
2	DI Yogyakarta	79,97	79,99	79,53
3	Kalimantan Timur	76,24	76,61	` 75,83
4	Kepulauan Riau	75,59	75,48	74,84
5	Bali	75,50	75,38	74,77
6	Sulawesi Utara	72,93	72,99	72,20
7	Riau	72,71	73,00	72,44
8	Banten	72,45	72,44	71,95
9	Sumatera Barat	72,38	72,39	71,73
10	Jawa Barat	72,09	72,03	71,30
11	Aceh	71,99	71,90	71,19
12	Sulawesi Selatan	71,93	71,66	70,90
13	**Jawa Tengah**	**71,87**	**71,73**	**71,12**
14	Sumatera Utara	71,77	71,74	71,18
15	Jawa Timur	71,71	71,50	70,77
16	Kepulauan Bangka Belitung	71,47	71,30	70,67
17	Sulawesi Tenggara	71,45	71,20	70,61
18	Bengkulu	71,40	71,21	70,64
19	Jambi	71,29	71,26	70,65

No	Provinsi	2020	2019	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Kalimantan Tengah	71,05	70,91	70,42
21	Kalimantan Selatan	70,91	70,72	70,17
22	Kalimantan Utara	70,63	71,15	70,56
23	Sumatera Selatan	70,01	70,02	69,39
24	Lampung	69,69	69,57	69,02
25	Sulawesi Tengah	69,55	69,50	68,88
26	Maluku	69,49	69,45	68,87
27	Gorontalo	68,68	68,49	67,71
28	Maluku Utara	68,49	68,70	67,76
29	Nusa Tenggara Barat	68,25	68,14	67,30
30	Kalimantan Barat	67,66	67,65	66,98
31	Sulawesi Barat	66,11	65,73	65,10
32	Nusa Tenggara Timur	65,19	65,23	64,39
33	Papua Barat	65,09	64,70	63,74
34	Papua	60,44	60,84	60,06
	INDONESIA	**71,94**	**71,92**	**71,39**

Sumber: BPS, diolah

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa disparitas pencapaian pembangunan antardaerah di Indonesia relatif masih tinggi, terutama antara wilayah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden RI dalam nawa cita yang salah satunya adalah *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*

Di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berada pada peringkat ke-28 dari total 35 Kabupaten/Kota dengan nilai 68,99 atau termasuk ke dalam kategori IPM Sedang. Nilai ini masih sedikit di bawah IPM Jawa Tengah tahun 2019 yang mencapai 71,73 dan termasuk kategori IPM Tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga masih memerlukan banyak pembenahan di semua dimensi baik kesehatan, pengetahuan, maupun standar hidup layak agar nilai IPM Kabupaten Purbalingga bisa semakin baik di tahun yang akan datang.

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.27 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Semarang	80,23	81,19	82,01	82,72	83,19
2	Kota Salatiga	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12
3	Kota Surakarta	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
4	Kota Magelang	76,39	77,16	77,84	78,31	78,80

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Kab. Sukoharjo	74,53	75,06	75,56	76,07	76,84
6	Kab. Karanganyar	74,26	74,90	75,22	75,54	75,89
7	Kab. Klaten	73,81	73,97	74,25	74,79	75,29
8	Kab. Kudus	72,72	72,94	73,84	74,58	74,94
9	Kota Tegal	72,96	73,55	73,95	74,44	74,93
10	Kota Pekalongan	72,69	73,32	73,77	74,24	74,77
11	Kab. Semarang	71,89	72,40	73,20	73,61	74,14
12	Kab. Boyolali	71,74	72,18	72,64	73,22	73,80
13	Kab. Sragen	71,10	71,43	72,40	72,96	73,43
14	Kab. Purworejo	70,37	70,66	71,31	71,87	72,50
15	Kab. Kendal	69,57	70,11	70,62	71,28	71,97
16	Kab. Banyumas	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96
17	Kab. Jepara	70,02	70,25	70,79	71,38	71,88
18	Kab. Demak	69,75	70,10	70,41	71,26	71,87
19	Kab. Pati	68,51	69,03	70,12	70,71	71,35
20	Kab. Rembang	68,18	68,60	68,95	69,46	70,15
21	Kab. Cilacap	67,77	68,60	68,90	69,56	69,98
22	Kab. Wonogiri	67,76	68,23	68,66	69,37	69,98
23	Kab. Magelang	67,13	67,85	68,39	69,11	69,87
24	Kab. Grobogan	68,05	68,52	68,87	69,32	69,86
25	Kab. Pekalongan	67,40	67,71	68,40	68,97	69,71
26	Kab. Kebumen	66,87	67,41	68,29	68,80	69,60
27	Kab. Temanggung	67,07	67,60	68,34	68,83	69,56
28	**Kab. Purbalingga**	**67,03**	**67,48**	**67,72**	**68,41**	**68,99**
29	Kab. Blora	66,22	66,61	67,52	67,95	68,65
30	Kab. Batang	65,46	66,38	67,35	67,86	68,42
31	Kab. Wonosobo	65,70	66,19	66,89	67,81	68,27
32	Kab. Tegal	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
33	Kab. Banjarnegara	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34
34	Kab. Pemalang	63,70	64,17	65,04	65,67	66,32
35	Kab. Brebes	63,18	63,98	64,86	65,68	66,12
	Jawa Tengah	**69,49**	**69,98**	**70,52**	**71,12**	**71,73**

Sumber: BPS, diolah

Meskipun nilai IPM Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori sedang, akan tetapi setiap tahunnya nilai IPM Kabupaten Purbalingga secara konsisten terus mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten se-eks karesidenan Banyumas, nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berada pada posisi 3 di bawah Banyumas dan Cilacap serta masih sedikit di atas Banjarnegara sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci, dilihat dari perhitungan terhadap empat komponen pembentuk IPM yang sangat mendasar, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Secara umum, seluruh komponen pembentuk IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Kenaikan yang cukup besar terjadi

pada komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang naik 0,14 poin dibandingkan tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.28 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2019

Komponen IPM	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,98	73,02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,95	11,98
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,00	7,14
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000 Rupiah)	9.786	10.131

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga 2020

g. Tingkat Kemiskinan

Sampai hari ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Hampir tidak ada negara yang bebas 100 persen dari kemiskinan meskipun negara tersebut berstatus sebagai negara industri yang maju dan modern sekalipun. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga di negara manapun, penyelesaian masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dan prioritas pembangunan.

Cina sekalipun, yang saat ini menjadi negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua dunia di bawah Amerika Serikat, pernah menjadi negara dengan tingkat kelaparan dan kemiskinan yang tinggi di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, Di tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Cina mencapai 17,20 persen atau kurang lebih 230 juta jiwa, namun di tahun 2019, jumlah penduduk miskin Cina hanya sebanyak 0,60 persen atau sekitar 8 juta jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Cina
Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Kemiskinan	
		Persen	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	1.337.825.000	17,20	230.105.900
2011	1.334.130.000	12,70	169.434.510
2012	1.353.821.000	10,20	138.089.742
2013	1.360.720.000	8,50	115.661.200
2014	1.367.820.000	7,20	98.483.040
2015	1.374.620.000	5,70	78.353.340
2016	1.382.710.000	4,50	62.221.950
2017	1.390.080.000	3,10	43.092.480
2018	1.395.380.000	1,70	23.721.460
2019	1.400.050.000	0,60	8.400.300

Sumber: Bank Dunia, diolah

Oleh karena itulah pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan kemiskinan, apalagi salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah selalu menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan di setiap era pemerintahan yang dituangkan melalui pengalokasian anggaran belanja yang besar dalam rangka memerangi kemiskinan. Apalagi di tahun 2020 ini ketika kondisi perekonomian sedang terpuruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan meskipun tingkat penurunannya tidak sebesar yang terjadi di Cina. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 28,01 juta atau 13,33 persen dari total penduduk, menurun menjadi 26,42 juta jiwa di tahun 2020 atau 9,78 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.30 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (juta)	persen
(1)	(2)	(3)
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78

Sumber: BPS, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020

Dari total 34 Provinsi di Indonesia, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 26,64 persen atau 911.370 jiwa, sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia adalah Bali sebesar

3,78 persen atau 165.190 jiwa. Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke-13 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.980.900 jiwa atau 11,41 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Per Maret 2020

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000)	persen
Papua	911,37	26,64
Papua Barat	208,58	21,37
Nusa Tenggara Timur	1.153,76	20,90
Maluku	318,18	17,44
Gorontalo	185,02	15,22
Bengkulu	302,58	15,03
Aceh	814,91	14,99
Nusa Tenggara Barat	713,89	13,97
Sulawesi Tengah	398,73	12,92
Sumatera Selatan	1.081,58	12,66
Lampung	1.049,32	12,34
Yogyakarta	475,72	12,28
Jawa Tengah	**3.980,90**	**11,41**
Jawa Timur	4.419,10	11,09
Sulawesi Tenggara	301,82	11,00
Sulawesi Barat	152,02	10,87
Sumatera Utara	1.283,29	8,75
Sulawesi Selatan	776,83	8,72
Jawa Barat	3.920,23	7,88
Sulawesi Utara	192,37	7,62
Jambi	277,80	7,58
Kalimantan Utara	366,77	7,17
Riau	483,39	6,82
Kalimantan Timur	51,79	6,80
Maluku Utara	86,37	6,78
Sumatera Barat	344,23	6,28
Kalimantan Selatan	230,26	6,10
Kepulauan Riau	131,97	5,92
Banten	775,99	5,92
Kalimantan Barat	132,94	4,82
Bangka Belitung	68,39	4,53
DKI Jakarta	480,86	4,53
Kalimantan Tengah	187,87	4,38
Bali	165,19	3,78
INDONESIA	**26.424,02**	**9,78**

Sumber: BPS, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk miskin per Maret 2020 sebanyak 211.090 jiwa atau 17,59 persen sedangkan terendah ada di Kota Semarang sebanyak 79.580 jiwa atau 4,34

persen. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebanyak 149.480 jiwa atau 15,90 persen dari total penduduk. Dengan jumlah penduduk miskin tersebut, Purbalingga merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-5 di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.32 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Per Maret 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Kebumen	211,09	17,59	380.557
Kabupaten Wonosobo	137,64	17,36	362.683
Kabupaten Brebes	308,78	17,03	431.897
Kabupaten Pemalang	209,03	16,02	389.209
Kabupaten Purbalingga	**149,48**	**15,90**	**375.199**
Kabupaten Banjarnegara	144,95	15,64	318.334
Kabupaten Rembang	100,08	15,60	403.932
Kabupaten Sragen	119,38	13,38	348.890
Kabupaten Banyumas	225,84	13,26	406.250
Kabupaten Klaten	151,83	12,89	419.510
Kabupaten Demak	146,87	12,54	432.533
Kabupaten Grobogan	172,26	12,46	395.001
Kabupaten Blora	103,73	11,96	353.259
Kabupaten Purworejo	84,79	11,78	364.289
Kabupaten Cilacap	198,60	11,46	351.735
Kabupaten Magelang	146,34	11,27	342.430
Kabupaten Wonogiri	104,37	10,86	341.643
Kabupaten Karanganyar	91,72	10,28	385.563
Kabupaten Pekalongan	91,86	10,19	403.662
Kabupaten Boyolali	100,59	10,18	347.520
Kabupaten Pati	127,37	10,08	445.913
Kabupaten Kendal	97,49	9,99	396.691
Kabupaten Temanggung	77,33	9,96	323.705
Kabupaten Batang	70,57	9,13	309.202
Kota Surakarta	47,03	9,03	487.445
Kabupaten Tegal	117,50	8,14	390.520
Kota Tegal	19,55	7,80	502.031
Kabupaten Sukoharjo	68,89	7,68	393.776
Kota Magelang	9,27	7,58	522.099
Kabupaten Semarang	79,88	7,51	404.455
Kabupaten Kudus	64,24	7,31	429.666
Kota Pekalongan	22,16	7,17	460.789
Kabupaten Jepara	91,14	7,17	407.056
Kota Salatiga	9,69	4,94	454.154
Kota Semarang	79,58	4,34	522.691
JAWA TENGAH	**3.981**	**11,41**	**395.407**

Sumber: BPS, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020

Dengan mewabahnya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan sampai saat ini belum berakhir, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di setiap negara termasuk Indonesia.

Bank Dunia dalam keterangannya memperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin akan bertambah antara 88 juta-115 juta di tahun 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan tersebut merupakan kondisi yang pertama kali terjadi selama lebih dari 20 tahun. Jumlah tersebut berpotensi akan terus meningkat di tahun 2021 menjadi kurang lebih sebanyak 150 juta orang tergantung pada seberapa parah tingkat kontraksi yang menimpa perekonomian dunia [5].

Demikian juga dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 9.000 jiwa dari semula berjumlah 140.070 jiwa di tahun 2019 menjadi 149.480 jiwa di tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.33 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	313.343	324.735	355.702	375.199
Penduduk Miskin (persen)	18,80	15,62	15,03	15,90
Penduduk Miskin (000)	171,88	144,16	140,07	149,48
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,79	2,79	2,24	2,32
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,68	0,74	0,47	0,44

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan kebijakan yang tepat.

a. Kondisi dan Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 diarahkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta penyesuaian dengan potensi pendapatan asli daerah akibat adanya pandemi Covid-19. Pendapatan Tahun 2020 masih

[5] Bank Dunia. *PRESS RELEASE NO: 2021/024/DEC-GPV*

didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dan juga bagi hasil pajak dari provinsi. Meskipun demikian pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari PAD melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

2) Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 Kabupaten Purbalingga menghadapi permasalahan utama di bidang Pendapatan Daerah antara lain :

a. Menurunnya aktifitas ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap potensi PAD;
b. Menurunnya alokasi pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Mengamankan target penerimaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat terpenuhi;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta;
d. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

b. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

1) Kondisi Umum Belanja Daerah

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah berpengaruh terhadap berbagai sektor sehingga sebagian belanja daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penanganan infrastruktur dialihkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan perkembangan wabah Covid-19 di Kabupaten Purbalingga maka alokasi anggaran yang semula direncanakan untuk penanganan Covid-19 sebagian digunakan kembali untuk penanganan sebagian kegiatan infrastruktur yang mengalami penundaan serta mencukupi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, dengan tetap menyediakan dana cadangan yang cukup untuk penanganan Covid-19 hingga akhir tahun anggaran.

2) Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 antara lain :

a. Kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang cukup tinggi;
b. Adanya kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang membutuhkan dana pendampingan dari APBD;

c. Turunnya petunjuk teknis kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi tidak tepat waktu.

3) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 tetap diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut, prioritas belanja daerah Tahun 2020 tetap didasarkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, diarahkan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Belanja Daerah APBD Tahun 2020 diarahkan pada :

a. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti :
   i. Belanja gaji dan tunjangan PNS khususnya adanya pemenuhan iuran asuransi kesehatan;
   ii. Langganan listrik, telepon, air, internet;
   iii. Belanja operasional dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemsyarakatan;
   iv. Kegiatan yang bersumber dana dari pendapatan *earmarked*;
b. Kegiatan dalam rangka penanganan bencana;
c. Kegiatan prioritas dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat yang tidak dapat ditunda.

c. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

1) Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 pada sisi penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu. Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri atas penyertaan modal/investasi. Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp61.405.000.000,00 setelah perubahan naik Rp68.588.761.000,- atau 111,70 persen sehingga menjadi Rp129.993.761.000,00. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA);
b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan tetap sebesar Rp.8.300.000.000,00.

2) Permasalahan Utama Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain adalah masih terbatasnya kemampuan keuangan untuk menambah penyertaan modal pada perusahaan daerah.

3) Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan diarahkan untuk pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan hasil yang sangat baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 103,35 persen dan realisasi belanja dan transfer daerah mencapai 94,22 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.34 Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2020

Uraian	2020			2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	1.889.271.367.000,00	1.952.575.564.054,00	103,35	2.076.658.064.142,00
Belanja	1.613.481.567.000,00	1.500.363.223.732,00	92,99	1.701.313.169.024,00
Transfer	397.483.561.000,00	394.456.655.648,00	99,24	361.414.681.400,00
Surplus/(Defisit)	**(121.693.761.000,00)**	**57.755.684.674,00**	**(47,46)**	**13.930.213.718,00**
Penerimaan Pembiayaan	129.993.761.000,00	130.001.861.009,00	100,01	125.149.497.291,00
Pengeluaran Pembiayaan	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	100,00	9.086.000.000,00
Pembiayaan (netto)	121.693.761.000,00	121.701.861.009,00	100,01	116.063.497.291,00
SILPA	**-**	**179.457.545.683,00**	**-**	**129.993.711.009,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

a. Realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.952.575.564.054,00 atau mencapai 103,35 persen dari target.
b. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp1.500.363.223.732,00 atau mencapai 92,99 persen dari rencana.
c. Realisasi transfer tahun 2020 sebesar Rp394.456.655.648,00 atau mencapai 99,24 persen dari rencana.
d. Dari realisasi pendapatan, belanja dan transfer tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp57.755.684.674,00.
e. Pembiayaan netto sebesar Rp121.701.861.009,00 atau 100,01 persen dari anggaran.

Dengan adanya surplus sebesar Rp57.755.684.674,00 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp121.701.861.009,00, maka dihasilkan angka Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp179.457.545.683,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp124.082.500.088,00 atau turun 5,98 persen sedangkan realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp167.907.971.044,00 atau turun 8,14 persen dari realisasi tahun 2019.

Penurunan target dan realisasi pendapatan dalam APBD Perubahan TA-2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana Pemerintah Daerah melakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat sehingg kegiatan ekonomi pun berkurang sangat drastis

sebagaimaana dijelaskan dalam BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Dengan adanya pandemi Covid-19, target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dengan realokasi dan *refocusing* anggaran yang mencapai Rp84.848.191.000,00, Pemerintah harus menerapkan skala prioritas terhadap kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2020, terutama terhadap kegiatan yang secara langsung mendukung upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 baik di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Meskipun kondisi perekonomian dan APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami tekanan yang cukup berat, akan tetapi secara umum realisasi kinerja APBD Kabupaten Purbalingga cukup baik meskipun sepanjang tahun 2020 harus melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 kali. Pergeseran ini dilakukan diantaranya untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.952.749.301.274,00 (103,36 persen), realisasi Belanja sebesar Rp1.500.418.873.732,00 (92,99 persen), dan realisasi Transfer sebesar Rp394.456.655.648,00 (99,24 persen). Realisasi belanja yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2020 antara lain Belanja Hibah dari semula hanya Rp26.241.821.443,00 di tahun 2019 menjadi Rp78.810.376.629,00 atau melonjak hingga 300 persen. Secara garis besar, realisasi kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun anggarna 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp1.952.749.301.274,00 atau mencapai 103,36 persen dari target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp1.889.271.367.000,00 sehingga terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp63.477.934.274,00. Kelompok Pendapatan Daerah yang mengalami pelampauan target adalah Pendapatan BLUD pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah terutama yang berasal dari klaim tindakan penanganan pasien COVID-19.

Pelampauan terbesar berturut-turut terdapat di RSUD Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp63.351.405.492,00 atau mengalami pelampauan 126,70% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan RSUD Panti Nugroho yang mengalamai pelampauan sebesar Rp14.683.328.019,00 atau mengalami pelampauan 83,76% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2020.

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	256.466.315.000,00	313.618.688.781,00	305.996.806.188,00
Pendapatan Transfer	1.532.610.752.000,00	1.539.129.862.493,00	1.674.265.467.954,00
Lain-lain PD yang Sah	100.194.300.000,00	100.000.750.000,00	96.395.840.000,00
Jumlah	**1.889.271.367.000,00**	**1.952.749.301.274,00**	**2.076.658.114.142,00**

Lebih jauh, jika melihat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020, dapat dilihat bahwa secara umum *trend* realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 yang memang sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Gambar 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp313.618.688.781,00 mengalami kenaikan 2,49 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp305.996.806.188,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan 3,74 persen dari semula Rp96.395.840.000,00 di tahun 2019 menjadi Rp100.000.750.000,00 di tahun 2020. Hanya realisasi Pendapatan Transfer yang mengalami penurunan yaitu sebesar 8,07 persen dari semula Rp1.674.265.467.954,00 di tahun 2019 menjadi Rp1.539.129.862.493,00 di tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Tahun 2016 - 2020

Dari komposisi Pendapatan Daerah di atas, terlihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal yang ditunjukkan dari relatif rendahnya Rasio Tinggat Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 20,38 persen yang diperoleh dari perhitungan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa referensi, Rasio KKD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Meskipun kemampuan keuangan Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori rendah sekali, namun rasio KKD mengalami peningkatan dari semula 18,28 persen di tahun 2019 menjadi 20,37 persen di tahun 2020. Demikian juga dilihat dari perkembangan rasio KKD tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang semakin baik, meskipun progress peningkatannya relatif sedikit namun secara umum terus menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Gambar 3.4 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2020

Rasio KKD yang semakin membaik dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator bahwa upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang positif dan berada pada jalur yang tepat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu terus mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mewujudkan cita-cita desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Realisasi Belanja-LRA

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.894.875.529.380,00 atau mencapai 94,23 persen dari pagu anggaran dalam APBD-P tahun 2020. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran relatif cukup baik karena berada di atas 90 persen dan secara capaian juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 meskipun jika dilihat dari sisi nilai realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai realisasi belanja tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2020

Uraian	2020				2019	2020 : 2019	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Persentase Capaian	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belanja Operasi	1.442.856.472.000,00	1.360.171.409.712,00	(82.685.062.288,00)	94,27	1.438.969.577.302,00	(78.853.817.590,00)	(5,48)
Belanja Modal	157.973.737.000,00	130.334.116.841,00	(27.639.620.159,00)	82,50	262.136.781.292,00	(131.802.664.451,00)	(50,28)
Belanja Tak Terduga	12.651.358.000,00	9.913.347.179,00	(2.738.010.821,00)	78,36	206.810.430,00	9.706.536.749,00	4.693,45
Transfer	397.483.561.000,00	394.456.655.648,00	(3.026.905.352,00)	99,24	361.414.681.400,00	33.041.974.248,00	9,14
Jumlah	**2.010.965.128.000,00**	**1.894.819.879.380,00**	**(116.145.248.620,00)**	**94,22**	**2.062.727.850.424,00**	**(167.907.971.044,00)**	(8,14)

Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total belanja dan transfer dengan rasio mencapai 71,78 persen. Dalam rentang periode 5 (lima) tahun ke belakang atau periode tahun 2016 hingga tahun 2020, proporsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Transfer menunjukkan kecenderungan yang terus meningka.

Di sisi lain, proporsi Belanja Modal justru menujukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahun dengan penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 yang mencapai Rp131.802.664.451,00 atau turun 50,28% dari realisasi tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 3.6 Perkembangan Proporsi Kelompok Belanja terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020

Proporsi belanja modal yang semakin menurun tersebut tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena belanja modal menjadi salah satu indikator sampai sejauh mana APBD bisa memenuhi sala satu fungsi yaitu fungsi alokasi yaitu APBD harus mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Pada prosesnya, fungsi

alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektivitas, dan efisiensi perekonomian, terutama melalui belanja modal yang dilaksanakan.

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ke depan, alokasi belanja modal perlu terus ditingkatkan.

Jika dilihat perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan *trend* yang cukup baik terlihat dari persentase realisasi Belanja Daerah yang terus meningkat dari semula sebesar 86,86 persen di tahun 2016 menjadi 93,23 persen di tahun 2019 atau secara agregat mengalami peningkatan sebesar 6,36 persen sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.3 di atas.

Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2016 - 2020

1) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 menurut fungsi Pemerintahan dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi yang terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial

Realisasi belanja menurut fungsi tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2020

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Kontribusi (Persen)
		Nilai	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan Umum	714.116.256.000,00	693.453.126.645,00	97,11	36,60
Ketertiban dan Keamanan	14.215.811.000,00	13.606.408.297,00	95,71	0,72
Ekonomi	102.259.256.000,00	91.650.984.366,00	89,63	4,84
Lingkungan Hidup	22.282.846.000,00	18.395.150.099,00	82,55	0,97
Perumahan dan Fasilitas Umum	92.438.296.000,00	76.581.971.117,00	82,85	4,04
Kesehatan	356.957.440.000,00	348.652.518.093,00	97,67	18,40
Pariwisata dan Budaya	5.039.248.000,00	4.522.524.662,00	89,75	0,24
Pendidikan	688.017.098.000,00	632.888.859.367,00	91,99	33,40
Perlindungan Sosial	15.638.877.000,00	15.068.336.734,00	96,35	0,80
Jumlah	**2.010.965.128.000,00**	**1.894.819.879.380,00**	**94,22**	**100,00**

Tahun ini, untuk pertama kalinya realisasi belanja fungsi pelayanan umum menjadi yang terbesar yaitu Rp693.453.126.645,00 atau 36,60 persen dari total Belanja Daerah tahun 2020. Belanja fungsi Pendidikan berada di posisi kedua dengan realiasi sebesar Rp632.888.859.367,00 atau 33,40 persen. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada fungsi Pariwisata dan Budaya yang hanya berkontribusi sebesar 0,24 persen.

Peningkatan proporsi belanja fungsi Pelayanan Umum dari semula Rp659.027.899.411,00 di tahun 2019 menjadi Rp693.453.126.645,00 di tahun 2020 terjadi karena adanya realisasi belanja hibah yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga dengan total sebesar Rp41.138.496.000,00.

Secara lengkap, komposisi realisasi Belanja Daerah tahun 2020 berdasarkan fungsi dapat disajikan sebagaimana grafik di bawah.

Gambar 3.9 Grafik Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Tahun 2020

Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2016-2020, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan di tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi kemudian menurun di tahun 2019. Berbeda lagi dengan belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang *trend*-nya terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari taun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Fungsi	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Umum	461.668.772.535,00	556.841.739.160,00	600.509.908.466,00	659.027.899.511,00	693.453.126.645,00
Ketertiban dan Keamanan	12.340.886.279,00	13.279.182.178,00	18.620.433.234,00	17.416.479.440,00	13.606.408.297,00
Ekonomi	129.552.252.560,00	122.735.111.962,00	96.178.339.731,00	105.810.311.540,00	91.650.984.366,00
Lingkungan Hidup	10.186.912.235,00	16.570.383.626,00	29.446.813.141,00	29.065.402.916,00	18.395.150.099,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	231.699.748.267,00	292.248.800.970,00	187.051.080.403,00	159.516.263.708,00	76.581.971.117,00
Kesehatan	304.091.429.000,00	296.302.234.972,00	323.957.378.201,00	356.525.560.488,00	348.652.518.093,00
Pariwisata dan Budaya	10.816.055.650,00	7.478.356.568,00	12.848.893.247,00	12.721.278.132,00	4.522.524.662,00
Pendidikan	635.052.014.640,00	680.366.143.818,00	639.891.032.847,00	705.675.301.084,00	632.888.859.367,00
Perlindungan Sosial	17.754.066.302,00	27.944.058.155,00	16.404.553.280,00	16.969.353.605,00	15.068.336.734,00
Jumlah	**1.813.162.137.468,00**	**2.013.766.011.409,00**	**1.924.908.432.550,00**	**2.062.727.850.424,00**	**1.894.819.879.380,00**

2) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sosial.

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi urusan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Belanja Urusan Pilihan meliputi urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi urusan Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2020 sebesar Rp1.067.648.313.673,00 atau 93,08 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.146.963.483.000,00.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2020 sebesar Rp93.411.788.080,00 atau 92,14 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp101.380.542.000,00.

Realisasi Belanja Urusan Pilihan Tahun 2020 sebesar Rp61.808.159.636,00 atau 87,42 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp70.704.470.000,00.

Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp671.951.617.991,00 atau 97,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalan APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp691.916.633.000,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2020

Uraian	2020				2019	2020 : 2019	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Persentase Capaian	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.146.963.483.000,00	1.067.648.313.673,00	(79.315.169.327,00)	93,08	1.224.115.246.480,00	(156.466.932.807,00)	(12,78)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	101.380.542.000,00	93.411.788.080,00	(7.968.753.920,00)	92,14	134.750.465.861,00	(41.338.677.781,00)	(30,68)
Urusan Pilihan	70.704.470.000,00	61.808.159.636,00	(8.896.310.364,00)	87,42	66.977.885.369,00	(5.169.725.733,00)	(7,72)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	691.916.633.000,00	671.951.617.991,00	(19.965.015.009,00)	97,11	636.884.252.714,00	35.067.365.277,00	5,51
Jumlah	**2.010.965.128.000,00**	**1.894.819.879.380,00**	**(116.145.248.620,00)**	**94,22**	**2.062.727.850.424,00**	**(167.907.971.044,00)**	**(8,14)**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja semua urusan pemerintah daerah mengalami penurunan di tahun 2020, kecuali realisasi belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang justru mengalami peningkatan sebesar Rp35.067.365.277,00 atau naik 5,51 persen dari semula Rp636.884.252.714,00 di tahun 2019 menjadi Rp671.951.617.991,00 di tahun 2020.

Dilihat dari komposisinya, realisasi belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja daerah Kabupaten Purbaligga tahun 2020 yaitu sebesar 56,35 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 3.12 Komposisi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Tahun 2020

Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2016-2020, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja Urusan Pilihan di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi kemudian meningkat di tahun 2019 dan menurun kembali di tahun 2020. Hanya Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang *trend*-nya terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.13 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2020

Urusan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.292.003.507.098,00	1.165.738.629.709,00	1.224.115.246.480,00	1.067.648.313.673,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	125.344.610.065,00	125.498.736.470,00	134.750.465.861,00	93.411.788.080,00
Urusan Pilihan	58.981.298.412,00	51.569.227.175,00	66.977.885.369,00	61.808.159.636,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	537.436.595.834,00	582.101.839.196,00	636.884.252.714,00	671.951.617.991,00
Jumlah	**2.013.766.011.409,00**	**1.924.908.432.550,00**	**2.062.727.850.424,00**	**1.894.819.879.380,00**

3) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/ kegiatan (misalnya belanja honorarium,

belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2020 mencapai Rp1.216.904.850.846,00 atau 95,68 persen dari APBD-P TA-2020 sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp677.915.028.534,00 atau 91,72 persen dari APBD-P TA-2020. Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2020 berkontribusi sebesar 64,22 persen dari total Belanja Daerah sedangkan Belanja Langsung berkontribusi sebesar 35,78 persen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Tahun 2020

Uraian	2020				2019	2020 : 2019	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Persentase Capaian	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belanja Tidak Langsung	1.271.877.873.000,00	1.216.904.850.846,00	(54.973.022.154,00)	95,68	1.181.395.992.816,00	35.508.858.030,00	3,01
Belanja Langsung	739.087.255.000,00	677.915.028.534,00	(61.172.226.466,00)	91,72	881.331.857.608,00	(203.416.829.074,00)	(23,08)
Jumlah	**2.010.965.128.000,00**	**1.894.819.879.380,00**	**(116.145.248.620,00)**	**94,22**	**2.062.727.850.424,00**	**(167.907.971.044,00)**	(8,14)

Jika dilihat perkembangan realiasi belanja tidak langsung tahun 2017-2020, nilainya cenderung terus mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2019 yang mencapai Rp54.681.895.133,00 atau naik 4,85 persen dari realiasi tahun 2018.

Sedangkan realisasi Belanja Langsung secara umum cukup dinamis, di tahun 2017 dan 2019 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah. Khusus untuk penurunan Belanja Langsung di tahun 2020, hal ini terjadi karena kondisi APBD yang difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sehingga dilakukan banyak realokasi dan refocusing belanja.

Gambar 3.15 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Tahun 2016-2020

c. Realisasi Belanja Khusus dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya melakukan 2 (dua) kebijakan terkait dengan aspek pendanaan dan pembiayaan kegiatan, yaitu:

1) Mengalokasikan anggaran belanja langsung penanganan Covid-19 untuk:
   - Penanganan dampak kesehatan;
   - Penanganan dampak ekonomi; dan
   - Jaring pengaman sosial
2) Mengalokasikan anggaran belanja tak terduga untuk penanganan Covid-19

Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan atas beberapa kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa regulasi yang diterbitkan, antara lain:

1) Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2) PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
3) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
4) SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah

Kebijakan tersebut dijabarkan melalui APBD Perubahan maupun pergeseran APBD yang selama tahun 2020 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Dari 7 (tujuh) kali pergeseran APBD yang dilakukan di tahun 2020, 3 (tiga) diantaranya merupakan pergeseran APBD yang dilakukan dalam rangka mengakomodasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Total anggaran yang dialokasikan dalam rangka penanganan dan penganggulangan dampak Covid-19 mengalami perubahan seiring dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan APBD Perubahan TA-2020, total alokasi anggaran penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp49.190.504.296,00 yang terdiri dari (i) alokasi anggaran untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp20.466.388.296,00, (ii) penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.148.815.000,00 dan (iii) jaring pengaman sosial sebesar Rp25.575.301.000,00. Total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp49.190.504.296,00 termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp12.102.102.000,00.

Secara rinci, perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap I

   Pada tahap pertama, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pemanfaatan SILPA tahun anggaran 2019 dalam rangka mendukung kegiatan penanganan dampak covid-19 yang difokuskan pada penanganan dampak kesehatan. Pendanaan tahap I ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.

   Total anggaran yang dialokasikan pada tahap I adalah sebesar Rp3.898.551.000,00

2. Tahap II

   Pada pendanaan tahap II, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan refocusing pertama dengan diterbitkannya Perbup Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.

   Refocusing tahap pertama dilakukan untuk memperoleh pendanaan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS yang dicukupi dengan melakukan efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas.

   Total anggaran yang dialokasikan sampai dengan refocusing tahap pertama adalah sebesar Rp34.799.939.390,00 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp23.421.329.390,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp778.000.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp10.600.610.000,00

3. Tahap III

   Pada pendanaan tahap III, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan refocusing kedua dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.

   Refocusing tahap kedua ini dilakukan untuk memperoleh pendanaan kegiatan penanganan dampak Covid-19 pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan JPS dengan melakukan efisiensi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

   Total anggaran yang dialokasikan sampai dengan refocusing tahap kedua ini adalah adalah sebesar Rp77.351.656.000,00 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp45.486.782.000,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.763.500.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp28.101.374.000,00.

4. Tahap IV

   Pada pendanaan tahap IV, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020.

Pada Perubahan APBD TA-2020, dilakukan penyesuaian besaran anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan realisasi belanja yang sudah dikeluarkan dan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun.

Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sampai dengan Perubahan APBD TA-2020 adalah sebesar Rp49.190.504.296 yang terdiri dari pendanaan untuk penanganan dampak kesehatan sebesar Rp20.466.388.296,00, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.148.815.000,00, dan jaring pengaman sosial sebesar Rp25.575.301.000,00.

Sehingga secara keseluruhan, rekapitulasi perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 pada APBD Kabupaten Purbalingga TA-2020 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.16 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

Tahap	Penanganan Kesehatan	Penanganan Dampak Ekonomi	Jaring Pengaman Sosial	Total	Keterangan
Tahap I	3.898.551.000,00	-	-	3.898.551.000,00	Pemanfaatan SiLPA
Tahap II	23.421.329.390,00	778.000.000,00	10.600.610.000,00	34.799.939.390,00	Refocusing I
Tahap III	45.486.782.000,00	3.763.500.000,00	28.101.374.000,00	77.351.656.000,00	Refocusing II
Tahap IV	20.466.388.296,00	3.148.815.000,00	25.575.301.000,00	49.190.504.296,00	Perubahan APBD

Dari total anggaran penanganan Covid-19 tersebut, nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.475.768.328,00 atau mencapai 92,45 persen dari pagu anggaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Covid-19 Taun 2020

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Kesehatan	20.466.388.296,00	17.155.731.911,00	83,82%
Penanganan Dampak Ekonomi	3.148.815.000,00	3.143.814.568,00	99,84%
Jaring Pengaman Sosial	25.575.301.000,00	25.176.221.849,00	98,44%
Total	**49.190.504.296,00**	**45.475.768.328,00**	**92,45%**

Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp3.143.814.568,00 atau 99,84 persen dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gelar Produk UMKM (pembelian masker UMKM)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Dinkop UKM
Pengelolaan BLK (pembuatan APD dan masker)	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	Dinnaker
Subsidi Bunga UMKM	1.000.000.000,00	995.000.000,00	99,50	Bakeuda
Subsidi PDAM	1.383.815.000,00	1.383.814.568,00	100,00	Bakeuda
Jumlah	**3.148.815.000,00**	**3.143.814.568,00**	**99,84**	

Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Subsidi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Per Jenis Belanja Tahun 2020

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Barang dan Jasa	*765.000.000,00*
Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00
Belanja Bahan/ Material	726.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman	24.000.000,00
Belanja Subsidi	*2.378.814.568,00*
Belanja Subsidi	1.383.814.568,00
Belanja Subsidi Bunga	995.000.000,00
Jumlah	**3.143.814.568,00**

Sedangkan untuk realisasi belanja kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp25.176.221.849,00 atau 98,44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp25.575.301.000,00. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, DinsosdaldukKBP3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Akses Pangan Masyarakat (bantuan bahan pangan untuk warga terdampak	2.482.200.000,00	2.095.610.200,00	84,43	DKPP
Fasilitasi Lembaga Cadangan Pangan (pengadaan gabah untuk warga terdampak)	102.950.000,00	102.896.750,00	99,95	DKPP
Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok (bantuan bahan pangan untuk warga terdampak)	21.922.154.000,00	21.914.120.854,00	99,96	Dinperindag
Bantuan bahan pangan untuk warga terdampak (Belanja Tak terduga)	825.007.000,00	825.006.795,00	100,00	Dinperindag
Pengendalian Inflasi Daerah (pembelian bahan pangan untuk warga terdampak)	54.400.000,00	54.297.250,00	99,81	Bag. Perekonomian
Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (bahan pangan untuk warga terdampak)	93.750.000,00	89.450.000,00	95,41	DinsosdaldukKBP3A
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG) (Pengadaan bahan pangan untuk warga terdampak)	94.840.000,00	94.840.000,00	100,00	Dinpermasdes
Jumlah	**25.575.301.000,00**	**25.176.221.849,00**	**98,44**	

Realisasi belanja kegiatan jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tak Terduga sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.21 Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 per Rekening Belanja Tahun 2020

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Barang dan Jasa	*24.351.215.054,00*
Belanja Bahan Pakai Habis	5.748.000,00
Belanja Bahan/ Material	24.156.345.304,00
Belanja Jasa Kantor	9.710.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	44.967.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman	15.542.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	98.102.250,00
Belanja Tak Terduga	*825.006.795,00*
Belanja Tak Terduga	825.006.795,00
Jumlah	**25.176.221.849,00**

Untuk kegiatan di bidang kesehatan, realisasi belanja sebesar Rp17.155.731.911,00 atau 83,82 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp20.466.388.296,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi kegiatan pada beberapa SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19 Tahun 2020

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tak Terduga	11.277.095.205,00	8.726.287.654,00	77,38	Bakeuda
Penanganan Covid-19	1.439.616.000,00	1.340.771.337,00	93,13	Dinas Kesehatan
Pengamanan di Posko Perbatasan	550.452.000,00	529.482.840,00	96,19	Dinas Perhubungan
Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	100.000.000,00	97.416.000,00	97,42	Dinas Perhubungan
Perencanaan dan Pengaturan Lalu Lintas	168.000.000,00	161.250.000,00	95,98	Dinas Perhubungan
Posko Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten	292.040.000,00	273.100.250,00	93,51	BPBD
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik) (Penyediaan masker, hand sanitizer, disinfektan)	258.616.000,00	258.215.350,00	99,85	Dinpendukcapil
Gugus tugas tingkat kecamatan	875.752.000,00	863.990.900,00	98,66	Kecamatan
Gugus tugas tingkat kelurahan (posko gugus tugas kelurahan, pengadaan APD, penyediaan ruang karantina)	1.049.028.000,00	983.400.500,00	93,74	Kelurahan
Bantuan Operasional Kesehatan (penyediaan APD dan bahan pelayanan kesehatan, makanan tambahan, monitoring OPD & PDP, publikasi)	2.869.938.403,00	2.588.871.957,00	90,21	Puskesmas
Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu (penyediaan APD, bahan pelayanan kesehatan)	30.954.090,00	30.302.817,00	97,90	Puskesmas
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD (penyediaan APD dan bahan pelayanan kesehatan)	1.425.093.145,00	1.193.097.412,00	83,72	Puskesmas
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	129.803.453,00	109.544.894,00	84,39	Puskesmas
Total	**20.466.388.296,00**	**17.155.731.911,00**	**83,82**	

Realisasi belanja kegiatan bidang kesehatan tersebut di atas terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.23 Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19 per Rekening Belanja Tahun 2020

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Pegawai	*1.694.875.000,00*
Honorarium PNS	1.677.755.000,00
Honorarium Non PNS	17.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa	*6.403.860.202,00*
Belanja Bahan Pakai Habis	68.382.408,00
Belanja Bahan/Material	4.929.511.719,00
Belanja Jasa Kantor	181.396.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	41.867.500,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.560.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	599.320.300,00
Belanja Perjalanan Dinas	472.355.000,00
Belanja Pemeliharaan	50.966.475,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa	13.700.000,00
Belanja Modal	*330.709.055,00*
BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	72.587.054,00
BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	67.500.000,00
BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	68.525.001,00
BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium	17.631.000,00
BM Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.050.000,00
BM Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	97.416.000,00
Belanja Tak Terduga	*8.726.287.654,00*
Belanja Tak Terduga	8.726.287.654,00
Jumlah	**17.155.731.911,00**

Secara keseluruhan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 73 SKPD yang terlibat dalam kegiatan penanganan dampak pandemik Covid-19 di tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.24 Realisasi Belanja Penanggulangan Covid-19 per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
1	Dinas Kesehatan	5.135.731.046,00	4.972.503.872,00	96,82
2	RSUD Goetheng Taroenadibrata	2.935.721.000,00	2.930.443.089,00	99,82
3	RSUD Panti Nugroho	250.000.000,00	203.754.015,00	81,50
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	58.998.000,00	58.998.000,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	432.840.500,00	432.840.500,00	100,00
6	Pelaksana BPBD	1.871.674.350,00	1.688.074.765,00	90,19
7	Dinas Sosial, Pendendalian Penduduk dan KB, P3A	93.750.000,00	89.450.000,00	95,41
8	Dinas Tenaga Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.585.150.000,00	2.198.506.950,00	85,04
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.616.000,00	258.215.350,00	99,85
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94.840.000,00	94.840.000,00	100,00

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
12	Dinas Perhubungan	818.452.000,00	788.148.840,00	96,30
13	Dinas Koperasi dan UKM	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	10.740.000,00	10.740.000,00	100,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.747.160.795,00	22.739.127.649,00	99,96
16	Bagian Perekonomian	54.400.000,00	54.297.250,00	99,81
17	Bagian Humas dan Protokol	42.805.000,00	42.805.000,00	100,00
18	Badan Keuangan Daerah	4.654.056.514,00	2.378.814.568,00	51,11
19-41	Puskesmas (23)	4.455.789.091,00	3.921.817.080,00	88,02
42-59	Kecamatan (18)	875.752.000,00	863.990.900,00	98,66
60-73	Kelurahan (14)	1.049.028.000,00	983.400.500,00	93,74
	Jumlah	**49.190.504.296,00**	**45.475.768.328,00**	**92,45**

Rincian realisasi belanja penanganan Covid-19 per SKPD dan per rekening belanja sebagaimana disajikan pada Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Bencana kemanusiaan internasional berupa Pandemi Covid-19 telah menekan APBN dan juga APBD sangat dalam sehingga banyak kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak bisa direalisasikan. Jika dilihat dari postur APBD dan APBD-Perubahan, terdapat perubahan yang sangat signifikan baik dari sisi target pendapatan maupun rencana belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.24 Perbandingan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2020

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Selisih	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Pendapatan**	**2.042.708.319.000,00**	**1.889.271.367.000,00**	**(153.436.952.000,00)**	**(7,51)**
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	284.009.239.000,00	256.466.315.000,00	(27.542.924.000,00)	(9,70)
1 . 2	Dana Perimbangan	1.274.999.202.000,00	1.147.061.410.000,00	(127.937.792.000,00)	(10,03)
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	483.699.878.000,00	485.743.642.000,00	2.043.764.000,00	0,42
2	**Belanja**	**2.095.813.319.000,00**	**2.010.965.128.000,00**	**(84.848.191.000,00)**	**(4,05)**
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1.281.187.859.000,00	1.271.877.873.000,00	(9.309.986.000,00)	(0,73)
2 . 2	Belanja Langsung	814.625.460.000,00	739.087.255.000,00	(75.538.205.000,00)	(9,27)

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka target pendapatan pada APBBD Perubahan TA-2020 mengalami koreksi yang sangat besar yaitu Rp153.436.952.000,00 atau 7,51 persen sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi di tahun anggaran 2019 dimana target pendapatan dalam APBD Perubahan justru mengalami kenaikan sebesar Rp39.300.414.000,00 atau naik 1,91 persen.

Penurunan target pendapatan pada APBD Perubahan TA-2020 dilakukan karena adanya pemotongan dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 dan juga penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah akibat dampak pandemi Covid-19. Penurunan alokasi transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.25 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi Pada APBD dan APBD Perubahan TA-2020

Uraian	APBD	APBD Perubahan	Pemotongan	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.308.779.932.000,00**	**1.177.740.004.000,00**	**(131.039.928.000,00)**	**(10,03)**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.572.950.000,00	27.015.516.000,00	1.442.566.000,00	5,64
Dana Alokasi Umum	934.782.107.000,00	847.952.218.000,00	(86.829.889.000,00)	(9,29)
Dana Alokasi Khusus	314.644.145.000,00	272.093.676.000,00	(42.550.469.000,00)	(13,52)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.780.730.000,00	30.678.594.000,00	(3.102.136.000,00)	(9,18)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	**112.992.776.000,00**	**106.774.776.000,00**	**(6.218.000.000,00)**	**12,79**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.992.776.000,00	91.742.776.000,00	(21.250.000.000,00)	(18,81)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	15.032.000.000,00	15.032.000.000,00	0,00

Demikian juga dengan rencana belanja pada ABPD Perubahan tahun 2020 yang mengalami pemangkasan sebesar Rp84.848.191.000,00 atau 4,05 persen dari APBD awal. Kondisi ini juga berbeda jauh dengan kondisi pada tahun anggaran 2019 dimana pagu belanja APBD Perubahan TA-2019 justru meningkat signifikan yaitu sebesar Rp111.308.846.000,00 atau meningkat 5,30 persen.

Selain pemotongan transfer ke daerah dan pemotongan pagu belanja pada APBD Perubahan TA-2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melakukan realokasi / *refocusing* belanja dalam rangka dukungan pendanaan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, terutama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial.

Dengan adanya realokasi dan *refocusing* anggaran tersebut, pagu seluruh SKPD baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dilakukan penyesuaian. SKPD yang mengalami pengurangan anggaran terbesar dari sisi nilai adalah Dinas Pekerjaan Umum dengan pengurangan anggaran sebesar Rp58.921.641.000,00 atau 44,90 persen sedangkan jika dilihat dari sisi persentasenya, SKPD dengan pengurangan anggaran terbesar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan persentase pengurangan mencapai 67,99 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.26 Daftar SKPD dengan Nilai Pengurangan Anggaran Terbesar Pada APBD Perubahan TA-2020

No	SKPD	APBD	APBD-P	Penambahan/ (Pengurangan)	
				Nilai	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DPU PR	131.219.225.000,00	72.297.584.000,00	(58.921.641.000,00)	(44,90)
2	Dinporapar	22.264.002.000,00	7.126.406.000,00	(15.137.596.000,00)	(67,99)
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	567.164.917.000,00	556.203.136.000,00	(10.961.781.000,00)	(1,93)
4	Dinas Pertanian	31.033.184.000,00	21.893.256.000,00	(9.139.928.000,00)	(29,45)
5	BKPPD	12.738.188.000,00	6.354.186.000,00	(6.384.002.000,00)	(50,12)
6	RSUD Goeteng Taroenadibrata	132.699.203.000,00	128.271.022.000,00	(4.428.181.000,00)	(3,34)
7	Dinas Kesehatan	58.781.046.000,00	55.297.791.000,00	(3.483.255.000,00)	(5,93)
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12.886.643.000,00	10.332.725.000,00	(2.553.918.000,00)	(19,82)
9	DinsosdaldukKBP3A	17.569.473.000,00	15.203.522.000,00	2.365.951.000,00)	(13,47)
10	Bappelitbangda	8.215.846.000,00	6.423.290.000,00	(1.792.556.000,00)	(21,82)

Tabel 3.27 Daftar SKPD dengan Persentase Pengurangan Anggaran Terbesar Pada APBD Perubahan TA-2020

No	SKPD	APBD	APBD-P	Penambahan/ (Pengurangan)	
				Nilai	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinporapar	22.264.002.000,00	7.126.406.000,00	(15.137.596.000,00)	(67,99)
2	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	662.653.000,00	288.424.000,00	(374.229.000,00)	(56,47)
3	Bagian Perekonomian	1.263.018.000,00	606.412.000,00	(656.606.000,00)	(51,99)
4	BKPPD	12.738.188.000,00	6.354.186.000,00	(6.384.002.000,00)	(50,12)
5	Bagian Administrasi Pembangunan	783.608.000,00	403.402.000,00	(380.206.000,00)	(48,52)
6	DPU PR	131.219.225.000,00	72.297.584.000,00	(58.921.641.000,00)	(44,90)
7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.005.156.000,00	586.387.000,00	(418.769.000,00)	(41,66)
8	Bagian Hukum	1.662.000.000,00	1.020.275.000,00	(641.725.000,00)	(38,61)
9	TK Negeri Pembina Bukateja	121.000.000,00	79.433.000,00	(41.567.000,00)	(34,35)
10	Bagian Pemerintahan	1.386.274.000,00	935.698.000,00	(450.576.000,00)	(32,50)

Diantara kegiatan yang sangat terdampak dengan pemotongan anggaran tersebut antara lain:

a. Kegiatan Pembangunan Jembatan Wirasana - Kalikajar pada Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp11.642.471.000,00 dibatalkan.

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Lamuk - Bukateja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp10.232.608.000,00 dibatalkan.

c. Beberapa paket pekerjaan pemeliharaan jalan dengan total anggaran lebih dari Rp10.000.000.000,00 diantaranya Pemeliharaan Berkala Jalan Sangkanayu - Kutabawa, Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Kutabawa, dan Pemeliharaan Berkala Jalan Bobotsari - Karanganyar.

d. Pembangunan GOR Tertutup pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan nilai pagu anggaran belanja modal sebesar Rp10.450.000.000,00 dibatalkan.

Mengingat peran APBD yang sangat vital salah satunya adalah fungsi alokasi yaitu bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian, maka kondisi APBD TA-2020 yang tertekan secara otomatis berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga berbasis akrual ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pada tahun 2020, terdapat 151 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daearah Kabupaten Purbalingga.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Aset

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
b) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
c) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
   (1) Piutang Pajak Daerah

Tabel 4.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

(2) Piutang Retribusi Daerah

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3 Tahun	Macet	100%

(3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

Tabel 4.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Selain Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

e) Dalam hal:
(1) Piutang Pajak/Retribusi atas suatu obyek pajak/retribusi telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan;
(2) Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan.

Namun kemudian diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa obyek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan surat ketetapan

dari pejabat yang berwenang, maka terhadap Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa memperhatikan umur piutang.

f) Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

g) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
   (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
   (4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
   (5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang
   (1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
   (2) Penilaian Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode yaitu:
      (a) Metode Biaya
      Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
      Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
      (b) Metode Ekuitas
      Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
      Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.
      Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah

tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Investasi Jangka Panjang yang bersifat Nonpermanen diukur sebagai berikut:

(a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

(b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(e) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

(f) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

(g) Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Berdasarkan Daftar Umur Dana Bergulir

No.	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1.	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

b) Aset Tetap

(1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

(c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

(2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

(3) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(5) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(6) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

(7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(8) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan

(b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset:

i. Biaya persiapan tempat;
ii. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
iii. Biaya pemasangan (installation cost);
iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
v. Biaya konstruksi; dan
vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

(c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

(9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

(b) Pengeluaran yang dikaitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

(c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi

secara langsung terhadap aset induknya tanpa terlebih dahulu mengurangkan nilai aset yang diganti.

(d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
- bertambah masa manfaat, dan/atau
- bertambah kapasitas, dan/atau
- bertambah kualitas, dan/atau
- bertambah volume.

ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

(10) Penyajian Aset Tetap

(a) Aset tetap disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

(b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$Penyusutan\ Per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Keterangan:
Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

(c) Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester, yaitu aset tetap yang diperoleh pada selama periode semester yang berkenaan, disusutkan untuk periode 1 (satu) semester penuh, baik perolehan aset tetap dilakukan di awal, tengah, maupun akhir semester.

(d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(e) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

i. Tanah
ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan
iii. Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern
iv. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat
v. Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya karena:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

c) Dana Cadangan
   (1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
   (2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
   (3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
   (4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d) Aset Lainnya
   (1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
   (2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
      (a) Tagihan Penjualan Angsuran;
      (b) Tuntutan Ganti Rugi;
      (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
      (d) Aset Tidak Berwujud; dan
      Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan Tabel Masa Manfaat sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	*Software* Komputer	4
2	Lisensi	10
3	*Franchise*	5
5	Paten Biasa	20
6	Merek	8
7	*Detailed Engineering Design* (DED)	2

      (e) Aset Lain-lain.
      Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang

menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah".
3) Kewajiban terdiri dari:
   a) Kewajiban Jangka Pendek
   Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
   Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
   Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannyanakan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
   b) Kewajiban Jangka Panjang
   Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d. Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan - LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, Bendahara BOS yang akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat:
   a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
   b) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
   c) Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkan pengesahan Pendapatan dan Belanja oleh PPKD.
   d) Belanja BOS diakui pada saat diterbitkan pengesahan Belanja oleh PPKD.

f. Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
   a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
   b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
      (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
      (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
   c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

g. Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2) Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4) Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

h. Pendapatan - LO

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
4) Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat *official assessment* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas retribusi dan pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.

i. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3) Beban diakui sebelum pengeluaran kas:
   a) Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang /diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
   b) Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
   c) Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
4) Beban diakui pada saat pengeluaran kas
   a) Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
   b) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
   c) Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
5) Beban diakui setelah pengeluaran kas
   a) Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran

kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

b) Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp 1.952.749.301.274,00 atau mencapai 103,36 persen dari target sebesar Rp1.889.271.367.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp313.618.688.781,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.539.129.862.493,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp100.000.750.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.076.658.114.142,00, realisasi Pendapatan tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp123.908.812.868,00 atau turun 5,97 persen. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2016-2020 terlihat pada grafik di bawah.

Gambar 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Realisasi Belanja tahun 2020 sebesar Rp1.500.418.873.732,00 atau mencapai 92,99 persen dari anggaran sebesar Rp1.613.481.567.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.360.171.409.712,00, Belanja Modal sebesar Rp130.334.116.841,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.913.347.179,00. Realisasi Belanja tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp200.894.295.292,00 atau turun 11,81 persen dari realisasi tahun 2019.

Realisasi Transfer tahun 2020 sebesar Rp394.456.655.648,00 atau mencapai 99,24 persen dari anggaran sebesar Rp397.483.561.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp6.937.738.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp387.518.917.648,00. Dibandingkan realisasi Transfer tahun 2019, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp33.041.974.248,00 atau naik 9,14 persen.

Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2016-2020

Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada tahun 2020 terdapat Surplus Anggaran sebesar Rp57.873.771.987,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp130.001.861.009,00 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp8.300.000.000,00 sehingga Pembiayaan Netto tahun 2020 adalah sebesar Rp121.701.861.009,00.

Dengan adanya Surplus Anggaran sebesar Rp57.873.771.987,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp121.701.861.009,00, maka pada tahun 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp179.575.632.996,00 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2020

Uraian	2020		Persen	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	1.889.271.367.000,00	1.952.749.301.274,00	103,36	2.076.658.114.142,00
Belanja	1.613.481.567.000,00	1.500.418.873.732,00	92,99	1.701.313.169.024,00
Transfer	397.483.561.000,00	394.456.655.648,00	99,24	361.414.681.400,00
Surplus/(Defisit)	**(121.693.761.000,00)**	**57.873.771.894,00**	**(47,56)**	**13.930.263.718,00**
Penerimaan Pembiayaan	129.993.761.000,00	130.001.861.009,00	100,01	125.149.497.291,00
Pengeluaran Pembiayaan	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	100,00	9.086.000.000,00
Pembiayaan (netto)	**121.693.761.000,00**	**121.701.861.009,00**	**100,01**	**116.063.497.291,00**
SILPA	**-**	**179.575.632.903,00**	**-**	**129.993.761.009,00**

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

V.1.a. PENDAPATAN-LRA _____ Rp1.952.749.301.274,00

Realisasi Pendapatan-LRA tahun 2020 sebesar Rp1.952.749.301.274,00 atau mencapai 103,36 persen dari target dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.889.271.367.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp313.618.688.781,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.539.129.862.493,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp100.000.750.000,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Pendapatan-LRA tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp123.908.812.868,00 atau turun 5,97 persen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	256.466.315.000,00	313.618.688.781,00	305.996.806.188,00
Pendapatan Transfer	1.532.610.752.000,00	1.539.129.862.493,00	1.674.265.467.954,00
Lain-lain PD yang Sah	100.194.300.000,00	100.000.750.000,00	96.395.840.000,00
Jumlah	**1.889.271.367.000,00**	**1.952.749.301.274,00**	**2.076.658.114.142,00**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dan Lain-lain PD yang Sah masing-masing mengalami kenaikan dibanding tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp7.621.882.593,00 atau naik 2,49 persen, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp3.604.910.000,00 atau naik 3,74 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp135.135.605.461,00 atau turun 8,07 persen dari realisasi tahun 2019.

V.1.a.1). Pendapatan Asli Daerah _____Rp313.618.688.781,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp313.618.688.781,00 atau 122,28 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp256.466.315.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 16,06 persen dari total Pendapatan-LRA tahun 2020.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.621.882.593,00 atau naik 2,49 persen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah	49.745.000.000,00	58.829.669.048,00	62.233.743.866,00
Retribusi Daerah	10.041.770.000,00	11.072.934.345,00	14.721.765.857,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.681.443.000,00	21.682.472.386,00	20.642.144.098,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.998.102.000,00	222.033.613.002,00	208.399.152.367,00
Jumlah	**256.466.315.000,00**	**313.618.688.781,00**	**305.996.806.188,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan setelah pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan.

V.1.a.1).a). Pajak Daerah _____Rp58.829.669.048,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di Kabupaten

Purbalingga hanya dikelola oleh 1 (satu) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp58.829.669.048,00 atau 118,26 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp49.745.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Hotel	170.000.000,00	433.869.168,00	422.831.757,00
Pajak Restoran	3.000.000.000,00	4.646.266.278,00	5.391.772.457,00
Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.081.448.629,00	4.105.266.734,00
Pajak Reklame	500.000.000,00	716.728.899,00	922.968.876,00
Pajak Penerangan Jalan	19.000.000.000,00	20.724.090.463,00	22.721.003.244,00
Pajak Parkir	75.000.000,00	79.470.763,00	115.691.131,00
Pajak Air Tanah	500.000.000,00	598.602.660,00	569.254.200,00
Pajak MBL dan Batuan	500.000.000,00	561.639.555,00	1.278.419.930,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.500.000.000,00	20.353.125.817,00	19.641.820.930,00
BPHTB	4.500.000.000,00	8.634.426.816,00	7.064.714.607,00
Jumlah	**49.745.000.000,00**	**58.829.669.048,00**	**62.233.743.866,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.404.074.818,00 atau turun 5,47 persen dari penerimaan Pajak Daerah tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan lesunya perekonomian di seluruh sektor dan berdampak terhadap menurunnya penerimaan Pajak Daerah tahun 2020. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah yaitu 35,23 persen, sedangkan Pajak Parkir memberikan kontribusi terkecil terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 yang hanya sebesar 0,14 persen.

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pajak Hotel ini terdiri dari (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Motel, dan (iii) Pajak Losmen.

Realisasi Pajak Hotel tahun 2020 sebesar Rp433.869.168,00 atau 255,22 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.037.411,00 atau naik 2,61 persen dari realisasi tahun 2019.

Kenaikan ini ditopang dengan adanya obyek pajak hotel baru yaitu Braling Grand Hotel By Azayana yang beroperasi mulai tahun 2020. Secara umum terjadi penurunan penerimaan pajak hotel dari usaha perhotelan di Purbalingga sebagai akibat adanya pandemi *covid-19*. Pandemi ini berdampak sangat besar terhadap lesunya perekonomian di sektor pariwisata dan berpengaruh pada menurunnya tingkat okupansi perhotelan.

Di tahun 2020, setoran terbesar Pajak Hotel berasal dari Owabong Waterpark sebesar Rp182.588.759,00 atau 42,08 persen dari total pendapatan Pajak Hotel. Sedangkan setoran terkecil berasal dari Losmen Ayem sebesar Rp920.000,00 atau hanya 0,21 persen dari total pendapatan Pajak Hotel tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Tabel 5.5 Kontributor Pajak Hotel Tahun 2020

Nama Hotel	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Owabong Waterpark	182.588.759,00	227.546.534,00	(44.957.775,00)
Braling Grand Hotel By Azana	151.036.523,00	-	151.036.523,00
Hotel Kencana	17.058.773,00	21.101.000,00	(4.042.227,00)
Hotel Nusantara	14.138.213,00	61.805.428,00	(47.667.215,00)
Hotel Utama	13.639.000,00	31.417.000,00	(17.778.000,00)
Hotel Belik Kembar	13.637.500,00	24.281.500,00	(10.644.000,00)
Wisma Mulia	11.337.000,00	1.875.000,00	9.462.000,00
Hotel Bagoes	8.345.550,00	15.771.995,00	(7.426.445,00)
Wisma Griyaku	7.353.600,00	13.882.150,00	(6.528.550,00)
Hotel Sejahtera	3.680.000,00	14.810.750,00	(11.130.750,00)
Hotel Planjan	3.645.000,00	3.475.000,00	170.000,00
Losmen Cemara	2.573.000,00	730.000,00	1.843.000,00
Losmen Sami Asih	2.405.000,00	695.000,00	1.710.000,00
TWP Purbasari Pancuran Mas	1.511.250,00	4.350.400,00	(2.839.150,00)
Losmen Ayem	920.000,00	1.090.000,00	(170.000,00)
Jumlah	**433.869.168,00**	**422.831.757,00**	**11.037.411,00**

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Rumah Makan, (iii) Pajak Warung, dan (iv) Pajak Katering.

Realisasi Pajak Restoran tahun 2020 sebesar Rp4.646.266.278,00 atau 154,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp745.506.179,00 atau turun 13,83 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan tersebut didorong karena adanya pandemi *covid-19* sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan pemilik usaha restoran dan katering dan berdampak terhadap menurunnya pendapatan pajak restoran.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari (i) Pajak Tontonan Film, (ii) Pajak Pagelaran Musik/Kesenian, (iii) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, serta (iv) Pajak Pertandingan Olah Raga.

Realisasi Pajak Hiburan tahun 2020 sebesar Rp2.081.448.629,00 atau 104,07 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.023.818.105,00 atau turun 49,30 persen dari realisasi tahun 2020. Penurunan yang cukup signifikan ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi *covid-19* yang menyebabkan menurunnya penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Purbalingga dan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak hiburan.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, baik yang berupa (i) Reklame Papan/Billboard, (ii) Reklame Kain, maupun (iii) Selebaran.

Realisasi Pajak Reklame tahun 2020 sebesar Rp 716.728.899,00 atau 143,35 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp206.239.977,00 atau turun 22,35 persen dari pencapaian tahun 2019.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Realisasi PPJ tahun 2020 sebesar Rp20.724.090.463,00 atau 109,07 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dari pencapaian di tahun 2019, yaitu berkurang sebesar Rp1.996.912.781,00 atau turun 8,79 persen. Penurunan tersebut terjadi karena adanya program pemerintah berupa stimulus listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga subsidi di masa pandemi *covid-19*.

(6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Parkir di Kabupaten Purbalingga tidak terlampau besar karena relatif sedikitnya tempat-tempat publik yang telah menyediakan lahan parkir mandiri selain badan jalan.

Realisasi Pajak Parkir tahun 2020 sebesar Rp79.470.763,00 atau 105,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.220.368,00 atau turun 31,31 persen dari realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp115.691.131,00.

(7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2020 sebesar Rp598.602.660,00 atau 119,72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.348.460,00 atau naik 5,16 persen dari realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp569.254.200,00.

(8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Realisasi Pajak MBLB tahun 2020 sebesar Rp561.639.555,00 atau 112,33 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp716.780.375,00 atau turun 56,07 persen dari realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp1.278.419.930,00.

Pajak MBLB ini sebagian besar berasal dari kegiatan konstruksi baik jalan maupun bangunan yang dilaksanakan di tahun 2020. Dengan adanya pandemi *covid-19* maka

banyak kegiatan konstruksi yang dibatalkan pelaksanaannya, terutama kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan permintaan mineral bukan logam dan batuan menurun dan berdampak signifikan terhadap penerimaan Pajak MBLB.

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pemungutan PBB-P2 adalah Perda Nomor 15 Tahun 2012 dan mulai dilakukan pungutan sejak tahun 2014.

PBB-P2 merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2020, yaitu sebesar Rp20.353.125.817,00 atau 34,60 persen dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2020.

Realisasi PBB-P2 tahun 2020 berhasil melampau target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 yaitu sebesar Rp19.500.000.000,00 atau mencapai 104,38 persen dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp711.304.887,00 atau naik 3,62 persen.

(10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pemungutan BPHTB di Kabupaten Purbalingga adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011.

BPHTB merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2020, yaitu sebesar Rp8.634.426.816,00 atau 14,68 persen dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2020.

Realisasi tersebut mencapai 191,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp4.500.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.569.712.209,00 atau naik 22,22 persen.

Rincian Realisasi Pajak Daerah tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.1

V.1.a.1).b). Retribusi Daerah _____Rp11.072.934.345,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2020, Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga masih dikelola oleh 11 SKPD.

Pelaksanaan pemungutan retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 mencapai sebesar Rp11.072.934.345,00 atau 110,27 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan yaitu Rp3.648.831.512,00 atau turun 24,79 persen.

Tingginya penurunan pendapatan retribusi daerah terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberlakukan beberapa

kebijakan yang berpengaruh terhadap pendapatan Retribusi Daerah. Diantaranya adalah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang memberikan dampak terhadap lesunya perekonomian di berbagai tempat seperti pasar dan tempat wisata.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan retribusi pasar untuk beberapa bulan sebagai bentuk perhatian kepada para pedagang pasar atas lesunya perekonomian yang terjadi selama masa pandemi. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan yang sangat signifikan atas penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun sebelumnya.

Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	1.958.709.469,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	302.700.000,00	490.068.500,00	457.108.400,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.532.558.000,00	2.006.142.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.159.500.000,00	2.514.293.400,00	3.330.114.800,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	746.456.000,00	400.364.500,00	656.138.999,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	714.630.000,00	854.561.250,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.855.550.000,00	1.998.402.810,00	2.584.930.180,00
Retribusi Terminal	82.244.000,00	80.791.500,00	121.065.500,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.088.500.000,00	890.985.000,00	1.325.550.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	45.990.000,00	37.650.000,00	76.710.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	99.900.000,00	75.494.835,00	331.932.670,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	606.000.000,00	615.790.000,00	608.084.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	1.268.061.050,00	904.314.639,00
Retribusi Izin Gangguan	-	-	100.000,00
Retribusi Izin Trayek	105.300.000,00	82.757.000,00	151.079.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00	145.478.500,00	118.062.200,00
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi	35.000.000,00	85.678.000,00	91.724.000,00
Jumlah	**10.041.770.000,00**	**11.072.934.345,00**	**14.721.765.857,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar memberikan kontribusi yang terbesar terhadap total pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 22,71 persen.

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling), Laboratorium Kesehatan Kabupaten, serta Rumah Sakit Umum Panti Nugroho.

Pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dibandingkan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp1.958.709.469,00 atau turun 100,00 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 semua fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Purbalingga telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga. Setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan BLUD dikelompokkan sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan per SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.7 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Purbalingga	-	-	1.230.000,00
UPTD Puskesmas Kutasari	-	-	6.300.000,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	-	-	66.985.000,00
UPTD Puskesmas Kalimanah	-	-	50.590.000,00
UPTD Puskesmas Padamara	-	-	99.090.000,00
UPTD Puskesmas Kaligondang	-	-	8.255.000,00
UPTD Puskesmas Kalikajar	-	-	2.885.000,00
UPTD Puskesmas Kejobong	-	-	66.575.000,00
UPTD Puskesmas Pengadegan	-	-	5.135.000,00
UPTD Puskesmas Bukateja	-	-	39.015.000,00
UPTD Puskesmas Kutawis	-	-	9.100.000,00
UPTD Puskesmas Rembang	-	-	41.120.000,00
UPTD Puskesmas Karanganyar	-	-	160.985.000,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	-	-	163.805.000,00
UPTD Puskesmas Karangtengah	-	-	38.855.000,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	-	-	236.535.000,00
UPTD Puskesmas Mrebet	-	-	11.000.000,00
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	-	-	54.950.000,00
UPTD Puskesmas Karangreja	-	-	112.496.518,00
UPTD Puskesmas Karangjambu	-	-	47.975.000,00
RSUD Panti Nugroho	-	-	735.827.951,00
Jumlah	-	-	**1.958.709.469,00**

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2020 sebesar Rp490.068.500,00 atau 161,90 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.960.100,00 dibandingkan realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp457.108.400,00.

Rincian pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per SKPD tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Lingkungan Hidup	250.200.000,00	443.116.000,00	373.933.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.500.000,00	46.952.500,00	83.175.400,00
Jumlah	**302.700.000,00**	**490.068.500,00**	**457.108.400,00**

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2020 sebesar Rp1.532.558.000,00 atau 102,17 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp473.584.000,00 atau turun 23,61 persen. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi *covid-19* yang menyebabkan sedikitnya orang yang berpergian dan memanfaatkan ruang parkir di tepi jalan umum.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2020 sebesar Rp2.514.293.400,00 atau 116,43 persen dari target dalam APBD-P Tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp815.821.400,00 atau turun 24,50 persen.

Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membebaskan retribusi pelayanan pasar selama beberapa bulan sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada para pedagang pasar atas lesunya perekonomian di pasar yang disebabkan adanya pandemi *covid-19*.

Rincian pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar per SKPD tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.159.500.000,00	2.514.293.400,00	3.330.114.800,00
Jumlah	**2.159.500.000,00**	**2.514.293.400,00**	**3.330.114.800,00**

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2020 sebesar Rp400.364.500,00 atau hanya mencapai 53,64 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp746.456.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp255.774.499,00 atau turun 38,98 persen.

Rincian pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor per SKPD tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.10 Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perhubungan	746.456.000,00	400.364.500,00	656.138.999,00
Jumlah	**746.456.000,00**	**400.364.500,00**	**656.138.999,00**

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan Retribusi Jasa Umum yang dikenakan pada orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak lagi melakukan pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut atas Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 mengenai Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melakukan pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setelah adanya penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut atas Keputusan MK tersebut di atas.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2020 sebesar Rp854.561.250,00 atau mencapai 119,58 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp714.630.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp854.561.250,00.

Rincian pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per SKPD tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Komunikasi dan Informatika	714.630.000,00	854.561.250,00	-
Jumlah	**714.630.000,00**	**854.561.250,00**	**-**

(7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah.

Pada tahun 2020, pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh 7 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Keuangan Daerah.

Rincian penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	382.050.000,00	230.854.000,00	524.218.250,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	700.000.000,00	876.902.120,00	838.609.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.000.000,00	108.547.000,00	103.285.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	2.000.000,00	11.000.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	57.500.000,00	30.460.000,00	163.908.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	266.000.000,00	272.566.000,00	416.289.000,00
Badan Keuangan Daerah	350.000.000,00	477.073.690,00	527.620.430,00
Jumlah	**1.855.550.000,00**	**1.998.402.810,00**	**2.584.930.180,00**

Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.998.402.810,00 atau 107,70 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.855.550.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp586.527.370,00 atau turun 22,69 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Menurunnya penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan sedikitnya pekerjaan jalan yang dilaksanakan di tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi.
- Menurunnya penerimaan retribusi dari pengelolaan GOR Goentoer Darjono pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi *covid-19* sehingga kunjungan ke GOR menurun sangat drastis dan berdampak terhadap penerimaan.
- Menurunnya penerimaan sewa lahan parkir di pasar segamas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikelola oleh pihak ketiga, dimana sebagian sewa tahun 2020 baru dibayarkan di tahun 2021.

(8) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa pelayanan di lingkungan terminal.

Penyelenggaraan Retribusi Terminal ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Terminal tahun 2020 sebesar Rp80.791.500,00 atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp82.244.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.274.000,00 atau turun 33,27 persen. Penurunan tersebut salah satunya dipicu oleh pengalihfungsian beberapa sub terminal diantaranya sub terminal Kutasari yang dibongkar kemudian dibangun menjadi gedung UPTD Puskesmas Kutasari.

Rincian realisasi Retribusi Terminal per SKPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.13 Realisasi Retribusi Terminal per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perhubungan	82.244.000,00	80.791.500,00	121.065.500,00
Jumlah	**82.244.000,00**	**80.791.500,00**	**121.065.500,00**

(9) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012, Retribusi Tempat Khusus Parkir diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2020 sebesar Rp890.985.000,00 atau 81,85 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp434.565.000,00 atau turun 32,78 persen, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.14 Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.088.500.000,00	890.985.000,00	1.325.550.000,00
Jumlah	**1.088.500.000,00**	**890.985.000,00**	**1.325.550.000,00**

(10) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013, Retribusi Rumah Potong Hewan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.

Realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2020 sebesar Rp37.650.000,00 atau 81,87 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.060.000,00 atau 50,92 persen dari realisasi tahun 2019, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.15 Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pertanian	45.990.000,00	37.650.000,00	76.710.000,00
Jumlah	**45.990.000,00**	**37.650.000,00**	**76.710.000,00**

(11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2020 sebesar Rp75.494.835,00 atau 75,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp256.437.835,00 atau turun 77,26 persen dari realisasi Tahun 2019.

Penurunan yang cukup besar ini disebabkan adanya pandemi *covid-19* yang berdampak sangat signifikan terhadap lesunya perekonomian di sektor pariwisata dan juga dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah berupa pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan angka penyebaran *covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut maka sebagian besar tempat rekreasi dan olah raga yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dibatasi kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan retribusi di sektor ini.

Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya pengalihan sejumlah obyek wisata, diantaranya Pendakian Gunung Slamet yang telah dikelola oleh Perhutani per Agustus 2019. Pengalihan pengelolaan Pendaikan Gunung Slamet ini sangat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga, karena pada tahun – tahun

sebelumnya merupakan kontributor utama pendapatan ini. Rincian kontributor retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.16 Rincian Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2020

Nama Obyek Wisata	2020	2019
(1)	(2)	(3)
Pendakian Gunung Slamet	-	104.930.000,00
Petilasan Ardi Lawet	5.691.500,00	7.500.000,00
GOR Mahesa Jenar	1.226.000,00	8.802.000,00
Buper Munjul Luhur	11.919.500,00	92.070.000,00
Stadion Goentoer Darjono	56.657.835,00	118.630.670,00
Total	**75.494.835,00**	**331.932.670,00**

(12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.000.000,00	75.225.000,00	75.300.000,00
Dinas Pertanian	531.000.000,00	540.565.000,00	532.784.000,00
Jumlah	**606.000.000,00**	**615.790.000,00**	**608.084.000,00**

Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2020 sebesar Rp615.790.000,00 atau 101,62 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.706.000,00 atau naik 1,27 persen.

(13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan IMB yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp1.268.061.050,00 atau 211,34 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp363.746.411,00 atau naik 40,22 persen.

Rincian realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	1.268.061.050,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	904.314.639,00
Jumlah	**600.000.000,00**	**1.268.061.050,00**	**904.314.639,00**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 SKPD pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berubah, dari sebelumnya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

(14) Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012, penyelenggaraan Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pada bulan Juni 2016, Kementerian Dalam Negeri merilis daftar Perda/Perkada yang dibatalkan karena dianggap menghambat iklim investasi di daerah, termasuk di dalamnya adalah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan. Dengan adanya pembatalan/pencabutan Perda Nomor 20 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak lagi berwenang untuk memungut retribusi izin gangguan sehingga dalam APBD Tahun 2020, tidak ada lagi target penerimaan yang berasal dari pendapatan retribusi izin gangguan. Hanya saja apabila masih terdapat setoran dari masyarakat, maka akan tetap dicatat sebagai pendapatan retribusi izin gangguan.

Tahun 2020 tidak terdapat Realisasi pendapatan Retribusi Izin Gangguan atau mengalami penurunan sebesar Rp100.000,00 atau turun 100,00 persen dari realisasi tahun 2019.

(15) Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012, penyelenggaraan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Trayek tahun 2020 sebesar Rp82.757.000,00 atau tercapai 78,59 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp105.300.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp68.322.000,00 atau turun 45,22 persen dari realisasi tahun 2019.

(16) Retribusi Perpanjangan IMTA

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) adalah pungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA tahun 2020 sebesar Rp145.478.500,00 atau 145,48 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp27.416.300,00 atau naik 23,22 persen dari realisasi tahun 2019.

(17) Retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi

Dasar Hukum Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengelolaan retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi tahun 2020 sebesar Rp85.678.000,00 atau 244,79 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp35.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.046.000,00 atau turun 6,59 persen dari realisasi tahun 2019.

V.1.a.1).c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp21.682.472.386,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berupa bagian laba (dividen) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas maupun biaya.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar Rp21.682.472.386,00 atau 100,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.040.328.288,00 atau naik 5,04 persen dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.19 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumda Air Minum	3.579.085.000,00	3.579.085.030,00	3.317.426.196,00
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	2.840.872.000,00	2.840.872.344,00	2.571.113.438,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	991.039.000,00	991.039.262,00	838.645.793,00
Perumda Owabong	4.545.876.000,00	4.545.876.456,00	4.291.132.428,00
PT Bank Jateng	6.899.456.000,00	6.899.456.594,00	7.001.217.243,00
PD BPR Artha Perwira	2.825.115.000,00	2.825.115.000,00	2.622.609.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	-	1.027.700,00	-
Jumlah	**21.681.443.000,00**	**21.682.472.386,00**	**20.642.144.098,00**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT Bank BPD Jawa Tengah masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan dividen Tahun 2020 yaitu 31,82 persen, sedangkan PT PRPP Jawa Tengah merupakan kontributor terkecil yaitu dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,005 persen dari total penerimaan dividen Tahun 2020.

Penetapan dividen tahun Buku 2019 (diterima di Tahun Anggaran 2020), didasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Perusahaan Daerah.

Adanya pandemi *covid-19* di tahun 2020 menyebabkan banyak sektor perekonomian yang terdampak, salah satunya yang paling terdampak adalah sektor pariwisata.

Perumda Owabong adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pariwisata dan terkena dampak langsung dari pandemi ini. Dimana adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan sektor pariwisata sempat diberhentikan selama beberapa bulan untuk menekan angka perkembangan kasus *covid-19*. Hal ini menyebabkan Perumda Owabong tidak dapat beroperasi secara normal untuk mencapai target pendapatan dan harus mengeluarkan beban operasional yang besar agar tetap dapat beroperasi dan berakibat pada kerugian yang cukup besar yaitu mencapai Rp7.657.214.189,00. Sehingga Perumda Owabong tidak dapat menetapkan besaran deviden tahun buku 2020 yang akan dibagikan di tahun 2021.

V.1.a.1).d). Lain-lain PAD yang Sah_____Rp222.033.613.002,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2020 sebesar Rp222.033.613.002,00 atau 126,88 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp174.998.102.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.634.460.635,00 atau naik 6,54 persen.

Kenaikan ini merupakan dampak dari perubahan RSKBD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten menjadi Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalinggga Nomor 900/419 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/283 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	280.000.000,00	1.022.298.239,00	1.301.811.460,00
Penerimaan Jasa	1.000.000.000,00	1.457.488.597,00	2.534.405.073,00
Pendapatan Bunga	8.000.000.000,00	10.163.972.505,00	13.213.798.545,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	67.578.300,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	47.232.409,00	1.235.016.041,00
Pendapatan Denda Pajak	-	65.982.040,00	64.988.445,00
Pendapatan Denda Retribusi	-	103.269.010,00	15.470.690,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	1.893.351.010,00	303.703.350,00
Pendapatan dari Pengembalian	538.000.000,00	580.908.044,00	2.991.902.653,00
Pendapatan BLUD	165.180.102.000,00	206.689.165.359,00	186.153.036.869,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	9.945.789,00	517.440.941,00
Jumlah	**174.998.102.000,00**	**222.033.613.002,00**	**208.399.152.367,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara berurutan Pendapatan BLUD dan Pendapatan Bunga memberikan kontribusi pendapatan terbesar terhadap Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 dengan kontribusi masing-masing sebesar 93,09 persen dan 4,58 persen.

Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.2.

Penjelasan rinci per masing-masing rekening Lain-Lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut.

(1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan aset-aset yang sudah tidak produktif lagi baik yang berupa peralatan dan mesin, bongkaran gedung bangunan, maupun kayu. Pencatatan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Termasuk di dalamnya adalah hasil penjualan eks Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 yang telah dihapusbukukan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/348 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain pada Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Laboratorium Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, SMP, dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2019.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp1.022.298.239,00 atau 365,11 persen dari target yang dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp280.000.000,00. Meskipun realisasinya jauh melebihi target, akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp279.513.221,00 atau turun 21,47 persen dari realisasi tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.21 Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	280.000.000,00	533.941.239,00	57.032.760,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	-	361.357.000,00	1.116.178.700,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	-	127.000.000,00	128.600.000,00
Jumlah	**280.000.000,00**	**1.022.298.239,00**	**1.301.811.460,00**

(2) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan bunga rekening giro Kas Daerah pada Bank BPD Jawa Tengah dan bunga rekening tabungan bendahara SKPD.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 sebesar Rp1.457.488.597,00 atau 145,75 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.076.916.476,00 atau turun 42,49 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.22 Rincian Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Giro Kas Daerah - LRA	950.000.000,00	1.206.887.611,00	2.462.732.445,00
Jasa Giro Bendahara - LRA	50.000.000,00	250.600.986,00	71.672.628,00
Jumlah	**1.000.000.000,00**	**1.457.488.597,00**	**2.534.405.073,00**

Jasa Giro Kas Daerah merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah (RKUD) pada rekening giro PT Bank BPD Jawa Tengah. Jasa Giro Bendahara merupakan penerimaan bunga tabungan atas penempatan dana SKPD khususnya bunga atas rekening Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan Jasa Giro memberikan kontribusi sebesar 0,66 persen terhadap total Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 atau terbesar keempat diantara komponen Lain-Lain PAD yang Sah yang lain.

(3) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito pada PT Bank BPD Jawa Tengah untuk periode Januari-Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Bunga deposito tahun 2020 sebesar Rp10.163.972.505,00 atau 127,05 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2020. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.049.826.040,00 atau turun 23,08 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Penurunan tersebut lebih disebabkan karena jumlah penempatan dana Pemda di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Rincian pendapatan bunga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.23 Rincian Pendapatan Bunga Deposito Periode Januari - Desember 2020

Bulan	2020	2019
(1)	(2)	(3)
Januari	557.602.738,00	537.226.027,00
Februari	699.999.992,00	544.623.287,00
Maret	676.986.296,00	854.383.547,00
April	955.068.487,00	945.924.656,00
Mei	1.209.178.070,00	1.383.287.669,00
Juni	832.328.756,00	1.165.993.149,00
Juli	1.016.712.316,00	1.091.095.886,00
Agustus	707.671.224,00	1.341.952.051,00
September	721.095.884,00	1.388.493.141,00
Oktober	1.027.945.196,00	1.302.191.770,00

Bulan	2020	2019
(1)	(2)	(3)
November	980.273.967,00	1.393.871.214,00
Desember	779.109.579,00	1.264.756.148,00
Jumlah	**10.163.972.505,00**	**13.213.798.545,00**

(4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tidak ada realisasi pendapatan dari tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengalami penurunan sebesar Rp67.578.000,00 atau turun 100,00 persen.

(5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga baik pekerjaan di bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum maupun bidang perhubungan.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020 sebesar Rp47.232.409,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.187.783.632,00 atau turun 96,18 persen dari realisasi tahun 2019. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Rincian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	2020 Realisasi (Rp)	2019 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bidang Pendidikan	-	3.079.400,00
Bidang Kesehatan	1.738.068,00	277.207.919,00
Bidang Pekerjaan Umum	34.759.883,00	926.445.466,00
Bidang Perumahan Rakyat	-	2.479.746,00
Bidang Perencanaan Pembangunan	181.368,00	-
Bidang Perhubungan	9.496.976,00	5.953.520,00
Bidang Lingkungan Hidup	1.056.114,00	19.849.990,00
Jumlah	**47.232.409,00**	**1.235.016.041,00**

(6) Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak.

Realisasi pendapatan denda pajak tahun 2020 sebesar Rp65.982.040,00, mengalami kenaikan sebesar Rp993.595,00 atau naik 1,53 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pendapatan denda pajak merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD.

Pendapatan denda pajak daerah tahun 2020 terdapat pada 8 jenis pajak sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020

Uraian	2020 Realisasi (Rp)	2019 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.675.175,00	86.550,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	21.354.108,00	27.937.589,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	9.588.251,00	55.500,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.445.480,00	9.084.797,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.028.095,00	916.047,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.973.828,00	2.173.473,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.868.402,00	7.628.442,00
Pendapatan Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan	12.048.701,00	15.356.047,00
Pendapatan Denda BPHTB	-	1.750.000,00
Jumlah	**65.982.040,00**	**64.988.445,00**

(7) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib retribusi yang terlambat melakukan pembayaran.

Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2020 sebesar Rp103.269.010,00, mengalami peningkatan sebesar Rp87.798.320,00 atau naik 567,51 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pendapatan denda retribusi merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD.

Rincian realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 5.26 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2020

Uraian	2020 Realisasi (Rp)	2019 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	15.000,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	9.860.660,00	15.235.060,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	230.630,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	375.150,00	5.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	93.018.200,00	-
Jumlah	**103.269.010,00**	**15.470.690,00**

(8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp1.893.351.010,00 merupakan pendapatan daerah yang berasal dari klaim Pemerintah Daerah terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2019 (putus kontrak) yang berasal dari PT. Joglo Multiayu masing-masing sebesar Rp1.362.999.5000,00 dan Rp530.351.510,00 atas Kegiatan Pembangunan GOR Tertutup.

(9) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan atas pengembalian belanja/pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah di masa lalu (bukan periode berjalan), termasuk di dalamnya adalah pengembalian yang dilakukan karena adanya

temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan baik internal (Inspektorat Daerah) maupun eksternal (BPK) serta pengembalian belanja dana BOS.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2020 sebesar Rp580.908.044,00 atau 107,98 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp2.410.994.609,00 atau turun 80,58 persen dari realisasi tahun 2019.

(10) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkeskab sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar Rp206.689.165.359,00, yang berasal dari jasa layanan umum, hasil kerja sama, dan pendapatan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	116.244.989.000,00	156.822.966.452,00	135.187.681.587,00
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	406.000.000,00	268.327.852,00	533.021.911,00
Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA	48.529.113.000,00	49.597.871.055,00	50.432.333.371,00
Jumlah	**165.180.102.000,00**	**206.689.165.359,00**	**186.153.036.869,00**

Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp206.689.165.359,00 sebagaimana terlihat pada tabel di atas merupakan 125,13 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp20.536.128.490,00 atau 11,03 persen. Hal itu dikarenakan perubahan bentuk RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkeskab di tahun 2019 menjadi BLUD.

Pendapatan BLUD ini memberikan kontribusi sebesar 93,09 persen terhadap total pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dan 65,93 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020.

- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

  Merupakan pendapatan pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas, dan UPTD Labkeskab yang berasal dari kompensasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD tahun 2020 sebesar Rp156.822.966.452,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.635.284.865,00 atau naik 16,00 persen dari realisasi tahun 2019.

  Rincian realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.28 Rincian Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Purbalingga	346.320.000,00	337.409.100,00	230.717.000,00
UPTD Puskesmas Bojong	146.700.000,00	209.527.000,00	162.968.500,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Kutasari	341.730.000,00	594.875.200,00	300.441.513,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	520.000.000,00	555.183.200,00	473.845.000,00
UPTD Puskesmas Kalimanah	501.550.000,00	520.669.200,00	340.267.914,00
UPTD Puskesmas Padamara	441.315.000,00	233.886.100,00	490.151.954,00
UPTD Puskesmas Kemangkon	470.420.000,00	433.849.220,00	144.194.000,00
UPTD Puskesmas Kaligondang	185.500.000,00	340.901.620,00	135.809.405,00
UPTD Puskesmas Kalikajar	93.600.000,00	209.269.355,00	148.259.136,00
UPTD Puskesmas Kejobong	609.955.000,00	708.290.100,00	500.133.820,00
UPTD Puskesmas Pengadegan	465.780.000,00	453.456.200,00	286.993.500,00
UPTD Puskesmas Bukateja	353.170.000,00	413.409.600,00	365.543.000,00
UPTD Puskesmas Kutawis	484.630.000,00	392.142.000,00	277.368.000,00
UPTD Puskesmas Rembang	722.500.000,00	707.163.600,00	440.276.200,00
UPTD Puskesmas Karanganyar	1.066.948.000,00	978.707.560,00	838.682.600,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	1.223.919.000,00	1.253.646.430,00	1.306.750.960,00
UPTD Puskesmas Karangtengah	431.590.000,00	500.377.900,00	372.366.000,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	1.003.943.000,00	1.002.694.967,00	1.276.898.000,00
UPTD Puskesmas Mrebet	357.550.000,00	361.147.799,00	224.140.000,00
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	619.500.000,00	572.174.100,00	535.079.500,00
UPTD Puskesmas Karangreja	1.337.400.000,00	1.199.887.503,00	982.846.669,00
UPTD Puskesmas Karangjambu	320.969.000,00	428.249.719,00	380.780.611,00
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	800.000.000,00	912.115.000,00	954.957.974,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata (BLUD)	78.600.000.000,00	111.289.565.960,00	102.216.210.529,00
RSUD Panti Nugroho (BLUD)	24.800.000.000,00	32.214.368.019,00	21.801.999.802,00
	116.244.989.000,00	**156.822.966.452,00**	**135.187.681.587,00**

- Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD

  Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama pemanfaatan aset BLUD dengan pihak lain yaitu kerja sama perparkiran dan pendidikan.

  Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD Tahun 2020, sebesar Rp268.327.852,00 atau 66,09 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp406.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp264.694.059,00 atau turun 49,66 persen dari realisasi tahun 2019. Realisasi pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD tahun 2020 ini berasal dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadirata dan UPTD Puskesmas Kejobong.

  Rincian realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.29 Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Kejobong	6.000.000,00	5.960.000,00	5.700.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	400.000.000,00	262.367.852,00	527.321.911,00
	406.000.000,00	**268.327.852,00**	**533.021.911,00**

- Pendapatan Lain-lain BLUD

  Merupakan pendapatan lainnya di luar pelayanan kesehatan dan hasil kerja sama, yang berupa pendapatan kapitasi JKN, pendapatan sewa gedung dan bunga bank (giro dan deposito). Realisasi Pendapatan Lain-lain BLUD tahun 2020 sebesar Rp49.597.871.055,00, menurun sebesar Rp834.462.316,00 atau turun 1,65 persen dari realisasi tahun 2019. Rincian realisasi Pendapatan Lain-Lain BLUD tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.30 Rincian Pendapatan Lain-Lain BLUD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Purbalingga	1.320.000.000,00	1.268.498.749,00	1.349.701.804,00
UPTD Puskesmas Bojong	750.000.000,00	756.946.200,00	816.895.508,00
UPTD Puskesmas Kutasari	3.520.835.000,00	3.611.636.605,00	3.634.730.579,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	2.940.000.000,00	2.921.303.518,00	3.088.104.790,00
UPTD Puskesmas Kalimanah	1.920.000.000,00	1.941.040.163,00	1.903.875.375,00
UPTD Puskesmas Padamara	1.920.000.000,00	2.559.068.218,00	2.270.945.550,00
UPTD Puskesmas Kemangkon	3.420.000.000,00	3.324.988.800,00	3.448.349.700,00
UPTD Puskesmas Kaligondang	2.119.008.000,00	2.012.587.548,00	2.199.079.813,00
UPTD Puskesmas Kalikajar	996.000.000,00	961.867.200,00	1.021.832.400,00
UPTD Puskesmas Kejobong	2.658.950.000,00	2.580.073.810,00	2.751.089.914,00
UPTD Puskesmas Pengadegan	2.180.945.000,00	2.170.867.337,00	2.236.120.269,00
UPTD Puskesmas Bukateja	2.514.000.000,00	2.381.658.004,00	2.580.552.300,00
UPTD Puskesmas Kutawis	1.709.400.000,00	1.713.928.204,00	1.781.705.471,00
UPTD Puskesmas Rembang	2.556.000.000,00	2.658.609.140,00	2.749.341.228,00
UPTD Puskesmas Karanganyar	2.280.000.000,00	2.129.501.087,00	2.167.475.360,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	2.410.175.000,00	2.446.425.549,00	2.578.017.580,00
UPTD Puskesmas Karangtengah	1.644.000.000,00	1.799.725.986,00	1.887.884.300,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	2.880.000.000,00	2.884.946.700,00	2.896.433.124,00
UPTD Puskesmas Mrebet	2.004.000.000,00	2.008.271.656,00	1.960.716.669,00
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	1.800.000.000,00	1.761.560.981,00	1.754.175.297,00
UPTD Puskesmas Karangreja	2.760.000.000,00	2.674.563.000,00	2.610.748.486,00
UPTD Puskesmas Karangjambu	1.225.800.000,00	1.230.330.920,00	1.326.548.577,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	1.000.000.000,00	1.799.471.680,00	1.418.009.277,00
	48.529.113.000,00	**49.597.871.055,00**	**50.432.333.371,00**

(11) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya merupakan pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis pendapatan yang ada yang ada di kelompok Lain-Lain PAD yang Sah. Jenis pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya diantaranya berasal dari hasil temuan inspektorat atas realisasi belanja tahun 2019 pada beberapa SKPD, salah setor dari SKPD, dan pendapatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020	2019
(1)	(2)	(3)
Dobel Setor Pajak Daerah	-	49.200,00
Kelebihan Setor Pajak Daerah	18.000,00	-
Kelebihan Setor UP	87.300,00	477.273,00
Salah Setor Pajak Pusat	-	13.224.841,00
AMU Bank Jateng	-	486.000.000,00
Jasa/Saldo Tutup Rekening	2.139.289,00	17.689.627,00
Lain-lain	7.701.200,00	-
Jumlah	**9.945.789,00**	**517.440.941,00**

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2020 sebesar Rp9.945.789,00, mengalami penurunan sebesar Rp507.495.152,00 atau turun 98,08 persen dari realisasi tahun 2019.

- *Kelebihan Setor Pajak Daerah* sebesar Rp18.000,00 merupakan kelebihan setor pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak.
- *Kelebihan Setoran Sisa UP Tahun 2020* sebesar Rp87.300,00 merupakan pendapatan atas kelebihan setoran sisa UP tahun 2020 yang berasal dari Kelurahan Karangmanyar.
- *Jasa/Saldo Tutup Rekening* sebesar Rp2.139.289,00 merupakan pendapatan yang berasal dari penutupan rekening yang tidak memiliki SK Bupati..
- *Lain-lain sebesar* Rp7.701.200,00 merupakan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

V.1.a.2). Pendapatan Transfer_____Rp1.539.129.862.493,00

Pendapatan Transfer (transfer masuk) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, baik yang berupa dana perimbangan, dana transfer lainnya, dan dana desa dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.539.129.862.493,00 atau 100,43 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.532.610.752.000,00. Realisasi pendapatan transfer ini memberikan kontribusi sebesar 78,82 persen dari total Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi masih relatif besar. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar rasio ketergantungan fiskal semakin berkurang.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp135.135.605.461,00 atau turun 8,07 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.147.061.410.000,00	1.144.405.027.431,00	1.271.720.206.430,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	278.774.566.000,00	276.353.798.000,00	281.054.092.000,00
Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	91.742.776.000,00	104.798.564.062,00	112.012.678.024,00
Bantuan Keuangan	15.032.000.000,00	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00
Jumlah	**1.532.610.752.000,00**	**1.539.129.862.493,00**	**1.674.265.467.954,00**

Penurunan Pendapatan Transfer ini terjadi karena adanya *refocusing* (pemangkasan) anggaran dari Pemerintah Pusat sebagai akibat dari adanya pandemi *covid-19*. Pemangkasan anggaran ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk penanganan pandemi *covid-19*.

V.1.a.2).a). Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan_____Rp1.144.405.027.431,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam APBN Tahun 2020, Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. **Dana Transfer Umum** merupakan jenis transfer ke daerah yang lebih bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan **Dana Transfer Khusus (*specific grant*)** sesuai dengan sifatnya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, Dana Transfer Khusus juga digunakan untuk memenuhi amanat dari peraturan perundangundangan. Dana Transfer Khusus ini dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.144.405.027.431,00 atau 99,77 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan tahun 2020

sebesar Rp1.147.061.410.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp127.315.178.999,00 atau turun 10,01 persen.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 74,35 persen terhadap total Pendapatan Transfer. Sedangkan jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 58,61 persen.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil Pajak	25.066.880.000,00	30.248.715.500,00	19.449.562.955,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA	1.948.636.000,00	1.799.423.282,00	1.332.044.780,00
Dana Alokasi Umum	847.952.218.000,00	841.051.988.000,00	918.228.685.000,00
Dana Alokasi Khusus	272.093.676.000,00	271.304.900.649,00	332.709.913.695,00
Jumlah	**1.147.061.410.000,00**	**1.144.405.027.431,00**	**1.271.720.206.430,00**

(1) Bagi Hasil Pajak_____Rp30.248.715.500,00

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) Tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang lebih lanjut diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020.

Sesuai dengan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2020 halaman 3-64, jenis Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPSKPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

DBH Pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan 2 prinsip, yakni: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (*by origin*); dan (2) prinsip pembagian berdasarkan realisasi penerimaan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, pembagian berdasarkan prinsip realisasi (*based on actual revenue)*, mengandung arti, DBH Pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dalam tahun anggaran berjalan. Sehingga meskipun realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, tetapi tidak serta merta alokasi untuk masing-masing daerah juga mengalami kenaikan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar Rp30.248.715.500,00 atau hanya mencapai 120,67 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan

sebesar Rp10.799.152.545,00 atau naik 55,52 persen. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.34 Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.004.236.000,00	4.302.699.594,00	5.239.718.715,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	2.665.965.006,00	273.367.395,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	13.086.461.000,00	16.653.908.596,00	7.055.691.292,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	6.976.183.000,00	6.626.142.304,00	6.880.785.553,00
Jumlah	**25.066.880.000,00**	**30.248.715.500,00**	**19.449.562.955,00**

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA_____Rp1.799.423.282,00

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah penghasil dengan pemerintah pusat. Sama halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*.

Sesuai dengan Nota Keuangan APBN Tahun 2020, DBH SDA terdiri atas: (1) DBH SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) DBH SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (*land-rent*) dan iuran produksi (*royalty*); (3) DBH SDA perikanan; (4) DBH SDA minyak bumi; (5) DBH SDA gas bumi; dan (6) DBH SDA panas bumi.

Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNBP belum diketahui, maka selisih DBH dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang telah disalurkan dan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Alokasi DBH SDA Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada Lampiran VI.6 yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.

Realisasi penerimaan DBH SDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar Rp1.799.423.282,00 atau 92,34 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu naik sebesar Rp467.378.502,00 atau turun 35,09 persen.

Penerimaan DBH SDA memberikan kontribusi sebesar 0,12 persen dari total Pendapatan Transfer 2020 dan hanya 0,09 persen dari total Pendapatan Daerah tahun 2020. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	314.159.000,00	195.546.812,00	155.146.800,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	1.418.361.000,00	788.276.289,00	590.155.800,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	154.934.000,00	56.090.685,00	95.052.100,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	-	711.359.243,00	419.934.900,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	60.579.000,00	47.639.100,00	71.617.980,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LRA	603.000,00	511.153,00	137.200,00
Jumlah	**1.948.636.000,00**	**1.799.423.282,00**	**1.332.044.780,00**

(3) Dana Alokasi Umum_____Rp841.051.988.000,00

Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, perhitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan calon PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Selain itu mulai tahun anggaran 2019, Pemerintah Pusat mensyaratkan agar minimal 25 persen dari total DAU digunakan untuk belanja infrastruktur.

Alokasi DAU Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran VI.10 yaitu sebesar Rp847.952.218.000,00.

Realisasi penerimaan DAU Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar Rp841.051.988.000,00 atau 99,19 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020.

Realisasi DAU tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp77.176.697.000,00 atau turun 8,40 persen dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2019.

(4) Dana Alokasi Khusus_____Rp271.304.900.649,00

Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat melakukan perubahan terhadap postur Dana Perimbangan menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik merupakan DAK yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional. Pada Tahun 2020, terdapat 3 jenis DAK Fisik yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat terdiri atas (1) DAK Reguler, (2) DAK Penugasan, dan (3) DAK Afirmasi.

DAK Fisik terdiri dari 16 bidang yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan Keluarga Berencana, (3) Air Minum; (4) Sanitasi: (5) Perumahan dan Permukiman, (6) Pasar, (7) Industri Kecil dan Menengah, (8) Pertanian, (9) Kelautan dan Perikanan, (10) Pariwisata,

(11) Jalan, (12) Irigasi, (13) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (14) Transportasi Pedesaan, (15) Sosial dan (16) Transportasi Laut.

Sedangkan DAK Afirmasi merupakan jenis DAK Fisik yang bertujuan untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi serta percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DAK Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah Tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas.

Pada tahun 2020, DAK Nonfisik terdiri atas 13 jenis yaitu (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (3) Tunjangan Profesi Guru PNSD, (4) Tambahan Penghasilan Guru PNSD, (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus, (6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (7) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (8) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (9) Pelayanan Administrasi Kependudukan, (10) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, (11) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, (12) Pelayanan Kepariwisataan, dan (13) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.11 dan Lampiran VI.12 yang kemudian diturunkan menjadi target penerimaan DAK dalam APBD-P Tahun 2020.

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp271.304.900.649,00 atau sebesar 99,71 persen dari target, mengalami penurunan sebesar Rp61.405.013.046,00 atau turun 18,46 persen dari realisasi penerimaan DAK tahun 2019.

Pada tahun 2020, jenis DAK Fisik maupun DAK Nonfisik yang alokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga masing-masing terdiri dari 11 jenis sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.36 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
DAK Fisik			
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	14.466.509.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5.059.683.000,00	2.260.775.000,00	3.592.557.840,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	709.287.000,00	1.915.039.000,00	-
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	650.000.000,00	650.000.000,00	-
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.296.875.000,00	-	2.433.370.000,00
DAK Bidang Kesehatan	-	-	27.589.550.486,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.041.144.000,00	1.040.059.000,00	764.905.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	-	806.046.200,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
DAK Bidang Pertanian	579.662.000,00	557.311.900,00	3.972.121.500,00
DAK Bidang Pendidikan	26.011.204.000,00	25.290.222.850,00	49.179.787.334,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.149.360.000,00	25.974.563.946,00	-
DAK Bidang Sentra IKM	2.614.936.000,00	2.195.369.000,00	12.920.404.000,00
DAK Bidang Pasar	-	-	1.934.317.000,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan)	3.423.796.000,00	3.190.904.280,00	3.144.496.600,00
DAK Bidang Pariwisata	1.031.898.000,00	744.342.000,00	1.788.088.000,00
DAK Non Fisik			
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	10.369.407.000,00	10.369.406.500,00	10.962.421.900,00
Tunjangan Profesi Guru	159.160.257.000,00	159.160.257.000,00	166.775.259.735,00
Tambahan Penghasilan Guru	-	461.250.000,00	183.512.500,00
Bantuan Operasional Kesehatan	16.505.714.000,00	25.964.585.330,00	21.372.274.682,00
Akreditasi Puskesmas	1.221.440.000,00	-	-
Jaminan Persalinan	2.490.584.000,00	-	-
Bantuan Operasional KB	5.214.609.000,00	5.214.609.793,00	5.178.869.688,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.091.185.000,00	3.091.185.050,00	2.175.922.230,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.495.300.000,00	2.495.300.000,00	3.019.500.000,00
Penyelenggaraan Museum	473.850.000,00	473.850.000,00	450.000.000,00
Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000,00	-	-
Pelayanan Kepariwisataan	255.870.000,00	255.870.000,00	-
Jumlah	**272.093.676.000,00**	**271.304.900.649,00**	**332.709.913.695,00**

V.1.a.2).b). Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya_____Rp276.353.798.000,00

Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2020 terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fskal daerah; (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID mencakup kriteria utama dan kategori kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: *(1) opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian;* (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan e-*procurement*). Sedangkan ***kategori kinerja*** merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah pada beberapa kategori yaitu (a) kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (b)

kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan; (c) kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan; (d) kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; (e) kategori pelayanan umum pemerintahan; (f) kategori peningkatan investasi; (g) kategori peningkatan ekspor; dan/ atau (h) kategori pengelolaan sampah.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa ini dimaksudkan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, mengingat dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2016, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2020 sebesar Rp276.353.798.000,00 atau 99,13 persen dari anggaran dalam APBD tahun 2020. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp4.700.294.000,00 atau turun 1,67 persen dari realisasi tahun 2019 yang didorong oleh turunnya alokasi Dana Insentif Daerah di tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.37 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Insentif Daerah - LRA	30.678.594.000,00	30.678.594.000,00	43.832.487.000,00
Dana Desa - LRA	248.095.972.000,00	245.675.204.000,00	237.221.605.000,00
Jumlah	**278.774.566.000,00**	**276.353.798.000,00**	**281.054.092.000,00**

(1) Dana Insentif Daerah_____Rp30.678.594.000,00

Pada tahun anggaran 2020, untuk ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Alokasi DID tahun 2020 untuk Kabupaten Purbalingga ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Lampiran VI.13 yaitu sebesar Rp30.678.594.000,00.

Realisasi pendapatan DID tahun 2020 sebesar Rp30.678.594.000,00 atau 100,00 persen dari alokasi dalam APBD tahun 2020. Sesuai dengan Lampiran VI.13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, alokasi DID bagi Kabupaten Purbalingga diperuntukkan bagi Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar publik.

(2) Dana Desa_____Rp245.675.204.000,00

Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam APBN Tahun 2020 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Lampiran VI.15 dengan nilai sebesar Rp245.675.204.000,00.

Dari total alokasi dalam APBN TA 2020 maupun APBD-P tahun 2020, seluruhnya telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar Rp245.675.204.000,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp8.453.599.000,00 atau naik 3,56 persen dibandingkan realisasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp237.221.605.000,00.

Dana Desa tersebut telah disalurkan seluruhnya ke 224 desa yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana akan dijelaskan dalam penjelasan poin 3.a.2).

V.1.a.2).c). Transfer Pemerintah Daerah Lainnya_____Rp104.798.564.062,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/202 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020. Total alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Purbalingga sebesar Rp113.814.642.000,00.

Meskipun alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah telah ditetapkan, pelaksanaan transfer dana bagi hasil tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi setelah adanya surat rekomendasi penyaluran bagi hasil dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp104.798.564.062,00 atau 114,23 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp91.742.776.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.214.113.962,00 dibandingkan realisasi tahun 2019 atau turun 6,44 persen. Jumlah penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp102.119.731.744,00 dan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 sebesar Rp2.678.832.318,00.

Rincian penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38 Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.355.624.000,00	24.589.643.223,00	29.529.105.058,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.174.610.000,00	10.806.909.375,00	19.018.701.352,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.601.398.000,00	18.563.275.603,00	26.971.974.639,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	23.054.000,00	111.209.932,00	115.216.688,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	33.588.090.000,00	50.727.525.929,00	36.377.680.287,00
Jumlah	**91.742.776.000,00**	**104.798.564.062,00**	**112.012.678.024,00**

V.1.a.2).d). Bantuan Keuangan_____Rp13.572.473.000,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terdiri dari 3 jenis yaitu (1) Bantuan Sarana Prasarana, (2) Bantuan Pendidikan, dan (3) Bantuan Non Sarana Prasarana.

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020 sebesar Rp13.572.473.000,00 atau 90,29 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp15.032.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp4.093.981.500,00 atau naik 43,19 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.39 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020

Uraian	2020		2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	15.032.000.000,00	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00
Jumlah	**15.032.000.000,00**	**13.572.473.000,00**	**9.478.491.500,00**

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2020 terealisasi cukup baik yaitu mencapai 90,23 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Rincian realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.40 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
TNI Manunggal Membangun Desa	837.000.000,00
Pendidikan	480.000.000,00
Sarana dan Prasarana	12.255.473.000,00
Jumlah	**13.572.473.000,00**

V.1.a.3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah_____Rp100.000.750.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya adalah realisasi pendapatan hibah Dana BOS pada sekolah negeri baik SD maupun SMP.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 sebesar Rp100.000.750.000,00 atau 99,81 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun

2020. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp3.604.910.000,00 atau naik 3,74 persen dari realisasi tahun 2019 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.41 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah	100.194.300.000,00	100.000.750.000,00	96.395.840.000,00
Jumlah	**100.194.300.000,00**	**100.000.750.000,00**	**96.395.840.000,00**

V.1.a.3).a). Pendapatan Hibah_____Rp100.000.750.000,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2020 sebesar Rp100.000.750.000,00 atau 99,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp100.194.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.604.910.000,00 atau naik 3,74 persen. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi Pendapatan Hibah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.42 Realisasi Lain-Lain PD yang Sah - Pendapatan Hibah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	100.194.300.000,00	99.930.750.000,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	62.793.900.000,00	62.442.900.000,00	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	91.895.840.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri	-	-	55.447.840.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	-	-	29.809.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi	-	-	4.434.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja	-	-	2.205.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	70.000.000,00	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	70.000.000,00	-
Jumlah	**100.194.300.000,00**	**100.000.750.000,00**	**96.395.840.000,00**

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah _____Rp99.930.750.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2020 sebesar Rp99.930.750.000,00 atau 99,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2019 , angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp95.430.750.000,00 atau naik

2.120,68 persen. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.43 Realisasi Hibah dari Pemerintah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri	62.793.900.000,00	62.442.900.000,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	33.100.400.000,00	33.187.850.000,00	-
Jumlah	**100.194.300.000,00**	**99.930.750.000,00**	**4.500.000.000,00**

Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi karena Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri pada tahun 2020 termasuk dalam kategori Pendapatan Hibah dari Pemerintah, dimana pada tahun 2019 Pendapatan Hibah Dana BOS termasuk dalam kategori Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya. Hal ini dilakukan karena Transfer Dana BOS dari Pemerintah mulai tahun 2020 tidak lagi melalui Pemerintah Provinsi tetapi langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima Dana BOS.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2020 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yang berupa Hibah SRMBR, Hibah Dana BOS SD Negeri dan Hibah Dana BOS SMP Negeri.

- Hibah Air Minum Perkotaan (SRMBR)

  Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah telah menetapkan program pengelolaan hibah negara sebagai bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat yang akan dihibahkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

  Hibah kepada PDAM merupakan pelaksanaan atas Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Lampiran IV tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Menurut Organisasi, Unit Organisasi, Fungsi Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Sumber Dana yang menyebutkan bahwa salah satu jenis belanja hibah yang dianggarkan adalah hibah air minum yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur (*output based*) di sejumlah pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA-2020 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

  Program Hibah Air Minum APBN adalah hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR MBR) yang dilaksanakan oleh PDAM.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Program ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2013 dan berlanjut sampai dengan sekarang dengan target seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pelayanan air minum.

Persyaratan utama untuk mengikuti program ini yaitu :

- adanya kapasitas air yang belum dimanfaatkan (*idle capacity*) yang dimiliki oleh PDAM.
- kesediaan Pemda untuk mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada PDAM untuk membiayai dahulu pelaksanaan pemasangan SR-MBR.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga termasuk dalam salah satu kabupaten/kota penerima Program Hibah Air Minum Perkotaan TA 2020.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui PDAM Kabupaten Purbalingga memperoleh alokasi sebanyak 1.100 SR (sesuai usulan), dan untuk setiap 1 SR akan diganti/mendapat hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3 juta.

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi SR-MBR yang dilakukan oleh PDAM sesuai dengan target sehingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapat dana pengganti (hibah air minum APBN) sebesar 1.100 X Rp3 juta = Rp3.300.000.000,00 yang diterima di RKUD pada tanggal 4 Desember 2020.

- Hibah Air Minum Pedesaan (SRMBR)

Selain hibah air minum perkotaan, Pemerintah Pusat juga menganggarkan program hibah air minum untuk masyarakat pedesaan. Total penerimaan hibah air minum pedesaan tahun 2020 berjumlah Rp1.000.000.000,00.

Sedangkan lokasi kegiatan berjumlah sebanyak 17 Desa pada Kecamatan sebagaiman ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 690/208 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Nasional Hibah Air Minum Perdesaan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, yaitu:

Tabel 5.44 Rincian Hibah Air Minum Pedesaan Berdasarkan Lokasi Tahun 2020

Lokasi/Desa	Kecamatan	Alokasi
Makam	Rembang	60.000.000,00
Palumutan	Kemangkon	50.000.000,00
Pagerandong	Mrebet	76.000.000,00
Lambur	Mrebet	50.000.000,00
Kedarpan	Kejobong	50.000.000,00
Gumiwang	Kejobong	50.000.000,00
Kedungjati	Bukateja	78.000.000,00
Mipiran	Padamara	76.000.000,00
Banjaran	Bojongsari	60.000.000,00
Kajongan	Bojongsari	80.000.000,00
Krangean	Kertanegara	70.000.000,00
Karangjambu	Karangjambu	50.000.000,00
Kembaran Wetan	Kaligondang	50.000.000,00

Lokasi/Desa	Kecamatan	Alokasi
Sumingkir	Kutasari	50.000.000,00
Karangnangka	Bukateja	50.000.000,00
Majatengah	Kemangkon	50.000.000,00
Mrebet	Mrebet	50.000.000,00
	Jumlah	**1.000.000.000,00**

- Hibah Dana BOS Sekolah Negeri

  Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.

  Oleh karena itu, dengan memperhatikan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 di atas maka pada APBD Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Hibah Dana BOS tidak lagi dianggarkan, dipertanggungjawabkan dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan direklasifikasi ke kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

  Lebih lanjut, untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Dana BOS, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah.

  Dengan memperhatikan 2 (dua) aturan di atas, maka proses penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawaban dan pelaporan Pendapatan Hibah Dana BOS disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Hibah pada kelompok pendapatan Lain-Lain PD yang Sah.

  Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Negeri tahun 2020 sebesar Rp95.630.750.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS pada 459 SD Negeri sebesar Rp62.442.900.000,00 dan Pendapatan Hibah BOS pada 60 SMP Negeri sebesar Rp33.187.850.000,00. Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS per Sekolah Negeri dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya_____Rp0,00

Tidak ada Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2019 yang merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS, sedangkan tahun 2020 dianggarkan pada kategori Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Hal ini dikarenakan penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Pusat tidak lagi melalui Pemerintah Provinsi, akan tetapi penyalurannya langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima.

Realisasi tersebut menurun sebesar Rp91.895.840.000,00 atau turun 100,00 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri	-	-	55.447.840.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri	-	-	29.809.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi	-	-	4.434.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja	-	-	2.205.000.000,00
Jumlah	**-**	**-**	**91.895.840.000,00**

(3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri_____Rp70.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri tahun 2020 sebesar Rp70.000.000,00, mengalami kenaikan 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Realisasi hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri merupakan hibah dalam bentuk uang yang langsung diserahkan kepada SKPD dan langsung dibelanjakan oleh SKPD dalam rangka operasional kegiatan yang terdiri dari:

Tabel 5.46 Rincian Pendapatan Hibah dari Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PT. Bank Jateng Cabang Purbalingga	-	25.500.000,00	-
PT. BPR BKK Purbalingga	-	39.500.000,00	-
PT. BPRS Buana Mitra Perwira	-	5.000.000,00	-
Jumlah	**-**	**70.000.000,00**	-

Hibah dari PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp25.500.000,00 diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruhnya digunakan untuk biaya publikasi pada media elektronik, sehingga per 31 Desember 2020 tidak ada saldo kas.

Hibah dari PT BPR BKK Purbalingga diberikan kepada Bagian Umum Sekretaris Daerah dan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan TMP Purbosaroyo. Dari total hibah uang sebesar Rp39.500.000,00, sampai dengan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa sebesar Rp14.350.000,00 dan telah disetorkan ke RKUD di tahun 2021.

Hibah dari PT BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp5.000.000,00 diberikan kepada Dinas Kesehatan dan digunakan seluruhnya untuk hadiah uang pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.

V.1.b. BELANJA DAERAH_____Rp1.500.418.873.732,00

Belanja Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp1.500.418.873.732,00 atau mencapai 92,99 persen dari anggaran sebesar Rp1.613.481.567.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, angka tersebut

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp200.894.295.292,00 atau turun 11,81 persen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.47 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Operasi	1.442.856.472.000,00	1.360.171.409.712,00	1.438.969.577.302,00
Belanja Modal	157.973.737.000,00	130.334.116.841,00	262.136.781.292,00
Belanja Tak Terduga	12.651.358.000,00	9.913.347.179,00	206.810.430,00
Jumlah	**1.613.481.567.000,00**	**1.500.418.873.732,00**	**1.701.313.169.024,00**

Penurunan realisasi belanja tahun 2020 yang cukup signifikan tersebut dipicu oleh penurunan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing mencapai Rp78.798.167.590,00 dan Rp131.802.664.451,00 atau turun 5,48 persen dan 50,28 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*.

V.1.b.1). Belanja Operasi_____Rp1.360.171.409.712,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp1.360.171.409.712,00 atau 94,27 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.442.856.472.000,00. Belanja Operasi tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total Belanja Daerah tahun 2020 yaitu sebesar 90,65 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp78.798.167.590,00 atau turun 5,48 persen.

Rincian Belanja Operasi tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai	820.836.083.000,00	768.877.791.072,00	817.816.299.448,00
Belanja Barang dan Jasa	531.552.721.000,00	501.534.677.443,00	566.575.338.765,00
Belanja Subsidi	2.383.815.000,00	2.378.814.568,00	986.499.846,00
Belanja Hibah	79.307.353.000,00	78.810.376.629,00	26.241.821.443,00
Belanja Bantuan Sosial	8.776.500.000,00	8.569.750.000,00	27.349.617.800,00
Jumlah	**1.442.856.472.000,00**	**1.360.171.409.712,00**	**1.438.969.577.302,00**

Dari total Belanja Operasi tahun 2020 di atas, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp768.877.791.072,00 atau 56,53 persen dari total Belanja Operasi, sedikit mengalami penurunan dibandingkan rasio tahun 2019 yang mencapai 56,83 persen.

V.1.b.1).a). Belanja Pegawai_____Rp768.877.791.072,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp768.877.791.072,00 atau 93,67 persen dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp820.836.083.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2019, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp48.938.508.376,00 atau turun 5,98 persen.

Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut terjadi pemangkasan yang signifikan terhadap anggaran belanja pegawai sehingga mempengaruhi penurunan realisasi belanja pegawai tahun 2020.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan di tahun 2020, berbanding terbalik dengan rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah yang mengalami peningkatan dari semula sebesar 48,07 persen di tahun 2019 menjadi 51,24 persen di tahun 2020. Rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.49 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji dan Tunjangan	703.025.890.000,00	658.454.032.593,00	689.888.610.456,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	60.436.531.000,00	56.817.250.372,00	66.703.489.582,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00	6.522.000.000,00	6.490.500.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.040.000.000,00	791.323.800,00	2.343.308.600,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.865.000,00	191.300.057,00	445.121.059,00
Belanja Uang Lembur	666.377.000,00	570.728.300,00	699.097.685,00
Belanja Pegawai - Dana BLUD	9.667.870.000,00	9.492.395.750,00	9.562.622.900,00
Honorarium PNS	16.149.971.000,00	14.932.283.000,00	19.023.674.950,00
Honorarium Non PNS	16.112.237.000,00	14.965.420.250,00	14.655.525.000,00
Belanja Pegawai Dana BOS	6.964.342.000,00	6.141.056.950,00	8.004.349.216,00
Jumlah	**820.836.083.000,00**	**768.877.791.072,00**	**817.816.299.448,00**

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada CPNS, PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD, yang berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sebanyak 464 pegawai dari semula 7.443 orang di akhir tahun 2019 menjadi 6.979 orang di akhir tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020

Golongan	Komposisi Pegawai		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun 2020	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Golongan IV	1.886	2.140	(254)
Golongan III	3.989	4.117	(128)
Golongan II	1.004	1.077	(73)
Golongan I	100	109	(9)
Jumlah	**6.979**	**7.443**	**(464)**

Penurunan jumlah pegawai tersebut berpengaruh terhadap penurunan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan di tahun 2020.

Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, jenis penghasilan yang diberikan didasarkan pada Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2020 sebesar Rp658.454.032.593,00 atau 93,66 persen dari anggaran sebesar Rp703.025.890.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.434.577.863,00 atau turun sebesar 4,56 persen.

Belanja Gaji dan Tunjangan memberikan kontribusi sebesar 85,64 persen terhadap total realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 dan 43,89 persen terhadap total Belanja Daerah tahun 2020. Dari seluruh komponen Belanja Gaji dan Tunjangan yang ada, Belanja Gaji Pokok PNS//Uang Representasi memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan yaitu 48,76 persen.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.51 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	403.672.185.000,00	374.922.661.651,00	390.773.956.470,00
Belanja Tunjangan Keluarga	34.961.490.000,00	34.389.460.767,00	35.906.954.719,00
Belanja Tunjangan Jabatan	8.297.697.000,00	7.930.916.000,00	7.922.567.750,00
Belanja Tunjangan Fungsional	26.121.238.000,00	25.772.823.000,00	26.176.329.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	4.933.763.000,00	4.848.223.000,00	5.459.266.000,00
Belanja Tunjangan Beras	17.607.469.000,00	17.291.414.238,00	18.052.397.070,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.345.232.000,00	1.840.347.298,00	1.762.069.313,00
Belanja Pembulatan Gaji	5.084.000,00	4.836.953,00	5.274.414,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	26.022.249.000,00	20.458.294.978,00	10.999.308.614,00
Belanja Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	85.816.500,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	28.319.000,00	26.856.900,00	24.618.825,00
Belanja Tunjangan Komisi	55.907.000,00	55.906.200,00	51.156.000,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	28.319.000,00	26.856.900,00	24.618.825,00
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	7.857.000,00	7.856.500,00	7.202.025,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	41.291.000,00	27.450.675,00	26.247.920,00
Belanja Tunjangan Perumahan	6.298.000.000,00	6.298.000.000,00	4.888.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian	9.450.000,00	-	416.115.000,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Iuran Jaminan Kematian	2.346.300.000,00	2.307.987.032,00	2.408.581.936,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	783.582.000,00	770.791.651,00	802.664.195,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	162.678.900.000,00	154.252.540.850,00	178.681.965.880,00
Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	318.000.000,00	771.750.000,00	297.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	934.500.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi	4.960.000.000,00	4.945.500.000,00	4.182.000.000,00
Jumlah	**703.025.890.000,00**	**658.454.032.593,00**	**689.888.610.456,00**

Rincian Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per SKPD Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.4.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS merupakan kompensasi yang hanya diberikan kepada PNS Daerah selain gaji dan tunjangan, yang nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Terdapat 4 jenis belanja Tambahan Penghasilan PNS yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari (i) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; (ii) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas; (iii) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja; dan (iv) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar Rp56.817.250.372,00 atau 94,01 persen dari anggaran sebesar Rp60.436.531.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.886.239.210,00 atau turun sebesar 14,82 persen dari realisasi tahun 2019.

Penurunan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2020 salah satunya disebabkan karena adanya penurunan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.52 Rincian Belanja Tamsil PNS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Tamsil Berdasarkan Beban Kerja	57.524.299.000,00	54.283.548.675,00	65.976.306.082,00
Belanja Tamsil Berdasarkan Tempat Bertugas	87.600.000,00	76.800.000,00	85.901.000,00
Belanja Tamsil Berdasarkan Kondisi Kerja	629.550.000,00	611.007.000,00	641.282.500,00
Belanja Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.195.082.000,00	1.845.894.697,00	-
Jumlah	**60.436.531.000,00**	**56.817.250.372,00**	**66.703.489.582,00**

Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.5.

(3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Anggota DPRD selain gaji dan tunjangan, yang komponen dan nilainya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 sebesar Rp6.522.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp6.522.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.500.000,00 atau naik sebesar 0,49 persen dari realisasi tahun 2019.

Rincian Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.53 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00
Penunjang Operasional KDH dan WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	231.000.000,00
Jumlah	**6.522.000.000,00**	**6.522.000.000,00**	**6.490.500.000,00**

(4) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2020.

Sedangkan besaran nilai insentif pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 973/50 Tahun 2020 tentang Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp791.323.800,00 atau 76,09 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.551.984.800,00 atau turun 66,23 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena insentif pemungutan pajak daerah tahun 2020 untuk ASN dianggarkan di Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Rincian realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.040.000.000,00	791.323.800,00	2.343.308.600,00
Jumlah	**1.040.000.000,00**	**791.323.800,00**	**2.343.308.600,00**

(5) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2019 sebesar Rp 191.300.057,00 atau 76,26 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp253.821.002,00 atau turun 57,02 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan ini selaras dengan penurunan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 dan juga disebabkan penganggaran insentif retribusi daerah untuk ASN dianggarkan pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya. Rincian realisasi belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.55 Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.865.000,00	191.300.057,00	445.121.059,00
Jumlah	**250.865.000,00**	**191.300.057,00**	**445.121.059,00**

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dilakukan berdasarkan pada Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Purbalingga sebagai berikut:

Tabel 5.56 Dasar Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020

SKPD	Dasar Hukum
Dinas Perumahan dan Permukiman	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/67 Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/135 Tahun 2020
Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 17 dan 107 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974.5/82 Tahun 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/57 Tahun 2020
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 14 dan 110 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/77 Tahun 2020
Dinas Pertanian	Peraturan Bupati Nomor 18.dan 96 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/116 Tahun 2020
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Bupati Nomor 26 dan 97 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Nomor 974/115.1 Tahun 2020

Dari total 8 SKPD yang menganggarkan Belanja Insentif Retribusi Daerah di tahun 2020, terdapat 7 SKPD yang melakukan pencairan, sebagaimana dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.57 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	-	-
Dinas Perumahan dan Permukiman	3.179.000,00	2.100.000,00	37.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.100.000,00	3.329.820,00	4.692.184,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.720.000,00	12.510.000,00	11.760.000,00
Dinas Perhubungan	-	-	117.061.796,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	10.327.000,00	7.744.737,00	-
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	49.749.604,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.000.000,00	3.238.832,00	33.146.420,00
Dinas Pertanian	30.382.000,00	14.378.760,00	25.892.800,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	162.157.000,00	147.997.908,00	165.318.255,00
Jumlah	**250.865.000,00**	**191.300.057,00**	**445.121.059,00**

(6) Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur Tahun 2019 sebesar Rp570.728.300,00 atau 85,65 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp128.369.385,00 atau turun 18,36 persen.

Belanja Uang Lembur tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu Uang Lembur PNS dan Non PNS, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.58 Rincian Belanja Uang Lembur Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Uang Lembur PNS	324.395.000,00	249.564.800,00	403.539.725,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	341.982.000,00	321.163.500,00	295.557.960,00
Jumlah	**666.377.000,00**	**570.728.300,00**	**699.097.685,00**

Realisasi Belanja Uang Lembur tersebut terdapat pada 24 SKPD sebagaimana Lampiran 5.6.

(7) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2020 sebesar Rp9.492.395.750,00 atau 98,18 persen dari anggaran Tahun 2020 sebesar Rp9.667.870.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp70.227.150,00 atau turun 0,73 persen dibandingkan realisasi tahun 2019.

Rincian realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.59 Rincian Belanja Pegawai BLUD Tahun 2020

Uraian	2020 Realisasi (Rp)	2019 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.509.305.500,00	6.587.761.400,00
Belanja Uang Lembur	37.645.000,00	196.431.000,00
Honorarium PNS	1.036.959.750,00	1.064.980.500,00
Honorarium Non PNS	1.908.485.500,00	1.713.450.000,00
Jumlah	**9.492.395.750,00**	**9.562.622.900,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Tambahan Penghasilan PNS memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Belanja Pegawai BLUD. Kontribusi Belanja Tambahan Penghasilan PNS terhadap total Belanja Pegawai BLUD mencapai 68,57 persen.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.7.

(8) Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp14.932.283.000,00, mencapai 92,46 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.091.391.950,00 atau turun 21,51 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan ini selaras dengan menurunnya anggaran Belanja Honorarium PNS dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*.

Belanja Honorarium PNS ini hanya memberikan kontribusi sebesar 1,94 persen terhadap total Belanja Pegawai tahun 2020. Rincian Belanja Honorarium PNS Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.60 Realisasi Honorarium PNS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.683.848.000,00	11.659.236.750,00	15.159.649.950,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	233.810.000,00	186.065.000,00	300.800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	146.839.000,00	108.372.000,00	121.400.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	3.085.474.000,00	2.978.609.250,00	3.441.825.000,00
Jumlah	**16.149.971.000,00**	**14.932.283.000,00**	**19.023.674.950,00**

(9) Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS tahun 2020 sebesar Rp14.965.420.250,00 atau 92,88 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp309.895.250,00 atau naik 2,11 persen dari realisasi tahun 2019.

Rincian Belanja Honorarium Non PNS Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Honorarium Non PNS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.525.740.000,00	14.421.225.250,00	14.604.500.000,00
Upah Harian	586.497.000,00	544.195.000,00	51.025.000,00
Jumlah	**16.112.237.000,00**	**14.965.420.250,00**	**14.655.525.000,00**

(10) Belanja Pegawai Dana BOS

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 yang kemudian diganti dengan SE Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018, belanja Dana BOS diklasifikasikan hanya menjadi 5 kategori yaitu Belanja Pegawai Dana BOS, Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS.

Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp6.141.056.950,00 atau 88,18 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp1.863.292.266,00 atau turun 23,28 persen.

Tabel 5.62 Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai Dana BOS	6.964.342.000,00	6.141.056.950,00	8.004.349.216,00
Jumlah	**6.964.342.000,00**	**6.141.056.950,00**	**8.004.349.216,00**

Dari total realisasi Belanja Pegawai Dana BOS tersebut, sebesar Rp5.197.236.950,00 merupakan Belanja Pegawai Dana BOS pada 459 SD Negeri dan sebesar Rp943.820.000,00 merupakan Belanja Pegawai Dana BOS pada 60 SMP Negeri.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS per Satuan Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.8.

V.1.b.1).b). Belanja Barang dan Jasa_____Rp501.534.677.443,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp501.534.677.443,00 atau 94,35 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp531.552.721.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.040.661.322,00 atau turun 11,48 persen.

Penurunan tersebut didorong oleh penurunan yang cukup signifikan dari Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Kantor masing-masing sebesar Rp40.432.161.435,00, Rp22.177.663.121,00, dan Rp11.752.134.857,00. Penurunan ini selaras dengan penurunan anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19* yang terjadi.

Secara agregat di tahun 2020, Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi sebesar 36,87 persen dari total Belanja Operasi tahun 2020 serta 33,42 persen dari total Belanja Daerah tahun 2020. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.63 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bahan Pakai Habis	14.804.420.000,00	13.740.542.182,00	16.037.179.854,00
Belanja Bahan/Material	49.620.197.000,00	48.138.279.607,00	36.749.660.458,00
Belanja Jasa Kantor	81.555.099.000,00	80.057.582.462,00	91.809.717.319,00
Belanja Premi Asuransi	18.169.451.000,00	15.632.799.933,00	719.004.901,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.242.955.000,00	7.832.207.041,00	10.256.875.061,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.823.961.000,00	4.479.681.234,00	7.217.066.514,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	320.652.000,00	204.480.000,00	540.935.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.327.360.000,00	1.015.290.000,00	1.063.028.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	50.000.000,00	-	173.400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.406.429.000,00	1.941.498.814,00	4.121.251.727,00
Belanja Makanan dan Minuman	25.075.974.000,00	22.426.903.347,00	28.192.439.348,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	611.388.000,00	596.416.250,00	804.566.500,00
Belanja Pakaian Kerja	883.002.000,00	868.153.000,00	1.180.538.200,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.212.303.000,00	2.170.593.300,00	2.038.881.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	39.954.885.000,00	33.367.002.466,00	55.544.665.587,00
Belanja Pemeliharaan	30.668.712.000,00	29.850.343.845,00	70.282.505.280,00
Belanja Jasa Konsultansi	1.351.841.000,00	1.339.212.000,00	2.924.635.200,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	253.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.890.016.000,00	1.611.112.552,00	4.688.817.614,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	73.931.793.000,00	65.702.238.234,00	64.622.575.319,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa	12.784.410.000,00	12.230.586.853,00	9.846.176.519,00
Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa	488.130.000,00	458.818.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	158.821.328.000,00	157.421.515.823,00	155.643.969.364,00
Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	558.415.000,00	449.420.000,00	1.863.950.000,00
Jumlah	**531.552.721.000,00**	**501.534.677.443,00**	**566.575.338.765,00**

Dari 24 jenis belanja yang termasuk kategori Belanja Barang dan Jasa, terdapat 3 (tiga) rekening belanja yang masing-masing memberikan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, Belanja Jasa Kantor dan Belanja Barang dan Jasa- Dana BLUD, dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,10 persen, 15,96 persen, dan 31,39 persen.

Penjelasan rinci atas masing-masing kelompok belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis tahun 2020 sebesar Rp13.740.542.182,00 atau 92,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp 14.804.420.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.296.637.672,00 atau turun 14,32 persen. Penurunan ini selaras

dengan penurunan anggaran Belanja Bahan Pakai Habis tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*.

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis tersebut berkontribusi terhadap 2,74 persen dari total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Bahan Pakai Habis dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Alat Tulis Kantor	5.326.773.000,00	5.164.389.954,00	5.335.177.424,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.131.693.000,00	1.015.522.556,00	1.302.247.008,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.367.000,00	305.167.500,00	296.715.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	818.099.000,00	712.570.224,00	642.472.536,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.222.735.000,00	769.245.308,00	1.077.685.112,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.425.000,00	24.450.000,00	25.500.800,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	92.838.000,00	77.340.500,00	77.906.900,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	228.356.000,00	220.843.500,00	436.163.375,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	430.197.000,00	418.951.300,00	543.659.700,00
Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.800.000.000,00	1.794.836.240,00	2.035.806.225,00
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.957.789.000,00	1.905.710.745,00	2.770.239.404,00
Belanja cenderamata / karangan bunga / plakat	711.975.000,00	697.732.875,00	937.143.370,00
Belanja Alat Peraga/praktek Sekolah	728.173.000,00	633.781.480,00	556.463.000,00
Jumlah	**14.804.420.000,00**	**13.740.542.182,00**	**16.037.179.854,00**

(2) Belanja Bahan/Material

Realisasi Belanja Bahan/Material tahun 2020 sebesar Rp48.138.279.607,00 atau 97,01 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp 49.620.197.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.388.619.149,00 atau naik 30,99 persen. Rincian realisasi Belanja Bahan/Material tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Bahan/Material Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.615.359.000,00	3.285.559.400,00	6.225.009.500,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman	476.385.000,00	455.982.000,00	705.866.100,00
Belanja Bahan obat-obatan	6.200.167.000,00	6.121.154.411,00	14.272.228.296,00
Belanja Bahan Kimia	399.157.000,00	398.730.800,00	330.573.000,00
Belanja Bahan Percontohan	537.841.000,00	519.026.250,00	918.635.150,00
Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	7.165.599.000,00	6.862.764.426,00	3.164.542.628,00
Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	69.581.000,00	67.210.000,00	79.622.000,00
Belanja Penghargaan	126.168.000,00	54.903.000,00	374.964.950,00
Belanja Bahan Bibit Ikan	32.500.000,00	32.500.000,00	146.750.000,00
Belanja Bahan Pangan	28.605.927.000,00	28.055.070.185,00	6.192.718.809,00
Belanja Perlengkapan Kantor	900.551.000,00	871.585.500,00	3.994.271.400,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bahan Laboratorium	1.490.962.000,00	1.413.793.635,00	344.478.625,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.615.359.000,00	3.285.559.400,00	6.225.009.500,00
Jumlah	**49.620.197.000,00**	**48.138.279.607,00**	**36.749.660.458,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis belanja yang termasuk kategori Belanja Bahan/Material yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah Belanja Bahan Pangan, yaitu meningkat sebesar Rp21.862.351.376,00 atau naik 353,03 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Kenaikan realisasi Belanja Bahan Pangan disebabkan karena naiknya anggaran Belanja Bahan Pangan yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*.

(3) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Jasa Kantor tahun 2020 sebesar Rp80.057.582.462,00 atau 98,16 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi tersebut berkontribusi terhadap 15,96 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Jasa Kantor disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.66 Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Telepon	413.500.000,00	299.677.928,00	310.702.402,00
Belanja Air	675.488.000,00	460.674.352,00	567.112.749,00
Belanja Listrik	15.778.357.000,00	14.638.633.249,00	13.703.644.828,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	-	-	3.102.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	275.614.000,00	266.394.500,00	297.458.800,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.793.311.000,00	1.652.495.793,00	1.529.642.409,00
Belanja Paket/Pengiriman	22.076.000,00	7.816.200,00	41.858.138,00
Belanja Sertifikasi	765.301.000,00	361.070.920,00	84.948.240,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	607.969.000,00	516.359.183,00	5.304.073.714,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.887.766.000,00	6.348.346.469,00	13.082.262.048,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.140.864.000,00	2.710.360.321,00	98.341.292,00
Belanja Jasa Dokumentasi	135.961.000,00	120.340.500,00	173.189.500,00
Belanja Jasa Publikasi	2.516.554.000,00	2.211.755.930,00	2.415.057.777,00
Belanja Pengobatan Pasien Tidak Mampu	-	-	15.259.231.555,00
Belanja Jasa Akomodasi	320.980.000,00	130.869.964,00	256.080.720,00
Belanja Jasa Dekorasi	277.103.000,00	181.279.900,00	508.984.864,00
Belanja Jasa Pengamanan	867.260.000,00	781.950.000,00	870.812.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.236.913.000,00	2.201.367.000,00	3.158.220.000,00
Belanja Jasa Hiburan / Rias	715.423.000,00	658.550.000,00	1.616.130.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.867.632.000,00	1.780.380.000,00	1.300.430.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.942.665.000,00	4.785.395.000,00	4.317.897.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	2.999.090.000,00	2.961.835.000,00	2.206.870.000,00
Belanja Jasa Pengemudi	464.000.000,00	449.600.000,00	386.650.000,00
Belanja Jasa Operator	6.461.250.000,00	6.242.490.000,00	5.361.220.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemungut Pendapatan	66.000.000,00	59.400.000,00	66.000.000,00
Belanja Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.512.150.000,00	13.984.100.000,00	13.135.883.000,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan	5.347.900.000,00	5.306.700.000,00	4.907.400.000,00
Belanja Jasa Medis	5.463.972.000,00	10.939.740.253,00	846.514.283,00
Jumlah	**81.555.099.000,00**	**80.057.582.462,00**	**91.809.717.319,00**

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2020 menurun cukup signifikan yaitu sebesar Rp11.752.134.857,00 atau turun 12,80 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Belanja Listrik memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2020 yaitu sebesar 18,29 persen. Sedangkan Belanja Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 17,47 persen.

Belanja jasa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan belanja dalam rangka pemberian kompensasi/honor kepada para Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga yang belum diangkat sebagai GTT Bupati. Total GTT dan PTT yang mendapatkan alokasi bantuan honorarium terdiri dari GTT TK, GTT/Tutor PAUD, GTT SD/MI, GTT SMP/MTs.

Sedangkan kompensasi/honor bagi para GTT dan PTT yang sudah diangkat dengan keputusan Bupati, dibebankan pada kelompok Belanja Pegawai, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap.

(4) Belanja Premi Asuransi

Realisasi Premi Asuransi tahun 2020 sebesar Rp15.632.799.933,00 atau hanya 86,04 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBDP Tahun 2020 sebesar Rp18.169.451.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu naik sebesar Rp14.913.795.032,00 atau naik 2.074,23 persen.

Realisasi Belanja Premi Asuransi tersebut berkontribusi terhadap 3,12 persen dari total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Premi Asuransi dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.67 Realisasi Belanja Premi Asuransi Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	17.119.190.000,00	15.044.311.121,00	37.995.150,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	817.072.000,00	504.986.000,00	675.154.000,00
Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	109.228.000,00	38.707.666,72	5.855.751,00
Belanja Premi Asuransi Kematian	123.961.000,00	44.795.145,28	-
Jumlah	**18.169.451.000,00**	**15.632.799.933,00**	**719.004.901,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Belanja Premi Asuransi Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp15.006.315.971,00 atau naik 39.495,35 persen dari realisasi tahun 2019. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan karena di tahun 2020 iuran BPJS untuk masyarakat kurang mampu dianggarkan pada Belanja Premi Asuransi Kesehatan

dari yang sebelumnya di tahun 2019 dianggarkan pada Belanja Pengobatan Pasien Tidak Mampu yang termasuk dalam kategori Belanja Jasa Kantor.

(5) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Perawaran Kendaraan Bermotor tahun 2019 sebesar Rp7.832.207.041,00 atau hanya 84,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp9.242.955.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.424.668.020,00 atau turun 23,64 persen.

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tersebut berkontribusi terhadap 1,56 persen dari total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Jasa Service	747.328.000,00	653.611.818,00	894.058.164,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	1.422.169.000,00	1.320.177.782,00	2.071.166.950,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.510.414.000,00	5.430.346.651,00	6.861.836.646,00
Belanja Jasa KIR	4.708.000,00	932.820,00	1.903.900,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	309.229.000,00	214.408.226,00	208.699.926,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	249.107.000,00	212.729.744,00	219.209.475,00
Jumlah	**9.242.955.000,00**	**7.832.207.041,00**	**10.256.875.061,00**

(6) Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2020 sebesar Rp4.479.681.234,00 atau 92,86 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp4.823.961.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.737.385.280,00 atau turun 37,93 persen.

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan tersebut berkontribusi sebesar 0,89 persen dari total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.69 Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Cetak	2.981.817.000,00	2.820.966.509,00	4.877.559.789,00
Belanja Penggandaan	1.842.144.000,00	1.658.714.725,00	2.339.506.725,00
Jumlah	**4.823.961.000,00**	**4.479.681.234,00**	**7.217.066.514,00**

(7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2020 sebesar Rp204.480.000,00 atau 63,77 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp320.652.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp336.455.000,00 atau turun 62,20 persen.

Rincian Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.70 Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	220.130.000,00	175.280.000,00	474.485.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	91.372.000,00	20.050.000,00	55.500.000,00
Belanja Sewa Tanah	6.150.000,00	6.150.000,00	10.950.000,00
Jumlah	**320.652.000,00**	**204.480.000,00**	**540.935.000,00**

(8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 sebesar Rp1.015.290.000,00 atau 76,49 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.327.360.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp47.738.000,00 atau turun 4,49 persen. Belanja Sewa Sarana Mobilitas ini merupakan sewa kendaraan dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,20 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.71 Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.327.360.000,00	1.015.290.000,00	1.063.028.000,00
Jumlah	**1.327.360.000,00**	**1.015.290.000,00**	**1.063.028.000,00**

(9) Belanja Sewa Alat Berat

Realisasi Belanja Sewa Alat Berat tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp173.400.000,00 atau turun 100,00. Rincian Belanja Sewa Alat Berat tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.72 Realisasi Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Sewa Excavator	50.000.000,00	-	173.400.000,00
Jumlah	**50.000.000,00**	**-**	**173.400.000,00**

(10) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020 sebesar Rp1.941.498.814,00 atau 80,68 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp2.406.429.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.179.752.913,00 atau turun 52,89 persen.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ini merupakan belanja sewa berbagai perlengkapan maupun peralatan kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga seperti sewa meja dan kursi, sound system, panggung, tenda dan peralatan lainnya. Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,39 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020.

Rincian Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73 Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Sewa Meja Kursi	270.531.000,00	193.927.500,00	544.574.500,00
Belanja Sewa Proyektor	25.000.000,00	15.000.000,00	48.000.000,00
Belanja Sewa Generator	66.500.000,00	61.500.000,00	166.620.000,00
Belanja Sewa Tenda	688.628.000,00	628.988.000,00	1.361.698.000,00
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	43.000.000,00	6.000.000,00	176.120.000,00
Belanja Sewa Sound System	607.605.000,00	523.485.000,00	849.205.000,00
Belanja Sewa Peralatan Praktek	17.628.000,00	17.628.000,00	1.346.000,00
Belanja Sewa Panggung	159.852.000,00	53.262.000,00	422.967.500,00
Belanja Sewa Peralatan Lainnya	527.685.000,00	441.708.314,00	550.720.727,00
Jumlah	**2.406.429.000,00**	**1.941.498.814,00**	**4.121.251.727,00**

(11) Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman tahun 2020 sebesar Rp22.426.903.347,00 atau 89,44 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp25.075.974.000,00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.765.536.001,00 atau turun 20,45 persen.

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,47 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Makanan dan Minuman tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.480.000,00	22.310.000,00	23.823.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.399.163.000,00	12.268.218.425,00	18.875.673.174,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.089.025.000,00	5.587.669.422,00	7.023.264.774,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	621.000,00	621.000,00	33.875.000,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Harian	4.542.290.000,00	4.539.879.500,00	2.203.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	22.395.000,00	8.205.000,00	32.178.000,00
Jumlah	**25.075.974.000,00**	**22.426.903.347,00**	**28.192.439.348,00**

(12) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 sebesar Rp596.416.250,00 atau 97,55 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp611.388.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp208.150.250,00 atau turun 25,87 persen.

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,12 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.75 Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	50.000.000,00	37.956.250,00	34.836.500,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	112.500.000,00	112.500.000,00	148.500.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.600.000,00	53.460.000,00	144.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	305.288.000,00	302.500.000,00	432.230.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	90.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah	**611.388.000,00**	**596.416.250,00**	**804.566.500,00**

(13) Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 sebesar Rp868.153.000,00 atau 98,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp883.002.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp312.385.200,00 atau turun 26,46 persen.

Realisasi Belanja Pakaian Kerja tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Realisasi Belanja Pakaian Kerja Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	883.002.000,00	868.153.000,00	1.180.538.200,00
Jumlah	**883.002.000,00**	**868.153.000,00**	**1.180.538.200,00**

(14) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu tahun 2020 sebesar Rp2.170.593.300,00 atau 98,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp2.212.303.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp131.712.300,00 atau naik 6,46 persen.

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,43 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Realisasi Belanja Pakaian Khusus Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pakaian adat daerah	17.500.000,00	11.525.000,00	83.800.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	670.153.000,00	651.194.800,00	308.647.500,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.135.800.000,00	1.122.663.500,00	715.337.650,00
Belanja Pakaian Seragam Khusus	231.990.000,00	228.490.000,00	503.425.000,00
Belanja Pakaian Seragam Organisasi	156.860.000,00	156.720.000,00	427.670.850,00
Jumlah	**2.212.303.000,00**	**2.170.593.300,00**	**2.038.881.000,00**

(15) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp33.367.002.466,00 atau 83,51 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp39.954.885.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp22.177.663.121,00 atau turun 39,93 persen. Penurunan tersebut selaras dengan penurunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang disebabkan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi *covid-19*.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tersebut memberikan kontribusi sebesar 6,65 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.78 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.504.202.000,00	14.570.747.650,00	19.408.225.543,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.450.683.000,00	18.796.254.816,00	36.105.482.084,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	30.957.960,00
Jumlah	**39.954.885.000,00**	**33.367.002.466,00**	**55.544.665.587,00**

(16) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp29.850.343.845,00 atau 97,33 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut menurun sebesar Rp40.432.161.435,00 atau turun 57,53 persen.

Realisasi Belanja Pemeliharaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 5,95 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Pemeliharaan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.970.000,00	15.767.000,00	77.751.362,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.537.910.000,00	3.503.176.558,00	14.748.939.600,00
Belanja Pemeliharaan Jalan	16.549.627.000,00	16.352.217.165,00	39.527.742.930,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	275.799.000,00	253.125.250,00	214.484.022,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.084.043.000,00	1.020.182.550,00	1.235.339.375,00
Belanja Pemeliharaan Mebelair	88.330.000,00	84.550.000,00	101.818.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	10.580.000,00	5.158.000,00	1.375.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	108.380.000,00	97.638.500,00	24.776.725,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	-	-	8.133.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan	188.761.000,00	154.104.800,00	119.313.366,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman	102.655.000,00	100.851.750,00	92.782.500,00
Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	608.709.000,00	607.911.900,00	730.137.650,00
Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	238.135.000,00	237.935.000,00	224.710.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	441.020.000,00	163.191.045,00	296.222.200,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	1.500.000,00	1.272.800,00	45.297.000,00
Belanja Pemeliharaan Drainase	1.585.627.000,00	1.575.887.507,00	1.733.555.500,00
Belanja Pemeliharaan Mesin Industri	7.000.000,00	6.475.000,00	21.980.100,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.187.492.000,00	3.180.585.820,00	7.875.436.000,00
Belanja Pemeliharaan Trotoar	436.800.000,00	409.710.000,00	326.170.000,00
Belanja Pemeliharaan SIM	100.000.000,00	50.000.000,00	24.970.000,00
Belanja Pemeliharaan Jembatan	2.100.374.000,00	2.030.603.200,00	2.841.569.950,00
Jumlah	**30.668.712.000,00**	**29.850.343.845,00**	**70.282.505.280,00**

(17) Belanja Jasa Konsultansi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi tahun 2020 sebesar Rp1.339.212.000,00 atau 99,07 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.351.841.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.585.423.200,00 atau turun 54,21 persen.

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,27 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Jasa Konsultansi tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.501.000,00	992.163.000,00	2.004.045.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	351.340.000,00	347.049.000,00	920.590.000,00
Jumlah	**1.351.841.000,00**	**1.339.212.000,00**	**2.924.635.200,00**

(18) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2020 tidak ada realisasi dan tidak dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp253.500.000,00 atau turun 100,00 persen.

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,98 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2019. Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.81 Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	-	-	115.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	-	-	130.000.000,00
Belanja Beasiswa Kejar Paket	-	-	8.500.000,00
Jumlah	**-**	**-**	**253.500.000,00**

(19) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 sebesar Rp1.611.112.552,00 atau 85,24 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp1.890.016.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.077.705.062,00 atau turun 65,64 persen. Penurunan tersebut selaras dengan penurunan anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020.

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,32 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Rincian Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.82 Realisasi Belanja Kursus Pelatihan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	955.495.000,00	830.674.896,00	2.711.516.422,00
Belanja Bimbingan Teknis	782.861.000,00	778.309.906,00	1.823.408.692,00
Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	151.660.000,00	2.127.750,00	153.892.500,00
Jumlah	**1.890.016.000,00**	**1.611.112.552,00**	**4.688.817.614,00**

(20) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp65.702.238.234,00 atau 88,87 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp73.931.793.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.079.662.915,00 atau naik 1,67 persen.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,10 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	73.931.793.000,00	65.702.238.234,00	64.622.575.319,00
Jumlah	**73.931.793.000,00**	**65.702.238.234,00**	**64.622.575.319,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS pada 459 Sekolah Dasar sebesar Rp44.447.132.949,00 dan 60 SMP Negeri total Rp20.359.105.282,00 serta Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp896.000.000,00 yang merupakan belanja pendampingan BOS.

Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.84 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020

Uraian	Dana BOS	BOS Pendamping	Total
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bahan Pakai Habis	8.199.347.610,00	297.262.200,00	8.496.609.810,00
Belanja Bahan/Material	2.898.684.320,00	50.200.300,00	2.948.884.620,00
Belanja Jasa Kantor	23.690.111.263,00	175.315.000,00	23.865.426.263,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.582.823,00	-	7.582.823,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	10.162.182.179,00	19.632.100,00	10.181.814.279,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.215.000,00	-	2.215.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	332.180.000,00	-	332.180.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.025.000,00	1.705.000,00	71.730.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	7.313.067.297,00	-	7.313.067.297,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	262.994.500,00	28.467.000,00	291.461.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.879.682.388,00	1.695.000,00	2.881.377.388,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.227.796.420,00	-	1.227.796.420,00
Belanja Pemeliharaan	7.760.369.434,00	321.723.400,00	8.082.092.834,00
Jumlah	**64.806.238.234,00**	**896.000.000,00**	**65.702.238.234,00**

(21) Belanja Hibah Barang atau Jasa

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa merupakan belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat yang diantaranya berupa:

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
- Pengadaan Alat Kesehatan
- Pengadaan Sistem Air Minum Desa
- Pengadaan Paket Budidaya Gurame, Nila dan Lele
- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
- Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
- Pengadaan Alat Pertanian
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan DAM Parit Desa
- Pembangunan Sumur Pantek

- Pengadaan Hewan Ternak

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa Tahun 2020 sebesar Rp12.230.586.853,00 atau 95,67 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp12.784.410.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.384.410.334,00 atau naik 24,22 persen.

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,44 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.85 Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.784.410.000,00	12.230.586.853,00	9.846.176.519,00
Jumlah	**12.784.410.000,00**	**12.230.586.853,00**	**9.846.176.519,00**

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa disajikan pada kelompok Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan penganggaran dalam APBD karena di dalam Lampiran IV Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Belanja Barang atau Jasa pada kelompok Belanja Langsung termasuk di dalamnya adalah Belanja Hibah Barang atau Jasa dalam Kodifikasi Akun Anggaran, di-*mapping* seluruhnya ke dalam Belanja Barang atau Jasa pada kelompok Belanja Operasi dalam Kodifikasi Akun Laporan Realisasi Anggaran.

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa tahun 2020 per SKPD sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.86 Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa Per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.586.250.000,00	1.560.548.910,00	150.000.000,00
Dinas Kesehatan	200.000.000,00	198.936.313,00	-
UPTD Puskesmas Bojong	3.850.000,00	3.850.000,00	-
Dinas Perumahan dan Permukiman	2.602.924.000,00	2.216.978.167,00	2.786.504.000,00
Dinas SosdaldukKBP3A	40.375.000,00	39.250.000,00	162.799.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.151.144.000,00	1.134.110.500,00	1.617.140.421,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	49.094.000,00
Dinas Perhubungan	100.000.000,00	99.930.000,00	159.953.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	457.100.000,00	457.100.000,00	70.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	20.000.000,00
Dinas Pertanian	5.146.047.000,00	5.134.624.157,00	3.502.270.098,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.044.236.000,00	935.054.806,00	767.675.000,00
Bagian Umum - Sekretariat Daerah	30.000.000,00	27.720.000,00	-
Kelurahan Bojong	8.650.000,00	8.650.000,00	9.500.000,00
Kelurahan Kedungmenjangan	20.490.000,00	20.490.000,00	17.150.000,00
Kelurahan Bancar	16.144.000,00	16.144.000,00	18.360.000,00
Kelurahan Purbalingga Wetan	45.850.000,00	45.850.000,00	96.075.000,00
Kelurahan Purbalingga Kulon	4.500.000,00	4.500.000,00	146.982.000,00
Kelurahan Purbalingga Kidul	74.500.000,00	74.500.000,00	97.900.000,00
Kelurahan Purbalingga Lor	18.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Kelurahan Penambongan	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelurahan Kandanggampang	40.040.000,00	40.040.000,00	-
Kelurahan Kembaran Kulon	26.010.000,00	26.010.000,00	33.590.000,00
Kelurahan Wirasana	24.000.000,00	24.000.000,00	30.384.000,00
Kelurahan Mewek	34.980.000,00	34.980.000,00	5.000.000,00
Kelurahan Karangmanyar	34.750.000,00	34.750.000,00	-
Kelurahan Kalikabong	5.070.000,00	5.070.000,00	-
Kelurahan Karangsentul	50.000.000,00	50.000.000,00	85.800.000,00
Jumlah	**12.784.410.000,00**	**12.230.586.853,00**	**9.846.176.519,00**

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp5.250.000.000. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, DAU Tambahan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dan salah satu bentuk penggunaan DAU Tambahan tersebut adalah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang akan diserahkan kepada lembaga yang ada di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

(22) Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa tahun 2020 sebesar Rp458.818.500,00 atau 94,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp488.130.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp458.818.500,00.

Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa ini terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman, dan DINSOSDALDUKKBP3A. Realisasi tersebut berupa bantuan instalasi listrik rumah swadaya dan bantuan alat bantu kesehatan untuk para penyandang *disabilitas* di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,09 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang Jasa tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.87 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	488.130.000,00	458.818.500,00	-
Jumlah	**488.130.000,00**	**458.818.500,00**	**-**

(23) Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tahun 2020 sebesar Rp157.421.515.823,00 atau 99,12 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp158.821.328.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.777.546.459,00 atau naik 1,14 persen.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut memberikan kontribusi sebesar 31,39 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2020. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.88 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	158.821.328.000,00	157.421.515.823,00	155.643.969.364,00
Jumlah	**158.821.328.000,00**	**157.421.515.823,00**	**155.643.969.364,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BLUD pada 21 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp157.421.515.823,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.89 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2020

Uraian	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.239.162,80
Belanja Bahan/Material	34.212.606.506,00
Belanja Jasa Kantor	106.197.075.069,00
Belanja Premi Asuransi	415.065.713,20
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	552.573.528,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.486.320,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.390.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.286.400,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.829.375,00
Belanja Makanan dan Minuman	3.997.914.234,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	86.858.000,00
Belanja Pakaian Kerja	220.481.800,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	338.941.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	371.624.344,00
Belanja Pemeliharaan	5.775.850.552,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	127.384.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	348.387.986,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	21.521.833,00
Jumlah	**157.421.515.823,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD per SKPD tahun 2020 disajikan pada Lampiran 5.9.

(24) Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Realisasi Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 sebesar Rp449.420.000,00 atau 80,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.414.530.000,00 atau turun 75,89 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Realisasi terbesar Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp227.600.000,00 atau 51,44 persen dari total realisasi Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Realisasi belanja tersebut merupakan hadiah-hadiah perlombaan terutama dalam bidang Beasiswa Prestasi.

Rincian Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.10.

V.1.b.1).c). Belanja Subsidi Rp2.378.814.568,00

Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp2.378.814.568,00 atau 99,79 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp2.383.815.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.392.314.722,00 atau naik 141,14 persen dibanding realisasi Belanja Subsidi tahun 2019. Realisasi Belanja Subsidi tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.90 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Subsidi	1.383.815.000,00	1.383.814.568,00	-
Belanja Subsisi Bunga	1.000.000.000,00	995.000.000,00	986.499.846,00
Jumlah	**2.383.815.000,00**	**2.378.814.568,00**	**986.499.846,00**

(1) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tersebut merupakan belanja subsidi bagi pelanggan air bersih yang disalurkan melalui PDAM. Belanja Subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi *covid-19.*

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2020 sebesar Rp1.383.814.568,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp1.383.815.000,00.

(2) Belanja Subsidi Bunga

Realisasi Belanja Subsidi Bunga tahun 2020 sebesar Rp995.000.000,00 atau 99,50 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Subsidi Bunga tahun 2019, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.500.154,00 atau naik 0,86 persen.

Belanja Subsidi Bunga tersebut merupakan belanja subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui 15 Lembaga Keuangan Penyalur. Rincian penyaluran Belanja Subsidi per masing-masing lembaga penyalur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91 Daftar Lembaga Penyalur Bantuan Subsidi Bunga Tahun 2020

No	Lembaga Penyalur	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	205.000.000,00
2	PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	180.000.000,00
3	Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga	145.000.000,00
4	PT BKK Jateng Cabang Purbalingga (Perseroda)	50.000.000,00

No	Lembaga Penyalur	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
5	BMT Mentari Bumi	87.500.000,00
6	BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	50.000.000,00
7	BMT Amanah Sinduraja	12.500.000,00
8	BMT Marhaban Rembang	50.000.000,00
9	BMT Buana Nawa Kartika	45.000.000,00
10	BMT Emas Purbalingga	50.000.000,00
11	BMT Syariah Wanita Islam	20.000.000,00
12	KJKS BTM Purbalingga	50.000.000,00
13	Koperasi LKM-A PUAP "Subur "	30.000.000,00
14	Kop LKM-A PUAP "Mugi Rahayu"	10.000.000,00
15	Kopontren Nurul Barokah	10.000.000,00
	Jumlah	**995.000.000,00**

V.1.b.1).d). Belanja Hibah_____Rp78.810.376.629,00

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial pada Kabupaten Purbalingga diatur dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

Lebih lanjut, alokasi belanja hibah tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/10 Tahun 2020 tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/331 Tahun 2020.

Realisasi Belanja Hibah tahun 2020 sebesar Rp78.810.376.629,00 atau 99,37 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp79.307.353.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Hibah tahun 2019, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52.568.555.186,00 atau naik 200,32 persen.

Peningkatan tersebut didorong dengan adanya peningkatan realisasi pada semua rekening belanja yang termasuk kategori Belanja Hibah. Secara agregat realisasi Belanja Hibah tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 5,79 persen terhadap total Belanja Operasional dan 5,25 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2020. Rincian realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.92 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah kepada Pemerintah	2.574.757.000,00	2.574.757.000,00	243.200.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.508.000.000,00	21.180.323.629,00	13.539.221.443,00
Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.138.496.000,00	41.138.496.000,00	190.000.000,00
Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	10.554.000.000,00	10.384.800.000,00	10.286.700.000,00
Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	3.532.100.000,00	3.532.000.000,00	1.982.700.000,00
Jumlah	**79.307.353.000,00**	**78.810.376.629,00**	**26.241.821.443,00**

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah

Hibah kepada Pemerintah merupakan belanja hibah kepada satuan kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2020 sebesar Rp2.574.757.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.331.557.000,00 atau naik 958,70 persen dari realisasi tahun 2019.

Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.93 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hibah kepada Kodim 0702	-	-	30.000.000,00
Hibah kepada Pangkalan TNI AU JB Soedirman	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00
Hibah kepada Polres Purbalingga	2.494.757.000,00	2.494.757.000,00	183.200.000,00
Jumlah	**2.574.757.000,00**	**2.574.757.000,00**	**243.200.000,00**

- Belanja Hibah kepada Pangkalan TNI AU JB Soedirman, merupakan hibah dalam rangka pelaksanaan bakti sosial dan rehab masjid Al-Ikhlas Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman .
- Belanja Hibah kepada Polres Purbalingga, merupakan hibah dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Lebaran, Natal tahun 2020 dan tahun Baru 2021 serta pengamanan terpadu lingkup Polres Purbalingga.

(2) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 sebesar Rp21.180.323.629,00 atau 98,48 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp21.508.000.000,00**.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.641.102.186,00 atau naik 56,44 persen.

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.94 Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Keagamaan	9.212.000.000,00	9.095.000.000,00	2.998.500.000,00
Urusan Pendidikan	8.330.000.000,00	8.330.000.000,00	6.363.000.000,00
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
Urusan Sosial	705.000.000,00	680.752.629,00	863.632.443,00
Urusan Koperasi dan UMKM	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Urusan Kebudayaan	144.500.000,00	124.500.000,00	47.000.000,00
Urusan Pemuda dan Olah Raga	2.294.000.000,00	2.158.697.000,00	2.520.000.000,00
Urusan Otda & Pem Umum	342.500.000,00	331.374.000,00	277.089.000,00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	-	-	280.000.000,00
Urusan Pertanian	320.000.000,00	300.000.000,00	105.000.000,00
Jumlah	**21.508.000.000,00**	**21.180.323.629,00**	**13.539.221.443,00**

(a) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Keagamaan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Keagamaan tahun 2020 adalah sebesar Rp9.095.000.000,00 atau 98,73 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp9.212.000.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Keagamaan tahun 2019, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.6.096.500.000,00 atau naik 203,32 persen.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Keagamaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 42,94 persen dari total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Keagamaan ini merupakan hibah yang diberikan kepada beberapa lembaga keagamaan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.95 Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BAITUL MUSLIMIN	-	-	50.000.000,00
Bantuan Masjid dan Musholla	1.841.000.000,00	1.776.000.000,00	1.443.500.000,00
BAZNAS Purbalingga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
BKSAG	25.000.000,00	-	-
IPHI	-	-	100.000.000,00
Kelompok Pengajian Al-Munawarah	35.000.000,00	35.000.000,00	-
LAZIZMU	-	-	75.000.000,00
LDII Purbalingga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Madrasah Diniyah	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	180.000.000,00
Majelis Taklim	86.000.000,00	86.000.000,00	-
MUI	137.500.000,00	137.500.000,00	150.000.000,00
MWC NU	495.000.000,00	495.000.000,00	-

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
NU CARE LAZIZNU	-	-	75.000.000,00
Panti Asuhan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
PC Nahdatul Ulama Purbalingga	600.000.000,00	600.000.000,00	-
PD Muhamadiyah Purbalingga	715.000.000,00	715.000.000,00	70.000.000,00
Pondok Pesantren	2.697.500.000,00	2.677.500.000,00	80.000.000,00
TPQ	963.000.000,00	963.000.000,00	675.000.000,00
Lembaga Keagamaan Lainnya	387.000.000,00	380.000.000,00	-
Jumlah	**9.212.000.000,00**	**9.095.000.000,00**	**2.998.500.000,00**

(b) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pendidikan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan sebesar Rp8.330.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.967.000.000,00 atau naik 30,91 persen.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pendidikan memberikan kontribusi sebesar 39,33 persen dari total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Hibah ini diberikan kepada beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.96 Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pendidikan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dewan Pendidikan Purbalingga	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Lembaga Pendidikan Setingkat PAUD/TK, SD/MI, , SMP/MTs dan SMA/MAN	7.855.000.000,00	7.855.000.000,00	5.608.000.000,00
Yayasan Harum	-	-	100.000.000,00
Yayasan Ardhya Garini Pengcab Lanud JB Soedirman	-	-	125.000.000,00
HIMPAUDI Purbalingga	-	-	105.000.000,00
Kwartir Cabang Pramuka Purbalingga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Badan Musyawarah Perguruan Swasta	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Jumlah	**8.330.000.000,00**	**8.330.000.000,00**	**6.363.000.000,00**

(c) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 adalah sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami kenaikan Rp75.000.000,00 atau naik 300,00 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontribusi sebesar 0,47 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini merupakan hibah yang diberikan kepada IKD Purbalingga.

(d) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Sosial

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Sosial tahun 2020 sebesar Rp680.752.629,00 atau 96,56 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp182.879.814,00 atau turun 21,18 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontribusi sebesar 3,21 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini diberikan kepada beberapa organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.97 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Sosial Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Arta Bangga	20.000.000,00	20.000.000,00	-
DPD PPNI Kab. Purbalingga	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Komisi Penanggulangan Aids Kab. Purbalingga	200.000.000,00	175.752.629,00	258.632.443,00
Paguyuban Karya Sentosa Desa Jetis Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Paguyuban Kematian Rekso Layon Dusun 1 Desa Jetis Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Paguyuban Kematian Rekso Layu Dusun 3 Desa Jetis Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Paguyuban Mardi Layon "Margi Rahayu" Dusun 2 Desa Jetis Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Paguyuban Pedagang Keliling Rizky Jaya RT 01 RW 02 Desa Jompo Kec Kalimanah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Palang Merah Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Panti Asuhan Griya Al-Falah Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Prosa Ayfam Kab. Purbalingga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Perkumpulan Orang Tua Penderita Thalasemia (POPTI)	-	-	50.000.000,00
Perkumpulan Usaha Pijat Tuna Netra (PUSPITA)	-	-	30.000.000,00
Yayasan Arsakusuma	-	-	200.000.000,00
Yayasan Pilar	-	-	50.000.000,00
Yayasan Purbalingga Sejahtera Perwira	-	-	25.000.000,00
Jumlah	**705.000.000,00**	**680.752.629,00**	**863.632.443,00**

(e) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Koperasi dan UMKM

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Koperasi dan UMKM tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut tidak mengalami perubahan.

Realisasi belanja hibah memberikan kontribusi sebesar 0,28 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini

diberikan kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA) Kabupaten Purbalingga.

(f) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Kebudayaan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Kebudayaan tahun 2020 sebesar Rp.124.500.000,00 atau 86,16 persen dari anggaran yang telah di tetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp77.500.000,00 atau naik 164,89 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontrisubsi sebesar 0,59 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini diberikan kepada lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan maupun kepada grup kesenian yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.98 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Kebudayaan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
HARPI	-	-	20.000.000,00
Grup Sapto Rahayu Desa Karangklesem Kec. Kutasari	-	-	7.000.000,00
Grup Tektek Punji Kastala RT 14 RW 05 Desa Jetis Kec. Kemangkon	-	-	10.000.000,00
Dewan Kesenian	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Group Kuda Kepang Sekar Manunggal Budaya Desa Jetis Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Group Kuda Kepang Turonggo Mangun Jaya RT 04 RW 02 Desa Bakulan Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Group Tek Tek Kobra RT 3 RW 5 Desa Toyareka Kec. Kemangkon	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Lembaga Kebudayaan Konsep	20.000.000,00	-	-
Mannahadh Fannan Solidarity Desa Kedarpan Kec. Kejobong	24.500.000,00	24.500.000,00	-
Paguyuban Keluarga Ebeg Purbalingga (Paku Beling) Desa Kembaran Wetan Kec. Kaligondang	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Sorot Nuswantoro	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Grup Tektek Putra Dewa RT 13 RW 05 Desa Jetis Kec. Kemangkon	-	-	10.000.000,00
Jumlah	**144.500.000,00**	**124.500.000,00**	**47.000.000,00**

(g) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemuda dan Olah Raga

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemuda dan Olah Raga tahun 2020 sebesar Rp2.158.697.000,00 atau 94,10 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp361.303.000,00 atau turun 14,34 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontribusi sebesar 10,19 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini diberikan kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang

kepemudaan dan olah raga yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.99 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
KONI	2.000.000.000,00	1.917.747.000,00	2.000.000.000,00
GMBI	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Sanggalangit	20.000.000,00	20.000.000,00	-
I-Vojet Desa Jetis Kec. Kemangkon	6.000.000,00	6.000.000,00	-
KNPI	125.000.000,00	125.000.000,00	-
Krandegan Volley Club Desa Karangtengah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
KVC Volley Club Desa Toyareka	6.000.000,00	6.000.000,00	-
PB Edelweis Desa Jetis	6.000.000,00	6.000.000,00	-
Karangtaruna	-	-	350.000.000,00
MPC Pemuda Pancasila	-	-	50.000.000,00
Senam Sehat Indonesia	-	-	10.000.000,00
Karangtaruna Taruna Bakti Desa Jetis Kec. Kemangkon	-	-	10.000.000,00
NPC	100.000.000,00	46.950.000,00	100.000.000,00
Jumlah	**2.294.000.000,00**	**2.158.697.000,00**	**2.520.000.000,00**

(h) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum tahun 2020 sebesar Rp331.374.000,00 atau 96,75 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka ini meningkat sebesar Rp54.285.000,00 atau naik 19,59 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.100 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Otda dan Pemerintahan Umum Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
KORPRI	75.000.000,00	73.874.000,00	190.889.000,00
PWRI	-	-	86.200.000,00
ORGANDA	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Paguyuban Bhakti Praja	10.000.000,00	-	-
Paguyuban Mawar Biru	37.500.000,00	37.500.000,00	-
PIVERI	10.000.000,00	10.000.000,00	-
DHC 45	50.000.000,00	50.000.000,00	-
LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	-
PEPABRI	10.000.000,00	10.000.000,00	-
PP POLRI	10.000.000,00	10.000.000,00	-
PWI	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Jumlah	**342.500.000,00**	**331.374.000,00**	**277.089.000,00**

(i) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tidak ada realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020. Hal ini dikarenakan Belanja Hibah tersebut tidak dianggarkan pada APBD-P tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp280.000.000,00 atau 100,00 persen. Rincian belanja hibah tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.101 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Paguyuban Ketua RT Purbalingga	-	-	250.000.000,00
Paguyuban Keluarga Guyub Rukun Desa Jetis	-	-	20.000.000,00
Paguyuban Keluarga Sehat Dusun Desa Jetis	-	-	10.000.000,00
Jumlah	**-**	**-**	**280.000.000,00**

(j) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pertanian

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pertanian tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00 atau 93,75 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp195.000.000,00 atau naik 185,71 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontribusi sebesar 1,42 persen terhadap total realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan. Belanja hibah ini merupakan hibah yang diberikan kepada beberapa kelompok tani sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.102 Realisasi Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan Urusan Pertanian Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kel. Budidaya Ikan Lele Ketel Desa Kejobong Kec. Kejobong	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Kel. Tani Marsudi Tani Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Kel. Tani Sri Mantap Desa Wanogara Wetan Kec. Rembang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Kel. Tani Ternak Kambing Ngudi Rejeki Kedarpan Kec. Kejobong	-	-	35.000.000,00
Kel. Tani Ternak Sapi Margo Mulyo Desa Timbang Kec. Kejobong	-	-	35.000.000,00
Kel. Tani Ternak Sapi Sido Mulyo Desa Nangkod Kec. Kejobong	-	-	35.000.000,00
Kel. Tani Trubus Mindri Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	20.000.000,00	-	-
Kel. Ternak Kambing Adil Desa Bedagas Kec. Pengadegan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Kel. Ternak Kambing Maju Mekar Desa Larangan Kec. Kejobong	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Kel. Ternak Kambing Sejahtera Pengadegan Kec. Pengadegan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
Kel. Ternak Kambing Silangit Pengadegan Kec. Pengadegan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Kel. Ternak Kambing Sumber Raharja Sumingkir Kec. Kutasari	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Kel. Ternak Kambing Sumber Rizki Metenggeng Kec. Bojongsari	50.000.000,00	50.000.000,00	-

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
KUBE Sareng Sejahtera Desa Toyareka Kec. Kemangkon	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Jumlah	**320.000.000,00**	**300.000.000,00**	**105.000.000,00**

(3) Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp41.138.496.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah di tetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp40.948.496.000,00 atau naik 21.551,84 persen.

Realisasi belanja hibah ini memberikan kontribusi sebesar 52,20 persen terhadap total realisasi belanja hibah tahun 2020. Belanja hibah ini merupakan hibah yang diberikan kepada KPU dan BAWASLU Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.103 Realisasi Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
KPU	31.452.929.000,00	31.452.929.000,00	150.000.000,00
BAWASLU	9.685.567.000,00	9.685.567.000,00	40.000.000,00
Jumlah	**41.138.496.000,00**	**41.138.496.000,00**	**190.000.000,00**

(4) BOP PAUD Masyarakat / Swasta

Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan agar mereka dapat memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSPN), dan diprioritaskan bagi yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

Total penerima hibah BOP PAUD tahun 2020 sebanyak 637 TK/RA/BA/PAUD/KB di 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dana Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta tahun 2020 yang disalurkan sebesar Rp10.384.800.000,00 atau 98,40 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp10.554.000.000,00. Realisasi penyaluran yang tidak mencapai 100,00 persen disebabkan karena adanya perbedaan jumlah siswa pada saat pengajuan anggaran dengan jumlah siswa riil di tahun pelajaran 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah ini meningkat sebesar Rp98.100.000,00 atau naik 0,95 persen.

Rincian penyaluran BOP PAUD tahun 2020 per Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.104 Realisasi Belanja Hibah BOP PAUD per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Lembaga Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bobotsari	32	485.400.000,00
Bojongsari	28	515.400.000,00
Bukateja	42	585.000.000,00
Kaligondang	33	464.100.000,00
Kalimanah	28	415.800.000,00
Karanganyar	30	399.000.000,00
Karangjambu	32	479.700.000,00
Karangmoncol	43	753.300.000,00
Karangreja	31	515.400.000,00
Kejobong	39	551.700.000,00
Kemangkon	41	607.800.000,00
Kertanegara	35	481.500.000,00
Kutasari	34	632.400.000,00
Mrebet	40	699.000.000,00
Padamara	29	530.700.000,00
Pengadegan	31	437.700.000,00
Purbalingga	47	1.002.300.000,00
Rembang	42	828.600.000,00
Jumlah	**637**	**10.384.800.000,00**

Rincian Daftar Penerima Hibah BOP PAUD tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.11.

(5) Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 sebesar Rp3.532.000.000,00 atau mencapai 99,997 persen dari anggaran yang telah di tetapkan sebesar Rp3.532.100.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.549.300.000,00 atau naik 78,14 persen.

Realisasi Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan ini disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di beberapa wilayah Kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kejar Paket dan Kelompok Belajar Usaha.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di bidang pendidikan ini termasuk pendidikan kesetaraan yang diprioritaskan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia wajib belajar. Merujuk pada ketentuan tersebut mengandung konsekuensi Pemerintah Daerah wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C. Mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas, maka di tahun 2020 Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan untuk membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan.

Rincian penyaluran BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 per Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.105 Realisasi Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020 Realisasi (Rp)	2019 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
PKBM Al Furqon Kec. Bobotsari	338.400.000,00	342.000.000
PKBM Al Ridlo Kec. Karangjambu	312.500.000,00	178.200.000
PKBM Bina Bangsa Kec. Kaligondang	376.800.000,00	202.500.000
PKBM Bina Insan Mandiri Kec. Karangreja	48.600.000,00	-
PKBM Bina Mandiri Kec. Karangmoncol	200.100.000,00	143.500.000
PKBM Cakra Kec. Mrebet	370.500.000,00	192.000.000
PKBM Ilman Nafian Kec. Rembang	102.600.000,00	-
PKBM Kartika Kec. Pengadegan	66.600.000,00	-
PKBM Karya Manunggal Kec. Kemangkon	113.400.000,00	108.000.000
PKBM Karya Utama Kec. Padamara	145.800.000,00	180.000.000
PKBM Maju Lestari Kec. Bojongsari	185.400.000,00	162.000.000
PKBM Mekar Kec. Kejobong	49.500.000,00	-
PKBM Resi Bisma Kec. Kalimanah	215.000.000,00	62.000.000
PKBM Satria Negara Kec. Kertanegara	316.500.000,00	216.000.000
PKBM Sentosa Kec. Bukateja	231.600.000,00	87.000.000
PKBM Taruna Maju Kec. Kutasari	288.300.000,00	19.500.000
PKBM Ubaya Mukti Kec. Purbalingga	170.400.000,00	90.000.000
Jumlah	**3.532.000.000,00**	**1.982.700.000,00**

V.1.b.1).e). Belanja Bantuan Sosial_____Rp8.569.750.000,00

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Jadi Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp8.569.750.000,00 atau 97,64 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp8.776.500.000,00. Jumlah tersebut menurun Rp18.779.867.800,00 atau turun 68,67 dibandingkan realisasi tahun 2019.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,63 persen terhadap total Belanja Operasional dan 0,57 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2020. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.106 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.245.000.000,00	2.245.000.000,00	2.590.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.531.500.000,00	6.324.750.000,00	24.759.617.800,00
Jumlah	**8.776.500.000,00**	**8.569.750.000,00**	**27.349.617.800,00**

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp2.245.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2020. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp345.000.000,00 atau turun 13,32 persen dari realisasi tahun 2019.

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan tahun 2020 dialokasikan untuk belanja bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp1.735.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda sebesar Rp490.000.000,00 dan Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia sebesar Rp20.000.000,00.

Rincian realisasi belanja bantuan PAMSIMAS tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.107 Rincian Bantuan PAMSIMAS Tahun 2020

Uraian	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Sharing Reguler	**735.000.000,00**	**735.000.000,00**
Desa Cipaku Kec. Mrebet	245.000.000,00	245.000.000,00
Desa Selaganggeng Kec. Mrebet	245.000.000,00	245.000.000,00
Desa Pekiringan Kec. Karangmoncol	245.000.000,00	245.000.000,00
Stimulan Sambungan Rumah MBR	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
Desa Makam Kec. Rembang	60.000.000,00	60.000.000,00
Desa Pelumutan Kec. Kemangkon	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Pagerandong Kec. Mrebet	76.000.000,00	76.000.000,00
Desa Lambur Kec. Mrebet	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Kedarpan Kec. Kejobong	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Gumiwang Kec. Kejobong	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Kedungjati Kec. Bukateja	78.000.000,00	78.000.000,00
Desa Mipiran Kec. Padamara	76.000.000,00	76.000.000,00
Desa Banjaran Kec. Bojongsari	60.000.000,00	60.000.000,00
Desa Kajongan Kec. Bojongsari	80.000.000,00	80.000.000,00
Desa Krangean Kec. Kertanegara	70.000.000,00	70.000.000,00
Desa Karangjambu Kec. Karangjambu	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Kembaran Wetan Kec. Kaligondang	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Sumingkir Kec. Kutasari	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Karangnangka Kec. Bukateja	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Majatengah Kec. Kemangkon	50.000.000,00	50.000.000,00
Desa Mrebet Kec. Mrebet	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah	**1.735.000.000,00**	**1.735.000.000,00**

Sedangkan rincian penerima Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.108 Rincian Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Panti Asuhan	**410.000.000,00**	**410.000.000,00**	**530.000.000,00**
Panti Asuhan Al Husna Patemon	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Al Khoerot Majasari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Ar Rohman Kalikabong Kec. Kalimanah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Daarul Istiqomah Babakan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Mamba'ul Ikhsan Karangpucung	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Mandanasiwi Penambongan	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	20.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
Panti Asuhan Muhammadiyah Palumutan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Nadhief Senon	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Nurul Barokah Beji	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Nurul Huda Karangreja	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Raudlatut Taqwa Penambongan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Rumah Asuh Putri Al Inayah Bajong	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Yusufiyah Cipawon	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Asuhan Anak Yayasan Boas Suwon Grecol	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Rehabilitasi	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**
Panti Rehabilitasi Nurul Ikhsan Karangsari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Rehabilitasi An Nur Bungkanel	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Rehabilitasi Rumah Terang Purbalingga Wetan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Panti Wreda	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
Panti Wreda Dharma Kasih Kalimanah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**610.000.000,00**

Sedangkan rincian penerima Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.109 Rincian Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Jumlah	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp6.324.750.000,00 atau 96,83 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2020 sejumlah Rp6.531.500.000,00. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp18.434.867.800,00 atau turun 74,46 persen dari realisasi tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.110 Rincian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu	1.500.000.000,00	1.464.150.000,00	1.252.750.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.778.500.000,00	1.717.800.000,00	2.221.367.800,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	1.000.000.000,00	937.800.000,00	903.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI	-	-	20.000.000,00
Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	48.000.000,00	-	18.000.000.000,00
Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	2.362.500.000,00
Jumlah	**6.531.500.000,00**	**6.324.750.000,00**	**24.759.617.800,00**

V.1.b.2). Belanja Modal_____Rp130.334.116.841,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp130.334.116.841,00 atau hanya 82,50 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp157.973.737.000,00. Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 8,69 persen dari total Belanja Daerah tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Belanja Modal tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp131.802.664.451,00 atau turun 50,28 persen.

Penurunan realisasi Belanja Modal tahun 2020 yang cukup besar tersebut terjadi antara lain karena realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami penurunan cukup besar yaitu masing-masing turun Rp94.383.566.992,00 atau turun 76,49 persen dan Rp47.236.659.874,00 atau turun 62,68 persen. Penurunan ini selaras dengan penurunan anggaran Belanja Modal tahun 2020 yang dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *covid-19*. Rincian realisasi Belanja Modal tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.111 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Tanah	4.699.950.000,00	3.232.345.287,00	2.050.826.204,00
BM Peralatan dan Mesin	61.759.094.000,00	59.243.387.999,00	49.772.239.568,00
BM Gedung dan Bangunan	37.934.076.000,00	29.004.314.147,00	123.387.881.139,00
BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	42.164.185.000,00	28.129.574.150,00	75.366.234.024,00
BM Aset Tetap Lainnya	11.416.432.000,00	10.724.495.258,00	11.559.600.357,00
Jumlah	**157.973.737.000,00**	**130.334.116.841,00**	**262.136.781.292,00**

Dari total realisasi Belanja Modal tahun 2020, Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi kontributor terbesar terhadap total realisasi Belanja Modal tahun 2020, dengan rasio 45,63 persen. Sedangkan rasio terkecil adalah Belanja Modal Tanah yaitu hanya sebesar 2,48 persen.

Dari sisi unit pelaksana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Belanja Modal Rp41.079.680.472,00 atau mencapai 31,52 persen dari total Belanja Modal Kabupaten Purbalingga. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar Rp15.175.933.825,00 atau turun 26,98 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan karena penurunan anggaran Belanja Modal tahun 2020 dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 yaitu berkurang sebesar Rp154.087.074.000. Rincian sepuluh besar unit pelaksana dengan realisasi Belanja Modal terbesar tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.112 Daftar 10 SKPD dengan Realisasi Belanja Modal Terbesar Tahun 2020

Uraian	2020		Persen terhadap Belanja Modal Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.531.899.000,00	41.079.680.472,00	31,52
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.685.495.000,00	24.233.275.694,00	18,59
RSUD Goeteng Taroenadibrata	14.823.987.000,00	14.627.705.378,00	11,22
RSUD Panti Nugroho	12.321.158.000,00	11.646.302.031,00	8,94
Dinas Kesehatan	9.900.818.000,00	6.131.016.671,00	4,70
Dinas Perhubungan	6.688.093.000,00	5.864.734.084,00	4,50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.994.670.000,00	3.496.742.805,00	2,68
Dinas Perumahan dan Permukiman	4.046.297.000,00	3.464.906.227,00	2,66
Dinas Lingkungan Hidup	3.506.313.000,00	2.134.795.680,00	1,64
DINSOSDALDUKKBP3A	1.428.070.000,00	1.414.071.000,00	1,08

Secara rinci, realisasi Belanja Modal per SKPD tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.12.

V.1.b.2).a). Belanja Modal Tanah_____Rp3.232.345.287,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.232.345.287,00 atau hanya mencapai 68,77 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp4.699.950.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.181.519.083,00 atau naik 57,61 persen.

Realisasi Belanja Modal Tanah memberikan kontribusi sebesar 2,48 persen terhadap total realisasi Belanja Modal Tahun 2020. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 di gunakan untuk membayar ganti rugi tanah dalam rangka perluasan SD Negeri 2 Gunungwuled, SD Negeri 2 Karangjambu, SD Negeri 1 Karangbawang, pembangunan jembatan Wirasana – Kalikajar dan perluasan penimbunan sampah TPA di Bedagas, Kecamatan Pengadegan.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.113 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020

Uraian	2020		2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.199.950.000,00	2.060.509.607,00	-
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.500.000.000,00	1.171.835.680,00	2.050.826.204,00
Jumlah	**4.699.950.000,00**	**3.232.345.287,00**	**2.050.826.204,00**

(1) Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung tahun 2020 sebesar Rp2.060.509.607,00 atau 93,66 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.199.950.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp2.060.509.607,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.114 Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	699.950.000,00	667.271.627,00	-
BM Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.500.000.000,00	1.393.237.980,00	-
Jumlah	**2.199.950.000,00**	**2.060.509.607,00**	**-**

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung tahun 2020 berada di DPUPR dan Dinrumkim. Realisasi tersebut digunakan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Wirasana – Kalikajar dan perluasan gedung sekolah pada SD Negeri 2 Gunungwuled, SD Negeri 2 Karangjambu dan SD Negeri 1 Karangbawang. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung per SKPD tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.115 Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung per SKPD Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000,00	1.393.237.980,00	-
Dinas Perumahan dan Permukiman	699.950.000,00	667.271.627,00	-
Jumlah	**2.199.950.000,00**	**2.060.509.607,00**	**-**

(2) Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung tahun 2020 sebesar Rp1.171.835.680,00 atau 46,87 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp878.990.524,00 atau turun 42,86 persen.

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung tahun 2020 hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi tersebut merupakan pengadaan tanah dalam rangka perluasan penimbunan sampah TPA di Bedagas, Kecamatan Pengadegan sebesar Rp1.171.835.680,00.

Rincian Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.116 Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	2.500.000.000,00	1.171.835.680,00	1.436.570.920,00
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	-	-	614.255.284,00
Jumlah	**2.500.000.000,00**	**1.171.835.680,00**	**2.050.826.204,00**

V.1.b.2).b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin_____Rp59.243.387.999,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp59.243.387.999,00 atau 95,93 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp61.759.094.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp9.471.148.431,00 atau naik 19,03 persen.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per rekening disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.117 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Peralsin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	365.805.000,00	200.320.000,00	2.135.774.049,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat-alat Bantu	16.075.000,00	16.075.000,00	11.450.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.620.061.000,00	1.605.211.000,00	9.785.114.580,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	238.462.000,00	237.500.000,00	422.481.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.700.000,00	1.700.000,00	28.600.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	236.683.450,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Ukur	20.330.000,00	17.789.264,00	1.027.736.440,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Pengolahan	22.240.000,00	22.200.000,00	18.800.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	140.319.000,00	134.961.000,00	89.118.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Kantor	836.956.000,00	817.415.905,00	4.296.147.701,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.565.618.000,00	1.498.231.054,00	7.003.941.984,00
BM Peralsin - Pengadaan Komputer	9.366.395.000,00	9.004.059.358,00	11.404.400.721,00
BM Peralsin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	1.975.000,00	325.550.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Studio	306.775.000,00	192.165.000,00	1.108.175.563,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Komunikasi	69.750.000,00	66.009.075,00	191.458.650,00
BM Peralsin - Pengadaan Peralatan Pemancar	6.500.000,00	6.500.000,00	69.050.000,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Kedokteran	19.965.619.000,00	19.182.328.196,00	9.188.405.046,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Kesehatan	53.250.000,00	53.250.000,00	4.925.005,00
BM Peralsin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.002.088.000,00	1.862.603.526,00	755.369.779,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.251.250.000,00	2.032.745.000,00	908.916.500,00
BM Peralsin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.000.000,00	1.000.000,00	-
BM Peralsin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	100.000.000,00	82.061.128,00	485.792.500,00
BM Peralsin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	77.900.000,00	76.050.000,00	274.348.600,00
BM Peralsin - Dana BLUD	6.072.246.000,00	6.090.785.499,00	-
BM Peralsin - Dana BOS	16.656.755.000,00	16.040.452.994,00	-
Jumlah	**61.759.094.000,00**	**59.243.387.999,00**	**49.772.239.568,00**

Meskipun dari sisi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, akan tetapi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 memiliki realisasi yang lebih besar baik secara nilai maupun persentase dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang terealisasi sebesar 49.772.239.568,00 atau mencapai 66,03 persen,

Dengan realisasi senilai Rp59.243.387.999,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi sebesar 45,63 persen dari total realisasi Belanja Modal tahun 2020 serta hanya berkontribusi sebesar 3,95 persen dari total realisasi Belanja Daerah tahun 2020.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah belanja Pengadaan Alat Kedokteran senilai Rp19.182.328.196,00 atau 32,28 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan SKPD dengan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp20.859.263.256,00 atau 35,21 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020. Rincian sepuluh besar SKPD dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.118 Daftar 10 SKPD dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terbesar Tahun 2020

Uraian	2020		Persentase terhadap BM Peralsin Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.648.651.000,00	20.859.263.256,00	35,21
RSUD Goeteng Taroenadibrata	11.654.170.000,00	12.024.825.562,00	20,30
RSUD Panti Nugroho	11.573.108.000,00	10.924.301.631,00	18,44
Dinas Kesehatan	3.442.027.000,00	2.930.642.171,00	4,95
DINSOSDALDUKKBP3A	898.550.000,00	885.215.000,00	1,49
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	694.500.000,00	679.540.000,00	1,15
UPT SMP Negeri 2 Purbalingga	593.300.000,00	566.895.000,00	0,96
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	516.862.000,00	507.624.264,00	0,86
Dinas Komunikasi dan Informatika	471.195.000,00	468.741.000,00	0,79
Dinas Perhubungan	347.484.000,00	342.255.784,00	0,58

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran 5.13.

V.1.b.2).c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan_____Rp29.004.314.147,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.004.314.147,00 atau 76,46 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp37.934.076.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019, nilai tersebut menurun sangat sifnifikan yaitu sebesar Rp94.383.566.992,00 atau turun 76,49 persen. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.119 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.429.288.000,00	25.614.397.057,00	121.961.572.239,00
BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	179.667.000,00	179.118.000,00	50.000.000,00
BM Pengadaan Bangunan Bersejarah	29.942.000,00	29.942.000,00	-
BM Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	70.536.000,00	70.536.000,00	6.500.000,00
BM Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	-	-	240.272.900,00
BM Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.283.939.000,00	1.192.929.500,00	1.129.536.000,00
BM Gedung & Bangunan - Dana BLUD	1.662.963.000,00	1.643.132.180,00	-
BM Gedung & Bangunan - Dana BOS	277.741.000,00	274.259.410,00	-
Jumlah	**37.934.076.000,00**	**29.004.314.147,00**	**123.387.881.139,00**

SKPD dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp11.710.695.986,00 atau 40,38 persen dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.120 Daftar 10 SKPD Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terbesar 2020

Uraian	2020		Persentase terhadap BM Gedung Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.011.097.000,00	11.710.695.986,00	40,38
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.951.070.000,00	3.453.263.805,00	11,91
Dinas Kesehatan	3.682.783.000,00	3.200.374.500,00	11,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.361.000.000,00	3.173.642.500,00	10,94
Dinas Perhubungan	1.291.089.000,00	1.199.179.500,00	4,13
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.046.772.000,00	749.673.500,00	2,58
RSUD Goeteng Taroenadibrata	1.269.817.000,00	1.255.748.816,00	4,33
RSUD Panti Nugroho	707.000.000,00	700.550.400,00	2,42
DINSOSDALDUKKBP3A	529.520.000,00	528.856.000,00	1,82
Dinas Lingkungan Hidup	386.846.000,00	381.776.000,00	1,32

Beberapa kegiatan pengadaan Gedung dan Bangunan tahun 2020 dengan realisasi anggaran yang cukup besar sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.121 Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terbesar Tahun 2020

Kegiatan	2020		SKPD Pelaksana
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemenuhan Sarana – Prasarana SD (DAK)	6.255.275.000,00	6.213.241.886,00	DINDIKBUD
Pembangunan Gedung Pemerintahan	3.361.000.000,00	3.173.642.500,00	DPUPR
Pemenuhan Sarana – Prasarana SMP (DAK)	2.951.368.000,00	2.943.945.350,00	DINDIKBUD
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	3.301.294.000,00	2.836.529.500,00	Dinas Kesehatan

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran 5.14.

V.1.b.2).d). Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____Rp28.129.574.150,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp28.129.574.150,00 atau 66,71 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp47.236.659.874,00 atau turun 62,68 persen. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 21,58 persen terhadap total realisasi Belanja Modal tahun 2020 dan 1,87 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.122 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM JIJ - Pengadaan Jalan	25.739.072.000,00	17.361.267.500,00	49.557.593.408,00
BM JIJ - Pengadaan Jembatan	463.118.000,00	294.235.000,00	5.220.479.000,00
BM JIJ - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.095.383.000,00	1.493.211.000,00	-
BM JIJ - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.560.000,00	8.559.050,00	-
BM JIJ - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	50.000.000,00	49.897.000,00	2.068.160.250,00
BM JIJ - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.125.000.000,00	2.576.836.600,00	13.690.000,00
BM JIJ - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	63.306.000,00	63.056.000,00	245.993.000,00
BM JIJ - Pengadaan Instalasi Air Kotor	-	-	353.750.000,00
BM JIJ - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	335.106.000,00	331.426.000,00	6.400.059.350,00
BM JIJ - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	95.000.000,00
BM JIJ - Pengadaan Jaringan Listrik	5.108.020.000,00	4.376.097.250,00	11.067.859.016,00
BM JIJ - Pengadaan Jaringan Telepon	1.350.000,00	1.000.000,00	-
BM JIJ - Pengadaan Jaringan Gas	-	-	343.650.000,00
BM JIJ - Dana BLUD	1.953.550.000,00	1.378.381.000,00	-
BM JIJ - Dana BOS	221.720.000,00	195.607.750,00	-
Jumlah	**42.164.185.000,00**	**28.129.574.150,00**	**75.366.234.024,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar berasal dari Belanja Modal Pengadaan Jalan yang mencapai Rp17.361.267.500,00 atau 61,72 persen dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020. Sedangkan SKPD dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp19.158.770.950,00 atau 68,11 persen dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pengelolaan jalan yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Daftar 10 SKPD dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terbesar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.123 Daftar 10 SKPD Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Terbesar Tahun 2020

Uraian	2020		Persentase terhadap BM JIJ Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.307.633.000,00	19.158.770.950,00	68,11
Dinas Perhubungan	5.049.520.000,00	4.323.298.800,00	15,37
Dinas Perumahan dan Permukiman	3.125.000.000,00	2.576.836.600,00	9,16
RSUD Goeteng Taroenadibrata	1.900.000.000,00	1.347.131.000,00	4,79
Dinas Lingkungan Hidup	285.106.000,00	281.323.000,00	1,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.445.000,00	120.576.400,00	0,43
Kelurahan Karangsentul	105.500.000,00	105.500.000,00	0,38
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,09
UPT SMP Negeri 3 Karangreja	32.000.000,00	21.100.000,00	0,08
RSUD Panti Nugroho	36.050.000,00	21.050.000,00	0,07

Beberapa kegiatan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.124 Kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Terbesar Tahun 2020

Kegiatan	2020		SKPD Pelaksana
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemeliharaan Berkala Jalan	16.056.174.000,00	13.037.381.000,00	DPUPR
Pengadaan dan pemasangan LPJU	5.049.520.000,00	4.323.298.800,00	Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarpras Air Bersih Curug Karang (Bangub)	3.125.000.000,00	2.576.836.600,00	DINRUMKIM
Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan	2.883.203.000,00	2.248.913.000,00	DPUPR
Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	2.400.000.000,00	1.969.721.000,00	DPUPR

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran 5.15.

V.1.b.2).e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya_____Rp10.724.495.258,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp10.724.495.258,00 atau 93,94 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp11.416.432.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp835.105.099,00 atau turun 7,22 persen.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terbesar berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Dana BOS sebesar Rp5.843.989.478,00 atau 54,49 persen dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada 459 SD Negeri dan 60 SMP Negeri. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.125 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020		2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
BM ATL - Pengadaan Buku	2.928.000.000,00	2.927.253.777,00	9.275.639.651,00
BM ATL - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	65.567.200,00
BM ATL - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.688.700.000,00	1.605.840.000,00	1.730.709.400,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM ATL - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	355.150.000,00	277.662.003,00	472.084.106,00
BM ATL - Pengadaan Hewan	-	-	2.600.000,00
BM ATL - Pengadaan Tanaman	-	-	13.000.000,00
BM ATL - Dana BLUD	86.500.000,00	69.750.000,00	-
BM ATL - Dana BOS	6.358.082.000,00	5.843.989.478,00	-
Jumlah	**11.416.432.000,00**	**10.724.495.258,00**	**11.559.600.357,00**

SKPD dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai realisasi sebesar Rp8.389.144.830,00 yang merupakan 78,22 persen dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.126 Daftar 10 SKPD dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Terbesar Tahun 2020

Uraian	2020		Persentase terhadap BM ATL Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.746.706.000,00	8.389.144.830,00	78,22
UPT SMP Negeri 1 Kalimanah	149.924.000,00	146.114.300,00	1,36
UPT SMP Negeri 1 Kertanegara	154.125.000,00	143.789.200,00	1,34
UPT SMP Negeri 1 Purbalingga	132.969.000,00	132.969.000,00	1,24
UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	81.059.000,00	76.046.100,00	0,71
UPT SMP Negeri 1 Kaligondang	95.198.000,00	73.325.800,00	0,68
UPT SMP Negeri 3 Kutasari	70.122.000,00	69.916.500,00	0,65
UPTD Puskesmas Kutawis	81.500.000,00	69.350.000,00	0,65
UPT SMP Negeri 2 Karangreja	90.953.000,00	65.712.800,00	0,61
UPT SMP Negeri 2 Padamara	64.964.000,00	64.964.000,00	0,61

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.16.

V.1.b.3). Belanja Tak Terduga_____Rp9.913.347.179,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 sebesar Rp9.913.347.179,00 atau hanya 78,36 persen dari anggaran sebesar Rp12.651.358.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sangat signifikan yaitu naik sebesar Rp9.706.536.749,00 atau naik 4.693,45 persen. Hal ini selaras dengan peningkatan anggaran untuk Belanja Tak Terduga tahun 2020.

Belanja Tak Terduga tahun 2020 digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk penanganan pandemi *covid-19*, pengembalian retensi pihak ketiga, dan untuk penanganan bencana longsor. Rincian SKPD yang mendapatkan dana Belanja Tak Terduga dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.127 Daftar SKPD Penerima Dana BTT Tahun 2020

Penerima BTT	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Penanganan Bencana Alam	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.606.000,00
Penanganan Pandemi Covid-19	
Badan Keuangan Daerah	458.935.000,00
Pelaksana BPBD	964.144.595,00
Dinas Kesehatan	3.631.732.535,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	825.006.795,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	10.740.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	58.998.000,00
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	3.012.448.089,00
Bagian Humas dan Protokol	42.805.000,00
RSUD Panti Nugroho	203.754.015,00
Satuan Polisi Pamong Praja	432.840.500,00
Retensi dan Pengembalian	
CV Permata	13.145.900,00
CV Sumber Rejeki	42.940.750,00
Rizqi Andestria Adi	2.250.000,00
Jumlah	**9.913.347.179,00**

V.1.c. TRANSFER Rp394.456.655.648,00

Realisasi Transfer tahun 2020 sebesar Rp394.456.655.648,00 atau 99,24 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020 sebesar Rp397.483.561.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp33.041.974.248,00 atau 9,14 persen.

Kenaikan tersebut salah satunya didorong oleh naiknya nilai transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dari semula Rp96.584.816.900,00 di tahun 2019 menjadi Rp118.995.608.648,00 di tahun 2020 serta peningkatan Dana Desa menjadi Rp245.675.204.000,00 di tahun 2020 yang semula hanya Rp237.221.606.000,00 di tahun 2019.

Realisasi Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp6.937.738.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp387.518.917.648,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.128 Realisasi Transfer Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.937.738.000,00	6.937.738.000,00	6.645.949.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	390.545.823.000,00	387.518.917.648,00	354.768.732.400,00
Jumlah	**397.483.561.000,00**	**394.456.655.648,00**	**361.414.681.400,00**

V.1.c.1). Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp6.937.738.000,00

Alokasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/167 Tahun 2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp6.937.738.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 tersebut memberikan kontribusi 1,76 persen terhadap total realisasi Transfer tahun 2020.

Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp291.789.000,00 atau naik 4,39 persen. Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.129 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.599.500.000,00	5.107.254.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.338.238.000,00	1.538.695.000,00
Jumlah	**6.937.738.000,00**	**6.937.738.000,00**	**6.645.949.000,00**

V.1.c.1).a). Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah _____Rp5.599.500.000,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp5.599.500.000,00 atau 100,00 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Realisasi tersebut merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Alokasi transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/167 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi tersebut meningkat sebesar Rp492.246.000,00 atau naik 9,64 persen. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kecamatan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.130 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	496.250.000,00	496.250.000,00	454.420.000,00
Kecamatan Bukateja	431.105.000,00	431.105.000,00	414.205.000,00
Kecamatan Kejobong	318.837.000,00	318.837.000,00	261.425.000,00
Kecamatan Kaligondang	424.414.000,00	424.414.000,00	374.970.000,00
Kecamatan Purbalingga	56.620.000,00	56.620.000,00	60.347.000,00
Kecamatan Kalimanah	390.126.000,00	390.126.000,00	378.809.000,00
Kecamatan Kutasari	366.293.000,00	366.293.000,00	316.944.000,00
Kecamatan Mrebet	436.866.000,00	436.866.000,00	404.067.000,00
Kecamatan Bobotsari	376.346.000,00	376.346.000,00	357.662.000,00
Kecamatan Karangreja	174.974.000,00	174.974.000,00	166.215.000,00
Kecamatan Karanganyar	274.422.000,00	274.422.000,00	240.272.000,00
Kecamatan Karangmoncol	261.059.000,00	261.059.000,00	242.770.000,00
Kecamatan Rembang	296.198.000,00	296.198.000,00	277.156.000,00
Kecamatan Bojongsari	363.128.000,00	363.128.000,00	321.760.000,00
Kecamatan Padamara	340.787.000,00	340.787.000,00	322.904.000,00
Kecamatan Pengadegan	229.335.000,00	229.335.000,00	199.508.000,00

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kertanegara	222.093.000,00	222.093.000,00	203.370.000,00
Kecamatan Karangjambu	140.647.000,00	140.647.000,00	110.450.000,00
Jumlah	**5.599.500.000,00**	**5.599.500.000,00**	**5.107.254.000,00**

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah per Desa tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.17.

V.1.c.1).b). Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya _____Rp1.338.238.000,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.338.238.000,00 atau 100,00 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut menurun sebesar Rp200.457.000,00 atau turun 13,03 persen.

Realisasi tersebut merupakan bagi hasil Retribusi Daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Alokasi transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/167 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Rincian realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2020 per Kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.131 Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	114.827.000,00	114.827.000,00	128.505.000,00
Kecamatan Bukateja	101.584.000,00	101.584.000,00	98.627.000,00
Kecamatan Kejobong	67.990.000,00	67.990.000,00	76.396.000,00
Kecamatan Kaligondang	107.027.000,00	107.027.000,00	109.280.000,00
Kecamatan Purbalingga	10.460.000,00	10.460.000,00	28.022.000,00
Kecamatan Kalimanah	87.018.000,00	87.018.000,00	96.856.000,00
Kecamatan Kutasari	93.856.000,00	93.856.000,00	105.476.000,00
Kecamatan Mrebet	108.164.000,00	108.164.000,00	115.792.000,00
Kecamatan Bobotsari	110.672.000,00	110.672.000,00	125.234.000,00
Kecamatan Karangreja	36.610.000,00	36.610.000,00	90.687.000,00
Kecamatan Karanganyar	73.360.000,00	73.360.000,00	79.946.000,00
Kecamatan Karangmoncol	57.530.000,00	57.530.000,00	60.742.000,00
Kecamatan Rembang	65.433.000,00	65.433.000,00	76.684.000,00
Kecamatan Bojongsari	73.725.000,00	73.725.000,00	87.310.000,00
Kecamatan Padamara	81.700.000,00	81.700.000,00	75.968.000,00
Kecamatan Pengadegan	55.097.000,00	55.097.000,00	81.642.000,00
Kecamatan Kertanegara	61.805.000,00	61.805.000,00	68.396.000,00
Kecamatan Karangjambu	31.380.000,00	31.380.000,00	33.132.000,00
Jumlah	**1.338.238.000,00**	**1.338.238.000,00**	**1.538.695.000,00**

Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah per Desa tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.18.

V.1.c.2). Transfer Bantuan Keuangan_____Rp387.518.917.648,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp387.518.917.648,00 atau 99,22 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp390.545.823.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp32.750.185.248,00 atau naik 9,23 persen. Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.132 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	389.305.218.000,00	386.278.312.648,00	353.551.421.900,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.240.605.000,00	1.240.605.000,00	1.217.310.500,00
Jumlah	**390.545.823.000,00**	**387.518.917.648,00**	**354.768.732.400,00**

V.1.c.2).a) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa_____Rp386.278.312.648,00

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2020 sebesar Rp386.278.312.648,00 atau 99,22 persen dari anggaran Rp389.305.218.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.726.890.748,00 atau naik 9,26 persen.

Rincian Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades, Dana Desa serta Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa dengan nilai sebegaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.133 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Alokasi Dana Desa (ADD)	119.036.746.000,00	118.995.608.648,00	96.584.816.900,00
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	20.297.000.000,00	19.732.000.000,00	19.745.000.000,00
Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	307.500.000,00	307.500.000,00	-
Dana Desa	248.095.972.000,00	245.675.204.000,00	237.221.605.000,00
Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	1.568.000.000,00	1.568.000.000,00	-
Jumlah	**389.305.218.000,00**	**386.278.312.648,00**	**353.551.421.900,00**

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,

Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp118.995.608.648,00 atau 99,97 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp119.036.746.000,00. Realisasi penyaluran ADD tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.410.791.748,00 atau naik 23,20 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp96.584.816.900,00.

Rincian realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa per Kecamatan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Realisasi Penyaluran ADD per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	9.393.775.000,00	9.386.145.668,00	8.121.225.000,00
Kecamatan Bukateja	7.608.291.000,00	7.607.964.975,00	6.391.557.000,00
Kecamatan Kejobong	7.714.100.000,00	7.714.100.000,00	5.586.827.500,00
Kecamatan Kaligondang	9.430.651.000,00	9.430.651.000,00	7.624.819.000,00
Kecamatan Purbalingga	962.177.000,00	962.177.000,00	804.217.500,00
Kecamatan Kalimanah	6.595.922.000,00	6.587.277.615,00	5.391.792.500,00
Kecamatan Kutasari	7.617.834.000,00	7.617.834.000,00	6.247.544.500,00
Kecamatan Mrebet	9.873.912.000,00	9.857.248.690,00	7.995.650.000,00
Kecamatan Bobotsari	7.712.761.000,00	7.710.773.250,00	6.377.935.000,00
Kecamatan Karangreja	4.179.180.000,00	4.179.180.000,00	3.421.186.000,00
Kecamatan Karanganyar	6.605.753.000,00	6.605.753.000,00	5.405.295.500,00
Kecamatan Karangmoncol	6.370.677.000,00	6.370.677.000,00	5.170.960.500,00
Kecamatan Rembang	6.977.884.000,00	6.977.884.000,00	5.775.454.500,00
Kecamatan Bojongsari	7.028.292.000,00	7.022.405.450,00	5.752.083.500,00
Kecamatan Padamara	6.273.616.000,00	6.273.616.000,00	5.060.106.500,00
Kecamatan Pengadegan	5.472.523.000,00	5.472.523.000,00	4.135.647.500,00
Kecamatan Karangjambu	3.620.362.000,00	3.620.362.000,00	2.744.020.000,00
Kecamatan Kertanegara	5.599.036.000,00	5.599.036.000,00	4.578.494.900,00
Jumlah	**119.036.746.000,00**	**118.995.608.648,00**	**96.584.816.900,00**

Pada tahun 2020, terdapat dana ADD yang belum disalurkan seluruhnya kepada 8 desa yaitu sejumlah Rp41.137.352,00. Kurang salur ADD tahun 2020 tersebut direncanakan akan disalurkan kembali pada tahun 2021.

Rincian realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa per Desa tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.19.

(2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa tahun 2020 sebesar Rp19.732.000.000,00 atau 97,22 persen dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp13.000.000,00 atau turun 0,07 persen dibandingkan realisasi tahun 2019.

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan

Khusus (BKK) tersebut disalurkan untuk 3 jenis kegiatan yaitu (i) Bantuan Sarana dan Prasarana Desa, (ii) Bantuan Desa Wisata/Rintisan Desa Wisata, dan (iii) Bantuan Pelaksanaan TMMD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135 Realisasi Belanja BKK Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Sapras Desa	15.950.000.000,00	15.705.000.000,00	15.930.000.000,00
Bantuan Desa Wisata/Rintisan Desa Wisata	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Bantuan TMMD	4.247.000.000,00	3.927.000.000,00	3.815.000.000,00
Jumlah	**20.297.000.000,00**	**19.732.000.000,00**	**19.745.000.000,00**

Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.20.

(3) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan belanja bantuan keuangan sebesar Rp307.500.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019.

Realisasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades tahun 2020 adalah sebesar Rp307.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp307.500.000,00. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades ini diberikan kepada 9 (sembilan) desa di Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Rincian penerima Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.136 Rincian Penerima Bantuan Keuangan Pelaksanaan PilkadesTahun 2020

Uraian	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Desa Pelumutan Kec. Kemangkon	35.000.000,00	35.000.000,00
Desa Karangkemiri Kec. Kemangkon	30.000.000,00	30.000.000,00
Desa Muntang Kec. Kemangkon	30.000.000,00	30.000.000,00
Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara	30.000.000,00	30.000.000,00
Desa Banjaran Kec. Bojongsari	40.000.000,00	40.000.000,00
Desa Mangunegera Kec. Mrebet	30.000.000,00	30.000.000,00
Desa Lumpang Kec. Karanganyar	30.000.000,00	30.000.000,00
Desa Maribaya Kec. Karanganyar	40.000.000,00	40.000.000,00
Desa Pangempon Kec. Kejobong	42.500.000,00	42.500.000,00
Jumlah	**307.500.000,00**	**307.500.000,00**

(4) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Transfer Bantuan Keuangan – Dana Desa tahun 2020 ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga TA 2020.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan-Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp245.675.204.000,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar Rp248.095.972.000,00. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.453.599.000,00 atau naik 3,56 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran Dana Desa di tahun 2019.

Rincian Penyaluran Dana Desa per Kecamatan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.137 Realisasi Pencairan Dana Desa per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	19.437.915.000,00	19.232.582.000,00	18.496.902.000,00
Kecamatan Bukateja	16.614.725.000,00	16.463.427.000,00	15.974.689.000,00
Kecamatan Kejobong	15.228.214.000,00	15.087.723.000,00	14.410.531.000,00
Kecamatan Kaligondang	18.436.888.000,00	18.242.362.000,00	17.529.859.000,00
Kecamatan Purbalingga	1.887.023.000,00	1.865.409.000,00	1.797.702.000,00
Kecamatan Kalimanah	12.303.991.000,00	12.152.693.000,00	12.045.216.000,00
Kecamatan Kutasari	17.115.938.000,00	16.964.640.000,00	16.252.056.000,00
Kecamatan Mrebet	21.139.011.000,00	20.933.678.000,00	20.186.770.000,00
Kecamatan Bobotsari	16.844.578.000,00	16.671.666.000,00	16.303.929.000,00
Kecamatan Karangreja	10.385.580.000,00	10.309.931.000,00	9.646.750.000,00
Kecamatan Karanganyar	13.603.720.000,00	13.463.229.000,00	13.653.005.000,00
Kecamatan Karangmoncol	12.496.748.000,00	12.377.871.000,00	11.934.647.000,00
Kecamatan Rembang	15.170.028.000,00	15.040.344.000,00	14.268.339.000,00
Kecamatan Bojongsari	14.707.761.000,00	14.567.270.000,00	13.859.050.000,00
Kecamatan Padamara	12.161.151.000,00	12.020.660.000,00	11.783.818.000,00
Kecamatan Pengadegan	11.119.731.000,00	11.022.468.000,00	10.593.653.000,00
Kecamatan Kertanegara	11.212.210.000,00	11.093.333.000,00	10.719.958.000,00
Kecamatan Karangjambu	8.230.760.000,00	8.165.918.000,00	7.764.731.000,00
Jumlah	**248.095.972.000,00**	**245.675.204.000,00**	**237.221.605.000,00**

Realisasi pencairan Dana Desa per Desa tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.21.

(5) Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan bantuan keuangan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa sebesar Rp1.568.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141.1/313 Tahun 2020.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa tahun 2020 sebesar Rp1.568.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Bantuan Keuangan tersebut diberikan kepada 224 desa di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Rincian Penyaluran Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa per Kecamatan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.138 Realisasi Bantuan Kegiatan Desk Pemilu per Kecamatan Tahun 2020

Uraian	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Kecamatan Kemangkon	133.000.000,00	133.000.000,00
Kecamatan Bukateja	98.000.000,00	98.000.000,00
Kecamatan Kejobong	91.000.000,00	91.000.000,00
Kecamatan Kaligondang	126.000.000,00	126.000.000,00
Kecamatan Purbalingga	14.000.000,00	14.000.000,00
Kecamatan Kalimanah	98.000.000,00	98.000.000,00
Kecamatan Kutasari	98.000.000,00	98.000.000,00
Kecamatan Mrebet	133.000.000,00	133.000.000,00
Kecamatan Bobotsari	112.000.000,00	112.000.000,00
Kecamatan Karangreja	49.000.000,00	49.000.000,00
Kecamatan Karanganyar	91.000.000,00	91.000.000,00
Kecamatan Karangmoncol	77.000.000,00	77.000.000,00
Kecamatan Rembang	84.000.000,00	84.000.000,00
Kecamatan Bojongsari	91.000.000,00	91.000.000,00
Kecamatan Padamara	91.000.000,00	91.000.000,00
Kecamatan Pengadegan	63.000.000,00	63.000.000,00
Kecamatan Kertanegara	77.000.000,00	77.000.000,00
Kecamatan Karangjambu	42.000.000,00	42.000.000,00
Jumlah	**1.568.000.000,00**	**1.568.000.000,00**

Realisasi Bantuan Kegiatan Desk Pemilu per Desa tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.22.

V.1.c.2).b) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya_____Rp1.240.605.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2020 merupakan Tranfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.240.605.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp1.240.605.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp23.294.500,00 atau naik 1,91 persen. Rincian alokasi dan realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.139 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Nasdem	48.615.000,00	48.615.000,00	52.225.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	224.319.000,00	224.319.000,00	165.897.500,00
Partai Keadilan Sejahtera	88.704.000,00	88.704.000,00	91.914.500,00
PDI Perjuangan	292.617.000,00	292.617.000,00	290.433.500,00
Partai Golkar	180.633.000,00	180.633.000,00	181.023.500,00
Partai Gerindra	188.478.000,00	188.478.000,00	173.949.500,00
Partai Demokrat	76.716.000,00	76.716.000,00	79.145.500,00
Partai Amanat Nasional	82.800.000,00	82.800.000,00	82.058.500,00
Partai Persatuan Pembangunan	57.723.000,00	57.723.000,00	65.129.500,00
Partai Hanura	-	-	35.533.500,00
Jumlah	**1.240.605.000,00**	**1.240.605.000,00**	**1.217.310.500,00**

Besaran alokasi bantuan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 210/273 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

V.1.d. PEMBIAYAAN Rp121.701.861.009,00

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Total Pembiayaan Daerah (*netto*) Tahun 2020 sebesar Rp121.701.861.009,00 atau mencapai 100,01 persen dari proyeksi dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp121.693.761.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah (*netto*) dihasilkan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp130.001.861.009,00 dikurangi dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp8.300.000.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.140 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.993.761.000,00	130.001.861.009,00	125.149.497.291,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	9.086.000.000,00
Pembiayaan Netto	**121.693.761.000,00**	**121.701.861.009,00**	**116.063.497.291,00**

V.1.d.1). Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp130.001.861.009,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp130.001.861.009,00 atau 100,01 persen dari proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp129.993.761.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, nilai tersebut meningkat sebesar Rp4.852.363.718,00 atau naik 3,88 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.141 Realisasi Penerimaaan Pembiayaan Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penggunaan SILPA	**129.993.761.000,00**	**129.990.361.009,00**	**125.136.675.308,00**
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	*113.904.051.000,00*	*113.904.051.009,00*	*125.141.575.308,00*
Pelampauan Penerimaan PAD	6.989.807.000,00	6.989.807.009,00	12.789.240.334,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	106.914.244.000,00	106.914.244.000,00	112.352.334.974,00
Koreksi SILPA	-	*(3.400.000,00)*	*(4.900.000,00)*
Sisa Belanja DAK	*16.081.788.000,00*	*16.081.788.000,00*	-
Pelampauan Pembiayaan Netto	*7.922.000,00*	*7.922.000,00*	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	**-**	**11.500.000,00**	**12.821.983,00**
Jumlah	**129.993.761.000,00**	**130.001.861.009,00**	**125.149.497.291,00**

V.1.d.1).a). Penggunaan SILPA

Realisasi Penggunaan SILPA sebesar Rp129.990.361.009,00 merupakan SILPA tahun 2019 yang dialokasikan untuk pembiayaan tahun 2020 sebagaimana sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.

Tidak seluruh realisasi SILPA tahun 2019 yakni sebesar Rp129.993.761.009,00 direalisasikan penggunaannya di tahun 2020 sebagai penerimaan pembiayaan karena terdapat koreksi atas kesalahan pencatatan transaksi tahun sebelumnya sebesar Rp3.400.000,00 yang menyebabkan saldo SILPA tahun 2019 menjadi lebih saji secara akumulatif.

Penjelasan lebih lanjut atas koreksi tersebut dapat dilihat pada bagian penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih bagian V.2.d.

V.1.d.1).b). Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2020 sebesar Rp11.500.000,00 merupakan penerimaan kembali atas dana bergulir dalam bentuk pemberian pinjaman maupun investasi yang dikelola oleh SKPD.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp1.321.983,00 atau turun 10,31 persen. Realisasi penerimaan kembali dana bergulir tersebut berasal dari pelunasan PUEP tahun 2002 atas nama Riyanto Sofyan melaui PD BKK Kalimanah.

V.1.c.3). Pengeluaran Pembiayaan Daerah_____Rp8.300.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp8.300.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp8.300.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp786.000.000,00 atau turun 8,65 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.142 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	9.086.000.000,00
Jumlah	**8.300.000.000,00**	**8.300.000.000,00**	**9.086.000.000,00**

V.1.d.2).a). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar Rp8.300.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, penyertaan modal tersebut menurun sebesar Rp786.000.000,00 atau turun 8,65persen.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut merupakan amanat dari Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.143 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Uraian	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PD BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	500.000.000,00	500.000.000,00	-
PT BPRS Buana Mitra Perwira	500.000.000,00	500.000.000,00	-
Perumda Air Minum Tirta Perwira	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.600.000.000,00
PT Bank BPD Jawa Tengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.486.000.000,00
Perumda Owabong	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	**8.300.000.000,00**	**8.300.000.000,00**	**9.086.000.000,00**

V.1.e. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)_Rp179.575.632.903,00

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp57.873.771.894,00 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp121.701.861.009,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp179.575.632.903,00. Nilai SILPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.581.871.894,00 atau naik 38,14 persen dibandingkan SILPA tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.144 Pertumbuhan SILPA Tahun 2020

Uraian	2020		Persen	2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus/(Defisit)	(121.693.761.000,00)	57.873.771.894,00	(47,56)	13.930.263.718,00
Pembiayaan (netto)	121.693.761.000,00	121.701.861.009,00	100,01	116.063.497.291,00
SILPA	**-**	**179.575.632.903,00**	**-**	**129.993.761.009,00**

Dari total SILPA tahun 2020 sebesar Rp179.575.632.903,00, tidak seluruhnya merupakan SILPA Bebas, namun sebesar Rp83.265.667.190,00 merupakan SILPA Terikat (*earmarked*) yang sudah ditetapkan penggunaanya. Sehingga jumlah SILPA Bebas tahun 2020 hanya sebesar Rp96.309.965.713,00 atau 53,63 persen dari total SILPA tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.145 Rincian SILPA Terikat Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)		
1	***SILPA 2020***			***179.575.632.903,00***
2	***SILPA Terikat:***			
a	Sisa DAK		29.451.359.257,00	
	- DAK Reguler	3.573.308.728,00		
	- DAK Tambahan P3K2	29.189.730,00		
	- DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan	110.572.307,00		
	- DAK Nonfisik BOP Kesetaraan	100.000,00		
	- DAK Nonfisik BOP Museum	61.024.286,00		
	- DAK Nonfisik Bantuan Operasional KB	448.933.445,00		
	- DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan	5.167.984.205,00		
	- DAK Nonfisik BOP PAUD	178.500.000,00		
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.151.829.250,00		
	- DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	8.426.359.965,00		
	- DAK Nonfisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	7.500.000,00		
	- DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan	1.106.500,00		
	- DAK Nonfisik Insentif Tenaga Kesehatan	19.492.841,00		
	- Bantuan Gubernur Tahun 2020	10.275.458.000,00		
b	Sisa Kas di BLUD		43.842.705.785,00	
c	Sisa Kas di Bendahara BOS		9.971.602.148,00	
3	***Jumlah SILPA Terikat***			***83.265.667.190,00***
4	***SILPA Bebas (1-3)***			***96.309.965.713,00***

V.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

V.2.a. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL _____Rp129.993.761.009,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019, yaitu sebesar Rp129.993.761.009,00 yang merupakan SILPA Tahun 2019.

V.2.b. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PEMBIAYAAN

TAHUN BERJALAN _____Rp129.990.361.009,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2019 sebesar Rp129.993.761.009,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dari saldo SAL tahun 2019 tersebut, jumlah yang direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2020 lebih kecil yaitu Rp129.990.361.009,00.

Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan koreksi terhadap SILPA tahun sebelumnya sebesar 3.400.000,00 Koreksi ini disebabkan karena adanya kelebihan salur dana BOS Tahun 2019 baru dikembalikan di Tahun 2020 pada SMP Negeri 2 Mrebet.

V.2.c. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SILPA) TA 2020 _____Rp179.575.632.903,00

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp57.873.771.894,00 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp121.701.861.009,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019 sebesar Rp179.575.632.903,00.

Nilai SILPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.581.871.894,00 atau naik 38,14 persen dibandingkan SILPA tahun 2019.

V.2.d. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN

TAHUN SEBELUMNYA _____Rp3.400.000,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp3.400.000,00 merupakan koreksi atas lebih salur dana BOS tahun 2019 pada SMP Negeri 2 Mrebet sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan penerimaan transfer Dana BOS Reguler pada SMP Negeri 2 Mrebet sebesar Rp3.400.000,00.

V.2.E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (SAL) AKHIR _Rp179.575.632.903,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2020 sebesar Rp179.457.545.683,00 yang berasal dari SAL Awal Rp129.993.761.009,00 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp129.990.361.009,00 dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp3.400.000,00 serta ditambah dengan SILPA tahun 2020 sebesar Rp Rp179.457.545.683,00.

V.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Secara ringkas, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.146 Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4=2:3)
Aset Lancar	240.198.409.409,54	202.961.129.112,01	118,35
Investasi Jangka Panjang	279.965.242.344,40	282.855.056.553,70	98,98
Aset Tetap	3.694.832.979.493,00	3.537.691.301.606,00	104,44
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.448.476.098.902,64)	(1.214.460.840.495,60)	119,27
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	3.473.579.546,02	37.282.040.316,76	9,32
Jumlah Aset	**2.769.994.111.890,32**	**2.846.328.687.092,87**	**97,32**
Kewajiban Jangka Pendek	35.696.303.447,75	18.706.493.815,83	190,82
Kewajiban Jangka Panjang	5.151.981.716,63	5.636.062.315,38	91,41
Jumlah Kewajiban	**40.848.285.164,38**	**24.342.556.131,21**	**167,81**
Ekuitas	**2.729.145.826.725,94**	**2.821.986.130.961,66**	**96,71**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**2.769.994.111.890,32**	**2.846.328.687.092,87**	**97,32**

V.3.a. ASET_____Rp2.769.994.111.890,32

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Posisi Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.769.994.111.890,32, mengalami penurunan sebesar Rp76.334.575.202,55 atau 2,68 persen dari posisi per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.147 Rincian Aset Per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Aset Lancar	240.198.409.409,54	202.961.129.112,01	118,35
Investasi Jangka Panjang	279.965.242.344,40	282.855.056.553,70	98,98
Aset Tetap	3.694.832.979.493,00	3.537.691.301.606,00	104,44
Akumulasi Penyusutan	(1.448.476.098.902,64)	(1.214.460.840.495,60)	119,27
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	3.473.579.546,02	37.282.040.316,76	9,32
Jumlah	**2.769.994.111.890,32**	**2.846.328.687.092,87**	**97,32**

V.3.a.1). Aset Lancar_____Rp240.198.409.409,54

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp240.198.409.409,54 mengalami kenaikan sebesar Rp37.237.280.297,53 atau naik 18,35 persen dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019.

Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya saldo kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 yang mencapai lebih dari 200,00 persen.

Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 5.148 Daftar Aset Lancar Per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Kas di Kas Daerah	127.536.210.567,00	110.610.754.109,00	115,30
Kas di Bendahara Penerimaan	103.737.220,00	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.096.156,00	391.454,00	280,02
Kas di BLUD	43.842.705.785,00	13.377.457.666,00	327,74
Kas di Bendahara BOS	9.971.602.148,00	7.919.667.462,00	125,91
Kas Lainnya	14.350.000,00	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang Pendapatan	32.475.307.420,00	46.452.136.974,00	69,91
Piutang Lainnya	161.100.000,00	1.362.999.500,00	
Penyisihan Piutang	(1.466.598.267,50)	(1.283.171.707,05)	114,29
Beban Dibayar Dimuka	232.105.641,58	239.005.529,74	97,11
Persediaan	27.326.792.739,46	24.281.888.124,32	112,54
Jumlah	**240.198.409.409,54**	**202.961.129.112,01**	**118,35**

V.3.a.1).a). Kas di Kas Daerah_____Rp127.536.210.567,00,00

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp127.536.210.567,00 yang yang terdiri dari Giro dan Deposito di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank BPD Jawa Tengah Nomor Rekening 1-027-00000-1, sebagai berikut:

Tabel 5.149 Jenis Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Giro BPD Jawa Tengah	27.536.210.567,00	10.610.754.109,00	259,51
Deposito di BPD Jateng	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
Jumlah	**127.536.210.567,00**	**110.610.754.109,00**	**115,30**

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.925.456.458,00 atau naik 15,30 persen dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp110.610.754.109,00.

Saldo deposito sebesar Rp100.000.000.000,00 seluruhnya merupakan deposito pada PT Bank BPD Jawa Tengah, yang terdiri dari:

Tabel 5.150 Daftar Nomor Bilyet Deposito Per 31 Desember 2020

No	Nama Bank	Nomor Bilyet	Nominal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 274601	10.000.000.000,00
2	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 274602	10.000.000.000,00
3	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 274603	10.000.000.000,00
4	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287614	10.000.000.000,00
5	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287615	10.000.000.000,00
6	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287616	10.000.000.000,00
7	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287617	10.000.000.000,00
8	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287618	10.000.000.000,00
9	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287619	10.000.000.000,00
10	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A 287620	10.000.000.000,00
		Jumlah	**100.000.000.000,00**

V.3.a.1).b). Kas di Bendahara Penerimaan_____Rp103.737.220,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.737.220,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2019. Saldo tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari setoran sewa tanah eks bengkok, yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah	Tanggal Setor ke Kasda
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Wirasana	5.300.000,00	14-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Purbalingga Kulon	2.000.000,00	27-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Bancar	19.069.200,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kedungmenjangan	19.202.653,00	16-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kalikabong	29.835.260,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kandanggampang	17.830.107,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Toyareka	10.500.000,00	27-Apr-21
	103.737.220,00	

Di tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu secara konsisten mendorong seluruh SKPD agar tertib dalam melakukan penatausahaan pendapatan dengan secara kontinu melakukan penyetoran atas pendapatan yang dikelolanya ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

V.3.a.1).c). Kas di Bendahara Pengeluaran_____Rp1.096.156,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 seluruhnya merupakan saldo potongan pajak pusat yang sampai 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara.

Per 31 Desember 2020, total Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.096.156,00, mengalami kenaikan sebesar Rp704.702,00 dibandingkan posisi 31 Desember 2019, atau naik 80,02 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.151 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagian Umum SETDA	72.000,00	-	-
Kecamatan Purbalingga	823.320,00	-	-
Kecamatan Bukateja	168.200,00	295.454,00	56,93
Kecamatan Mrebet	15.909,00	-	-
Kecamatan Bobotsari	16.727,00	-	-
Kelurahan Mewek	-	96.000,00	-
Jumlah	**1.096.156,00**	**391.454,00**	**280,02**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang berupa Utang Pajak pusat tersebut telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.152 Daftar Penyetoran Utang Pajak Tahun 2020

SKPD	Tanggal Penyetoran	Nilai
(1)	(2)	(3)
Bagian Umum SETDA	11-Jan-2021	72.000,00
Kecamatan Purbalingga	11-Jan-2021	823.320,00
Kecamatan Bukateja	28 Jan 2021	168.200,00
Kecamatan Mrebet	1-Feb-2021	15.909,00
Kecamatan Bobotsari	4-Jan-2021	9.091,00
	9-Jan-2021	7.636,00
Jumlah		**1.096.156,00**

V.3.a.1).d). Kas di BLUD_____Rp43.842.705.785,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.842.705.785,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.465.248.119,00 atau naik 227,74 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.377.457.666,00.

Saldo Kas di BLUD tersebut terdapat di 25 entitas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.153 Daftar Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020

BLUD	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
UPTD Puskesmas Purbalingga	98.845.366,00	138.596.689,00	71,32
UPTD Puskesmas Bojong	88.704.359,00	85.961.747,00	103,19
UPTD Puskesmas Kutasari	488.322.119,00	165.610.531,00	294,86
UPTD Puskesmas Bojongsari	272.544.559,00	284.402.527,00	95,83
UPTD Puskesmas Kalimanah	220.911.812,00	100.928.955,00	218,88
UPTD Puskesmas Padamara	391.267.709,00	265.971.907,00	147,11
UPTD Puskesmas Kemangkon	200.089.443,00	234.963.270,00	85,16
UPTD Puskesmas Kaligondang	317.064.609,00	395.807.576,00	80,11
UPTD Puskesmas Kalikajar	228.074.425,00	131.488.853,00	173,46
UPTD Puskesmas Kejobong	386.798.358,00	286.687.898,00	134,92
UPTD Puskesmas Pengadegan	238.946.108,00	210.674.507,00	113,42
UPTD Puskesmas Bukateja	434.725.801,00	440.542.228,00	98,68
UPTD Puskesmas Kutawis	249.717.470,00	300.409.609,00	83,13
UPTD Puskesmas Rembang	244.450.051,00	369.306.708,00	66,19
UPTD Puskesmas Karanganyar	85.507.920,00	165.623.592,00	51,63

BLUD	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
UPTD Puskesmas Karangmoncol	317.632.100,00	196.768.515,00	161,42
UPTD Puskesmas Karangtengah	446.441.624,00	242.433.513,00	184,15
UPTD Puskesmas Bobotsari	156.275.591,00	184.005.067,00	84,93
UPTD Puskesmas Mrebet	315.572.892,00	236.491.067,00	133,44
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	223.610.869,00	106.299.312,00	210,36
UPTD Puskesmas Karangreja	406.700.304,00	439.518.076,00	92,53
UPTD Puskesmas Karangjambu	291.488.303,00	191.310.584,00	152,36
Laboratorium Kesehatan Kabupaten	111.064.498,00	71.009.070,00	156,41
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	32.290.314.289,00	7.786.064.217,00	414,72
RSUD Panti Nugroho	5.337.635.206,00	346.581.648,00	1.540,08
Jumlah	**43.842.705.785,00**	**13.377.457.666,00**	**327,74**

Kenaikan yang sangat signifikan tersebut terutama terdapat pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugoho dengan kenaikan mencapai 314,72 persen dan 1.440,08 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pelampauan pendapatan yang cukup besar di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yaitu Rp33.351.405.492,00 atau 41,69 persen dan di RSUD Panti Nugroho sebesar Rp7.414.368.019,00 atau 29,90 persen. Pelampauan pendapatan tersebut salah satunya berasal dari peningkatan pendapatan klaim BPJS untuk penanganan pasien *Covid-19*.

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp43.842.705.785,00 berasal dari saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp13.377.457.666,00 ditambah dengan Pendapatan BLUD tahun 2020 sebesar Rp206.689.165.359,00 dan penerimaan PFK sebesar Rp10.205.534.599,00 kemudian dikurangi dengan Belanja BLUD tahun 2020 sebesar Rp176.204.775.252,00 dan pengeluaran PFK tahun 2020 sebesar Rp10.224.676.587,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.154 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2020

Uraian	Saldo Awal 2020	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2020
		Pendapatan BLUD	Penerimaan PFK	Belanja BLUD	Pengeluaran PFK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)-(4)-(5)
Kas di BLUD	13.377.457.666,00	206.689.165.359,00	10.205.534.599,00	176.204.775.252,00	10.224.676.587,00	43.842.705.785,00
Jumlah	13.377.457.666,00	206.689.165.359,00	10.205.534.599,00	176.204.775.252,00	10.224.676.587,00	43.842.705.785,00

Saldo Kas di BLUD tahun 2020 terdiri dari kas di Giro BLUD dan Kas di Bendahara Penerimaan BLUD. Terdapat 6 BLUD yang memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan yaitu UPTD Puskesmas Purbalingga, UPTD Puskesmas Bojong, UPTD Puskesmas Padamara, UPTD Puskesmas Pengadegan, UPTD Labkeskab, dan RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.155 Komposisi Kas di BLUD Tahun 2020

BLUD	Giro BLUD	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Purbalingga	98.422.366,00	423.000,00	98.845.366,00
UPTD Puskesmas Bojong	88.392.359,00	312.000,00	88.704.359,00
UPTD Puskesmas Kutasari	488.322.119,00	-	488.322.119,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	272.544.559,00	-	272.544.559,00

BLUD	Giro BLUD	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
UPTD Puskesmas Kalimanah	220.911.812,00	-	220.911.812,00
UPTD Puskesmas Padamara	390.147.709,00	1.120.000,00	391.267.709,00
UPTD Puskesmas Kemangkon	200.089.443,00	-	200.089.443,00
UPTD Puskesmas Kaligondang	317.064.609,00	-	317.064.609,00
UPTD Puskesmas Kalikajar	228.074.425,00	-	228.074.425,00
UPTD Puskesmas Kejobong	386.798.358,00	-	386.798.358,00
UPTD Puskesmas Pengadegan	238.555.108,00	391.000,00	238.946.108,00
UPTD Puskesmas Bukateja	434.725.801,00	-	434.725.801,00
UPTD Puskesmas Kutawis	249.717.470,00	-	249.717.470,00
UPTD Puskesmas Rembang	244.450.051,00	-	244.450.051,00
UPTD Puskesmas Karanganyar	85.507.920,00	-	85.507.920,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	317.632.100,00	-	317.632.100,00
UPTD Puskesmas Karangtengah	446.441.624,00	-	446.441.624,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	156.275.591,00	-	156.275.591,00
UPTD Puskesmas Mrebet	315.572.892,00	-	315.572.892,00
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	223.610.869,00	-	223.610.869,00
UPTD Puskesmas Karangreja	406.700.304,00	-	406.700.304,00
UPTD Puskesmas Karangjambu	291.488.303,00	-	291.488.303,00
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	110.010.998,00	1.053.500,00	111.064.498,00
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	32.290.314.289,00	-	32.290.314.289,00
RSUD Panti Nugroho	5.316.310.632,00	21.324.574,00	5.337.635.206,00
Jumlah	**43.818.081.711,00**	**24.624.074,00**	**43.842.705.785,00**

Jika dibandingkan dengan rekening koran Giro BLUD, terdapat perbedaan pada 3 (tiga) BLUD yaitu UPTD Puskesmas Kutasari, UPTD Puskesmas Kaligondang, dan UPTD Puskesmas Bobotsari. Perbedaan pada 3 BLUD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.156 Selisih Saldo Giro BLUD dan Rekening Koran BLUD Tahun 2020

BLUD	Saldo Giro Menurut Pembukuan	Saldo Giro Menurut Rek Koran	Selisih	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UPTD Puskesmas Kutasari	488.322.119,00	488.372.119	(50.000,00)	Dana Pihak Ketiga
UPTD Puskesmas Kaligondang	317.064.609,00	317.064.709	(100,00)	Kekurangan Transfer Belanja
UPTD Puskesmas Bobotsari	156.275.591,00	156.275.594	(3,00)	Kekurangan Transfer Belanja

Terhadap kekurangan transfer belanja, sudah diproses lebih lanjut di tahun 2021, yaitu tanggal 1 Februari 2021 untuk UPTD Puskesmas Kaligondang, 15 Januari 2021 untuk UPTD Puskesmas Bobotsari dan 19 Maret 2021 untuk UPTD Puskesmas Kutasari.

Khusus untuk BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, total saldo kas pada Giro BLUD sebesar Rp32.290.314.289,00 terdiri dari saldo Dana BLUD sebesar Rp32.164.210.771,00 dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp126.103.518,00 yang terdiri dari Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp47.695.025,00 dan Iuran BPJS karyawan bulan Desember tahun 2020 yang baru disetorkan di bulan Januari 2021 sebesar Rp78.408.493,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.157 Komposisi Kas di BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kas BLUD	32.164.210.771,00	7.641.354.291,00	420,92
Utang PFK	126.103.518,00	144.709.926,00	87,14
Jumlah	**32.290.314.289,00**	**7.786.064.217,00**	**414,72**

V.3.a.1).e). Kas di Bendahara BOS_____Rp7.919.667.462,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.919.667.462,00 merupakan saldo Kas di Bendahara BOS Sekolah Negeri di Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari 459 SD Negeri dan 54 SMP Negeri serta 6 SMP Negeri Satu Atap.

Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.568.344.525,00 atau naik 136,31 persen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.158 Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020

Sekolah Negeri	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
SD Negeri	2.658.647.722,00	4.093.109.862,00	63,71
SMP Negeri	7.312.954.426,00	3.826.557.600,00	195,17
Jumlah	**9.971.602.148,00**	**7.919.667.462,00**	**125,91**

Saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2020 sebesar Rp9.971.602.148,00 di atas terdiri dari Sisa Dana BOS tahun 2020 yang belum dibelanjakan sebesar Rp9.954.283.683,00 dan Utang Pajak Pusat pada SMP Negeri 1 Bobotsari sebesar Rp1.045.453,00 dan 22 SD Negeri dengan total sebesar Rp16.273.012,00.

Sisa Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.971.602.148,00 berasal dari saldo awal Kas BOS 1 Januari 2020 ditambah dengan mutasi masuk berupa pendapatan BOS, pendapatan nonBOS, dan saldo utang pajak tahun 2020 serta dikurangi dengan mutasi keluar berupa belanja BOS dan pembayaran utang pajak tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.159 Rincian Mutasi Dana BOS Tahun 2020

Sekolah	Saldo Awal Kas BOS 01-Jan-20	Kas Masuk	Kas Keluar	Utang Pajak 2020	Saldo Akhir Kas BOS 31-Des-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(4)+(5)
SD Negeri	4.172.752.578,00	62.443.014.461,00	63.973.392.329,00	16.273.012,00	2.658.647.722,00
SMP Negeri	3.746.914.884,00	33.189.348.464,00	29.624.354.375,00	1.045.453,00	7.312.954.426,00
Jumlah	**7.919.667.462,00**	**95.632.362.925,00**	**93.597.746.704,00**	**17.318.465,00**	**9.971.602.148,00**

Saldo utang pajak BOS tahun 2020 seluruhnya sudah disetorkan ke rekening kas negara sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.160 Rincian Penyetoran Utang Pajak Dana BOS Tahun 2020

Uraian	Tanggal Setor	Nominal
(1)	(2)	(3)
SD Negeri 1 Bojongsari	15-Jan-2021	2.803.481,00
SD Negeri 4 Bukateja	2-Feb-2021	562.500,00
SD Negeri 2 Karanggedang	21-Jan-2021	593.280,00

Uraian	Tanggal Setor	Nominal
(1)	(2)	(3)
SD Negeri 3 Bajong	12-Jan-2021	1.323.920,00
SD Negeri 3 Kembangan	4-Feb-2021	924.000,00
SD Negeri 1 Penaruban	4-Feb-2021	1.890.750,00
SD Negeri 1 Buara	2-Feb-2021	28.900,00
SD Negeri 2 Purbasari	11-Feb-2021	8.800,00
SD Negeri 2 Danasari	2-Feb-2021	284.999,00
SD Negeri 1 Tamansari	27-Jan-2021	191.350,00
SD Negeri 1 Langgar	3-Feb-2021	5.000,00
SD Negeri 2 Kemangkon	27-Jan-2021	197.500,00
SD Negeri 2 Muntang	2-Feb-2021	437.950,00
SD Negeri 1 Kemangkon	8-Feb-2021	176.850,00
SD Negeri 2 Serayu Larangan	9-Feb-2021	7.700,00
SD Negeri 1 Serayukaranganyar	3-Feb-2021	611.992,00
SD Negeri 2 Karangturi	2-Feb-2021	880.150,00
SD Negeri 1 Bojong	7-Jan-2021	149.860,00
SD Negeri 1 Karangpule	1-Feb-2021	112.750,00
SD Negeri 1 Tetel	21-Jan-2021	1.444.917,00
SD Negeri 4 Pasunggingan	5-Feb-2021	2.727.273,00
SD Negeri 2 Karangbawang	2-Feb-2021	909.090,00
SMP Negeri 1 Bobotsari	1-Feb-2021	1.045.453,00
Jumlah		**17.318.465,00**

Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOS per Sekolah tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.23.

V.3.a1).f). Kas Lainnya _____Rp14.350.000,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.350.000.00 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Saldo Kas Lainnya tersebut merupakan sisa hibah uang sebesar Rp39.500.000,00 dari PT BPR BKK Purbalingga kepada Bagian Umum Setda yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum digunakan untuk operasional entitas. Dana tersebut sudah dikembalikan ke RKUD pada tanggal 19 April 2021.

V.3.a.1).g). Piutang Pendapatan_____Rp32.475.307.420,00

Piutang Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.475.307.420,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.976.829.554,00 atau turun 30,09 persen dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2019. Rincian saldo Piutang Pendapatan tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.161 Daftar Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pajak	685.563.025,00	273.782.130,00	250,40
Piutang Retribusi	887.674.130,00	231.607.440,00	383,27
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	18.198.088.140,00	35.557.686.982,00	51,18
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.027.852.329,00	7.710.228.104,00	13,33
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.676.129.796,00	2.678.832.318,00	435,87
Jumlah	**32.475.307.420,00**	**46.452.136.974,00**	**69,91**

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP No 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Selain saldo piutang yang telah didukung dengan bukti yang memadai untuk dilakukan pengakuan dan pencatatan dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memiliki tagihan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan insentif tenaga kesehatan yang terkait dengan penanganan Covid-19 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Pusat karena keterbatasan anggaran. Total nilai insentif tenaga kesehatan Covid-19 yang masih terutang sebesar Rp7.550.974.349,00 disajikan pada tabel di bawah.

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	161.428.595,00
2	RSUD Goeteng Taroenadibrata	4.891.428.645,00
3	RSUD Panti Nugroho	1.028.214.334,00
4	Puskesmas Kemangkon	175.000.022,00
5	Puskesmas Bukateja	73.214.296,00
6	Puskesmas Kutawis	6.071.431,00
7	Puskesmas Kejobong	157.857.159,00
8	Puskesmas Pengadegan	26.428.576,00
9	Puskesmas Kaligondang	52.857.149,00
10	Puskesmas Kalikajar	30.000.012,00
11	Puskesmas Purbalingga	85.000.012,00
12	Puskesmas Bojong	46.428.574,00
13	Puskesmas Kalimanah	38.214.296,00
14	Puskesmas Padamara	20.000.006,00
15	Puskesmas Kutasari	58.571.435,00
16	Puskesmas Bojongsari	26.785.715,00
17	Puskesmas Mrebet	172.857.155,00
18	Puskesmas Serayu Larangan	26.785.722,00
19	Puskesmas Bobotsari	66.428.580,00
20	Puskesmas Karangreja	239.188.322,00
22	Puskesmas Karanganyar	8.928.575,00
23	Puskesmas Karangtengah	25.000.008,00
24	Puskesmas Karangmoncol	72.142.863,00
25	Puskesmas Rembang	62.142.867,00
	Jumlah	**7.550.974.349,00**

(1) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp685.563.025,00, bertambah sebesar Rp411.780.895,00 atau naik 150,40 persen dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019. Rincian Piutang Pajak tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.24.

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2020 terdiri dari 3 jenis yaitu Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Air Tanah, dan Piutang PBB-P2 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 5.162 Daftar Piutang Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pajak Reklame	78.286.449,00	95.661.203,00	81,84
Piutang Pajak Air Tanah	73.434.815,00	58.653.675,00	125,20
Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	533.841.761,00	119.467.252,00	446,85
Jumlah	**685.563.025,00**	**273.782.130,00**	**250,40**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 berasal dari saldo awal piutang sebesar Rp273.782.130,00 bertambah dengan pencatatan piutang baru tahun 2020 sebesar Rp523.611.655,00 dan pengurangan karena adanya pelunasan piutang sebesar Rp111.071.160,00 dan koreksi pencatatan piutang PBB a.n. Tower Bersama Group sebesar Rp759.600,00 karena sudah diterima pembayarannya di tahun 2019. Rincian mutasi Piutang Pajak tahun 2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.163 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020

Uraian	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pajak Reklame	95.661.203,00	35.733.344,00	53.108.098,00	78.286.449,00
Piutang Pajak Air Tanah	58.653.675,00	46.295.120,00	31.513.980,00	73.434.815,00
Piutang PBB P2	119.467.252,00	441.583.191,00	27.208.682,00	533.841.761,00
Jumlah	**273.782.130,00**	**523.611.655,00**	**111.830.760,00**	**685.563.025,00**

(a) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.286.449,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.374.754,00 atau turun 18,16 persen.

Penurunan tersebut terjadi karena terdapat banyak wajib pajak yang melunasi piutang di tahun 2020 yang diiringi dengan penambahan piutang baru yang tidak terlalu besar di tahun 2020.

Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2020 terdiri dari piutang tahun 2014 pada Suzuki Motor sebesar Rp3.660.000,00, piutang tahun 2018 sebesar Rp6.502.813,00, piutang tahun 2019 pada 3 Wajib Pajak sebesar Rp32.390.292,00 dan piutang baru tahun 2020 pada 9 Wajib Pajak senilai Rp35.733.344,00, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.164 Rincian Piutang Pajak per Wajib Pajak Tahun 2020

Wajib Pajak	Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)
(1)	(2)	(3)
Suzuki Motor	2014	3.660.000,00
Planet Biru Advertisng	2018	6.441.875,00
Telering Purbalingga	2018	60.938,00
PT World Innovative Telecommunication	2019	745.938,00
Ariyo Dipoyudo Utomo	2019	4.041.250,00
CV. Cipta Kreasi Mandiri	2019	1.491.876,00
Bank Permata	2019	3.167.095,00
Pertamina UPMS Wil IV	2019	1.373.064,00
PT Bass Komunika	2019	19.826.563
PT YNR Promosindo	2019	1.446.876,00
Rejo Putra Elektronik	2019	2.033.282,00
Restoran Joglo	2019	1.517.397,00
Sonic Advertising	2019	702.000,00
Hotel Braling	2019	1.230.000,00
Yoyok Mei Darto	2019	1.086.201,00
PT. Bianglala Nuansa Persada	2020	58.750,00
Bank Central Asia	2020	505.300,00
Mata Advertising	2020	147.000,00
CV. Duta Perkasa	2020	886.154,00
Planet Biru Adv Jogja	2020	182.813,00
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga	2020	22.482.452,00
Ferry Advertising	2020	3.135.625,00
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2020	2.064.000,00
Jumlah		**78.286.449,00**

(b) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.434.815,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.781.140,00, atau naik 25,20 persen dari saldo 31 Desember 2019.

Kenaikan tersebut terjadi karena jumlah pembayaran piutang di tahun 2020 lebih sedikit dari penambahan piutang baru di tahun 2020. Penerimaan piutang di tahun 2020 hanya sebesar Rp46.295.120,00 sedangkan penambahan piutang baru mencapai Rp41.319.640,00.

Saldo piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 terdiri dari piutang tahun 2016 sebesar Rp840.576,00, piutang tahun 2017 sebesar Rp5.728.939,00, piutang tahun 2018 sebesar Rp11.092.520,00, piutang tahun 2019 sebesar Rp9.477.660,00. dan piutang baru tahun 2020 sebesar Rp46.295.120,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.165 Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2020

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Saldo Akhir
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2020	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2+3-4-5)
Piutang Tahun 2016	840.576,00	-	-	-	840.576,00
Piutang Tahun 2017	5.728.939,00	-	-	-	5.728.939,00
Piutang Tahun 2018	11.342.520,00	-	250.000,00	-	11.092.520,00
Piutang Tahun 2019	40.741.640,00	-	31.263.980,00	-	9.477.660,00
Piutang Tahun 2020	-	46.295.120,00	-	-	46.295.120,00
	58.653.675,00	**46.295.120,00**	**31.513.980,00**	**-**	**73.434.815,00**

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.24.

(c) Piutang PBB-P2

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp533.841.761,00 merupakan Piutang PBB pada 3.156 Wajib Pajak. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019, nilai tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp414.374.509,00 atau meningkat 346,85 persen.

Kondisi ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan agar ke depan bisa menerapkan kebijakan yang mampu mendorong tingkat pelunasan PBB-P2 guna mengurangi semakin bertambahnya nilai piutang PBB di tahun yang akan datang. Mengingat bahwa PBB-P2 merupakan sumber PAD terbesar kedua setelah Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU).

Saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 berasal dari saldo awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp119.467.252,00 dikurangi dengan penerimaan piutang PBB-P2 di tahun 2020 sebesar Rp26.449.082,00 dan koreksi piutang sebesar Rp759.600,00 ditambah dengan piutang baru tahun 2020 sebesar Rp441.583.191,00.

Tabel 5.166 Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2020

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		Saldo Akhir
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2020	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2016	680.320,00	-	680.320,00	-	-
Piutang Tahun 2017	1.755.495,00	-	1.755.495,00	-	-
Piutang Tahun 2018	50.828.440,00	-	1.351.348,00	-	49.477.092,00
Piutang Tahun 2019	66.202.997,00	-	22.661.919,00	759.600,00	42.781.478,00
Piutang Tahun 2020	-	441.583.191,00	-	-	441.583.191,00
	119.467.252,00	**441.583.191,00**	**26.449.082,00**	**759.600,00**	**533.841.761,00**

Rincian Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.24.

(2) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp887.674.130,00, merupakan hak Pemerintah Daerah tahun 2020 yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima pembayarannya.

Nilai Piutang Retribusi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp656.066.690,00 atau naik 283,27 persen dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.167 Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	114.196.000,00	114.196.000,00	100,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.275.840,00	17.275.840,00	100,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	164.964.290,00	95.185.600,00	173,31
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	495.750.000,00	-	
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	95.488.000,00	4.950.000,00	1.929,05
Jumlah	**887.674.130,00**	**231.607.440,00**	**243,48**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 berasal dari saldo awal piutang sebesar Rp231.607.440,00 bertambah dengan pencatatan piutang baru tahun 2020 sebesar Rp712.117.890,00 dan berkurang karena adanya pelunasan piutang sebesar Rp56.051.200,00. Rincian mutasi Piutang Retribusi tahun 2020 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.168 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2020

Uraian	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	114.196.000,00	-	-	114.196.000,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.275.840,00	-	-	17.275.840,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.185.600,00	120.879.890,00	51.101.200,00	164.964.290,00
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	495.750.000,00	-	495.750.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.950.000,00	95.488.000,00	4.950.000,00	95.488.000,00
Jumlah	**231.607.440,00**	**712.117.890,00**	**56.051.200,00**	**887.674.130,00**

(a) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp114.196.000,00 merupakan piutang pada Dinas Perhubungan yang terdiri dari:

Tabel 5.169 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Tahun 2013	27.356.000,00	27.356.000,00	100,00
Piutang Tahun 2014	19.505.000,00	19.505.000,00	100,00
Piutang Tahun 2015	13.335.000,00	13.335.000,00	100,00
Piutang Tahun 2016	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
Jumlah	**114.196.000,00**	**114.196.000,00**	**100,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2020 sama dengan saldo piutang per 31 Desember 2019 karena selama tahun 2020, tidak ada pelunasan piutang serta tidak ada mutasi tambah piutang baru.

(b) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019 sebesar Rp17.275.840,00, masih sama dengan saldo Piutang Tahun 2019, merupakan piutang

kepada PT Linggajati Al Manshurin yang sudah berumur lebih dari 4 tahun, sehingga nilai bersihnya sudah Rp0,00.

(c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp164.964.290,00, mengalami kenaikan sebesar Rp69.778.690,00 atau naik 73,31 persen dari saldo piutang tahun 2019.

Seluruh saldo piutang tersebut terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang berupa piutang sewa kios tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 serta piutang sewa rumah dinas tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.170 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020

Tahun	Jumlah Wajib Retribusi	Nilai
(1)	(2)	(3)
2017	4	12.298.000,00
2018	4	22.932.000,00
2019	4	8.854.400,00
2020	28	120.879.890,00
	Jumlah	**164.964.290,00**

Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Keuangan Daerah per tahun per Wajib Retribusi sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.25.

(d) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Saldo Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp495.750.000,00 merupakan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Pasar Hewan sebesar Rp5.000.000,00 dan Pasar Segamas sebesar Rp490.750.000,00.

Piutang retribusi tempat khusus parkir pada pasar hewan merupakan piutang atas pengelolaan parkir tahun 2020 sedangkan piutang retribusi tempat khusus parkir pada Pasar Segamas terdiri dari:

Tahun	Debitur	Total Piutang
(1)	(2)	(3)
2018	CV Adi Perwira	125.000.000,00
2019	CV Adi Perwira	252.500.000,00
2020	CV Maju Mapan	113.250.000,00
	Jumlah	**490.750.000,00**

(e) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp95.488.000,00 berasal dari SKRD yang telah diterbitkan di tahun 2020 namun baru diterima pembayarannya di tahun 2021. Nilai tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp90.538.000,00 atau naik 1.829,05 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019.

Rincian Piutang IMB per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.26.

(3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.198.088.140,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.359.598.842,00 atau turun 48,82 persen dibandingkan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2019.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 hanya terdiri dari piutang BLUD sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.171 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	530.351.510,00	-
Piutang BLUD	18.198.088.140,00	35.027.335.472,00	51,95
Jumlah	**18.198.088.140,00**	**35.027.335.472,00**	**51,18**

(a) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan

Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan 100,00% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp530.351.510,00.

Piutang tahun 2019 sebesar Rp530.351.510,00 tersebut merupakan piutang kepada CV Joglo Multiayu, Jakarta atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan GOR Tertutup pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang putus kontrak. Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan telah dibayarkan oleh PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga pada tanggal 10 Juli 2020 sehingga per 31 Desember 2020 sudah tidak ada saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan.

(b) Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2020 merupakan piutang yang ada pada seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.198.088.140,00, mengalami penurunan Rp16.829.247.332,00 atau turun 48,05 persen dibandingkan saldo Piutang BLUD tahun 2019 sebesar Rp35.027.335.472,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.172 Saldo Piutang BLUD per Unit BLUD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
UPTD Puskesmas Kutasari	9.100.000,00	5.600.000,00	162,50
UPTD Puskesmas Bojongsari	1.600.000,00	40.100.000,00	3,99
UPTD Puskesmas Kalimanah	2.665.000,00	45.880.000,00	5,81
UPTD Puskesmas Padamara	22.400.000,00	28.981.500,00	77,29
UPTD Puskesmas Kemangkon	12.597.100,00	-	-
UPTD Puskesmas Kaligondang	-	1.260.000,00	-
UPTD Puskesmas Kejobong	-	49.100.000,00	-
UPTD Puskesmas Pengadegan	16.755.000,00	14.305.000,00	117,13
UPTD Puskesmas Bukateja	4.997.100,00	23.070.000,00	21,66

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
UPTD Puskesmas Kutawis	7.700.000,00	1.830.000,00	420,77
UPTD Puskesmas Rembang	55.724.000,00	36.990.000,00	150,65
UPTD Puskesmas Karanganyar	25.885.000,00	81.105.000,00	31,92
UPTD Puskesmas Karangmoncol	52.165.200,00	131.598.500,00	39,64
UPTD Puskesmas Karangtengah	22.794.200,00	25.835.000,00	88,23
UPTD Puskesmas Bobotsari	39.500.000,00	76.160.000,00	51,86
UPTD Puskesmas Mrebet	20.900.000,00	4.100.000,00	509,76
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	58.000.000,00	102.520.000,00	56,57
UPTD Puskesmas Karangreja	54.790.000,00	115.941.500,00	47,26
UPTD Puskesmas Karangjambu	6.684.000,00	19.250.000,00	34,72
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	34.817.000,00	29.815.000,00	116,78
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	10.049.337.340,00	30.063.772.672,00	33,43
RSKBD Panti Nugroho	7.699.677.200,00	4.130.121.300,00	186,43
Jumlah	**18.198.088.140,00**	**35.027.335.472,00**	**51,95**

Nilai Piutang BLUD tersebut berasal dari saldo awal Piutang BLUD sebesar Rp35.027.335.472, mutasi tambah sebesar Rp16.766.947.243,00 dan mutasi kurang sebesar Rp33.557.199.863,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.173 Mutasi Piutang BLUD Tahun 2020

Uraian	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)
Piutang Pasien	1.388.004.064,00	29.000.393,00	554.712,00	1.416.449.745,00
Piutang Jasa Pelayanan	33.576.083.408,00	16.709.590.150,00	33.557.199.863,00	16.728.473.695,00
Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama	63.248.000,00	28.356.700,00	38.440.000,00	53.164.700,00
Jumlah	**35.027.335.472,00**	**16.766.947.243,00**	**33.596.194.575,00**	**18.198.088.140,00**

- Piutang Pasien

  Piutang Pasien per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.416.449.745,00 merupakan saldo Piutang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata kepada pasien yang timbul karena ketidakmampuan pasien untuk membayar biaya perawatan, baik sebagian maupun keseluruhan.

  Jumlah Piutang Pasien tersebut terdiri dari akumulasi saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.388.004.064,00 ditambah dengan piutang pasien tahun 2020 sebesar Rp29.000.393,00 dikurangi dengan pelunasan piutang pasien sebesar Rp554.712,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.174 Rincian Mutasi Piutang Pasien per 31 Desember 2020

URAIAN	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
		Piutang Baru	Pelunasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pasien Tahun 2020	-	29.000.393,00	-	29.000.393,00
Piutang Pasien Tahun 2019	63.345.074,00	-	554.712,00	62.790.362,00
Piutang Pasien Tahun 2018	49.835.573,00	-	-	49.835.573,00
Piutang Pasien Tahun 2017	99.182.714,00	-	-	99.182.714,00
Piutang Pasien Tahun 2016	193.991.893,00	-	-	193.991.893,00
Piutang Pasien Tahun 2015	89.621.661,00	-	-	89.621.661,00

URAIAN	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
		Piutang Baru	Pelunasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pasien Tahun 2014	109.017.584,00	-	-	109.017.584,00
Piutang Pasien Tahun 2013	110.978.261,00	-	-	110.978.261,00
Piutang Pasien Tahun ≤ 2012	672.031.304,00	-	-	672.031.304,00
Total Piutang	**1.388.004.064,00**	**29.000.393,00**	**554.712,00**	**1.416.449.745,00**

- Piutang Jasa Pelayanan BLUD

  Saldo Piutang Jasa Pelayanan BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.728.473.695,00, mengalami penurunan sebesar Rp16.847.609.713,00 atau turun 50,18 persen dibandingkan saldo Piutang Jasa Pelayanan BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.576.083.408,00.

  Piutang tersebut merupakan piutang kepada pengelola asuransi kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pelunasannya oleh BLUD. Nilai tersebut berasal dari saldo awal tahun 2020 sebesar Rp33.576.083.408,00, penambahan piutang baru sebesar Rp16.709.590.150,00, pengurangan piutang karena pelunasan sebesar Rp33.557.199.863,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.175 Rincian Mutasi Piutang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2020

BLUD	31-Des-19	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-20
		Piutang Baru	Pelunasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pusk Kutasari	5.600.000,00	9.100.000,00	5.600.000,00	9.100.000,00
Pusk Bojongsari	40.100.000,00	1.600.000,00	40.100.000,00	1.600.000,00
Pusk Kalimanah	45.880.000,00	2.665.000,00	45.880.000,00	2.665.000,00
Pusk Padamara	28.981.500,00	22.400.000,00	28.981.500,00	22.400.000,00
Pusk Kemangkon	-	12.597.100,00	-	12.597.100,00
Pusk Kaligondang	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-
Pusk Kejobong	49.100.000,00	-	49.100.000,00	-
Pusk Pengadegan	14.305.000,00	16.755.000,00	14.305.000,00	16.755.000,00
Pusk Bukateja	23.070.000,00	4.997.100,00	23.070.000,00	4.997.100,00
Pusk Kutawis	1.830.000,00	7.700.000,00	1.830.000,00	7.700.000,00
Pusk Rembang	36.990.000,00	55.724.000,00	36.990.000,00	55.724.000,00
Pusk Karanganyar	81.105.000,00	25.885.000,00	81.105.000,00	25.885.000,00
Pusk Karangmoncol	131.598.500,00	52.165.200,00	131.598.500,00	52.165.200,00
Pusk Karangtengah	25.835.000,00	22.794.200,00	25.835.000,00	22.794.200,00
Pusk Bobotsari	76.160.000,00	39.500.000,00	76.160.000,00	39.500.000,00
Pusk Mrebet	4.100.000,00	20.900.000,00	4.100.000,00	20.900.000,00
Pusk Serayu Larangan	102.520.000,00	58.000.000,00	102.520.000,00	58.000.000,00
Pusk Karangreja	115.941.500,00	54.790.000,00	115.941.500,00	54.790.000,00
Pusk Karangjambu	19.250.000,00	6.684.000,00	19.250.000,00	6.684.000,00
Labkes	29.815.000,00	34.817.000,00	29.815.000,00	34.817.000,00
RSUD R. Goeteng T	28.612.520.608,00	8.560.839.350,00	28.593.637.063,00	8.579.722.895,00
RSUD Panti Nugroho	4.130.121.300,00	7.699.677.200,00	4.130.121.300,00	7.699.677.200,00
Jumlah	**33.576.083.408,00**	**16.709.590.150,00**	**33.557.199.863,00**	**16.728.473.695,00**

Rincian piutang jasa pelayanan BLUD per Lembaga dapat disajikan pada tabel di bawah. Piutang kepada BPJS Kesehatan masih mendominasi dengan total mencapai Rp16.147.181.167,00 atau 96.53% dari total piutang jasa pelayanan BLUD.

Tabel 5.176 Rincian Piutang Jasa Pelayanan BLUD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang kepada BPJS Kesehatan	16.147.181.167,00	33.444.692.994,00	48,28
Piutang kepada YAKES TELKOM	9.422.615,00	14.582.300,00	64,62
Piutang kepada Jasa Raharja	441.725.835,00	43.810.543,00	1.008,26
Piutang kepada In Health	826.051,00	3.480.201,00	23,74
Piutang kepada BPJS Ketenagakerjaan	2.767.881,00	23.792.498,00	11,63
Piutang TB-MDR	104.866.628,00	34.418.068,00	304,68
PT KAI (Persero)	192.748,00	565.480,00	-
Jamkesda Banjarnegara	21.490.770,00	10.741.324,00	-
Jumlah	**16.728.473.695,00**	**33.576.083.408,00**	**49,82**

- Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD

  Saldo Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp53.164.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.083.300,00 atau turun 15,94 persen dibandingkan saldo Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD per 31 Desember 2019.

  Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD merupakan piutang pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang berasal dari kerja sama antara RSUD dengan pihak lain terkait dengan pemanfaatan aset rumah sakit maupun kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para mahasiswa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.177 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pendapatan Diklat	29.883.000,00	12.248.000,00	243,98
Piutang Pendapatan Sewa Kios PKL	22.000.000,00	51.000.000,00	43,14
Piutang Pendapatan Jasa antar obat	166.300,00	-	-
Piutang Pendapatan Jasa Pembuatan Kartu Identitas Pasien	1.115.400,00	-	-
Jumlah	**53.164.700,00**	**63.248.000,00**	**84,06**

(4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.027.852.329,00 merupakan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil SDA/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.682.375.775,00 atau turun 86,67 persen dari saldo per 31 Desember 2019.

Pencatatan piutang tersebut dilakukan berdasarkan data kurang bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 serta

juga PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Sedangkan piutang tahun 2019 telah diterima seluruhnya di tahun 2020.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.178 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Bagi Hasil Pajak	**608.422.017,00**	**7.426.825.925,00**	**8,19**
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	200.953.069,00	632.167.994,00	31,79
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	-	-	-
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	152.983.497,00	2.505.463.806,00	6,11
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	4.082.274.887,00	-
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	254.485.451,00	206.919.238,00	122,99
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	**419.430.312,00**	**283.402.179,00**	**148,00**
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	159.146.941,00	8.056.162,00	1.975,47
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	229.300.150,00	3.677.289,00	6.235,58
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	-	31.326.485,00	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	30.983.221,00	240.342.240,00	12,89
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	-	3,00	-
Jumlah	**1.027.852.329,00**	**7.710.228.104,00**	**13,33**

(5) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.676.129.796,00, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp8.997.297.478,00 atau naik 335,87 persen dari saldo per 31 Desember 2019.

Pencatatan ini dilakukan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 971.1/4475 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah TA 2020 serta Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Dana Transfer dan Kurang Salur kepada Kabupaten/Kota sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2020 Nomor 01/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021 s.d Nomor 35/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021 tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2021.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.179 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil PKB	5.619.499.486,00	1.715.237.416,00	327,62
Bagi Hasil BBNKB	2.181.779.156,00	951.851.187,00	229,21
Bagi Hasil PBBKB	3.853.695.486,00	3.551.151,00	108.519,62
Bagi Hasil PAP	21.155.668,00	8.192.564,00	258,23
Jumlah	**11.676.129.796,00**	**2.678.832.318,00**	**435,87**

V.3.a.1).h). Piutang Lainnya _____Rp161.100.000,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp161.100.000,00, mengalami penurunan sebesar 88,18 persen dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2019.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 merupakan uang muka pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada CV Maju Nata untuk pembangunan SD N 1 Pagerandong Kecamatan Kaligondang tahun 2020 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 1 Pagerandong Kecamatan Kaligondang merupakan pekerjaan yang didanai dengan Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan nilai kontrak sebesar Rp537.000.000,00.

Pelaksanaan pekerjaan fisik telah diselesaikan dan pembayaran telah dilakukan seluruhnya dengan SP2D Nomor SP2D-14961/LS/1.01.01.01/2020 tanggal 20 November 2020 sebesar Rp161.000.000,00 dan SP2D-18202/LS/1.01.01.01/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp375.900.000,00.

Sampai dengan tahun anggaran berakhir, uang muka pelaksanaan pekerjaan belum dikembalikan oleh CV Maju Nata ke RKUD dan baru disetorkan kembali pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp50.000.000,00 dan tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp50.000.000,00.

V.3.a.1).i). Penyisihan Piutang _____(Rp1.466.598.267,50)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.466.598.267,50), bertambah sebesar (Rp183.426.560,45) atau meningkat 14,29 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019.

Kenaikan ini terjadi karena saldo piutang per 31 Desember 2019 sebagian besar belum tertagih sehingga meningkatkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2020. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.180 Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Penyisihan Piutang Pajak	(51.976.530,25)	(25.224.724,65)	206,05
Penyisihan Piutang Retribusi	(188.699.440,00)	(144.174.340,00)	130,88
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.225.922.297,25)	(1.113.772.642,40)	110,07
Jumlah	**(1.466.598.267,50)**	**(1.283.171.707,05)**	**114,29**

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.27.

V.3.a.1).j). Beban Dibayar di Muka_____Rp232.105.641,58

Beban Dibayar di Muka merupakan belanja SKPD yang dikeluarkan di tahun 2019 namun sebagiannya untuk membayar beban tahun 2020. Nilai Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp232.105.641,58, mengalami penurunan sebesar Rp6.899.888,16 atau turun 2,89 persen dari saldo per 31 Desember 2019.
Seluruh saldo beban dibayar di muka tersebut merupakan Beban Jasa Dibayar di Muka, yang terdiri dari:

Tabel 5.181 Rincian Daftar Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Asuransi Barang Milik Daerah Dibayar di Muka	146.217.222,64	136.533.739,74	107,09
Asuransi Tanggung Gugat Dibayar di Muka	62.062.666,67	73.472.000,00	84,47
Asuransi Kecelakaan Kerja Dibayar di Muka	-	1.528.000,00	-
Beban Listrik Dibayar di Muka	23.508.375,22	27.471.790,00	85,57
Beban Jasa Pihak Ketiga dibayar dimuka	317.377,05	-	
Jumlah	**232.105.641,58**	**239.005.529,74**	**97,11**

(1) Asuransi Barang Milik Daerah Dibayar di Muka

Asuransi Barang Milik Daerah Dibayar di Muka tahun 2020 merupakan pembayaran atas asuransi kendaraan dinas pada Badan Keuangan Daerah dan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata periode 2020-2021 yang sudah dibayarkan preminya di tahun 2020.

Saldo Asuransi Barang Milik Daerah Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp146.217.222,64, bertambah sebesar Rp9.683.482,90 atau naik 7,09 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebagaimaan dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.182 Daftar Asuransi BMD Dibayar di Muka per SKPD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	1.371.321,00	1.324.274,00	103,55
Badan Keuangan Daerah	144.845.901,64	135.209.465,74	107,13
Jumlah	**146.217.222,64**	**136.533.739,74**	**107,09**

(2) Asuransi Tanggung Gugat Dibayar di Muka

Asuransi Tanggung Gugat Dibayar di Muka Tahun 2020 merupakan pembayaran atas premi asuransi tanggung gugat bagi para dokter pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho.

Saldo Asuransi Tanggung Gugat Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp62.062.666,67,00, turun sebesar Rp11.409.333,33 atau turun 15,53 persen dari saldo per 31 Desember 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.183 Daftar Asuransi Tanggung Gugat Dibayar di Muka per SKPD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	48.361.000,00	46.672.000,00	103,62
RSUD Panti Nugroho	13.701.666,67	26.800.000,00	51,13
Jumlah	**62.062.666,67**	**73.472.000,00**	**84,47**

(3) Beban Listrik Dibayar di Muka

Saldo Beban Listrik Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.508.375,22, turun sebesar Rp3.963.414,78 atau turun 14,43 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Beban Listrik Dibayar di Muka merupakan biaya pembayaran listrik prabayar pada 10 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.184 Daftar Beban Listrik Dibayar di Muka per SKPD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.383.056,00	1.482.385,00	93,30
Kecamatan Kemangkon	1.500.000,00	120.000,00	1.250,00
Kecamatan Bukateja	4.873.014,22	1.845.892,00	263,99
Kecamatan Kaligondang	-	3.356.000,00	-
Kecamatan Purbalingga	6.493.748,00	7.333.929,00	88,54
Kecamatan Kalimanah	-	86.500,00	-
Kecamatan Kutasari	3.294.882,00	2.884.218,00	-
Kecamatan Mrebet	807.000,00	2.036.868,00	-
Kecamatan Bojongsari	1.578.492,00	-	-
Kecamatan Padamara	3.118.842,00	2.293.984,00	135,96
Kecamatan Pengadegan	295.900,00	4.010.000,00	7,38
Kecamatan Karangjambu	163.441,00	20.558,00	795,02
Kecamatan Kertanegara	-	2.001.456,00	-
Jumlah	**23.508.375,22**	**27.471.790,00**	**85,57**

(4) Beban Jasa Pihak Ketiga dibayar di Muka

Saldo Beban Jasa Pihak Ketiga dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp317.377,05.

Beban Jasa Pihak Ketiga dibayar dimuka merupakan biaya pembayaran sewa pengharum ruangan di Badan Keuangan Daerah kepada PT. Calmic Indonesia.

V.3.a.1).k). Persediaan_____Rp27.326.792.739,46

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.326.792.739,46, meningkat sebesar Rp3.044.904.615,14 atau naik 12,54 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019.

Terhitung mulai tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menerapkan kodefikasi yang baru terhadap persediaan dan aset tetap sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Oleh karena itu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang dapat diperbandingkan, saldo persediaan tahun 2019 disajikan kembali dengan menggunakan rekening Permendagri 108 Tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.185 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Bahan	9.318.074.843,25	6.444.083.650,12	144,60
Suku Cadang	1.060.507.992,00	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatam Kantor	2.110.958.248,01	1.665.297.394,74	126,76
Obat-obatan	10.237.187.325,20	11.153.925.471,46	91,78
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	4.324.367.104,00	4.978.280.563,00	86,86
Natura dan Pakan	157.009.327,00	40.301.045,00	389,59
Persediaan Penelitian	118.687.900,00	-	-
Jumlah	**27.326.792.739,46**	**24.281.888.124,32**	**112,54**

Rincian Persediaan per Jenis per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.28.

(1) Bahan

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.318.074.843,25, meningkat sebesar Rp2.873.991.193,13 atau naik 44,60 persen dari saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.186 Rincian Persediaan Bahan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Bahan Bangunan dan Kontruksi	574.389.125,00	1.187.426.800,00	48,37
Bahan Kima	1.135.966.148,00	1.051.294.122,00	108,05
Bahan Bakar dan Pelumas	154.634.850,00	112.538.600,00	137,41
Bahan Baku	5.482.650,00	-	-
Bahan/Bibit Tanaman	600.000,00	-	-
Bahan Lainnya	475.000,00	-	-
Isi Tabung Gas	7.446.527.070,25	4.092.824.128,12	181,94
Jumlah	**9.318.074.843,25**	**6.444.083.650,12**	**144,60**

Saldo persediaan Bahan di atas terdapat di 38 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata senilai Rp3.347.176.425,00 atau 35,92 persen dari total saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2020. Daftar 5 SKPD dengan saldo persediaan Bahan terbesar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.187 Lima SKPD dengan Persediaan Bahan Terbesar per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	Rasio terhadap Total Persediaan Bahan (Persen)
(1)	(2)	(3)
RSUD Goeteng Taroenadibrata	3.347.176.425,00	35,92
Dinas Kesehatan	2.939.765.051,00	31,55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	668.449.125,00	7,17
RSUD Panti Nugroho	656.692.783,00	7,05
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	166.294.462,00	1,78

(2) Suku Cadang

Saldo Suku Cadang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.060.507.992,00, bertambah sebesar Rp1.060.507.992,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.188 Rincian Suku Cadang per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Suku Cadang Alat Kedokteran	16.757.600,00	-	-
Suku Cadang Alat Laboratorium	1.043.715.392,00	-	-
Suku Cadang Alat Bengke	35.000,00	-	-
Jumlah	**1.060.507.992,00**	**-**	**-**

Nilai Persediaan Suku Cadang di atas terdapat di 10 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp930.952.237,00 atau 87,78 persen dari total saldo Suku Cadang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.189 Lima SKPD dengan Suku Cadang Terbesar per 31 Desember 2020

SKPD	Nilai	Rasio
Dinas Kesehatan	930.952.237,00	87,78
RSUD Goeteng Taroenadibrata	84.569.505,00	7,97
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.667.750,00	1,95
Dinas Perhubungan	18.280.000,00	1,72
UPTD Puskesmas Karanganyar	4.255.000,00	0,40
RSUD Panti Nugroho	1.178.000,00	0,11
UPTD Puskesmas Kalimanah	525.000,00	0,05
UPTD Puskesmas Kejobong	35.000,00	0,00
UPT SMP Negeri 1 Karangjambu	33.500,00	0,00
UPT SMP Negeri 2 Bojongsari	12.000,00	0,00
Jumlah	**1.060.507.992,00**	**100,00**

(3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.110.958.248,01, bertambah sebesar Rp445.660.853,27 atau naik 26,76 persen dari saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.190 Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Alat Tulis Kantor	1.111.846.362,00	743.113.574,67	149,62
Kertas dan Cover	61.126.057,00	-	-
Bahan Cetak	119.163.195,00	450.802.744,00	26,43
Benda POS	8.621.000,00	9.401.500,00	91,70
Bahan Komputer	38.587.200,00	-	-
Perabot Kantor	122.004.508,34	680.000,00	17.941,84
Alat Listrik	77.103.431,00	363.056.942,00	21,24
Perlengkapan Dinas	567.279.244,67	1.622.500,00	34.963,28
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	3.602.500,00	-	-
Suvenir/Cendera Mata	-	5.580.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.624.750,00	91.040.134,07	1,78
Jumlah	**2.110.958.248,01**	**1.665.297.394,74**	**126,76**

Nilai Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor di atas terdapat di 111 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai Rp517.571.613,00,00 atau 24,52 persen dari total saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor. Daftar 5 SKPD dengan saldo terbesar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.191 Lima SKPD dengan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Terbesar per 31 Desember 2020

SKPD	Nilai	Rasio
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	517.571.613,00	24,52
Dinas Kesehatan	287.113.690,00	13,60
Dinas Perhubungan	226.193.750,00	10,72
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	214.921.125,00	10,18
RSUD Goeteng Taroenadibrata	202.850.932,00	9,61

(4) Obat-Obatan

Saldo Obat-Obatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.237.187.325,20, berkurang sebesar Rp916.738.146,26 atau turun 8,22 persen dari saldo Obat-Obatan per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.192 Rincian Obat-Obatan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Obat-Obatan	10.237.187.325,20	11.112.914.464,46	92,12
Obat-Obatan Lainnya	-	41.011.007,00	-
Jumlah	**10.237.187.325,20**	**11.153.925.471,46**	**91,78**

Nilai Obat-Obatan di atas terdapat di 28 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp3.592.843.371,99 atau 35,10 persen dari total saldo persediaan Obat-Obatan. Daftar 5 SKPD dengan saldo persediaan obat-obatan terbesar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.193 SKPD dengan Obat-Obatan Terbesar per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	Rasio terhadap Total Persediaan Bahan (Persen)
(1)	(2)	(3)
Dinas Kesehatan	3.592.843.371,99	35,10
RSUD Goeteng Taroenadibrata	2.654.764.554,00	25,93
RSUD Panti Nugroho	535.691.163,00	5,23
UPTD Puskesmas Kalimanah	249.343.411,00	2,44
UPTD Puskesmas Bobotsari	237.042.072,00	2,32

(5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.324.367.104,00, berkurang sebesar Rp653.913.459,00 atau turun 13,14 persen dari saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.194 Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	4.324.367.104,00	4.978.280.563,00	86,86
Jumlah	4.324.367.104,00	4.978.280.563,00	**86,86**

Nilai Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan di atas terdapat di 9 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Perumahan dan Permukiman dengan nilai Rp2.576.836.600,00 atau 59,59 persen dari total saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan. Sedangkan SKPD dengan saldo persediaan Untuk Dijual/Diserahkan paling sedikit adalah UPTD Puskesmas Karanganyar sebesar Rp10.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.195 Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per SKPD per 31 Desember 2020

SKPD	Saldo	Rasio
Dinas Perumahan dan Permukiman	2.576.836.600,00	59,59
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1.184.986.766,00	27,40
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	229.278.350,00	5,30
Dinas Kesehatan	198.936.313,00	4,60
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131.095.875,00	3,03
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.912.000,00	0,07
UPTD Puskesmas Kejobong	175.000,00	0,00
RSUD Panti Nugroho	136.200,00	0,00
UPTD Puskesmas Karanganyar	10.000,00	0,00
Jumlah	**4.324.367.104,00**	**100,00**

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.576.836.600,00 merupakan bangunan Sarpras Air Bersih Curug Karang yang akan dihibahkan kepada masyarakat.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp1.184.986.766,00 merupakan sisa alat dan obat kontrasepsi serta bantuan sosial yang akan diserahkan kepada pihak ketiga seperti klinik kesehatan maupun masyarakat**.**

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp229.278.350,00 merupakan Persediaan Bahan Pangan berupa gabah yang digunakan sebagai *buffer* apabila suatu saat terjadi bencana di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp198.936.313,00 merupakan alat kesehatan yang akan dihibahkan kepada Klinik NU Bukateja dan Karangmoncol.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada BPBD sebesar Rp131.095.875,00,00 merupakan sisa persediaan material maupun bahan pangan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

(6) Natura dan Pakan

Saldo persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp157.009.327,00, bertambah sebesar Rp116.708.282,00 atau naik 289,59 persen dari saldo Natura dan Pakan per 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.196 Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Natura dan Pakan	157.009.327,00	40.301.045,00	389,59
Jumlah	**157.009.327,00**	**40.301.045,00**	**389,59**

Nilai persediaan Natura dan Pakan di atas terdapat di 5 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberadayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai Rp63.030.000,00 atau 40,14 persen dari total saldo Natura dan Pakan. Daftar SKPD yang memiliki saldo Natura dan Pakan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.197 SKPD dengan Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	Rasio terhadap Total Persediaan Bahan (persen)
(1)	(2)	(3)
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	63.030.000,00	40,14
RSUD Goeteng Taroenadibrata	54.876.317,00	34,95
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.236.700,00	18,62
RSUD Panti Nugroho	9.843.710,00	6,27
Dinas Perumahan dan Permukiman	22.600,00	0,01

(7) Persediaan Penelitian dan Teknologi

Saldo Persediaan Penelitian dan Teknologi per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.687.900,00 yang seluruhnya terdapat di Dinas Pertanian, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.198 Saldo Persediaan Penelitian dan Teknologi per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Persediaan Penelitian dan Teknologi	118.687.900,00	-	-
Jumlah	118.687.900,00	-	**-**

V.3.a.2). Investasi Jangka Panjang_____Rp279.965.242.344,40

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.965.242.344,40, mengalami penurunan sebesar Rp2.889.814.209,30 atau turun 1,02 persen dibandingkan posisi 31 Desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.199 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Investasi Non Permanen	-	-	-
Investasi Permanen	279.965.242.344,40	282.855.056.553,70	98,98
Jumlah	**279.965.242.344,40**	**282.855.056.553,70**	**98,98**

V.3.a.2).a). Investasi Jangka Panjang Non Permanen_____Rp0,00

Sesuai dengan Bultek SAP Nomor 7, Dana Bergulir disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap saldo Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dana Bergulir per 31 Desember 2020 disisihkan seluruhnya sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih karena telah berumur lebih dari 5 tahun.

Pengurangan nilai Dana Bergulir di tahun 2020 terjadi karena terdapat penerimaan pengembalian dana bergulir sejumlah 11.500.000,00.

Tabel 5.200 Daftar Dana Bergulir Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dana Bergulir	2.934.844.474,00	2.946.344.474,00	99,60
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.934.844.474,00)	(2.946.344.474,00)	99,60
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Dana Bergulir di Kabupaten Purbalingga terdapat pada Rincian Dana Bergulir per SKPD pada Lampiran 5.29.

V.3.a.2).b). Investasi Jangka Panjang Permanen_____Rp279.965.242.344,40

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.965.242.344,40 yang merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/Perusahaan Daerah. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.889.814.209,30 atau turun 1,02 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2019, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.201 Perkembangan Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2020

BUMD	Persen Kepemilikan	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
Metode Ekuitas *(Equity Method)*				
- PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	41,14%	26.894.061.489,31	25.817.969.176,46	104,17
- PD BPR Artha Perwira	100,00%	24.959.582.677,43	23.975.173.453,95	104,11
- PT BPRS Buana Mitra Perwira	58,56%	9.343.514.770,67	8.370.556.722,97	111,62
- PD Purbalingga Ventura	100%	-	225.343.003,00	-
- Perumda Owabong	100%	66.720.751.418,00	81.283.295.366,00	82,08
- Perumda Air Minum Tirta Perwira	100%	108.479.565.927,00	103.346.849.527,00	104,97
- Perumda Puspahastama	100%	6.294.766.062,00	3.562.869.304,32	176,68
Metode Biaya *(Cost Method)*				
- PT Bank BPD Jawa Tengah	0,92%	34.605.000.000,00	33.605.000.000,00	102,98
- PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	0,70%	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	100,00
- PT PRPP Jawa Tengah		128.000.000,00	128.000.000,00	100,00
Jumlah		**279.965.242.344,40**	**282.855.056.553,70**	**98,98**

Pandemi *covid-19* yang terjadi di sepanjang tahun 2020 telah memberikan tekanan yang cukup besar kepada hampir seluruh sektor perekonomian. Dari total 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebenarnya hanya Perumda Owabong yang mengalami penurunan nilai penyertaan di tahun 2020, akan tetapi karena penurunannya sangat signifikan membuat nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai investasi permanen tahun 2019. Penurunan kinerja Perumda Owabong yang sangat signifikan di tahun 2020 telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional bagian V.4.a.1).c).

Untuk BUMD yang pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas, nilai investasi permanen diperoleh dengan cara mengalikan persentase kepemilikan saham Pemerintah pada masing-masing BUMD dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2020 sedangkan

untuk nilai investasi pada perusahaan minoritas dicatat sesuai dengan jumlah penyertaan yang telah disetorkan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.202 Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD / Perusahaan per 31 Desember 2020

BUMD	Status Laporan Keuangan	Ekuitas BUMD 31 Des 2020	% Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2020
(1)		(2)	(3)	(4)=(2x3)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	A	65.372.050.290,00	41,14%	26.894.061.489,31
PD BPR Artha Perwira	A	24.959.582.677,43	100,00%	24.959.582.677,43
PT BPRS Buana Mitra Perwira	A	15.955.455.551,00	58,56%	9.343.514.770,67
Perumda OWABONG	A	66.720.751.418,00	100,00%	66.720.751.418,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	A	108.479.565.927,00	100,00%	108.479.565.927,00
Perumda Puspahastama	A	6.294.766.062,00	100,00%	6.294.766.062,00
PT BPD Jawa Tengah	A	73.106.133.918,00	0,92%	34.605.000.000,00
PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	NA		0,70%	2.540.000.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	NA		0,00%	128.000.000,00
		360.888.305.843,43		**279.965.242.344,40**

Tabel 5.196 menunjukkan bahwa kenaikan nilai investasi permanen yang paling signifikan terjadi pada Perumda Air Minum Tirta Perwira yaitu sebesar Rp5.132.716.400,00. Hal ini terjadi seiring dengan kenaikan ekuitas bersih perusahaan, baik karena laba bersih maupun adanya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa *fresh money*.

Laporan Keuangan PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) tahun 2020 telah diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00011/2.0282/AU.2/07/0182/1/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.

Laporan Keuangan PD BPR Artha Perwira tahun 2020 telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 0009/3.0217/AU.2/07/1417-1/1/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

Laporan Keuangan PT BPRS Buana Mitra Perwira tahun 2020 telah diaudit oleh KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00003/0946/AU.2/07/1052-3/1/I-2021 tanggal 27 Januari 2021. Pengecualian atas Laporan Keuangan PT BPRS Buana Mitra Perwira tahun 2020 disebabkan karena Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP Bab 24 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan nilai investasi permanen pada PD Purbalingga Ventura di tahun 2020 adalah Rp0,00 seiring dengan telah dilakukannya likuidasi terhadap PD Purbalingga Ventura sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020.

Laporan Keuangan Perumda Owabong tahun 2020 telah diaudit oleh KAP Siswanto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00035/2.1163/AU.2/05/1388-1/1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Perwira tahun 2020 telah diaudit oleh KAP I. Soetikno dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan

Auditor Independen Nomor 00005/2.0393/AU.2/04/0370/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

Laporan Keuangan Perumda Puspahastama tahun 2020 telah diaudit oleh KAP Tarmizi Achmad dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.0604/AU.2/05/0430/1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021. Pengecualian terdapat pada beberapa transaksi yang tidak didukung dengan bukti yang cukup dan memadai.

Sedangkan total nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT Bank BPD Jawa Tengah merupakan total penyertaan modal yang telah setorkan kepada PT BPD Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah Tahun 2020 *(Audited)*. Total kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebanyak 33.605 lembar saham senilai Rp34.605.000.000 ekivalen dengan 0,92 persen kepemilikan.

PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan hasil penggabungan/merger dari seluruh PD BKK se Jawa Tengah termasuk di dalamnya adalah PD BPR BKK Karangmoncol, yang diputuskan dalam RUPS-LB PD BKK Se-Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2020. Berdasarkan Neraca Pembukaan PT BKK Jawa Tengah (Perseroda), nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar Rp2.540.000.000,00 atau hanya setara dengan 0,70 persen dari total Modal Disetor PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) yang mencapai Rp338.260.000.000,00.

V.3.a.3). Aset Tetap_____Rp3.694.832.979.493,00

Nilai Aset Tetap (sebelum penyusutan) per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.694.832.979.493,00. Sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Rp1.448.476.098.902,64 adalah sebesar Rp2.246.356.880.590,36 yang terdiri dari:

Tabel 5.203 Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Tanah	596.844.539.923,00	569.003.659.989,00	104,89
Peralatan dan Mesin	501.789.978.891,00	435.548.958.915,00	115,21
Gedung dan Bangunan	1.039.655.592.282,00	1.009.573.065.483,00	102,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.415.750.229.426,00	1.389.940.729.822,00	101,86
Aset Tetap Lainnya	88.988.871.743,00	83.046.175.169,00	107,16
Konstruksi dalam Pengerjaan	51.803.767.228,00	50.578.712.228,00	102,42
Jumlah	**3.694.832.979.493,00**	**3.537.691.301.606,00**	**104,44**
Akumulasi Penyusutan	(1.448.476.098.902,64)	**(1.214.460.840.495,60)**	**119,17**
Nilai Bersih	**2.246.356.880.590,36**	**2.323.230.461.110,40**	**96,74**

Nilai buku aset tetap tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp76.873.580.520,04 atau turun 3,31 persen dari nilai buku aset tetap per 31 Desember 2019.

Kenaikan nilai Aset Tetap tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga sudah berada di jalur yang benar, yaitu dengan pembelanjaan APBD lebih diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik. Sedangkan penurunan nilai buku aset tetap, terjadi karena bertambahnya nilai penyusutan tetap baik karena

bertambahnya periode penyusutan maupun karena adanya proses reklasifikasi dan kapitalisasi aset tetap yang dilakukan di tahun 2020.

Meskipun demikian, kenaikan tersebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena di tahun 2020, APBD Kabupaten Purbalingga diprioritaskan untuk pendanaan dan pembiayaan berbagai program dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* sebagaimana dijelaskan pada Bab III.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 berasal dari Saldo Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.537.691.301.606,00, mutasi tambah sebesar Rp1.469.426.288.094,00, dan mutasi kurang sebesar Rp1.312.284.610.207,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.204 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
Aset Tetap Per 31 Des 2019	**569.003.659.989,00**	**435.548.958.915,00**	**1.009.573.065.483,00**	**1.389.940.729.822,00**	**83.046.175.169,00**	**50.578.712.228,00**	**3.537.691.301.606,00**
Mutasi Tambah							
- Belanja Modal APBD	3.232.345.287,00	36.774.875.506,00	26.897.022.557,00	23.920.168.800,00	4.810.755.780,00	42.880.000,00	95.678.047.930,00
- Belanja Modal B L U D	-	6.173.496.499,00	1.633.782.180,00	1.433.181.000,00	400.000,00	-	9.240.859.679,00
- Belanja Modal BOS	-	16.882.149.719,00	377.382.910,00	150.619.050,00	5.203.547.953,00	-	22.613.699.632,00
- Belanja Barang Jasa	-	670.335.750,00	20.570.000,00	-	30.000.000,00	-	720.905.750,00
- Hibah	4.318.535.000,00	2.423.652.080,00	1.416.496.510,00	1.223.623.572,00	11.089.000,00	-	9.393.396.162,00
- Barang Temuan/ Koreksi Tambah (Inv)	32.113.141.654,00	140.157.500,00	112.528.893.421,00	1.303.959.686.052,00	7.250.000,00	-	1.310.641.399.096,00
- Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya	-	208.787.363,00	5.983.938.324,00	-	300.000,00	-	5.208.619.949,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	-	8.690.082.244,00	56.041.050,00	1.186.164.900,00	4.808.688.702,00	1.188.383.000,00	15.929.359.896,00
Jumlah Mutasi Tambah	**39.664.021.941,00**	**71.963.536.661,00**	**148.914.126.952,00**	**1.331.873.443.374,00**	**14.872.031.435,00**	**1.231.263.000,00**	**1.469.426.288.094,00**
Mutasi Kurang							
- Kebijakan Akuntansi Daerah	-	3.107.212.810,00	392.962.565,00	-	-	-	3.500.175.375,00
- Reklasifikasi Keluar Aset Lainnya	2.025.834.069,00	1.337.437.364,00	754.937.709,00	5.301.818,00	101.155.125,00	-	4.224.666.085,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Keluar	-	998.266.511,00	4.007.107.749,00	2.102.955.900,00	8.821.029.736,00	-	15.929.359.896,00
- Koreksi Kurang	9.797.307.938,00	279.600.000,00	113.676.682.130,00	1.303.955.686.052,00	7.150.000,00	6.208.000,00	1.288.630.408.851,00
Jumlah Mutasi Kurang	**11.823.142.007,00**	**5.713.116.685,00**	**118.831.690.153,00**	**1.306.063.943.770,00**	**8.929.334.861,00**	**6.208.000,00**	**1.312.284.610.207,00**
Mutasi Bersih	**27.840.879.934,00**	**66.250.419.976,00**	**30.082.526.799,00**	**25.809.499.604,00**	**5.942.696.574,00**	**1.225.055.000,00**	**157.141.677.887,00**
Aset Tetap Per 31 Des 2020	**596.844.539.923,00**	**501.789.978.891,00**	**1.039.655.592.282,00**	**1.415.750.229.426,00**	**88.988.871.743,00**	**51.803.767.228,00**	**3.694.832.979.493,00**

Total Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp1.469.426.288.094,00 berasal dari (a) Belanja Modal APBD (BMD), (b) Belanja Modal BLUD (BLUD), (c) Belanja Modal BOS (BBM), (d) Belanja Barang dan Jasa (NBM), (e) Hibah (HBH), (f) Barang Temuan (INV), (g) Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya, dan (h) Reklasifikasi Aset Tetap Masuk, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.205 Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
- Belanja Modal	3.232.345.287,00	36.774.875.506,00	26.897.022.557,00	23.920.168.800,00	4.810.755.780,00	42.880.000,00
- Belanja Modal BLUD	-	6.173.496.499,00	1.633.782.180,00	1.433.181.000,00	400.000,00	-
- Belanja Modal BOS	-	16.882.149.719,00	377.382.910,00	150.619.050,00	5.203.547.953,00	-
- Belanja Barang Jasa	-	670.335.750,00	20.570.000,00	-	30.000.000,00	-
- Hibah	4.318.535.000,00	2.423.652.080,00	1.416.496.510,00	1.223.623.572,00	11.089.000,00	-
- Barang Temuan/ Koreksi Tambah (Inv)	32.113.141.654,00	140.157.500,00	112.528.983.421,00	1.303.959.686.052,00	7.250.000,00	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	208.787.363,00	5.983.938.324,00	-	300.000,00	-
- Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	-	8.690.082.244,00	56.041.050,00	1.186.164.900,00	4.808.688.702,00	1.188.383.000,00
Jumlah	**39.664.021.941,00**	**71.963.536.661,00**	**148.914.216.952,00**	**1.331.873.443.374,00**	**14.872.031.435,00**	**1.231.263.000,00**

Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.30 sampai dengan 5.35.

Total Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp1.312.275.210.207,00 yang disebabkan karena (a) Perolehan Dibawah Satuan Minimum Kapitalisasi, (b) Reklasifikasi ke Aset Lainnya, (c) Reklasifikasi Aset Tetap Keluar, dan (d) Koreksi Kurang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
- Kebijakan Akuntansi Daerah	-	3.107.212.810,00	392.962.565,00	-	-	-
- Reklasifikasi Keluar Aset Lainnya	2.025.834.069,00	1.328.037.364,00	754.937.709,00	5.301.818,00	101.155.125,00	-
- Reklasifikasi Aset Tetap Keluar	-	998.266.511,00	4.007.107.749,00	2.102.955.900,00	8.821.029.736,00	-
- Koreksi Kurang	9.797.307.938	279.600.000,00	113.676.682.130,00	1.303.955.686.052,00	7.150.000,00	6.208.000,00
Jumlah	**11.823.142.007,00**	**5.713.116.685,00**	**118.831.690.153,00**	**1.306.063.943.770,00**	**8.929.334.861,00**	**6.208.000,00**

Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.36 sampai dengan 5.39.

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai saldo aset tetap per jenis per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

V.3.a.3).a) Tanah _____Rp596.844.539.923,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp596.844.539.923,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.840.879.934,00 atau naik 4,89 persen dari nilai Tanah per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Tanah tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.207 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**569.003.659.989,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	3.232.345.287,00
Hibah	4.318.535.000,00
Barang Temuan (INV)/Koreksi Tambah	32.113.141.654,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar Aset Lainnya	2.025.834.069,00
Koreksi kurang	9.797.307.938,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**596.844.539.923,00**

(1) Mutasi Tambah Tanah

(a) Penambahan Tanah yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp3.232.345.287,00, merupakan Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.

Tabel 5.208 Mutasi Tambah Tanah dari Belanja Modal Tahun 2020

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.393.237.980,00
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	667.271.627,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.171.835.680,00
	Jumlah	**3.232.345.287,00**

Belanja Modal Tanah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas publik, yang meliputi:

- Pengadaan tanah untuk perluasan penimbunan sampah TPA Bedagas
- Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Wirasana-Kalikajar
- Pengadaan tanah untuk Perluasan SDN 2 Karangjambu, SDN 2 Gunungwuled dan SDN 1 Karangbawang.

(b) Penambahan tanah yang berasal dari Hibah bertambah sebesar Rp4.318.535.000,00. Penambahan tersebut berasal dari Mahkamah Agung (MA) berupa tanah ex. Pengadilan Agama di Jl. Mayjend Panjaitan, Purbalingga.

(c) Penambahan tanah yang berasal dari Barang Temuan/Koreksi Tambah sebesar Rp32.113.141.654,00 merupakan penambahan karena adanya pencatatan atas tanah yang sebelumnya belum tercatat atau karena koreksi pemutakhiran data atas bidang tanah, yang terdapat pada 11 SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.209 Mutasi Tambah Tanah dari Inventarisasi / Koreksi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	1.365.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.162.676.340,00
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	16.600.000,00
4	Dinas Pertanian	3.350.640.000,00
5	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	1.571.740.000,00
6	Kecamatan Purbalingga	739.200.000,00
7	Kelurahan Penambongan	1.885.269.900,00
8	Kelurahan Wirasana	298.911.798,00
9	Kelurahan Mewek	241.000.000,00
10	Kelurahan Kalikabong	2.957.748.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	524.355.616,00
	Jumlah	**32.113.141.654,00**

Penambahan tanah yang berasal dari koreksi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hasil inventarisasi atas tanah irigasi yang belum tercatat senilai Rp18.860.899.500,00 dan hasil pemutakhiran data atas pemecahan bidang tanah senilai Rp301.776.840,00. Hal yang sama juga terjadi pada Kelurahan Penambongan dan Kelurahan Kalikabong. Koreksi tambah pada Kelurahan Penambongan merupakan hasil inventarisasi atas tanah pertanian yang belum tercatat senilai Rp73.785.600,00 dan hasil pemutakhiran data atas pemecahan bidang tanah senilai Rp526.447.000,00. Sedangkan untuk Kelurahan Kalikabong, koreksi tambah tersebut merupakan hasil inventarisasi atas tanah kantor POLRES Purbalingga yang belum tercatat senilai Rp2.840.193.000,00 dan pemutakhiran data atas pemecahan bidang tanah senilai Rp117.555.000,00.

Penambahan tanah yang berasal dari koreksi tambah pada Dinas Pertanian merupakan hasil pemutakhiran data atas pemecahan bidang tanah. Hal yang sama juga terjadi pada Bagian Umum, Kecamatan Purbalingga, Kelurahan Mewek, Kelurahan Wirasana dan SMP Negeri 4 Purbalingga.

Sedangkan Penambahan tanah yang berasal dari koreksi tambah pada Badan Keuangan Daerah merupakan hasil inventarisasi atas tanah pasar Kutasari, tanah terminal Jompo dan tanah rumah dinas Sekda yang belum tercatat. Hal yang

sama juga terjadi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, koreksi tambah tersebut merupakan hasil inventarisasi atas tanah Pondok Pemuda Kutabawa yang belum tercatat.

(2) Mutasi Kurang Tanah

(a) Mutasi kurang tanah karena reklasifikasi keluar ke aset lainnya merupakan tanah yang akan dihibahkan kepada pihak lain. Pengurangan tanah karena reklasifikasi keluar ke aset lainnya senilai Rp2.025.834.069,00 terdapat pada 9 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.210 Mutasi Kurang Tanah karena Reklas ke Aset Lainnya Tahun 2020

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	14.014.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.180.140,00
3	Dinas Pertanian	1.496.986.559,00
4	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	1.958.000,00
5	Kecamatan Purbalingga	242.201.085,00
6	Kelurahan Penambongan	182.010.790,00
7	Kelurahan Wirasana	57.275.890,00
8	Kelurahan Mewek	5.945.605,00
9	Kelurahan Kalikabong	8.262.000,00
	Jumlah	**2.025.834.069,00**

Pengurangan tanah yang berasal dari reklasifikasi keluar ke aset lainnya pada SKPD tersebut di atas merupakan pengurangan tanah yang akan dihibahkan kepada pihak lain.

Pengurangan pada Dinas Pertanian merupakan pengurangan tanah yang akan dihibahkan kepada Universitas Islam Negeri. Sedangkan pengurangan tanah pada SKPD lainnya merupakan pengurangan tanah yang akan dihibahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk pembangunan saluran irigasi Slinga.

(b) Mutasi kurang tanah karena koreksi pengurangan nilai tanah sebesar Rp8.512.270.638,00 terdapat pada 9 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.211 Mutasi Kurang Tanah dari Koreksi Kurang Tahun 2020

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	1.365.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	301.776.840,00
3	Dinas Pertanian	3.350.640.000,00
4	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	1.571.740.000,00
5	Kecamatan Purbalingga	739.200.000,00
6	Kelurahan Penambongan	1.811.484.300,00
7	Kelurahan Wirasana	298.911.798,00
8	Kelurahan Mewek	241.000.000,00
9	Kelurahan Kalikabong	117.555.000,00
	Jumlah	**9.797.307.938,00**

Pengurangan tanah yang berasal dari koreksi kurang pada SKPD tersebut di atas merupakan koreksi dalam rangka pemutakhiran data tanah. Nilai tersebut sama

dengan mutasi tambah tanah yang berasal dari koreksi tambah sebagaimana sudah dijelaskan pada poin (1).(c)

Rincian Saldo Tanah Per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.40.

V.3.a.3).b). Peralatan dan Mesin _____Rp501.789.978.891,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp501.789.978.891,00, mengalami kenaikan sebesar Rp66.241.019.976,00 atau naik 15,21 persen dari nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.212 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**435.548.958.915,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD + BBM + BLUD)	59.830.521.724,00
Belanja Barang Jasa	670.335.750,00
Hibah	2.423.652.080,00
Barang Temuan/Koreksi Tambah	140.157.500,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	208.787.363,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	8.690.082.244,00
Mutasi Kurang:	
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	3.107.212.810,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	1.337.437.364,00
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar	998.266.511,00
Koreksi Kurang (KOR)	279.600.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**501.789.978.891,00**

(1) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

(a) Total penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar Rp59.830.521.724,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS, maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut sedikit berbeda dengan dengan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 yang mencapai Rp59.243.387.999,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp587.133.725,00. Perbedaan tersebut terdapat pada 43 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.213 Perbedaan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pencatatan di KIB B Tahun 2020

SKPD	BM Peralatan dan Mesin	Dicatat di KIB B	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.859.263.256,00	21.300.989.781,00	441.726.525,00
UPT SMP Negeri 3 Purbalingga	150.465.000,00	141.179.000,00	(9.286.000,00)
UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	39.970.000,00	46.374.000,00	6.404.000,00
UPT SMP Negeri 5 Purbalingga	109.170.200,00	100.616.900,00	(8.553.300,00)
UPT SMP Negeri 1 Kalimanah	98.574.100,00	114.024.100,00	15.450.000,00
UPT SMP Negeri 2 Kalimanah	200.150.000,00	206.550.000,00	6.400.000,00
UPT SMP Negeri 3 Kalimanah	26.746.500,00	27.056.500,00	310.000,00

SKPD	BM Peralatan dan Mesin	Dicatat di KIB B	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
UPT SMP Negeri 1 Kutasari	107.045.400,00	119.845.400,00	12.800.000,00
UPT SMP Negeri 3 Kutasari	46.550.000,00	55.400.000,00	8.850.000,00
UPT SMP Negeri 4 Kutasari	122.672.750,00	131.247.750,00	8.575.000,00
UPT SMP Negeri 1 Karangreja	71.250.000,00	74.250.000,00	3.000.000,00
UPT SMP Negeri 1 Karangjambu	290.999.378,00	294.599.378,00	3.600.000,00
UPT SMP Negeri 2 Karangjambu	73.557.000,00	74.502.000,00	945.000,00
UPT SMP Negeri 2 Bukateja	34.832.000,00	40.314.000,00	5.482.000,00
UPT SMP Negeri 2 Kejobong	209.043.000,00	212.043.000,00	3.000.000,00
UPT SMP Negeri 1 Kaligondang	100.398.000,00	120.998.000,00	20.600.000,00
UPT SMP Negeri 2 Rembang	88.840.000,00	114.325.000,00	25.485.000,00
UPT SMP Negeri 4 Rembang	63.050.000,00	60.600.000,00	(2.450.000,00)
UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol	32.000.000,00	33.700.000,00	1.700.000,00
UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	153.534.000,00	2.750.000,00	(150.784.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Kertanegara	51.839.000,00	159.984.000,00	108.145.000,00
UPT SMP Negeri 2 Kertanegara	26.450.000,00	51.839.000,00	25.389.000,00
UPT SMP Negeri 1 Bojongsari	159.652.000,00	26.450.000,00	(133.202.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Bojongsari	149.626.900,00	161.352.000,00	11.725.100,00
UPT SMP Negeri 1 Mrebet	111.195.000,00	150.476.900,00	39.281.900,00
UPT SMP Negeri 2 Mrebet	85.050.000,00	118.198.500,00	33.148.500,00
UPT SMP Negeri 3 Mrebet	39.450.000,00	95.735.000,00	56.285.000,00
UPT SMP Negeri 4 Mrebet	78.050.000,00	39.450.000,00	(38.600.000,00)
UPT SMP Negeri 5 Mrebet	98.292.900,00	81.850.000,00	(16.442.900,00)
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	679.540.000,00	98.292.900,00	(581.247.100,00)
UPT SMP Negeri 2 Bobotsari	52.911.000,00	680.790.000,00	627.879.000,00
UPT SMP Negeri 3 Bobotsari	29.122.000,00	60.911.000,00	31.789.000,00
UPT SMP Negeri 4 Bobotsari	59.739.900,00	31.122.000,00	(28.617.900,00)
TK Negeri Pembina Bobotsari	23.500.000,00	59.739.900,00	36.239.900,00
TK Negeri Pembina Bojongsari	13.975.000,00	23.500.000,00	9.525.000,00
TK Negeri Pembina Bukateja	0,00	13.975.000,00	13.975.000,00
UPT SMP Negeri 4 Karangmoncol	2.750.000,00	461.000,00	(2.289.000,00)
UPTD Puskesmas Purbalingga	127.181.091,00	119.681.091,00	(7.500.000,00)
UPTD Puskesmas Kejobong	183.342.500,00	126.892.500,00	(56.450.000,00)
UPTD Puskesmas Bukateja	44.630.000,00	63.130.000,00	18.500.000,00
UPTD Puskesmas Kutawis	0,00	69.350.000,00	69.350.000,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	96.171.500,00	71.267.500,00	(24.904.000,00)
UPTD Puskesmas Bobotsari	96.740.000,00	98.640.000,00	1.900.000,00
Jumlah	**25.087.319.375,00**	**25.674.453.100,00**	**587.133.725,00**

Selisih kurang catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 terdapat pada 13 SKPD yang secara umum terjadi karena aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Peralatan dan Mesin tidak termasuk aset kelompok Peralatan dan Mesin sehingga dicatat pada KIB lainnya.

Sedangkan selisih lebih catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 terdapat pada 30 SKPD yang secara umum terjadi karena terdapat aset Peralatan dan Mesin yang dihasilkan dari Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin.

Secara rinci perbedaan tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 5.214 Penjelasan atas Perbedaan Pencatatan di KIB B dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No	Uraian	SKPD
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dicatat bukan di KIB B	UPT SMP Negeri 3 Purbalingga
		UPT SMP Negeri 5 Purbalingga
		UPT SMP Negeri 4 Rembang
		UPT SMP Negeri 1 Karanganyar
		UPT SMP Negeri 1 Bojongsari
		UPT SMP Negeri 4 Mrebet
		UPT SMP Negeri 5 Mrebet
		UPT SMP Negeri 1 Bobotsari
		UPT SMP Negeri 4 Bobotsari
		UPT SMP Negeri 4 Karangmoncol
		UPTD Puskesmas Purbalingga
		UPTD Puskesmas Kejobong
		UPTD Puskesmas Karangmoncol
2	Aset dicatat di kelompok KIB B tapi berasal dari Belanja Modal Non Peralatan dan Mesin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		UPT SMP Negeri 4 Purbalingga
		UPT SMP Negeri 1 Kalimanah
		UPT SMP Negeri 2 Kalimanah
		UPT SMP Negeri 3 Kalimanah
		UPT SMP Negeri 1 Kutasari
		UPT SMP Negeri 3 Kutasari
		UPT SMP Negeri 4 Kutasari
		UPT SMP Negeri 1 Karangreja
		UPT SMP Negeri 1 Karangjambu
		UPT SMP Negeri 2 Karangjambu
		UPT SMP Negeri 2 Bukateja
		UPT SMP Negeri 2 Kejobong
		UPT SMP Negeri 1 Kaligondang
		UPT SMP Negeri 2 Rembang
		UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol
		UPT SMP Negeri 1 Kertanegara
		UPT SMP Negeri 2 Kertanegara
		UPT SMP Negeri 2 Bojongsari
		UPT SMP Negeri 1 Mrebet
		UPT SMP Negeri 2 Mrebet
		UPT SMP Negeri 3 Mrebet
		UPT SMP Negeri 2 Bobotsari
		UPT SMP Negeri 3 Bobotsari
		TK Negeri Pembina Bobotsari
		TK Negeri Pembina Bojongsari
		TK Negeri Pembina Bukateja
		UPTD Puskesmas Bukateja
		UPTD Puskesmas Kutawis
		UPTD Puskesmas Bobotsari

(b) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp670.335.750,00, terdapat pada 40 SKPD sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.31.

(c) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah tahun 2020 sebesar Rp2.423.252.080,00 terdapat pada 88 SKPD sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.32.

(d) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi tahun 2020 sebesar Rp147.157.500,00 terdapat pada 8 SKPD sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.33.

(e) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi masuk dari aset lainnya sebesar Rp208.787.363,00. Hal ini dilakukan karena aset tersebut masih digunakan untuk kegiatan operasional sehingga dikembalikan ke asalnya yaitu di kategori aset tetap. Penambahan tersebut terdapat pada 8 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.215 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Reklas Aset Lainnya Tahun 2020

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.408.605,00
2	UPT SMP Negeri 2 Kejobong	960.500,00
3	UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	7.500.000,00
4	UPTD Puskesmas Bobotsari	4.853.258,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	34.975.000,00
6	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	135.890.000,00
7	Kelurahan Purbalingga Wetan	3.200.000,00
8	Kecamatan Karanganyar	16.000.000,00
	Jumlah	**208.787.363,00**

(f) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Masuk tahun 2020 sebesar Rp8.690.082.244,00. Penambahan tersebut merupakan hasil dari reklas antar KIB maupun karena perubahan kode barang dalam satu KIB yang terdapat pada 88 SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.35.

(2) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

(a) Pengurangan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena adanya Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap karena nilai perolehan aset tetap berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold)* dan direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2020 sebesar Rp3.107.212.810,00 terdapat pada 101 SKPD. Rincian pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke Daftar Barang Ekstrakomptabel sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.36.

Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kebijakan Akuntansi Daerah sebesar Rp1.696.136.124,00 sebagian besar merupakan aset alat peraga/praktek sekolah yang berdasarkan Permendagri 108/2016 direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya. Karena nilainya dibawah satuan minimum kapitalisasi maka dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Ekstrakomptabel.

(b) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp1.337.437.364,00. Reklasifikasi ini dilakukan terhadap Peralatan

dan Mesin yang sudah dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada dan sudah diusulkan untuk dihapuskan. Termasuk di dalamnya adalah aset yang hilang pada Kelurahan Kedungmenjangan karena kecurian dengan total nilai sebesar Rp22.000.000,00. Pengurangan ini terdapat pada 22 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.37.

(c) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Keluar tahun 2020 sebesar Rp1.284.866.511,00. Pengurangan tersebut merupakan hasil dari reklas keluar dari KIB Peralatan dan Mesin maupun karena perubahan kode barang KIB Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 23 SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.38.

(d) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi Kurang tahun 2020 sebesar Rp279.600.000,00. Pengurangan tersebut merupakan koreksi atas pencatatan ganda kendaraan bermotor pada Kecamatan Kutasari senilai Rp10.000.000,00 dan koreksi pencatatan pada Badan Keuangan Daerah karena status aset telah dihibahkan kepada pihak lain senilai Rp269.600.000,00.

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Per SKPD tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 5.41.

V.3.a.3).c). Gedung dan Bangunan _____Rp1.039.655.592.282,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.039.655.592.282,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.082.526.799,00 atau naik 2,98 persen dari nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.216 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**1.009.573.065.483,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD+BLUD+BOS)	28.908.187.647,00
Belanja Barang dan Jasa (NBM)	20.570.000,00
Hibah (HBH)	1.416.496.510,00
Barang Temuan atau Koreksi Tambah (INV)	112.528.983.421,00
Reklasifikasi masuk Aset Lainnya (ASL)	5.983.938.324,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	56.041.050,00
Mutasi Kurang:	
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	392.962.565,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	754.937.709,00
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	4.007.107.749,00
Koreksi Kurang (KOR)	113.676.682.130,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**1.039.655.592.282,00**

(1) Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan

(a) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp28.908.187.647,00, baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai penambahan tersebut berbeda dengan nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 yang mencapai Rp29.004.314.147,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp96.126.500,00 yang terdapat pada 5 SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.217 Perbedaan Pencatatan di KIB C dengan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

SKPD	BM Gedung dan Bangunan	Dicatat di KIB C	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.710.695.986,00	11.641.913.486,00	(68.782.500,00)
UPT SMP Negeri 3 Purbalingga	-	10.806.000,00	10.806.000,00
UPTD Puskesmas Bukateja	18.500.000,00	-	(18.500.000,00)
RSUD Panti Nugroho	700.550.400,00	691.200.400,00	(9.350.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	381.776.000,00	371.476.000,00	(10.300.000,00)
Jumlah	**12.811.471.986,00**	**12.715.395.886,00**	**(96.126.500,00)**

Perbedaan nilai perolehan aset Gedung dan Bangunan dalam KIB C dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 secara umum terjadi karena terdapat aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Gedung dan Bangunan dicatat pada selain KIB C atau sebaliknya terdapat aset yang termasuk kelompok Gedung dan Bangunan tetapi sumber perolehannya adalah selain Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Secara rinci, penjelasan atas perbedaan tersebut dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.218 Penjelasan atas Perbedaan Pencatatan di KIB C dengan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020

No	Uraian	SKPD
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan dicatat di bukan di KIB C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Puskesmas Bukateja RSUD Goeteng Taroenadibrata Dinas Lingkungan Hidup
2	Aset dicatat di kelompok KIB C tapi berasal dari Belanja Modal Non Gedung dan Bangunan	UPT SMP Negeri 3 Purbalingga

(b) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 merupakan kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dalam APBD dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa akan tetapi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

Nilai penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.570.000,00 terdapat pada 1 SKPD yaitu UPT SMP Negeri 1 Kutasari sebesar Rp16.320.000,00 yang berupa sarana pelengkap.

(c) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah tahun 2020 sebesar Rp 1.416.496.510,00 terdapat pada 6 SKPD. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah adalah hibah dari Mahkamah Agung

(MA) yaitu Gedung Pengadilan Agama Lama sedangkan mutasi tambah gedung dan bangunan pada 5 SKPD lainnya adalah hibah dari Komite Sekolah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.219 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Asal Hibah	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah Komite	59.951.010,00
2	UPT SMP Negeri 2 Purbalingga	Hibah Komite	28.179.000,00
3	UPT SMP Negeri 1 Bukateja	Hibah Komite	22.300.000,00
4	UPT SMP Negeri 2 Bojongsari	Hibah Komite	23.450.000,00
5	UPT SMP Negeri 1 Mrebet	Hibah Komite	996.000.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	Hibah Pemerintah Pusat	286.616.500,00
		Jumlah	**1.416.496.510,00**

(d) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Inventarisasi atau Koreksi Tambah sebesar Rp112.528.983.421,00 terdapat pada 43 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.33. Inventarisasi atau koreksi tambah gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta SMP Negeri merupakan pencatatan atas koreksi kapitalisasi gedung ke dalam aset induknya.

(e) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya (ASL) sebesar Rp5.983.938.324,00, sebagian besar ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp5.908.538.324,00 yang sebelumnya tercatat di Aset Lainnya kemudian direklasifikasi kembali ke aset Gedung dan Bangunan karena setelah dilakukan validasi ternyata masih layak pakai.

(f) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Masuk Aset Tetap (RKM) sebesar Rp56.041.050,00 terdapat pada UPT SMP Negeri 1 Rembang yang berasal dari Belanja Modal BOS Peralatan dan Mesin-Alat Rumah Tangga Lainnya (Homeuse) direklasifikasi masuk ke Gedung dan Bangunan.

(2) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

(a) Pengurangan Gedung dan Bangunan yang disebabkan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap karena nilanya berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold)* sehingga direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2020 sebesar Rp392.962.565,00 terdapat pada 12 SKPD sebagaimana Lampiran 5.36.

(b) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp754.937.709,00 terdapat pada 5 SKPD sebagian besar merupakan aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan DPUPR.

Rincian pengurangan Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi ke aset lainnya sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.37.

(c) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Keluar (RKL) sebesar Rp4.007.107.749,00 merupakan pengurangan atas Gedung dan Bangunan yang

direklas ke aset tetap lain pada 6 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.38.

(d) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Kurang tahun 2020 sebesar Rp113.676.682.130,00 terdapat pada 42 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.39. Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPT SMP Negeri merupakan transaksi koreksi atas gedung dan bangunan yang dikapitalisasi ke dalam aset induknya.

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.42.

V.3.a.3).d). Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____Rp1.415.750.229.426,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.415.750.229.426,00, mengalami kenaikan sebesar Rp25.809.499.604,00 atau naik 1,86 persen dari nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.220 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**1.389.940.729.822,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD+BLUD+BOS)	25.503.968.850,00
Hibah (HBH)	1.223.623.572,00
Barang Temuan atau Koreksi Tambah (INV)	1.303.959.686.052,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	1.186.164.900,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	5.301.818,00
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	2.102.955.900,00
Koreksi Kurang	1.303.955.686.052,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**1.415.750.229.426,00**

(1) Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan

(a) Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar Rp25.503.968.850,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut berbeda dengan nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp28.129.574.150,00 atau terdapat kumulatif perbedaan sebesar Rp2.625.605.300,00.

Perbedaan pencatatan aset tersebut terdapat pada 11 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.221 Perbedaan Pencatatan di KIB D dengan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

OPD	BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dicatat di KIB D	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.576.400,00	59.866.400,00	(60.710.000,00)
UPT SMP Negeri 5 Purbalingga	-	8.553.300,00	8.553.300,00
UPT SMP Negeri 2 Kalimanah	8.900.000,00	2.500.000,00	(6.400.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Bukateja	5.482.000,00	-	(5.482.000,00)
UPT SMP Negeri 4 Rembang	5.500.000,00	7.950.000,00	2.450.000,00
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	900.000,00	-	(900.000,00)
UPTD Puskesmas Kejobong	8.500.000,00	64.950.000,00	56.450.000,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)
RSUD Panti Nugroho	21.050.000,00	12.800.000,00	(8.250.000,00)
Dinas Perumahan dan Permukiman	2.576.836.600,00	-	(2.576.836.600,00)
Dinas Lingkungan Hidup	281.323.000,00	248.743.000,00	(32.580.000,00)
Jumlah	**3.030.968.000,00**	**405.362.700,00**	**(2.625.605.300,00)**

Perbedaan nilai perolehan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam KIB D dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 secara umum terjadi karena terdapat aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat pada selain KIB D atau sebaliknya terdapat aset yang dicatat pada KIB D tetapi sumber perolehannya adalah selain Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Secara rinci, penjelasan atas perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 5.222 Penjelasan atas Perbedaan Pencatatan di KIB D dengan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020

No	Uraian	SKPD
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat bukan di KIB D	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT SMP Negeri 2 Kalimanah UPT SMP Negeri 2 Bukateja UPT SMP Negeri 1 Bobotsari UPTD Puskesmas Bobotsari RSUD Panti Nugroho Dinas Lingkungan Hidup
2	Aset dicatat di KIB D tapi berasal dari Belanja Modal Non Jalan, Irigasi dan Jaringan	UPT SMP Negeri 5 Purbalingga UPT SMP Negeri 4 Rembang UPTD Puskesmas Kejobong
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	Dinas Perumahan dan Pemukiman

(b) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.223.623.572,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Komite. Untuk Hibah Komite tahun 2020 sebesar Rp49.829.500,00 terdapat di UPT SMP Negeri 2 Purbalingga, sedangkan Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementrian ESDM) terdapat di Badan Keuangan Daerah atas Bangunan Pengambilan Sumber Air

(Sumur Bor) lokasi di desa Selakambang, Gumiwang, dan Pengadegan sebesar Rp1.173.794.072,00.

(c) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Inventarisasi/Koreksi Tambah tahun 2020 sebesar Rp1.303.959.686.052,00 terdapat pada 2 SKPD yaitu terdapat pada UPT SMP Negeri 4 Kutasari Rp4.000.000,00, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.303.955.686.052,00. Transaksi pada DPUPR merupakan pencatatan kembali atas pemecahan aset jalan Tidu-Bandara menjadi 2 kategori yaitu Jalan dan Lampu Penerangan Jalan yang semula dicatat secara gabungan pada kelompok aset jalan dan juga transaksi reklasifikasi dan kapitalisasi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan ke dalam aset induknya sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.33.

(2) Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

(a) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp5.301.818,00 merupakan jaringan listrik pada bangunan PKD Puskesmas Padamara yang akan dihibahkan kepada pemerintah desa sehingga direklas ke aset lainnya.

(b) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Keluar tahun 2020 sebesar Rp2.102.955.900,00 merupakan pencatatan atas transaksi reklasifikasi kode barang jalan, jembatan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kondisi riil asetnya.

(c) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Koreksi Kurang tahun 2020 sebesar Rp1.303.955.686.052,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang merupakan koreksi pencatatan aset jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka reklasifikasi kode barang dan kapitalisasi biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi ke dalam aset induknya.

Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.43.

V.3.a.3).e). Aset Tetap Lainnya _____Rp88.988.871.743,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.988.871.743,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.942.696.574,00 atau naik 7,16 persen dari nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.223 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**83.046.175.169,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD + BOS + BLUD)	10.014.703.733,00
Belanja Barang dan Jasa (NBM)	30.000.000,00
Hibah (HBH)	11.089.000,00
Barang Temuan atau Koreksi Tambah (INV)	7.250.000,00
Reklasifikasi masuk Aset Lainnya (ASL)	300.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk (RKM)	4.808.688.702,00

Uraian	Jumlah
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	101.155.125,00
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	8.821.029.736,00
Koreksi Kurang	7.150.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**88.988.871.743,00**

(1) Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

(a) Total nilai penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar Rp10.014.703.733,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan realiasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp10.724.495.258,00 atau lebih tinggi sebesar Rp709.791.525,00.

Perbedaan pencatatan aset tetap lainnya tersebut terdapat pada 25 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.224 Perbedaan Pencatatan di KIB E dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

SKPD	BM ATL	Dicatat di KIB E	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.389.144.830,00	7.901.780.805,00	(487.364.025,00)
UPT SMP Negeri 3 Purbalingga	27.912.500,00	26.392.500,00	(1.520.000,00)
UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	50.636.000,00	44.232.000,00	(6.404.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Kalimanah	146.114.300,00	130.664.300,00	(15.450.000,00)
UPT SMP Negeri 3 Kalimanah	10.867.000,00	10.557.000,00	(310.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Kutasari	16.510.000,00	3.710.000,00	(12.800.000,00)
UPT SMP Negeri 3 Kutasari	69.916.500,00	61.066.500,00	(8.850.000,00)
UPT SMP Negeri 4 Kutasari	43.186.900,00	34.611.900,00	(8.575.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Karangreja	10.172.000,00	7.172.000,00	(3.000.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Karangjambu	15.012.000,00	11.412.000,00	(3.600.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Karangjambu	2.068.000,00	1.123.000,00	(945.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Kejobong	15.416.000,00	12.416.000,00	(3.000.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Kaligondang	73.325.800,00	52.725.800,00	(20.600.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Rembang	34.229.000,00	8.744.000,00	(25.485.000,00)
UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol	6.014.600,00	4.314.600,00	(1.700.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	76.046.100,00	69.596.100,00	(6.450.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Bojongsari	59.615.149,00	57.915.149,00	(1.700.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Bojongsari	61.738.900,00	60.888.900,00	(850.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Mrebet	49.157.000,00	42.153.500,00	(7.003.500,00)
UPT SMP Negeri 2 Mrebet	64.780.000,00	54.095.000,00	(10.685.000,00)
UPT SMP Negeri 4 Mrebet	36.334.600,00	32.534.600,00	(3.800.000,00)
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	39.224.200,00	38.874.200,00	(350.000,00)
UPT SMP Negeri 2 Bobotsari	11.000.000,00	3.000.000,00	(8.000.000,00)
UPT SMP Negeri 3 Bobotsari	20.648.000,00	18.648.000,00	(2.000.000,00)
UPTD Puskesmas Kutawis	69.350.000,00	-	(69.350.000,00)
Jumlah	**9.398.419.379,00**	**8.688.627.854,00**	**(709.791.525,00)**

Perbedaan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dalam KIB E dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2020 secara umum terjadi karena terdapat aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Aset Tetap Lainnya dicatat pada selain KIB E.

(b) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp30.000.000,00, terdapat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berupa pengadaan buku elektronik.

(c) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Hibah pada tahun 2020 sebesar Rp11.089.000,00, merupakan hibah kelompok masyarakat (Komite Sekolah) yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.000.000,00, dan UPT SMP Negeri 2 Kutasari sebesar Rp89.000,00.

(d) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Inventarisasi atau Koreksi Tambah tahun 2020 sebesar Rp7.250.000,00 terdapat pada UPT SMP Negeri 5 Purbalingga merupakan kurang saji pencatatan nilai aset tetap.

(e) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi masuk sebesar Rp4.808.688.702,00 merupakan penambahan karena adanya reklasifikasi masuk dari kelompok aset tetap yang lain maupun karena koreksi perubahan kode barang yang masih dalam satu kelompok Aset Tetap Lainnya.

(2) Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

(a) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp101.155.125,00, merupakan reklasifikasi terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat atau sudah tidak ditemukan fisiknya terdapat pada 3 SKPD yaitu UPT SMP Negeri 1 Bukateja Rp23.870.000,00, UPT SMP Negeri Pengadegan Rp77.075.125,00 dan UPTD Puskesmas Bojongsari Rp210.000,00.

(b) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Keluar sebesar Rp8.821.029.736,00 merupakan pengurangan karena adanya koreksi perubahan kode barang yang masih dalam kelompok Aset Tetap Lainnya dan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sesuai dengan kodefikasi barang menurut Permendagri 108 tahun 2016 yang terdapat pada 82 SKPD sebagaimana disajikan pada Lamprian 5.37.

(c) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Kurang sebesar Rp7.150.000,00 pada UPT SMP Negeri 5 Purbalingga merupakan koreksi kurang saji nilai aset tetap.

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.44.

V.3.a.3).f). Konstruksi dalam Pengerjaan _____Rp51.803.767.228,00

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.803.767.228,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.225.055,00 atau naik 2,42 persen dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019.

Penambahan saldo KDP di tahun 2020 tersebut disebabkan adanya mutasi tambah KDP sebesar Rp1.231.263.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp6.208.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.225 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

URAIAN	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-19
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.803.767.228,00	1.231.263.000,00	6.208.000,00	50.578.712.228,00
Jumlah	**51.803.767.228,00**	**1.231.263.000,00**	**6.208.000,00**	**50.578.712.228,00**

Mutasi tambah KDP sebesar Rp1.231.263.000,00 sebagian besar berasal dari perencanaan teknis yang pembangunan fisiknya tidak jadi dilaksanakan karena pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.226 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020

Pekerjaan	31-Des-20	Tambah	Kurang	31-Des-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan Teknis Pembangunan Unit Transfusi Darah (Dinkes)	41.990.000,00	-	-	41.990.000,00
Perencanaan Teknis Puskesmas Rembang	89.740.000,00	89.740.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan Puskesmas 2 Kemangkon (Dinkes)	31.592.000,00	31.592.000,00	-	-
Pembangunan Gedung DPRD (DPUPR)	25.624.161.500,00		-	25.624.161.500,00
Pembangunan Gedung Islamic Center (DPUPR)	21.263.542.500,00		-	21.263.542.500,00
Kegiatan Penilaian Tanah (Dinrumkin)	61.824.208,00		-	61.824.208,00
Penilaian Tanah Untuk Pembangunan GOR Indoor (Dinrumkin)	35.082.020,00		-	35.082.020,00
Penilaian Tanah utk Pelebaran Jl Cahyana Baru	43.250.000,00		-	43.250.000,00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana KB	-		6.208.000,00	6.208.000,00
Pembangunan GOR Tertutup Goentoer Darjono	3.484.379.000,00		-	3.484.379.000,00
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK) - Pembangunan BPP	43.175.000,00	24.900.000,00	-	18.275.000,00
Perencanaan Pembangunan Gedung DPRD	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-
Review Design Pembangunan Gedung DPRD	39.909.000,00	39.909.000,00	-	-
Perencanaan Pembangunan Alun-Alun MTL Soedirman dan Lingkungannya	19.921.000,00	19.921.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pagar Tematik SMP 1 Purbalingga	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Tematik Kantor Pemerintah Daerah	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-
Perencanaan dll. Pembangunan Jembatan Wirasana – Kalikajar	126.749.000,00	126.749.000,00	-	-
Perencanaan dll. Penggantian Jembatan Sungai Muli Ruas Jalan Tamansari – Tajug	75.831.000,00	75.831.000,00	-	-
Perencanaan dll. Pembangunan Jembatan Lamuk – Bukateja	91.655.000,00	91.655.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Trotoar Jalan Kapten Sarengat	12.965.000,00	12.965.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Trotoar Jalan Pujowiyoto	23.740.000,00	23.740.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pembangunan Gerbang Masuk Bandara JBS	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari – Jetis	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kutabawa – Bambangan	23.800.000,00	23.800.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Sangkanayu – Kutabawa	50.800.000,00	50.800.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Bobotsari – karanganyar	43.883.000,00	43.883.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan – Bedagas	35.650.000,00	35.650.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja – Kutabawa	35.650.000,00	35.650.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Gambarsari – Jetis	23.650.000,00	23.650.000,00	-	-

Pekerjaan	31-Des-20	Tambah	Kurang	31-Des-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja – Gondang	27.250.000,00	27.250.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Rajawana – Rembang	35.634.000,00	35.634.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Pengadegan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan Pepedan - Tegalpingen (Lanjutan)	82.900.000,00	82.900.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan Ruas Sangkanayu - Talagening	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Majasari – Bajong	23.750.000,00	23.750.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Struktur Jalan Tobong - Kajen	29.450.000,00	29.450.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Karangjambu -Ponjen (BAN-GUB)	79.989.000,00	79.989.000,00	-	-
BU Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP)	1.594.000,00	1.594.000,00	-	-
Perencanaan dll. Rehabilitasi Bendung Cangkring II Karanganyar	15.021.000,00	15.021.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bendung Nambo I	11.680.000,00	11.680.000,00	-	-
Perencanaan Teknis/Review DED Peningkatan Jalan Lingkungan TPA (DLH)	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-
Perencanaan Teknis Penanganan LeacheteTimbunan Sampah Lama (DLH)	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-
Perencanaan Teknis RTH Bojong (DLH)	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-
Biaya Umum Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan (DAK)	2.330.000,00	2.330.000,00	-	-
Jumlah	**51.803.767.228,00**	**1.231.263.000,00**	**6.208.000,00**	**50.578.712.228,00**

Saldo KDP tahun 2020 sebesar Rp51.803.767.228,00 di atas terdapat pada 7 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.227 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2020

SKPD	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Kesehatan	163.322.000,00	41.990.000,00	388,95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.927.525.000,00	46.887.704.000,00	102,22
Dinas Perumahan dan Permukiman	140.156.228,00	140.156.228,00	100,00
Dinas SosdaldukKBP3A	-	6.208.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	42.880.000,00	-	-
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.484.379.000,00	3.484.379.000,00	100,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.330.000,00	-	-
Dinas Pertanian	43.175.000,00	18.275.000,00	236,25
Jumlah	**51.803.767.228,00**	**50.578.712.228,00**	**102,42**

V.3.a.3).g). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap_____(Rp1.448.476.098.902,64)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.448.476.098.902,64) bertambah sebesar (Rp234.015.258.407,04) atau naik 19,27 persen dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Dari hasil penelaahan lebih lanjut terhadap Beban Penyusutan tahun 2020, terdapat beberapa SKPD yang kurang/lebih saji Beban Penyusutan tahun 2019 sehingga menyebabkan saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2019 secara konsolidasi menjadi lebih saji. Pada tahun 2020, atas saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2019 yang lebih saji tersebut, telah dilakukan penyesuaian sehingga akan mengurangi saldo akhir Akumulasi Penyusutan tahun 2020.

Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan perubahan terhadap kodefikasi aset tetap untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Salah satu dampak dari penyesuaian kodefikasi aset tetap tersebut adalah adanya penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan tahun 2019. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi barang serta perubahan kebijakan penyajian aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 5.45.

Secara umum, ringkasan mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.228 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**(1.214.460.840.495,60)**
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	(25.263.213.875,89)
Mutasi Tambah:	
Mutasi masuk	(622.533.864,57)
Reklasifikasi aset	(3.861.087.999,86)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(2.366.967.938,54)
Inventarisasi	(766.733.396.012,69)
Mutasi Kurang:	
Mutasi keluar	(1.260.888.753,85)
Reklasifikasi aset	(535.662.914,75)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(1.198.096.591,48)
Koreksi pembukuan aset tetap	(683.156.914.571,65)
Beban Penyusutan 2020	**(171.846.049.299,00)**
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**(1.448.476.098.902,64)**

(1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(a) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari mutasi masuk sebesar Rp622.533.864,57 merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari mutasi masuk aset tetap antar SKPD yang terdapat pada 37 SKPD sebagaimana disajikan pada lampiran 3.46A.

(b) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp3.861.087.999,86 merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan yang bersumber dari transaksi reklasifikasi aset tetap dari kodefikasi tertentu ke kodefikasi yang lain, baik masih dalam satu kelompok KIB maupun antar KIB, termasuk perubahan kodefikasi karena penyesuaian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

(c) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi kembali dari aset lainnya sebesar Rp2.366.967.938,54 yang terdapat pada 8 SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.229 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2020

SKPD	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.194.787.180,54
UPT SMP Negeri 2 Kejobong	14.532.500,00
UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	7.500.000,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	4.853.258,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	34.975.000,00
Bagian Umum - Sekretariat Daerah	91.120.000,00
Kelurahan Purbalingga Wetan	3.200.000,00
Kecamatan Karanganyar	16.000.000,00
Jumlah	**2.366.967.938,54**

(d) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari inventarisasi yaitu sebesar Rp766.733.396.012,69 merupakan pencatatan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh berasal dari transaksi inventarisasi/pencatatan aset tetap yang sebelumnya tidak tercatat atau transaksi koreksi pencatatan aset tetap, termasuk di dalamnya adalah transaksi kapitalisasi aset jalan dan jembatan pada DPUPR serta kapitalisasi gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sekolah. Terdapat 45 SKPD yang mengalami penambahan akumulasi penyusutan sebagai dampak dari transaksi tersebut, sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.46A.

(2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(a) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan karena mutasi keluar sebesar Rp1.260.888.753,85 merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari mutasi keluar aset tetap antar SKPD maupun ke luar entitas pemerintah daerah baik karena proses hibah maupun transaksi mutase keluar lainnya yang terdapat pada 7 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.230 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan karena Mutasi Keluar Tahun 2020

SKPD	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	851.752.671,02
Dinas Kesehatan	26.290.346,00
UPTD Puskesmas Bojong	3.588.468,80
RSUD Goeteng Taroenadibrata	61.372.976,40
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	52.000.000,00
Bagian Umum - Sekretariat Daerah	170.856.360,83
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Daerah	6.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.350.000,00
Badan Keuangan Daerah	69.477.930,80
Jumlah	**1.260.888.753,85**

(b) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp535.662.914,75 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh reklasifikasi aset tetap dari kodefikasi tertentu ke kodefikasi yang lain, baik masih dalam satu kelompok KIB maupun antar KIB, termasuk perubahan kodefikasi karena penyesuaian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

(c) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.198.096.591,48 merupakan pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena reklasifikasi aset tetap kondisi rusak berat ke dalam kelompok aset lainnya, sehingga saldo akumulasi penyusutan tercatat juga ikut direklasifikasi.

Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena reklasifikasi ke aset lainnya terdapat pada 23 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.46B.

(d) Pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena koreksi pembukuan aset tetap sebesar Rp683.156.914.571,65 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh koreksi reklasifikasi dan juga kapitalisasi aset tetap terutama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Transaksi lain yang berpengaruh terhadap pengurangan saldo akumulasi penyusutan adalah koreksi kesalahan perhitungan penyusutan tahun sebelumnya karena adanya kekeliruan pemilihan kode barang pada aplikasi SIMAset di tahun 2019. Kesalahan pemilihan kode barang menyebabkan umur ekonomis atas aset tetap tersebut menjadi tidak akurat yang seharusnya 50 tahun menjadi hanya tercatat 1 tahun atau 25 tahun.

Saldo akumulasi penyusutan karena koreksi pembukuan aset tetap terjadi pada 56 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.46B.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per SKPD per 31 Desember 2020 sebagaimana Lampiran 5.47.

V.3.a.4). Aset Lainnya_____Rp3.473.579.546,02

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.473.579.546,02 mengalami penurunan sebesar Rp33.808.460.770,74 atau turun 90,68 persen dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019.

Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 5.231 Daftar Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189,00	25.638.189,00	100,00
Aset Tak Berwujud	307.686.000,00	325.893.250,00	94,41
Aset Lain-lain	3.140.255.357.02	36.930.508.877,76	7,26
Jumlah	**3.473.579.546,02**	**37.282.040.316,76**	**8,08**

V.3.a.4).a). Tagihan Jangka Panjang_____Rp25.638.189,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah Rp25.638.189,00 atau sama dengan posisi per 31 Desember 2019 merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap Sdr. Eko Kartiko, PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan penggelapan uang Daerah. Sekarang yang bersangkutan sudah diberhentikan dari PNS sehingga angsuran pengembaliannya menjadi macet.

V.3.a.4).b). Aset Tak Berwujud_____Rp307.686.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp307.686.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.207.250,00 atau turun 5,59 persen dari saldo per 31 Desember

2019. Mutasi Penambahan Rp153.854.000,00 perolehan Aset Tak Berwujud baru oleh 5 SKPD di tahun 2020 diantaranya Badan Keuangan Daerah, UPTD Puskesmas Karangmoncol, UPTD Puskesmas Purbalingga, UPT SMP Negeri 2 Purbalingga, dan UPT SMP Negeri 2 Karangreja. Sedangkan mutasi kurang karena adanya beban amortisasi penyusutan aset tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp172.061.250,00.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 5.232 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Software	1.145.515.590,00	991.661.590,00	115,51
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(837.829.590,00)	(665.768.340,00)	25,84
Jumlah	**307.686.000,00**	**325.893.250,00**	**94,41**

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD tahun 2020 disajikan pada Lampiran 5.48.

V.3.a.4).c). Aset Lain-Lain_____Rp3.140.255.357,02

Aset Lain-Lain tersebut berupa Barang Rusak Berat dan Barang Tidak Ada yang sampai tanggal laporan belum dihapuskan atau aset tetap yang direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya karena dihentikan dari operasional pemerintah daerah.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.140.255.357,02 (*netto*), berkurang sebesar Rp33.790.253.520,74 atau turun 91,50 persen dari saldo per 31 Desember 2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.233 Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Aset Lain-lain	4.715.655.415,00	63.017.106.144,00	7,48
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1.575.400.057,98)	(26.086.597.266,24)	6,08
Jumlah	**3.140.255.357,02**	**36.930.508.877,76**	**8,50**

(1) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.715.655.415,00 mengalami pengurangan sebesar Rp58.301.450.729,00 atau turun 92,52 persen dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp63.017.106.144,00.

Saldo Aset Lain-Lain tersebut berasal dari saldo awal sebesar Rp63.017.106.144,00, mutasi tambah sebesar Rp4.224.666.085,00 dan mutasi kurang sebesar Rp62.526.116.814,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.234 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	**63.017.106.144,00**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	4.224.666.085,00
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	26.959.996.339,00
Koreksi Saldo awal	13.600.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	5.208.619.949,00
Dihibahkan	237.641.100,00
Koreksi Pencatatan	30.106.259.426,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**4.715.655.415,00**

(a) Mutasi Tambah Aset Lain-lain

Mutasi tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp4.224.666.085,00 berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah disebabkan kondisi aset rusak berat sehingga sudah tidak bisa digunakan dan juga karena hilang.

Total reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain tahun 2020 tersebut di atas berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah sebesar Rp2.025.834.069,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.328.037.364,00, reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp760.239.527,00, dan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp101.155.125,00.

Reklasifikasi Tanah ke dalam aset lain-lain sebesar Rp2.025.834.069,00 terdapat pada 9 SKPD, yang merupakan tanah yang akan dihibahkan.

Khusus untuk aset tetap hilang, pada tahun 2020 terdapat kasus kecurian pada Kelurahan Kedungmenjangan yang menyebabkan hilangnya aset tetap milik SKPD berupa laptop dan proyektor total senilai Rp22.000.000,00.

Secara rinci, reklasifikasi aset tetap per KIB ke aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.37.

(b) Mutasi Kurang Aset Lain-lain

Mutasi kurang Aset Lain-Lain tahun 2020 sebesar Rp62.526.116.814,00 terjadi karena adanya (i) penghapusan senilai Rp26.959.996.339,00, (ii) koreksi saldo awal senilai Rp13.600.000,00, (iii) reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp5.208.619.949,00, (iv) dihibahkan senilai Rp237.641.100,00 dan (v) koreksi pencatatan senilai Rp30.106.259.426,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun aset lain-lain harus sudah dihapuskan. Pengapusan Aset Lain-Lain yang dilakukan di tahun 2020 merupakan penghapusan atas saldo Aset Lain-Lain yang disajikan dalam LKPD tahun 2019 *(Audited)* sedangkan Aset Lain-Lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tahun 2020 akan dihapuskan di tahun 2021.

Penghapusan Aset Lain-Lain tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/346 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2019 pada Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Laboratorium Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, SMP, dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi Kurang Aset Lain-Lain karena Reklasifikasi ke Aset Tetap merupakan Aset Lain-lain yang direklasifikasi kembali ke Aset Tetap terdapat pada 9 SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.235 Aset Lain-lain Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2020

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.929.541.191,00
UPT SMP Negeri 2 Kejobong	76.360.500,00
UPT SMP Negeri 1 Karanganyar	7.500.000,00
UPT TK Negeri Pembina Bobotsari	300.000,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	4.853.258,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	34.975.000,00
Bagian Umum - Sekretariat Daerah	135.890.000,00
Kelurahan Purbalingga Wetan	3.200.000,00
Kecamatan Karanganyar	16.000.000,00
Jumlah	**5.208.619.949,00**

Sedangkan koreksi pencatatan Aset Lain-Lain merupakan koreksi pencatatan Aset Lain-Lain yang secara fisik sudah dilakukan penjualan atau pembongkaran di tahun 2019 tetapi sampai dengan akhir tahun 2019 masih tercatat sebagai saldo aset lain-lain pada SKPD yaitu:

Tabel 5.236 Koreksi Pencatatan Aset Lain-Lain Tahun 2020

SKPD	Nilai
(1)	**(2)**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.715.878.802,00
UPT SMP Negeri 1 Bukateja	188.000.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	65.739.520,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.663.225.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	24.693.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.288.976.790,00
Badan Keuangan Daerah	159.745.564,00
Jumlah	**30.106.259.426,00**

Koreksi pencatatan aset lain-lain pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nominal Rp26.288.976.790,00 merupakan koreksi pencatatan atas gedung bangunan lama Lingkungan Industri Kecil (LIK) UPTD Logam yang telah dilakukan rekonstruksi dan juga bangunan Pasar Sinduraja yang juga sudah dilakukan rehabilitasi di tahun 2019.

Secara lengkap, Rekapitulasi penghapusan Aset Lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.49.

(2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.575.400.057,98) berkurang sebesar Rp24.511.197.208,26 atau turun 93,96 persen dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp26.086.597.266,24).

Saldo tersebut berasal dari saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp26.086.597.266,24, mutasi tambah sebesar Rp1.211.560.850,78 dan mutasi kurang sebesar Rp25.722.758.059,04 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.237 Mutasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2020	**26.086.597.266,24**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	1.211.560.850,78
Mutasi Kurang:	
Penjualan	18.981.076.126,73
Koreksi Saldo Awal	590.937.589,74
Reklasifikasi ke Aset Tetap	2.581.648.925,24
Dihibahkan	220.453.600,00
Koreksi Pencatatan	3.348.641.817,33
Saldo Akhir 31 Desember 2020	**1.575.400.057,98**

(a) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp1.211.560.850,78 berasal dari pencatatan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah disebabkan kondisi aset rusak berat sehingga sudah tidak bisa digunakan atau hilang. Jumlah ini sama dengan nilai pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya sebagaimana dijelaskan pada bagian V.3.a.3).g)..

(b) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi kurang Akumulasi Aset Lain-Lain sebesar Rp25.722.758.059,04 yang terdiri karena (i) penjualan Rp18.981.076.126,73, (ii) koreksi saldo awal Rp590.937.589,74, (iii) reklasifikasi ke aset tetap Rp2.581.648.925,24, (iv) dihibahkan Rp220.453.600,00, dan (v) koreksi pencatatan Rp3.348.641.817,33.

Rincian Saldo Aset Lain-Lain per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.50.

V.3.b. KEWAJIBAN Rp40.848.285.164,38

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.848.285.164,38 naik sebesar Rp16.505.729.033,17 atau naik 67,81 persen dari nilai kewajiban per 31 Desember 2019. Nilai kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel 5.238 Daftar Kewajiban Daerah per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kewajiban Jangka Pendek	35.696.303.447,75	18.706.493.815,83	190,82
Kewajiban Jangka Panjang	5.151.981.716,63	5.636.062.315,38	91,41
Jumlah	**40.848.285.164,38**	**24.342.556.131,21**	**167,81**

V.3.b.1). Kewajiban Jangka Pendek_____Rp35.696.303.447,75

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.696.303.447,75, meningkat sebesar Rp16.989.809.631,92 atau meningkat 90,82 persen dari saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel 5.239 Daftar Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144.579.059,00	97.210.043,00	148,73
Pendapatan Diterima Dimuka	527.037.212,24	726.047.022,08	72.59
Utang Belanja	34.540.606.577,76	17.331.346.427,00	199.30
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.080.598,75	551.890.323,75	87,71
Jumlah	**35.696.303.447,75**	**18.706.493.815,83**	**190,82**

V.3.b.1).a). Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)_____Rp144.579.059,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.579.059,00, mengalami penurunan sebesar Rp47.369.016,00 atau turun 48,73 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.240 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Retensi	47.695.025,00	-	-
Utang Pajak	18.475.541,00	19.713.342,00	93,72
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	78.408.493,00	76.900.201,00	101,96
Utang PFK Lainnya	-	596.500,00	-
Jumlah	**144.579.059,00**	**97.210.043,00**	**148,73**

(1) Utang Retensi

Saldo Utang Retensi (Jaminan Pemeliharaan) per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.695.025,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.695.025,00 atau naik 100,00 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019.

Saldo Utang Retensi per 31 Desember 2020 ini merupakan Utang Retensi (Jaminan Pemeliharaan) pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata. Pada tahun 2019, utang retensi pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata disajikan pada kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya dan di tahun 2020 dilakukan reklasifikasi ke kelompok Utang PFK sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

Tabel 5.241 Rincian Utang Retensi per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Tahun 2013	4.495.000,00	-	-
Tahun 2014	9.467.500,00	-	-
Tahun 2016	4.550.000,00	-	-
Tahun 2019	14.997.125,00	-	-
Tahun 2020	14.185.400,00	-	-
Jumlah	**47.695.025,00**	**-**	**-**

(2) Utang Pajak

Saldo Utang Pajak merupakan pajak yang sudah dipotong/dipungut oleh Bendahara baik Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS maupun Bendahara BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum disetor ke RKUN.

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.475.541,00 yang terdapat pada 8 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, UPT SMP Negeri 1 Bobotsari, UPTD Puskesmas Serayu Larangan, Bagian Umum SETDA, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Mrebet, dan Kecamatan Bobotsari yang seluruhnya berasal dari transaksi tahun 2020, sedangkan utang pajak tahun 2019 telah disetorkan di tahun 2020.

Saldo tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.237.801,00 atau turun 6,28 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Penurunan saldo utang pajak tersebut, meskipun relatif belum signifikan, menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan keuangan terutama dana BOS sudah semakin baik, terlihat dari semakin tertibnya Bendahara BOS melakukan pemotongan dan penyetoran pajak pusat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.242 Rincian Utang Pajak per SKPD per 31 Desember 2020

SKPD	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.273.012,00	17.658.053,00	92,16
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	1.045.453,00	1.663.835,00	62,83
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	60.920,00	-	-
Bagian Umum SETDA	72.000,00	-	-
Kecamatan Bukateja	168.200,00	295.454,00	56,93
Kecamatan Purbalingga	823.320,00	-	-
Kelurahan Mewek	-	96.000,00	-
Kecamatan Mrebat	15.909,00	-	-
Kecamatan Bobotsari	16.727,00	-	-
Jumlah	**18.475.541,00**	**19.713.342,00**	**93,72**

Saldo Utang Pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT SMP Negeri 1 Bobotsari merupakan Utang Pajak Pusat yang dipotong oleh Bendahara BOS, saldo Utang Pajak pada UPTD Puskesmas Serayu Larangan merupakan Utang Pajak Pusat yg dipotong oleh Bendahara BLUD, sedangkan saldo Utang Pajak pada Bagian Umum Setda, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran.

Tabel 5.243 Rincian Utang Pajak per Kelompok per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran	1.096.156,00	391.454,00	280,02
Utang Pajak Bendahara BOS	17.318.465,00	19.321.888,00	89,63
Utang Pajak Bendahara BLUD	60.920,00	-	-
Jumlah	**18.475.541,00**	**19.713.342,00**	**93,72**

Saldo Utang Pajak tahun 2020 tersebut di atas sudah disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Negara sebagaimana tabel 5.149 dan 5.156.

V.3.b.1).b). Pendapatan Diterima di Muka _____Rp527.037.212,24

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 sebesar Rp527.037.212,24, mengalami penurunan sebesar Rp199.009.809,84 atau turun 27,41 persen dibandingkan saldo tahun 2019. Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 terdapat pada 5 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.244 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per SKPD per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	72.826.667,00	76.250.000,00	95,51
Dinas Perumahan dan Permukiman	31.187.314,00	18.729.172,60	166,52
Dinas Tenaga Kerja	-	16.782.000,00	-
Dinas Perhubungan	63.933.333,38	62.440.000,02	102,39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.048.002,00	296.526.447,00	42,85
Badan Keuangan Daerah	232.041.895,86	255.319.402,46	90,88
Jumlah	**527.037.212,24**	**726.047.022,08**	**72,59**

(1) RSUD Goeteng Taroenadibrata

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri/Swasta dengan perjanjian/MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp72.826.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.423.333,00 atau turun 4,49 persen dari posisi per 31 Desember 2019.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.51.

(2) Dinas Perumahan dan Permukiman

Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp31.187.314,00 merupakan pendapatan sewa lahan milik Pemda di Kelurahan Karangsentul yang disewa untuk Rumah Makan Nony dan 1 bidang tanah di Kantor Badan Keuangan Daerah disewa oleh Bank Jateng untuk ATM.

Saldo Pendapatan diterima di Muka yang digunakan oleh BPD Jawa Tengah untuk lokasi ATM dengan periode sewa selama 1 tahun terhitung mulai 22 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2021 sesuai dengan Perjanjian Nomor 590/48/X Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan total nilai sewa sebesar Rp7.500.000,00. Sedangkan yang

digunakan oleh Rumah Makan Nony periode sewa 1 tahun terhitung mulai 6 Oktober 2020 sampai dengan 6 Oktober 2021 sesuai dengan Perjanjian Nomor 590/743 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dengan total nilai sewa sebesar Rp32.870.500,00.

Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.458.141,40 atau naik 6,52 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2019.

(3) Dinas Perhubungan

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perhubungan merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari retribusi pemberian ijin trayek yang diterbitkan di tahun 2019 dan 2020.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.933.333,38 meningkat sebesar Rp1.493.333,36 atau naik 2,39 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2019.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.52.

(4) DPMPTSP

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada DPMPTSP merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari penerimaan retribusi izin gangguan (HO) Tahun 2015-2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.245 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada DPMPTSP per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2016	-	57.914.328,00	-
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2017	96.100.232,00	192.200.464,00	50,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2018	30.887.770,00	46.331.655,00	66,88
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2019	60.000,00	80.000,00	75,00
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2020	-	-	-
Jumlah	**127.048.002,00**	**296.526.447,00**	**42,88**

(5) Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)

Pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2020 senilai Rp232.041.895,86 terdiri dari pendapatan diterima dimuka pajak daerah sebesar Rp195.490.854.76, dan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp35.551.041,10.

Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.277.506,60 atau turun 9,12 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Keuangan Daerah tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.53.

V.3.b.1).c). Utang Belanja _____Rp34.540.606.577,76

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi maupun penyerahan barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun 2020 belum dilaksanakan pembayarannya.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga,

yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.540.606.577,76 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp17.209.260.150,76 atau naik 99,30 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Seluruh saldo utang belanja tahun 2019 telah direalisasikan pembayarannya di tahun 2020 sehingga saldo utang belanja tahun 2020 seluruhnya berasal dari utang baru di tahun 2020, yang terdiri dari:

Tabel 5.246 Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Pegawai	32.160.230.821,00	14.885.345.663,00	216,05
Utang Belanja Barang dan Jasa	2.336.779.404,76	2.425.941.764,00	96,32
Utang Belanja Transfer	41.137.352,00	-	-
Utang Belanja Modal	2.459.000,00	20.059.000,00	12.26
Jumlah	**34.540.606.577,76**	**17.331.346.427,00**	**199,06**

(1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2020 belum terbayarkan.

Total Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.160.230.821,00 yang terdapat pada 139 SKPD. Nilai tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp17.274.885.158,00 atau naik 116,05 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.247 Rincian Utang Belanja Pegawai per Jenis Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	764.724.315,00	122.956.762,00	621,95
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.560.041.087,00	5.822.701.884,00	112,66
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	63.280.650,00	551.697.800,00	11,47
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	76.830.253,00	201.333.995,00	38,16
Utang Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tamsil Guru	13.456.248.400,00	-	-
Utang Belanja Jasa Medis	11.226.006.116,00	8.185.105.222,00	137,15
Utang Belanja Honorarium Non PNS	13.100.000,00	1.550.000,00	845,16
Jumlah	**32.160.230.821,00**	**14.885.345.663,00**	**216,05**

Rincian Utang Belanja Pegawai per jenis per SKPD disajikan dalam lampiran 5.54.

(a) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2020 sebesar Rp764.724.315,00, mengalami peningkatan Rp641.767.553,00 atau naik 521,95 persen dari saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2019. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya kurang bayar Iuran BPJS PNS Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk periode September-November 2020. Sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Pemerintah Kabupaten Total kekurangan iuran

BPJS untuk seluruh PNS Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp662.003.414,00 yang sudah dibayarkan seluruhnya di bulan Januari 2021.

(b) Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar Rp6.560.041.087,00, mengalami peningkatan Rp737.339.203,00 atau naik 12,66 persen dari saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2019. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan tagihan tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain itu juga karena adanya perubahan penggunaan rekening belanja untuk insentif pemungutan pajak daerah yang di tahun 2019 menggunakan rekening belanja insentif pemungutan pajak daerah sedangkan di tahun 2020 menggunakan rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

(c) Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Saldo Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp63.280.650,00, mengalami penurunan Rp488.417.150,00 atau turun 88,53 persen dari saldo Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan penggunaan rekening belaja sebagaimana dijelaskan pada poin b) di atas.

(d) Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Saldo Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp76.830.253,00, mengalami penurunan Rp124.503.742,00 atau turun 61,84 persen dari saldo Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan penerimaan retribusi daerah di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

(e) Utang Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tamsil Guru

Saldo Utang Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tamsil Guru tahun 2020 sebesar Rp13.456.248.400,00, mengalami peningkatan 100,00% dari saldo Utang Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tamsil Guru tahun 2019. Saldo utang tersebut terjadi karena adanya kekurangan alokasi DAK Non Fisik dari APBN sebagai dampak dari pemotongan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Total alokasi dan realisasi pendapatan DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru tahun 2020 adalah sebesar Rp159.621.507.000,00 sedangkan total pencairan sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp155.024.290.850,00 sehingga dana yang tersisa sampai dengan Triwulan III hanya Rp4.597.216.150,00. Di sisi lain, total kebutuhan dana untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru Triwulan IV/2020 untuk 3.384 orang guru SD dan SMP adalah sebesar Rp13.456.248.400,00.

Tabel 5.248 Rincian Utang Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20
(1)	(2)
DAK Non Fisik TPG	159.621.507.000,00
Pencairan TPG sd TW III/2020	155.024.290.850,00
Sisa Dana DAK Non Fisik TPG	**4.597.216.150,00**
Kebutuhan Dana Pencairan TPG TW IV/2020 (Terutang)	**13.456.248.400,00**

(f) Utang Belanja Jasa Medis

Saldo Utang Belanja Jasa Medis tahun 2020 sebesar Rp11.226.006.116,00, mengalami kenaikan Rp3.040.900.894,00 atau naik 37,15 persen dari saldo Utang Belanja Jasa Medis tahun 2019. Kenaikan tersebut bersumber dari jasa medis atas tindakan yang dilakukan terkait dengan penanangan pandemi Covid-19. Nilai utang jasa medis terbesar terdapat pada RSUD Panti Nugroho yaitu sebesar Rp4.056.727.845,00 atau 36,14 persen dari total nilai Utang Belanja Jasa Medis sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.249 Rincian Utang Belanja Jasa Medis per SKPD Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	%
(1)	(2)	(2)	(4)=(2:3)
UPTD Puskesmas Purbalingga	61.542.120,00	63.651.142,00	96,69
UPTD Puskesmas Bojong	74.898.320,00	44.580.950,00	168,01
UPTD Puskesmas Kutasari	169.804.133,00	136.713.700,00	124,20
UPTD Puskesmas Bojongsari	134.098.635,00	160.018.515,00	83,80
UPTD Puskesmas Kalimanah	185.790.608,00	75.013.955,00	247,67
UPTD Puskesmas Padamara	207.278.230,00	144.860.075,00	143,09
UPTD Puskesmas Kemangkon	139.613.745,00	154.840.064,00	90,17
UPTD Puskesmas Kaligondang	98.202.770,00	99.902.000,00	98,30
UPTD Puskesmas Kalikajar	37.107.220,00	73.922.932,00	50,20
UPTD Puskesmas Kejobong	236.635.670,00	163.446.415,00	144,78
UPTD Puskesmas Pengadegan	121.117.000,00	122.785.465,00	98,64
UPTD Puskesmas Bukateja	116.162.870,00	149.354.835,00	77,78
UPTD Puskesmas Kutawis	174.229.710,00	102.778.565,00	169,52
UPTD Puskesmas Rembang	208.849.750,00	162.268.725,00	128,71
UPTD Puskesmas Karanganyar	180.945.700,00	191.011.225,00	94,73
UPTD Puskesmas Karangmoncol	261.783.950,00	253.897.635,00	103,11
UPTD Puskesmas Karangtengah	189.623.690,00	75.814.208,00	250,12
UPTD Puskesmas Bobotsari	151.633.770,00	217.864.005,00	69,60
UPTD Puskesmas Mrebet	137.024.870,00	98.798.630,00	138,69
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	184.374.360,00	144.022.412,00	128,02
UPTD Puskesmas Karangreja	330.765.892,00	284.514.118,00	116,26
UPTD Puskesmas Karangjambu	155.046.658,00	104.671.508,00	148,13
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	102.144.600,00	73.550.000,00	138,88
RSUD Goeteng Taroenadibrata	3.510.604.000,00	3.622.818.000,00	96,90
RSUD Panti Nugroho	4.056.727.845,00	1.464.006.143,00	277,10
Jumlah	**11.226.006.116,00**	**8.185.105.222,00**	**137,15**

(g) Utang Belanja Honorarium Non PNS

Saldo Utang Belanja Honorarium Non PNS tahun 2020 sebesar Rp13.100.000,00, mengalami kenaikan Rp11.550.000,00 atau naik 745,16 persen dari saldo Utang Belanja Honorarium Non PNS tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.250 Rincian Utang Belanja Honorarium Non PNS per SKPD Tahun 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	%
(1)	(2)	(2)	(4)=(2:3)
UPTD Puskesmas Kalimanah	4.650.000,00	-	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	6.900.000,00	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
	13.100.000,00	**1.550.000,00**	**845,16**

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pihak ketiga yang terkait dengan konsumsi barang/jasa tahun 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran.

Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.336.779.404,76 yang terdapat pada 15 SKPD. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp89.162.359,24 atau turun 3,68 persen dibandingkan nilai Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2019.

Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut terdiri dari:

Tabel 5.251 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Bahan / Material	1.831.574.094,00	2.241.290.614,00	81,72
Utang Belanja Cetak dan Penggandaan	1.469.500,00	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor	261.494.387,00	155.040.821,00	168,66
Utang Belanja Premi Asuransi	932.423,76	-	-
Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	14.079.829,00	-
Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	181.390.000,00	-	-
Utang Belanja Makanan dan Minuman	44.503.000,00	390.000,00	11.411,03
Utang Belanja Pemeliharaan	15.416.000,00	15.140.500,00	101,82
Jumlah	**2.336.779.404,76**	**2.425.941.764,00**	**96,32**

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD tahun 2020 pada Lampiran 5.55.

(a) Utang Belanja Bahan/Material

Saldo Utang Belanja Bahan/Material tahun 2020 sebesar Rp1.831.574.094,00, mengalami penurunan Rp409.716.520,00 atau turun 18,28 persen dari saldo Utang Belanja Bahan/Material tahun 2019. Saldo utang belanja bahan/material tersebut merupakan utang atas pembelian obat-obatan, bahan pelayanan kesehatan maupun bahan laboratorium pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.252 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
RSUD Goeteng Taroenadibrata	1.450.542.379,00	2.226.895.189,00	65,14
RSUD Panti Nugroho	381.031.715,00	14.395.425,00	2.646,89
Jumlah	**1.831.574.094,00**	**2.241.290.614,00**	**81,72**

(b) Utang Belanja Cetak dan Penggandaan

Saldo Utang Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.469.500,00, merupakan utang pada UPTD Puskesmas Kalimanah.

(c) Utang Belanja Jasa Kantor

Saldo Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp261.494.387,00, mengalami peningkatan sebesar Rp106.453.566,00 atau naik 68,66 persen dari saldo

per 31 Desember 2019. Saldo utang tersebut terdapat pada 13 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.253 Rincian Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
UPT SMP Negeri 5 Mrebet	-	410.320,00	-
Dinas Kesehatan	-	83.551.851,00	-
UPTD Puskesmas Kalimanah	80.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Kutawis	1.582.146,00	-	-
UPTD Puskesmas Karanganyar	-	3.240.000,00	-
UPTD Puskesmas Bobotsari	888.960,00	31.050,00	2.863,00
UPTD Puskesmas Mrebet	6.422.517,00	-	-
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	4.596.350,00	-	-
UPTD Puskesmas Karangreja	-	995.000,00	-
UPTD Puskesmas Karangjambu	-	2.661.780,00	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	578.470,00	5.868.200,00	9,86
RSUD Goeteng Taroenadibrata	150.671.068,00	-	-
RSUD Panti Nugroho	91.451.160,00	29.342.160,00	311,67
Dinas Perumahan dan Permukiman	-	4.500.000,00	-
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	231.000,00	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.903.600,00	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	497.280,00	75.700,00	656,91
Dinas Perhubungan	290.700,00	3.300.000,00	8,81
Dinas Pertanian	-	1.563.480,00	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	17.023.560,00	-
Kelurahan Bojong	-	1.027.720,00	-
Kecamatan Karangmoncol	2.301.136,00	-	-
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	-	1.450.000,00	-
Jumlah	**261.494.387,00**	**155.040.821,00**	**168,66**

(d) Utang Belanja Premi Asuransi

Saldo Utang Belanja Premi Asuransi per 31 Desember 2020 sebesar Rp932.423,76, mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Saldo utang tersebut merupakan utang belanja premi iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas Karangreja.

(e) Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Saldo Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan 100,00 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Saldo utang tahun 2019 pada Pelaksana BPBD sudah dibayarkan seluruhnya di tahun 2020 dengan SP2D Nomor SP2D-01181/LS/1.05.02.01/2020 tanggal 18 Februari 2020.

(f) Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Saldo Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp181.390.000,00, mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Saldo utang tersebut merupakan utang sewa alat kedokteran pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.

(g) Utang Belanja Makanan dan Minuman

Saldo Utang Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.503.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp44.113.000,00 atau naik 11.311,03 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Saldo utang tersebut merupakan utang belanja makanan dan minuman pada RSUD Panti Nugroho.

(h) Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.416.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp275.500,00 atau naik 1,82 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Saldo utang tersebut merupakan utang belanja pemeliharaan pada UPTD Puskesmas Bojong berupa pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan.

(3) Utang Belanja Transfer

Salo Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.137.352,00 merupakan kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2020 kepada 8 Desa di 6 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.254 Rincian Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2020

Desa, Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)
Kemangkon Kec. Kemangkon	4.726.860,00
Senon Kec. Kemangkon	2.902.472,00
Cipawon Kec. Bukateja	326.025,00
Kedungwuluh Kec. Kalimanah	8.644.385,00
Binangun Kec. Mrebet	16.139.695,00
Lambur Kec. Mrebet	523.615,00
Gunungkarang Kec. Bobotsari	1.987.750,00
Gembong Kec. Bojongsari	5.886.550,00
Jumlah	**41.137.352,00**

(4) Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pihak ketiga yang terkait dengan perolehan Aset Tetap tahun 2020 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran.

Total Utang Belanja Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.459.000,00. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.600.000,00 atau 87,74 persen, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.255 Rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.459.000,00	11.809.000,00	102,24
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	8.250.000,00	0,60
Jumlah	**2.459.000,00**	**20.059.000,00**	**1,45**

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp2.459.000,00 terdapat pada UPTD Puskesmas Purbalingga yang merupakan jumlah kurang bayar atas pekerjaan renovasi gedung IGD.

Dengan adanya Utang Belanja Modal tersebut di atas, UPTD Puskesmas Purbalingga telah melakukan pencatatan secara keseluruhan (100,00 persen) terhadap aset tetap yang dibangun sebagaimana diatur pada Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual bahwa perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit/termin diakui sebagai penambah nilai aset tetap dimaksud dan sebagai kewajiban pada neraca.

V.3.b.1).d). Utang Jangka Pendek Lainnya_____Rp484.080.598,75

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp484.080.598,75. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2019, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.809.725,00 atau turun 12,29 persen, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.256 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Jaminan Pemeliharan BLUD	-	67.809.725,00	-
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka – Retribusi Pasar Segamas	484.080.598,75	484.080.598,75	100,00
Jumlah	**484.080.598,75**	**551.890.323,75**	**87,71**

(1) Jaminan Pemeliharaan BLUD

Di tahun 2020, saldo jaminan pemeliharaan BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dilakukan reklasifikasi ke kelompok Utang PFK sehingga saldo Jaminan Pemeliharaan BLUD pada Utang Jangka Pendek Lainnya menjad Rp0,00.

(2) Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pasar Segamas

Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pasar Segamas atas pembayaran sewa kios Pasar Segamas yang merupakan porsi tahun 2020 sebesar Rp484.080.598,75.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kios pasar segamas dapat dilihat pada penjelasan atas Utang Jangka Panjang Lainnya.

V.3.b.2). Kewajiban Jangka Panjang_____Rp5.151.981.716,63

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.151.981.716,63, mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 8,59 persen dari posisi per 31 Desember 2019. Seluruh saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.257 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.151.981.716,63	5.636.062.315,38	91,41
Jumlah	**5.151.981.716,38**	**5.636.062.315,38**	**91,41**

V.3.b.2).a). Utang Jangka Panjang Lainnya_____Rp5.151.981.716,63

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.151.981.716,63 mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 8,59 persen dari posisi per 31 Desember 2019.

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya tersebut berasal dari:

Tabel 5.258 Daftar Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kelebihan Setor Dividen Perumda Owabong	1.521.377.226,00	1.521.377.226,00	100,00
Pendapatan atas Sewa Pasar Segamas	3.630.604.490,63	4.114.685.089,38	88,24
Jumlah	**5.151.981.716,63**	**5.636.062.315,38**	**91,41**

(1) Pengakuan Kelebihan Pembayaran Dividen tahun 2010 dan 2011 dari Perumda Owabong

Sesuai dengan LHP Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, terdapat kelebihan setor dividen dari PD Owabong kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2010 sebesar Rp1.138.164.318,00 dan tahun 2011 sebesar Rp383.212.908,00 atau total sebesar Rp1.521.377.226,00. Kelebihan setor ini terjadi karena terdapat perbedaan ketentuan persentase bagian laba untuk Pemerintah Daerah antara Perda Nomor 38 Tahun 2005 (75 persen) dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 (55 persen).

Atas kelebihan setor dividen di tahun 2010 dan 2011 tersebut, Perumda Owabong telah mencatat adanya uang muka kepada Pemda dan BPK RI dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2010 memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperjelas status kelebihan setor dividen dari Perumda Owabong tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam LKPD tahun 2019 mulai melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap kelebihan setor dividen tersebut sebagai Utang Jangka Panjang.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melakukan pembayaran atas Utang tersebut sehingga per 31 Desember 2020 masih teratat sebagai Utang Jangka Panjang.

(2) Pendapatan Diterima di Muka Sewa Pasar Segamas

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima pendapatan sewa kios/lapak/pelataran Pasar Segamas dari para pengguna/penyewa sebesar Rp9.681.611.975,00 untuk periode 5 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 tentang Harga Sewa Kios, Kios Dalam Los/Lapak, Los/Lapak, Pelataran dan *Service Charge* Pada Pasar Segamas Purbalingga dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Kios Dalam Los/Lapak dan Pelataran Pada Pasar Segamas Purbalingga.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, dijelaskan pada Ketentuan Peralihan Pasal 32 bahwa Wajib Retribusi yang telah membayar uang sewa tempat usaha di Pasar Segamas sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2009 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009, tidak diwajibkan melakukan pembayaran retribusi jasa tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan sewa.

Atas kondisi ini, BPK-RI dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 melakukan koreksi pencatatan untuk mengakui adanya kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada para penyewa kios/los/lapak/pelataran, yang mulai disajikan dalam LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010.

Rincian alokasi pendapatan sewa per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.259 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020

Tahun	Sewa Dibayar Dimuka	Biaya Sewa
01-Jun-09	9.681.611.975,00	Rp 242.040.299,38
2010	9.439.571.675,63	Rp 484.080.598,75
2011	8.955.491.076,88	Rp 484.080.598,75
2012	8.471.410.478,13	Rp 484.080.598,75
2013	7.987.329.879,38	Rp 484.080.598,75
2014	7.503.249.280,63	Rp 484.080.598,75
2015	7.019.168.681,88	Rp 484.080.598,75
2016	6.535.088.083,13	Rp 484.080.598,75
2017	6.051.007.484,38	Rp 484.080.598,75
2019	5.566.926.885,63	Rp 484.080.598,75
2020	5.082.846.286,88	Rp 484.080.598,75
2020	4.598.765.688,13	Rp 484.080.598,75
2021	4.114.685.089,38	Rp 484.080.598,75
2022	3.630.604.490,63	Rp 484.080.598,75
2023	3.146.523.891,88	Rp 484.080.598,75
2024	2.662.443.293,13	Rp 484.080.598,75
2025	2.176.362.694,38	Rp 484.080.598,75
2026	1.694.282.095,63	Rp 484.080.598,75
2027	1.210.201.496,88	Rp 484.080.598,75
2028	720.120.898,13	Rp 484.080.598,75
2029	242.040.299,38	Rp 242.040.299,38

Setiap tahun, dilakukan reklasifikasi terhadap porsi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo tahun berikutnya ke dalam rekening Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang pada kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp484.080.598,75.

V.3.c. EKUITAS _____ Rp2.729.145.826.725,94

Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.729.145.826.725,94, mengalami penurunan sebesar Rp92.840.304.235,72 atau turun 3,29 persen dari posisi Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.821.986.130.961,66.

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban.

Tabel 5.260 Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Persen
Ekuitas	2.729.145.826.725,94	2.821.986.130.961,66	96,71
Jumlah	**2.729.145.826.725,94**	**2.821.986.130.961,66**	**96,71**

V.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

V.4.a. PENDAPATAN-LO_____Rp1.719.603.208.372,16

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp1.719.603.208.372,16, mengalami penurunan sebesar Rp154.530.823.961,61 atau turun 8,25 persen dibandingkan dengan realiasi tahun 2019 sebesar Rp1.874.134.032.333,77.

Pendapatan-LO tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp294.424.043.699,22, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.295.769.580.196,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp129.409.584.476,94.

Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah di atas, hanya kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.261 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Kenaikan / (Penurunan)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2:3)
Pendapatan Asli Daerah – LO	294.424.043.699,22	326.640.831.949,27	(32.216.788.250,05)	90,14
Pendapatan Transfer – LO	1.295.769.580.196,00	1.439.678.711.521,00	(143.909.131.325,00)	90,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	129.409.584.476,94	107.814.488.863,50	21.595.095.613,44	120,03
Jumlah	**1.719.603.208.372,16**	**1.874.134.032.333,77**	**(154.530.823.961,61)**	**91,75**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.a.1). Pendapatan Asli Daerah-LO_____Rp294.424.043.699,22

Total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp294.424.043.699,22, mengalami penurunan sebesar Rp32.216.788.250,05 atau turun 9,86 persen dari saldo Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2019 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.262 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	59.293.528.090,54	62.231.752.034,44	95,28
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.862.677.734,30	12.939.999.416,35	91,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	20.133.369.181,38	34.847.064.630,48	57,78
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	203.134.468.693,00	216.622.015.868,00	93,77
Jumlah	**294.424.043.699,22**	**326.640.831.949,27**	**90,14**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp294.424.043.699,22 lebih rendah sebesar Rp32.216.788.250,05 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.263 Perbandingan PAD-LO dan PAD-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Pajak Daerah	59.293.528.090,54	58.829.669.048,00	463.859.042,54
Pendapatan Retribusi Daerah	11.862.677.734,30	11.072.934.345,00	789.743.389,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.133.369.181,38	21.682.472.386,00	(1.549.103.204,62)
Lain-Lain PAD yang Sah	203.134.468.693,00	222.033.613.002,00	(18.899.144.309,00)
Jumlah	**294.424.043.699,22**	**313.618.688.781,00**	**(19.194.645.081,78)**

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp463.859.042,54 karena adanya pencatatan dan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020 yang berasal dari Piutang Pajak 2020 dan pengakuan atas porsi pendapatan pajak diterima di muka tahun 2020 serta pengurangan Pendapatan Pajak Daerah-LO karena penerimaan piutang pajak 2019 di tahun 2020 dan pencatatan pajak reklame dibayar di muka, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.264 Perhitungan Pajak Daerah - LO Tahun 2020

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	**58.829.669.048,00**
(+) Piutang Pajak Daerah 2020	523.611.655,00
(+) Jurnal balik atas Pajak Diterima di Muka Tahun 2019	250.044.812,30
(-) Pendapatan Pajak Daerah 2019 yang diterima di 2020	(114.306.570,00)
(-) Pendapatan Pajak Reklame Diterima di Muka 2020	(195.490.854,76)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	**59.293.528.090,54**

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp789.743.389,30 yang berasal dari penambahan karena pengakuan piutang retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp712.117.890,00 dan pengakuan atas porsi pendapatan retribusi diterima di muka tahun 2020 sebesar Rp226.900.874,43 serta pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO karena penerimaan piutang retribusi daerah 2019 di tahun 2020 sebesar Rp63.407.020,00 serta pencatatan retribusi diterima di muka tahun 2020 sebesar Rp85.868.355,13, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.265 Perhitungan Retribusi Daerah - LO Tahun 2020

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	**11.072.934.345,00**
(+) Piutang Retribusi Daerah 2020	712.117.890,00
(+) Jurnal Balik Pendapatan Retribusi Diterima di Muka 2019	226.900.874,43
(-) Penerimaan Piutang Retribusi Daerah di tahun 2020	(63.407.020,00)
(-) Pendapatan Retribusi Diterima di Muka 2020	(85.868.355,13)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	**11.862.677.734,30**

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih rendah sebesar Rp1.549.103.204,62 dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan sebagai konsekuensi penerapan kebijakan akuntansi dalam pencatatan hasil investasi menggunakan metode ekuitas dan biaya.

Untuk investasi permanen yang dicatat dengan metode ekuitas, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pengakuan laba/rugi BUMD sesuai dengan porsi kepemilihan saham sedangkan penerimaan dividen tunainya bukan merupakan bagian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Sedangkan untuk investasi permanen yang pencatatannya menggunakan metode biaya yaitu PT BPD Jawa Tengah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO hanya berasal dari pengakuan atas dividen tunai tahun Buku 2019 yang sudah diterima di tahun 2020 sesuai dengan Keputusan RUPS PT BPD Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2020.

Tabel 5.266 Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO Tahun 2020

BUMD / Perusahaan	Laba/Rugi 2020 *(Audited)*	% Kepemilikan Saham 2020	Bagian Laba / Rugi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO
(1)	(2)	(3)	(4) = (3 x 2)	(5)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	11.748.466.803,00	41,14%	4.833.319.242,75	4.833.319.242,75
PD BPR Artha Perwira	4.288.780.905,43	100%	4.288.780.905,43	4.288.780.905,43
PT BPRS Buana Mitra Perwira	3.410.935.639,00	58,56%	1.997.443.910,20	1.997.443.910,20
Perumda OWABONG	(7.657.214.189,00)	100%	(7.657.214.189,00)	(7.657.214.189,00)
Perumda Air Minum Tirta Perwira	7.038.658.260,00	100%	7.038.658.260,00	7.038.658.260,00
Perumda Puspahastama	2.731.896.758,00	100%	2.731.896.758,00	2.731.896.758,00
PT BPD Jawa Tengah *)				6.899.456.594,00
PT BKK Jateng (Perseroda)		0,70%		-
PT PRPP Jawa Tengah *)				1.027.700,00
			Jumlah	**20.133.369.181,38**

*) Pencatatan investasi permanen menggunakan metode biaya

d) Lain-Lain PAD yang Sah

Terdapat perbedaan sebesar Rp18.833.395.046,00 antara realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA yang bersumber dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp1.893.351.010,00 dan Pendapatan BLUD sebesar Rp16.940.044.036,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.267 Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.022.298.239,00	1.022.298.239,00	-
Penerimaan Jasa Giro	1.457.488.597,00	1.457.488.597,00	-
Pendapatan Bunga	10.163.972.505,00	10.163.972.505,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	47.232.409,00	47.232.409,00	-
Pendapatan Denda Pajak	65.982.040,00	65.982.040,00	-

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Denda Retribusi	103.269.010,00	103.269.010,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	1.893.351.010,00	(1.893.351.010,00)
Pendapatan dari Pengembalian	580.908.044,00	580.908.044,00	-
Pendapatan BLUD	189.683.372.060,00	206.689.165.359,00	(17.005.793.299,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	9.945.789,00	9.945.789,00	-
Jumlah	**203.134.468.693,00**	**222.033.613.002,00**	**(18.899.144.309,00)**

Perbedaan tersebut di atas terjadi karena adanya penambahan yang berasal dari pencatatan atas piutang BLUD tahun 2020, pencatatan atas pendapatan LO dari pendapatan diterima di muka tahun 2019 dan pengurangan yang terjadi karena pencatatan atas piutang pendapatan BLUD tahun 2019 dan pendapatan diterima di muka tahun 2020, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.268 Perhitungan Lain-lain PAD yang Sah – LO dengan LRA Tahun 2020

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA	**222.033.613.002,00**
(+) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020	16.766.947.243,00
(+) Jurnal Balik Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima di Muka 2019	76.250.000,00
(-) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 yang diterima di 2020	(35.669.514.885,00)
(-) Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima di Muka 2020	(72.826.667,00)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	**203.134.468.693,00**

Penjelasan atas pendapatan diterima di muka BLUD dan piutang BLUD dapat dilihat pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

V.4.a.1).a). Pendapatan Pajak Daerah-LO _____Rp59.293.528.090,54

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp59.293.528.090,54 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.938.223.943,90 atau turun 4,72 persen dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2020 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.269 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pajak Hotel - LO	433.869.168,00	422.831.757,00	102,61
Pajak Restoran - LO	4.646.266.278,00	5.391.772.457,00	86,17
Pajak Hiburan - LO	2.081.448.629,00	4.105.266.734,00	50,70
Pajak Reklame - LO	752.666.852,54	866.900.008,44	86,82
Pajak Penerangan Jalan - LO	20.724.090.463,00	22.721.003.244,00	91,21
Pajak Parkir - LO	79.470.763,00	115.691.131,00	68,69
Pajak Air Tanah - LO	611.490.440,00	575.559.940,00	106,24
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	561.639.555,00	1.278.419.930,00	43,93
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	20.768.159.126,00	19.689.592.226,00	105,48
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	8.634.426.816,00	7.064.714.607,00	122,22
Jumlah	**59.293.528.090,54**	**62.231.752.034,44**	**95,28**

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.56.

V.4.a.1).b). Pendapatan Retribusi Daerah – LO _____Rp11.862.677.734,30

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing unit SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2020 mencapai sebesar Rp11.862.677.734,30, mengalami penurunan sebesar Rp1.077.321.682,05 atau turun 8,33 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Dengan adanya perubahan bentuk kelembagaan pada Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2019, maka retribusi Pelayanan Pasar-LO menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 21,19 persen disusul dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dengan kontribusi sebesar 17,00 persen. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.270 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	490.068.500,00	457.108.400,00	107,21
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.532.558.000,00	2.006.142.000,00	76,39
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.514.293.400,00	3.283.429.000,00	76,58
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	400.364.500,00	656.138.999,00	61,02
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	854.561.250,00	-	0
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.017.091.587,66	2.558.633.697,23	78,83
Retribusi Terminal - LO	80.791.500,00	121.065.500,00	66,73
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.386.735.000,00	1.325.550.000,00	104,62
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	37.650.000,00	76.710.000,00	49,08
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	75.494.835,00	331.932.670,00	22,74
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	615.790.000,00	608.084.000,00	101,27
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.358.598.550,00	909.264.639,00	149,42
Retribusi Izin Gangguan - LO	169.478.445,00	231.798.551,88	73,11
Retribusi Izin Trayek - LO	81.263.666,64	114.171.499,99	71,18
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	162.260.500,00	168.246.459,25	96,44
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi - LO	85.678.000,00	91.724.000,00	93,41
Jumlah	**11.862.677.734,30**	**12.939.999.416,35**	91,67

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.57.

V.4.a.1).c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan – LO _____Rp20.133.369.181,38

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2020 sebesar Rp20.133.369.181,38. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.713.695.449,10

atau turun 42,22 persen dibandingkan pendapatan tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.271 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) - LO	4.833.319.242,75	4.815.037.871,51	100,38
PD BPR Artha Perwira - LO	4.288.780.905,43	5.136.572.681,95	83,49
PT BPRS Buana Mitra Perwira - LO	1.997.443.910,20	1.848.091.864,70	108,08
Perumda OWABONG - LO	(7.657.214.189,00)	8.265.229.920,00	(92,64)
Perumda Air Minum Tirta Perwira - LO	7.038.658.260,00	6.507.427.326,00	108,16
Perumda Puspahastama - LO	2.731.896.758,00	1.273.487.723,32	214,52
PT Bank BPD Jawa Tengah - LO	6.899.456.594,00	7.001.217.243,00	98,55
PT PRPP Jawa Tengah - LO	1.027.700,00	-	-
Jumlah	**20.133.369.181,38**	**34.847.064.630,48**	**57,78**

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pencatatan atas pengakuan laba/(rugi) pada 6 (enam) BUMD tahun 2020 *(Audited)* yang metode pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas dan penerimaan atas dividen PT Bank BPD Jawa Tengah dan PT Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan Jawa Tengah (PT PRPP Jawa Tengah) yang telah dibayarkan di tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.272 Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020

BUMD	Laba/Rugi 2020	Kepemilikan Saham 2020 (%)	Bagian Laba / Rugi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2x3)
PD BPR BKK Purbalingga (Perseroda) - LO	11.748.466.803,00	41,14	4.833.319.242,75
PD BPR Artha Perwira - LO	4.288.780.905,43	100,00	4.288.780.905,43
PT BPRS Buana Mitra Perwira - LO	3.410.935.639,00	58,56	1.997.443.910,20
Perumda OWABONG - LO	(7.657.214.189,00)	100,00	(7.657.214.189,00)
Perumda Air Minum Tirta Perwiwa - LO	7.038.658.260,00	100,00%	7.038.658.260,00
Perumda Puspahastama - LO	2.731.896.758,00	100,00%	2.731.896.758,00
PT Bank BPD Jawa Tengah - LO	-	0,92	6.899.456.594,00
PT PRPP Jawa Tengah - LO	-	0,00	1.027.700,00
Jumlah	**21.561.524.176,43**		**20.133.369.181,38**

Tabel 5.271 menunjukkan bahwa dari 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta 2 penyertaan modal pada BUMD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 BUMD yang menunjukkan peningkatan kinerja di tahun 2020 yaitu PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Puspahastama, dan PT PRPP Jawa Tengah. Sedangkan kinerja PT Bank BPD Jawa Tengah, PD BPR Artha Perwira, dan Perumda Owabong relatif menunjukkan adanya penurunan yang ditandai dengan penurunan laba bersih di tahun 2020. Bahkan Perumda Owabong untuk pertama kalinya sejak berdiri mengalami rugi bersih yang cukup besar yaitu Rp7.657.214.189,00 atau mengalami penurunan kinerja hingga 192,64 persen jika dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2019.

Kerugian yang cukup signifikan yang dialami oleh Perumda Owabong terjadi sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh negara di dunia dan membuat banyak perusahaan di dunia mengalami kerugian bahkan ada yang sampai bangkrut. Sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang mengalami tekanan paling hebat akibat pandemi *Covid-19*.

Jika di tahun 2019 Perumda Owabong masih mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp43.711.953.350,00 maka di tahun 2020, total pendapatan usaha Perumda Owabong hanya mencapai 1/3 nya atau sebesar Rp15.993.258.837,00. Kondisi pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir di tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah yang masih melakukan pembatasan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat berpotensi untuk menekan kembali kinerja perusahaan di tahun 2021.

Dari beberapa BUMD yang mengalami peningkatan kinerja di tahun 2020, salah satu yang nilai peningkatannya paling signifikan adalah Perumda Puspahastama dari semula hanya mencatatkan laba bersih sebesar Rp1.273.487.723,32 di tahun 2019 melonjak 116,95 persen menjadi Rp2.762.866.098,00 di tahun 2020.

Lonjakan kinerja keuangan Perumda Puspahastama ini tidak terlepas dari penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyediaan sembako untuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*. Total penjualan JPS tersebut mencapai sebesar Rp17.291.888.403,00.

V.4.a.1).d). Lain-lain PAD yang Sah-LO_____Rp203.134.468.693,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2020 sebesar Rp203.134.468.693,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.487.547.175,00 atau turun 6,23 persen dari realisasi pendapatan tahun 2019, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 5.273 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.022.298.239,00	1.301.811.460,00	78,53
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.457.488.597,00	2.534.405.073,00	57,51
Pendapatan Bunga - LO	10.163.972.505,00	13.213.798.545,00	76,92
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	67.578.300,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	47.232.409,00	1.235.016.041,00	3,82
Pendapatan Denda Pajak - LO	65.982.040,00	64.988.445,00	101,53
Pendapatan Denda Retribusi - LO	103.269.010,00	15.470.690,00	667,51
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	834.054.860,00	-
Pendapatan dari Pengembalian -LO	580.908.044,00	2.991.902.653,00	19,42
Pendapatan BLUD - LO	189.683.372.060,00	192.229.622.629,00	98,68
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	9.945.789,00	2.133.367.172,00	0,47
Total	**203.134.468.693,00**	**216.622.015.868,00**	**93,77**

Penjelasan atas masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.58.

V.4.a.2). Pendapatan Transfer-LO _____Rp1.295.769.580.196,00

Realisasi Pendapatan Transfer–LO tahun 2020 sebesar Rp1.295.769.580.196,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp143.909.131.325,00 atau turun hingga 10,00 persen dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2019.

Penurunan terbesar terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menurun sebesar Rp144.939.567.343,00 atau turun 11,30 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena di tahun 2020, alokasi transfer Pemerintah Pusat terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami pemotongan dalam rangka realokasi dan *refocusing* APBN untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19* terutama di sektor ekonomi dan kesehatan.

Penjelasan lebih luas mengenai penurunan realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.2) Pendapatan Transfer-LRA dan Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.274 Realisasi Pendapatan Transfer - LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.137.722.651.656,00	1.282.662.218.999,00	88,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	30.678.594.000,00	43.832.487.000,00	69,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	113.795.861.540,00	103.705.514.022,00	109,73
Bantuan Keuangan - LO	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00	143,19
Jumlah	**1.296.846.146.126,00**	**1.439.678.711.521,00**	**90,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2020, realisasi Pendapatan Transfer-LO lebih kecil sebesar Rp243.360.282.297,00 dengan dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini. Deviasi terbesar terdapat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO yaitu sebesar Rp245.675.204.000,00.

Tabel 5.275 Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.137.722.651.656,00	1.144.405.027.431,00	(6.682.375.775,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	30.678.594.000,00	276.353.798.000,00	(245.675.204.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	113.795.861.540,00	104.798.564.062,00	8.997.297.478,00
Bantuan Keuangan - LO	13.572.473.000,00	13.572.473.000,00	-
Jumlah	**1.295.769.580.196,00**	**1.539.129.862.493,00**	**(243.360.282.297,00)**

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA senilai Rp6.682.375.775,00. Nilai tersebut merupakan

perhitungan dari piutang transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak tahun 2020, serta penerimaan kurang bayar bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.276 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah - LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.144.405.027.431,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020	608.422.017,00
(+) Piutang Bagi Hasil Non Pajak/SDA Tahun 2020	419.430.312,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2019	(7.426.825.925,00)
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Non Pajak/ SDA Tahun 2019	(283.402.179,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	**1.137.722.651.656,00**

Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dicatat berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 yang terdiri dari:

Tabel 5.277 Bagi Hasil Pajak - LO dari Piutang DBH Pajak Tahun 2020

Uraian		Nilai
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO		200.953.069,00
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO		152.983.497,00
- Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO		254.485.451,00
	Total	**608.422.017,00**

Tabel 5.278 Bagi Hasil Bukan Pajak - LO dari Piutang DBH Bukan Pajak Tahun 2020

Uraian		Nilai
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO		159.146.941,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO		229.300.150,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO		30.983.221,00
	Total	**419.430.312,00**

Sedangkan pencatatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang berasal dari penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak tahun 2019 terdiri dari:

Tabel 5.279 Penerimaan Piutang DBH Pajak Tahun 2020

Uraian		Nilai
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO		206.919.238,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO		632.167.994,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO		2.505.463.806,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPSKPDN dan PPh Pasal 21 - LO		4.082.274.887,00
	Total	**7.426.825.925,00**

Tabel 5.280 Penerimaan Piutang DBH Non Pajak Tahun 2020

Uraian		Nilai
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO		240.342.240,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO		3,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO		8.056.162,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO		3.677.289,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO		31.326.485,00
	Total	**283.402.179,00**

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp245.675.204.000,00 merupakan nilai penerimaan transfer yang berupa Dana Desa.

Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO, sehingga hanya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp8.997.297.478,00. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pencatatan atas Piutang kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.676.129.796,00 serta koreksi pencatatan atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.678.832.318,00.

Rincian perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO disajikan dalam tabel di berikut ini.

Tabel 5.281 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	104.798.564.062,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020	**11.676.129.796,00**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.155.668,00
Pajak Kendaraan Bermotor	5.619.499.486,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.181.779.156,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.853.695.486,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2019	**(2.678.832.318,00)**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	(8.192.564,00)
Pajak Kendaraan Bermotor	(1.715.237.416,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(951.851.187,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(3.551.151,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**113.795.861.540,00**

V.4.a.2).a). Transfer Pemerintah Pusat-LO_____Rp1.137.722.651.656,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2020 sebesar Rp1.137.722.651.656,00, mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp144.939.567.343,00 atau turun 11,30 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.282 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat -LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil Pajak - LO	23.430.311.592,00	25.525.062.725,00	91,79
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.935.451.415,00	1.590.867.579,00	121,66
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	841.051.988.000,00	922.836.375.000,00	91,14
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	271.304.900.649,00	332.709.913.695,00	81,54
Jumlah	**1.137.722.651.656,00**	**1.282.662.218.999,00**	**88,70**

Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung pendanaan untuk penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* di sektor kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA-2020. Dalam Lampiran I Perpres 72/2020, total alokasi Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp692.735.645.050,00 dari semula Rp784.945.321.424,00 atau berkurag sebesar Rp92.209.676.374,00.

Khusus untuk Kabupaten Purbalingga, alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat (di luar Dana Desa) mengalami pengurangan sebesar Rp131.039.928.000,00 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

(1) Bagi Hasil Pajak – LO_____Rp23.430.311.592,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2020 sebesar Rp23.430.311.592,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.094.751.133,00 atau turun 8,21 persen dari Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2019, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.283 Realisasi Pendapatan Tranfer Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	3.871.484.669,00	5.351.302.994,00	72,35
DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	313.484.697,00	2.715.197.406,00	11,55
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPSKPDN dan PPh Pasal 21 - LO	12.571.633.709,00	10.377.227.087,00	121,15
DBH Cukai Hasil Tembakau - LO	6.673.708.517,00	7.081.335.238,00	94,24
Jumlah	**23.430.311.592,00**	**25.525.062.725,00**	**91,79**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LRA tahun 2020, realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LO lebih kecil Rp6.818.403.908,00, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah. Perbedaan tersebut telah dijelaskan pada penjelasan atas Pendapatan Transfer-LO.

Tabel 5.284 Perbandingan Tranfer Bagi Hasil Pajak - LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
DBH PBB Sektor Pertambangan - LO	3.871.484.669,00	4.302.699.594,00	(431.214.925,00)
DBH PBB Sektor Perhutanan - LO	313.484.697,00	2.665.965.006,00	(2.352.480.309,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	12.571.633.709,00	16.653.908.596,00	(4.082.274.887,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau - LO	6.673.708.517,00	6.626.142.304,00	47.566.213,00
Jumlah	**24.506.877.522,00**	**30.248.715.500,00**	**(6.818.403.908,00)**

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO_____Rp1.935.451.415,00

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO tahun 2020 sebesar Rp1.935.451.415,00, mengalami peningkatan sebesar Rp344.583.836,00 atau naik 21,66 persen

dibandingkan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.285 Realisasi Pendapatan Tranfer Bagi Hasil Bukan Pajak - LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	346.637.591,00	163.202.962,00	212,40
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	784.599.000,00	593.833.089,00	132,12
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	229.300.150,00		
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	24.764.200,00	126.378.585,00	19,60
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	471.017.003,00	660.277.140,00	71,34
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	78.622.321,00	47.038.600,00	167,14
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO	511.150,00	137.203,00	372,55
Jumlah	**1.935.451.415,00**	**1.590.867.579,00**	**121,66**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA tahun 2020, realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO lebih besar Rp136.028.133,00, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.286 Perbandingan Tranfer Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA - LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
DBH Provisi Sumber Daya Hutan - LO	346.637.591,00	195.546.812,00	151.090.779,00
DBH Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	784.599.000,00	788.276.289,00	(3.677.289,00)
DBH Pungutan Hasil Perikanan - LO	229.300.150,00	-	229.300.150,00
DBH Pertambangan Minyak Bumi - LO	24.764.200,00	56.090.685,00	(31.326.485,00)
DBH Pertambangan Gas Bumi - LO	471.017.003,00	711.359.243,00	(240.342.240,00)
DBH Pertambangan Panas Bumi - LO	78.622.321,00	47.639.100,00	30.983.221,00
DBH Pertambangan Umum - LO	511.150,00	511.153,00	(3,00)
Jumlah	**1.935.451.415,00**	**1.799.423.282,00**	**136.028.133,00**

Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO dan LRA dikarenakan adanya pengakuan Piutang Pendapatan Bagi Hasi Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.7/2020 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan penerimaan atas Piutang DBH SDA tahun 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pendapatan Transfer-LO.

(3) Dana Alokasi Umum-LO_____Rp841.051.988.000,00

Besarnya alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 sebesar Rp841.051.988.000,00. Alokasi DAU tahun 2020 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga tidak ada piutang Transfer Dana Alokasi Umum di tahun 2020.

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp841.051.988.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp81.784.387.000,00 atau turun 8,86 persen dari Realisasi Dana Alokasi Umum – LO tahun 2019. Rincian penerimaan DAU tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.287 Realisasi Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dana Alokasi Umum - LO	835.801.988.000,00	912.934.570.000,00	91,55
Dana Alokasi Umum Tambahan - LO	5.250.000.000,00	9.901.805.000,00	53,02
Jumlah	**841.051.988.000,00**	**922.836.375.000,00**	**91,14**

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LO di atas sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LRA tahun 2020. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1a.2).a).(3). Dana Alokasi Umum

(4) Dana Alokasi Khusus-LO_____Rp271.304.900.649,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jumlah realisasi DAK-LO tahun 2020 sebesar Rp271.304.900.649,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.405.013.046,00 atau turun 18,46 persen dari realisasi penerimaan DAK-LO tahun 2019. Penurunan realisasi tersebut terjadi karena penurunan alokasi DAK tahun 2020 sebagai akibat kebijakan realokasi dan refocusing APBN TA-2020.

Hampir seluruh realisasi penerimaan DAK di tahun 2020 mengalami penurunan dengan DAK Bidang Kesehatan merupakan jenis DAK yang mengalami penurunan terbesar yaitu Rp27.589.550.486,00 atau turun 100,00 persen dari tahun 2019 disusul oleh DAK Pendidikan yang mengalami penurunan Rp23.889.564.484,00 atau turun 48,58 persen. Rincian realisasi penerimaa DAK-LO tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.288 Realisasi Pendapatan Tranfer DAK-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DAK FISIK	**63.818.586.976,00**	**122.592.152.960,00**	**52,06**
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	-	14.466.509.000,00	-
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	2.260.775.000,00	3.592.557.840,00	62,93
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	1.915.039.000,00	-	
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	650.000.000,00	-	
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	-	2.433.370.000,00	-
DAK Bidang Kesehatan - LO	-	27.589.550.486,00	-
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	1.040.059.000,00	764.905.000,00	135,97
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO		806.046.200,00	-
DAK Bidang Pertanian - LO	557.311.900,00	3.972.121.500,00	14,03
DAK Bidang Pendidikan - LO	25.290.222.850,00	49.179.787.334,00	51,42
DAK Bidang Kesehatan dan KB - LO	25.974.563.946,00	-	
DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah - LO	2.195.369.000,00	12.920.404.000,00	16,99
DAK Bidang Pasar - LO	-	1.934.317.000,00	-
DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan) - LO	3.190.904.280,00	3.144.496.600,00	101,48
DAK Bidang Pariwisata - LO	744.342.000,00	1.788.088.000,00	41,63

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DAK NON FISIK	**207.486.313.673,00**	**210.117.760.735,00**	**98,75**
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - LO	10.369.406.500,00	10.962.421.900,00	94,59
Tunjangan Profesi Guru - LO	159.160.257.000,00	166.775.259.735,00	95,43
Tambahan Penghasilan Guru - LO	461.250.000,00	183.512.500,00	251,35
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	25.964.585.330,00	21.372.274.682,00	121,49
Bantuan Operasional KB - LO	5.214.609.793,00	5.178.869.688,00	100,69
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	3.091.185.050,00	2.175.922.230,00	142,06
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	2.495.300.000,00	3.019.500.000,00	82,64
Penyelenggaraan Museum - LO	473.850.000,00	450.000.000,00	105,30
Pelayanan Kepariwisataan - LO	255.870.000,00	-	
Jumlah	**271.304.900.649,00**	**332.709.913.695,00**	**81,54**

V.4.a.2).b). Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO_____Rp30.678.594.000,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp30.678.594.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.153.893.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2019.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO ini merupakan realisasi Dana Insentif Daerah-LO yang diterima di tahun 2020 sebagai penghargaan dari Pemerintah Pusat atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2019.

Tabel 5.289 Realisasi Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dana Insentif Daerah - LO	30.678.594.000,00	43.832.487.000,00	69,99
Jumlah	**30.678.594.000,00**	**43.832.487.000,00**	**69,99**

V.4.a.2).c). Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO_____Rp113.795.861.540,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan dana transfer yang menjadi hak pemerintah daerah di tahun 2020 yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana bagi hasil lainnya.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp113.795.861.540,00, mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp10.090.347.518,00 atau naik 9,73 persen dibandingkan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2019, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.290 Realisasi Pendapatan Tranfer Daerah Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil Dari PKB	28.493.905.293,00	29.327.143.474,00	97,16
Bagi Hasil Dari BBNKB	12.036.837.344,00	18.915.234.539,00	63,64
Bagi Hasil Dari PBBKB	22.413.419.938,00	24.984.524.790,00	89,71
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	124.173.036,00	115.739.252,00	107,29
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	50.727.525.929,00	30.362.871.967,00	167,07
Jumlah	**113.795.861.540,00**	**103.705.514.022,00**	**109,73**

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp113.795.861.540,00 berbeda dengan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp103.705.514.022,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp8.997.297.478,00.

Perbedaan tersebut terjadi karena realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO memperhitungkan penerimaan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019 dan pencatatan atas kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/4475 tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.291 Perbandingan Pendapatan Tranfer Daerah Lainnya-LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Bagi Hasil Dari PKB	28.493.905.293,00	24.589.643.223,00	3.904.262.070,00
Bagi Hasil Dari BBNKB	12.036.837.344,00	10.806.909.375,00	1.229.927.969,00
Bagi Hasil Dari PBBKB	22.413.419.938,00	18.563.275.603,00	3.850.144.335,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	124.173.036,00	111.209.932,00	12.963.104,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	50.727.525.929,00	50.727.525.929,00	-
Jumlah	**113.795.861.540,00**	**104.798.564.062,00**	**8.997.297.478,00**

Total piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 yang telah diterima di tahun 2020 adalah sebesar Rp2.678.832.318,00 sedangkan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar Rp11.676.129.796,00 sebagaimana disajikan pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.292 Perhitungan Pendapatan Tranfer Daerah Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	104.798.564.062,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020	**11.676.129.796,00**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.155.668,00
Pajak Kendaraan Bermotor	5.619.499.486,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.181.779.156,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.853.695.486,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2019	**(2.678.832.318,00)**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	(8.192.564,00)
Pajak Kendaraan Bermotor	(1.715.237.416,00)

Uraian	Jumlah
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(951.851.187,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(3.551.151,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**113.795.861.540,00**

V.4.a.2).d). Bantuan Keuangan-LO_____Rp13.572.473.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan-LO tahun 2020 berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp13.572.473.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO tahun 2019 sebesar Rp9.478.491.500,00, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.093.981.500,00 atau naik 43,19 persen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.293 Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00	143,19
Jumlah	**13.572.473.000,00**	**9.478.491.500,00**	**143,19**

Penjelasan mengenai realisasi pendapatan Bantuan Keuangan-LO ini bisa dilihat pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Poin V.1.a.2.d).

V.4.a.3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO_____Rp129.409.584.476,94

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2020 sebesar Rp129.409.584.476,94 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp21.595.095.613,44 atau naik 20,03 persen dari realisasi pendapatan tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini. Seluruh realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2020 bersumber dari Pendapatan Hibah.

Tabel 5.294 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah - LO	129.409.584.476,94	107.814.488.863,50	120,03
Jumlah	**129.409.584.476,94**	**107.814.488.863,50**	**120,03**

Kenaikan Pendapatan Hibah-LO salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan hibah dana BOS kepada SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Purbalingga. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

V.4.a.3).a). Pendapatan Hibah-LO_____Rp129.409.584.476,94

Realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2020 sebesar Rp129.409.584.476,94 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp21.595.095.613,44 atau naik 20,03 persen dari realisasi pendapatan tahun 2019. Rincian Pendapatan Hibah - LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.295 Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	106.312.134.652,00	6.629.890.950,00	1.603,53
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	9.766.165.222,00	98.358.859.863,50	9,93
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	202.035.000,00	9.000.000,00	2.244,83
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	13.129.249.602,94	2.816.738.050,00	466,12
Jumlah	**129.409.584.476,94**	**107.814.488.863,50**	**120,03**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LRA tahun 2020, terdapat perbedaan sebesar Rp18.365.717.374,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.296 Perbandingan Pendapatan Hibah-LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	106.312.134.652,00	99.930.750.000,00	6.381.384.652,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	9.766.165.222,00	-	9.766.165.222,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	202.035.000,00	70.000.000,00	132.035.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	13.129.249.602,94	-	13.129.249.602,94
Jumlah	**129.409.584.476,94**	**100.000.750.000,00**	**29.408.834.476,94**

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengakuan terhadap Pendapatan Hibah Aset maupun Persediaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah, Masyarakat Umum maupun Perusahaan Swasta Lainnya sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.297 Perhitungan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Pendapatan HIbah – LRA	99.930.750.000,00
(+) Hibah Aset dari Pemerintah Pusat	6.381.384.652,00
(+) Hibah Obat dan Alkon dari Provinsi Jawa Tengah	9.766.165.222,00
(+) Hibah Aset dari Organisasi Swasta Dalam Negeri	132.035.000,00
(+) Hibah Aset dari Komite dan Perorangan	2.099.425.500,00
(+) Hibah Aset dan Persediaan dari Masyarakat terkait Penanganan Covid-19	11.029.824.102,94
Pendapatan Hibah – LO	**129.409.584.476,94**

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO_____Rp106.312.134.652,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah–LO tahun 2020 sebesar Rp106.312.134.652,00 mengalami kenaikan sebesar Rp99.682.243.702,00 atau naik 1.503 persen dari realisasi tahun 2019, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan mekanisme penganggaran dan penyaluran hibah dana BOS di tahun 2020. Sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020, mekanisme penyaluran dana

BOS diubah dari yang semula melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi menjadi langsung ke Rekening Sekolah.

Tabel 5.298 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	10.681.384.652,00	6.629.890.950,00	161,11
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri - LO	62.442.900.000,00	-	
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri - LO	33.187.850.000,00	-	
Jumlah	**106.312.134.652,00**	**6.629.890.950,00**	**1.603,53**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO tersebut terdiri dari hibah air minum perkotaan dan perdesaan serta hibah aset dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.299 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun 2020

Jenis Hibah	Nilai
(1)	(2)
Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Agama	5.778.945.572,00
Hibah Peralatan dan Mesin dari KPU	59.529.080,00
Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	542.910.000,00
Hibah Air Minum Perkotaan	3.300.000.000,00
Hibah Air Minum Perdesaan	1.000.000.000,00
Jumlah	**10.681.384.652,00**

Pejelasan mengenai Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan dapat dilihat pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.

Sedangkan Pendapatan Hibah berupa aset tetap baik yang berasal dari Mahkamah Agung, KPU maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat disajikan pada tabel berikut.

Hibah dari Mahkamah Agung berupa gedung eks Pengadilan Agama, hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Peralatan TIK dan hibah dari KPU berupa *thermogun.*

Tabel 5.300 Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat per SKPD tahun 2020

Instansi Pemberi	SKPD Penerima	Nilai
(1)	(2)	(3)
Mahkamah Agung	Badan Keuangan Daerah	5.778.945.572,00
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	271.455.000,00
	UPT SMP Negeri 2 Karangreja	90.485.000,00
	UPT SMP Negeri 3 Karangreja	90.485.000,00
	UPT SMP Negeri 4 Karangmoncol	90.485.000,00
Komisi Pemilihan Umum	Kelurahan Bancar	3.595.680,00
	Kelurahan Bojong	3.595.680,00
	Kelurahan Kalikabong	4.794.240,00
	Kelurahan Kandanggampang	2.796.640,00
	Kelurahan Karangmanyar	1.997.600,00
	Kelurahan Karangsentul	2.397.120,00

Instansi Pemberi	SKPD Penerima	Nilai
(1)	(2)	(3)
	Kelurahan Kedungmenjangan	3.595.680,00
	Kelurahan Kembaran Kulon	5.193.760,00
	Kelurahan Mewek	2.397.720,00
	Kelurahan Penambongan	3.995.200,00
	Kelurahan Purbalingga Kidul	5.992.800,00
	Kelurahan Purbalingga Kulon	1.997.600,00
	Kelurahan Purbalingga Lor	5.593.280,00
	Kelurahan Purbalingga Wetan	4.394.720,00
	Kelurahan Wirasana	7.191.360,00
	Jumlah	**6.381.384.652,00**

Penjelasan mengenai Pendapatan Hibah BOS SD Negeri dan SMP Negeri secara lebih detail dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.3).a).(1).

(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO ___Rp9.766.165.222,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2020 sebesar Rp9.766.165.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp88.592.694.641,50 atau turun 90,07 persen dari realisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.301 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	9.766.165.222,00	6.463.019.863,50	151,11
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri - LO	-	55.447.840.000,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri - LO	-	29.809.000.000,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi - LO	-	4.434.000.000,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja - LO	-	2.205.000.000,00	-
Jumlah	**9.766.165.222,00**	**98.358.859.863,50**	**9,93**

Dengan berubahnya mekanisme penyaluran dana BOS dari RKUN langsung ke Rekening Sekolah, maka di tahun 2020 tidak ada realiasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA. Sedangkan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2020 merupakan hibah obat-obatan kepada Dinas Kesehatan dan hibah Alkon dan KB kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.302 Perbedaan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Hibah Obat dari Provinsi kepada DINKES	7.986.312.662,00	-	7.986.312.662,00
Hibah Alat Kontrasepsi dan KB dari Provinsi kepada DINSOSDALDUKKBP3A	1.779.852.560,00	-	1.779.852.560,00
Jumlah	**9.766.165.222,00**	**-**	**9.766.165.222,00**

(3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO_____Rp202.035.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO tahun 2020 sebesar Rp202.035.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp193.035.000,00 atau naik 2.144,83 persen dari realisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.303 Realisasi Pendapatan Hibah-LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	202.035.000,00	9.000.000,00	2.244,83
Jumlah	**202.035.000,00**	**9.000.000,00**	**2.244,83**

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO tersebut terdiri dari (1) Hibah uang tunai dari PT BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.500.000,00; (2) Hibah uang tunai dari PT BPRS Buana Mitra Perwira kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.000.000,00; (3) Hibah uang tunai dari PT BPR BKK Purbalingga kepada Bagian Umum sebesar Rp39.500.000,00; (4) Hibah aset tetap berupa Laptop dari PT BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga kepada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp10.499.000,00; dan (5) Hibah aset tetap dari PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga berupa alat komunikasi telepon seluler sebanyak 64 buah kepada 54 SKPD sebesar Rp121.536.000,00. Data SKPD penerima hibah alat komunikasi dari PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga disajikan pada Lampiran 5.59.

(4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan - LO _____Rp13.129.249.602,94

Realisasi Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat–LO tahun 2020 sebesar Rp13.129.249.602,94 mengalami peningkatan sebesar Rp10.312.511.552,94 atau naik 366,12 persen dari realisasi tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.304 Realisasi Pendapatan Hibah-LO dari Kelompok Masyarakat - LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	13.129.160.602,94	2.816.738.050,00	466,11
Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO	89.000,00	-	-
Jumlah	**13.129.249.602,94**	**2.816.738.050,00**	**466,12**

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat-LO merupakan hibah aset kepada sekolah-sekolah yang berasal dari Komite sebesar Rp2.099.425.500,00, hibah aset dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp748.300.000,00 serta hibah persediaan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp 10.281.524.102,94.

Pendapatan hibah aset dari Komite Sekolah sebesar Rp2.099.425.500,00 terdiri dari hibah komite TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.305 Rincian Hibah dari Komite Sekolah Tahun 2020

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Hibah Aset Tetap dari Komite kepada SD Negeri	11.000.000,00
Hibah Aset Tetap dari Komite kepada SMP Negeri	2.087.575.500,00
Hibah Aset Tetap dari Komite kepada TK Negeri	850.000,00
Jumlah	**2.099.425.500,00**

Sedangkan hibah aset dan persediaan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* terdapat pada 4 (empat) SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.306 Rekapitulasi Hibah Aset dan Persediaan terkait Covid-19 Tahun 2020

Uraian	Aset	Persediaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Dinas Kesehatan	-	7.412.050.922,94	7.412.050.922,94
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	726.000.000,00	2.100.332.280,00	2.826.332.280,00
RSUD Panti Nugroho	-	269.632.500,00	269.632.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.300.000,00	499.508.400,00	521.808.400,00
Jumlah	**748.300.000,00**	**10.281.524.102,94**	**11.029.824.102,94**

Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan-LO merupakan hibah buku agama dan buku laporan dari guru kepada SMP Negeri 2 Kutasari.

Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO per SKPD tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.60.

V.4.b. BEBAN Rp1.721.535.687.875,84

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban tahun 2020 sebesar Rp1.721.535.687.875,84 mengalami peningkatan sebesar Rp32.326.127.760,37 atau naik 1,91 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.307 Realisasi Beban-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pegawai - LO	879.156.560.927,00	903.513.484.852,00	97,30
Beban Persediaan	183.512.289.866,27	166.180.754.609,21	110,43
Beban Jasa	141.520.392.679,12	161.214.120.743,20	87,78
Beban Pemeliharaan	52.047.628.877,00	50.817.851.641,00	102,42
Beban Perjalanan Dinas	36.620.004.198,00	60.742.815.275,00	60,29
Beban Subsidi	2.378.814.568,00	986.499.846,00	241,14
Beban Hibah	96.238.205.151,00	37.351.109.751,00	257,66
Beban Bantuan Sosial	9.037.665.500,00	27.413.867.800,00	32,97
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.018.110.549,00	156.630.046.175,66	109,82
Beban Penyisihan Piutang	183.426.560,45	165.933.022,40	110,54
Beban Transfer	148.822.589.000,00	124.193.076.400,00	119,83
Jumlah	**1.721.535.687.875,84**	**1.689.209.560.115,47**	**101,91**

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Beban tahun 2020 sebagai berikut:

V.4.b.1) Beban Pegawai_____Rp879.156.560.927,00

Beban Pegawai adalah beban kompensasi untuk tahun berjalan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang timbul selama periode pelaporan.

Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp879.156.560.927,00, mengalami penurunan sebesar Rp24.356.923.925,00 atau turun 2,70 persen dibandingkan realisasi beban pegawai tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.307 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	672.475.675.689,00	688.222.625.259,00	97,71
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	57.344.043.093,00	80.700.139.953,00	71,06
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.522.000.000,00	6.490.500.000,00	100,49
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	302.906.650,00	2.478.987.100,00	12,22
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	124.562.443,00	541.023.003,00	23,02
Beban Uang Lembur - LO	570.728.300,00	895.528.685,00	63,73
Beban Pegawai - Dana BLUD - LO	94.838.144.299,00	-	-
Beban Honorarium PNS	14.932.283.000,00	20.088.655.450,00	74,33
Beban Honorarium Non PNS	14.965.420.250,00	16.313.625.000,00	91,74
Beban Jasa Medis	10.939.740.253,00	79.778.051.186,00	13,71
Beban Pegawai - Dana BOS	6.141.056.950,00	8.004.349.216,00	76,72
Jumlah	**879.156.560.927,00**	**903.513.484.852,00**	**97,31**

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA, nilai Beban Pegawai tersebut lebih tinggai sebesar Rp110.278.769.855,00 dibandingkan Belanja Pegawai-LRA dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.308 Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Selisih
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	672.475.675.689,00	658.454.032.593,00	14.021.643.096,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	57.344.043.093,00	56.817.250.372,00	526.792.721,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.522.000.000,00	6.522.000.000,00	-
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	302.906.650,00	791.323.800,00	(488.417.150,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	124.562.443,00	191.300.057,00	(66.737.614,00)
Beban Uang Lembur - LO	570.728.300,00	570.728.300,00	-
Beban Pegawai - Dana BLUD - LO	94.838.144.299,00	9.492.395.750,00	85.345.748.549,00
Beban Honorarium PNS	14.932.283.000,00	14.932.283.000,00	-
Beban Honorarium Non PNS	14.965.420.250,00	14.965.420.250,00	-
Beban Jasa Medis	10.939.740.253,00	-	10.939.740.253,00
Beban Pegawai - Dana BOS	6.141.056.950,00	6.141.056.950,00	-
Jumlah	**879.156.560.927,00**	**768.877.791.072,00**	**110.278.769.855,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA terdapat pada beberapa rekening yaitu Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Pegawai Dana BLUD serta Beban Jasa Medis. Rincian Beban Pegawai per SKPD sebagaimana Lampiran 5.61.

V.4.b.1).a). Beban Gaji dan Tunjangan-LO_____Rp672.475.675.689,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan-LO tahun 2020 sebesar Rp672.475.675.689,00, mengalami penurunan sebesar Rp15.746.949.570,00 atau turun 2,29 persen dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan-LO tahun 2019.

Jika Beban Gaji dan Tunjangan-LO dibandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp14.021.643.096,00.

Selisih lebih tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan-LO bukan semata-mata memperhitungkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2019 yang telah dibayar di tahun 2020 sebagai komponen pengurang serta utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.309 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA 2020	**658.454.032.593,00**
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2020	14.218.276.465,00
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2019 yang dibayar di 2020	(196.633.369,00)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO 2020	**672.475.675.689,00**

V.4.b.1).b). Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO_____Rp57.344.043.093,00

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun 2020 sebesar Rp57.344.043.093,00, berkurang sebesar Rp23.356.096.860,00 atau turun 28,94 persen dari realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun 2019. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRA.

Jika Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO dibandingkan dengan Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp526.792.721,00.

Selisih lebih pada Beban Tambahan Penghasilan PNS terjadi karena Beban Tambahan Penghasilan PNS tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2019 yang telah dibayar di tahun 2020 sebagai komponen pengurang serta utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2020 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.310 Perhitungan Beban Tamsil PNS-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA 2020	**56.817.250.372,00**
(+) Utang Belanja Tamsil Tahun 2020	5.299.546.039,00
(-) Utang Belanja Tamsil Tahun 2019 yang dibayar di 2020	(4.772.753.318,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 2020	**57.344.043.093,00**

V.4.b.1).c). Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO_____Rp6.522.000.000,00

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO tahun 2020 sebesar Rp6.522.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.500.000,00 atau naik 0,49 persen dari realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO tahun 2019. Secara umum, kenaikan tersebut telah dijelaskan pada pos Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRA.

V.4.b.1).d). Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO _____Rp302.906.650,00

Realisasi Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp302.906.650,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.176.080.450,00 atau turun 87,78 persen dari realisasi Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO tahun 2019. Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena di tahun 2020, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan pada rekening lain yang berbeda dengan rekening tahun 2019 yaitu Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Jika Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO dibandingkan dengan Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LRA, terdapat selisih kurang sebesar (Rp488.417.150,00). Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran insentif pajak daerah pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja insentif pemungutan pajak daerah tahun 2019 yang telah dibayar di tahun 2020 sebagai komponen pengurang serta utang belanja insentif pemungutan pajak daerah tahun 2020 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.311 Perhitungan Beban Insentif Pajak Daerah-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Insentif Pajak Daerah-LRA 2020	**791.323.800,00**
(+) Utang Belanja Insentif Pajak tahun 2020	63.280.650,00
(-) Utang Belanja Insentif Pajak tahun 2019 yang dibayar di 2020	(551.697.800,00)
Beban Insentif Pajak Daerah - LO 2020	**302.906.650,00**

V.4.b.1).e). Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO ____Rp124.562.443,00

Realisasi Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp124.562.443,00, mengalami penurunan sebesar Rp416.460.560,00 atau turun 76,98 persen dari realisasi Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO tahun 2019. Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena di tahun 2020, rekening Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan pada rekening lain yang berbeda

dengan rekening tahun 2019 yaitu Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Oyektif Lainnya.

Jika Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO dibandingkan dengan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LRA, terdapat selisih kurang sebesar Rp66.737.614,00. Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran insentif retribusi daerah pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2019 yang telah dibayar di tahun 2020 sebagai komponen pengurang serta utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2020 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.312 Perhitungan Beban Insentif Retribusi Daerah-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Insentif Retribusi Daerah-LRA 2020	**191.300.057,00**
(+) Utang Belanja Insentif Retribusi tahun 2020	53.497.613,00
(-) Utang Belanja Insentif Retribusi tahun 2019 yang dibayar di 2020	(120.235.227,00)
Beban Insentif Retribusi Daerah - LO 2020	**124.562.443,00**

V.4.b.1).f). Beban Uang Lembur-LO _____Rp 570.728.300,00

Realisasi Beban Uang Lembur-LO tahun 2020 sebesar Rp570.728.300,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp17.449.165,00 atau naik 1,99 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Jika Beban Uang Lembur-LO dibandingkan dengan Belanja Uang Lembur-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp196.431.000,00. Selisih lebih pada Beban Uang Lembur-LO terjadi karena terdapat reklas Beban Pegawai – BLUD ke Beban Uang Lembur-LO sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

V.4.b.1).g). Beban Pegawai Dana BLUD-LO _____Rp94.838.144.299,00

Realisasi Beban Pegawai-Dana BLUD tahun 2020 sebesar Rp94.838.144.299,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp94.838.144.299,00 atau naik 100,00 persen.

Jika Beban Pegawai Dana BLUD-LO dibandingkan dengan Belanja Pegawai Dana BLUD-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp85.345.748.549,00. Selisih lebih Beban Pegawai Dana BLUD-LO terjadi karena adanya reklas Beban Jasa Medis dan Tambahan Penghasilan PNS dari Beban Barang dan Jasa Dana BLUD-LO ke Beban Pegawai Dana BLUD-LO. Reklasifikasi ini dilakukan untuk menyajikan Beban Jasa Medis dan Beban Tambahan Penghasilan PNS ke dalam kelompok Beban Pegawai sesuai dengan definisi Belanja Pegawai dalam Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yaitu bahwa Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Dengan kriteria tersebut, maka Beban Jasa Medis lebih tepat disajikan sebagai bagian dari Beban Pegawai meskipun dalam APBD dan Laporan Realisasi APBD disajikan sebagai bagian dari Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 5.313 Perhitungan Beban Pegawai Dana BLUD-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Pegawai - Dana BLUD 2020	**9.492.395.750,00**
(+) Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2020	12.521.383.804,00
(+) Reklas Beban Jasmed dan Tamsil 2020	82.130.514.016,00
(-) Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2019 yang Dibayar 2020	(9.306.149.271,00)
Beban Pegawai - Dana BLUD 2020	**94.838.144.299,00**

V.4.b.1).h). Beban Honorarium PNS-LO _____Rp14.932.283.000,00

Realisasi Beban Honorarium PNS-LO tahun 2020 sebesar Rp14.932.283.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.156.372.450,00 atau turun 25,67 persen dari realisasi Beban Honorarium PNS-LO tahun 2019 sebesar Rp20.088.655.450,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Nilai Beban Honorarium PNS-LO sama dengan nilai Belanja Honorarium PNS.

Tabel 5.314 Rincian Beban Honorarium PNS-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	11.659.236.750,00	15.737.807.450,00	74,08
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - LO	186.065.000,00	335.550.000,00	55,45
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - LO	108.372.000,00	154.700.000,00	70,05
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD - LO	2.978.609.250,00	3.860.598.000,00	77,15
Jumlah	**14.932.283.000,00**	**20.088.655.450,00**	**74,33**

Penjelasan mengenai penurunan Beban Honorarium PNS dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Nomor V.1.b.1).a).(8) Belanja Honorarium PNS.

V.4.b.1).i). Beban Honorarium Non PNS-LO _____Rp14.965.420.250,00

Realisasi Beban Honorarium Non PNS-LO tahun 2020 sebesar Rp14.965.420.250,00. Sebagaimana dengan realisasi Beban Pegawai-LO yang mengalami penurunan di tahun 2020, realisasi Beban Honorarium Non PNS-LO juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.348.204.750,00 atau turun 8,26 persen. Penurunan tersebut telah dijelaskan pada penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran bagian V.1.b.1).a).(9) Belanja Honorarium Non PNS.

Tabel 5.315 Perbandingan Beban Honorarium Non PNS-LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	-	7.850.000,00	-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	14.421.225.250,00	16.203.050.000,00	89,00
Beban Upah Harian	544.195.000,00	102.725.000,00	529,76
Jumlah	**14.965.420.250,00**	**16.313.625.000,00**	**91,74**

V.4.b.1).j). Beban Jasa Medis-LO _____Rp10.939.740.253,00

Realisasi Beban Jasa Medis-LO tahun 2020 sebesar Rp10.939.740.253,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp68.838.310.933,00 atau turun 86,29 persen. Penurunan tersebut diantaranya terjadi karena pada tahun 2020 Beban Jasa Medis BLUD tidak disajikan sebagai beban tersendiri akan tetapi dijadikan satu di dalam rekening Beban Pegawai BLUD.

Realisasi Beban Jasa Medis-LO tahun 2020 seluruhnya merupakan reklasifikasi Belanja Jasa Medis pada kelompok Belanja Jasa Kantor tahun 2020 yang berupa pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 pada RSUD dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk bulan Maret-November 2020.

V.4.b.1).k). Beban Pegawai Dana BOS-LO _____Rp6.141.056.950,00

Realisasi Beban Pegawai Dana BOS-LO tahun 2020 sebesar Rp6.141.056.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.863.292.266,00 atau turun 23,28 persen dari realisasi Beban Pegawai Dana BOS-LO tahun 2019.

Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Pegawai Dana BOS dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.b.1).a).(10) Belanja Pegawai Dana BOS.

V.4.b.2). Beban Persediaan_____Rp183.512.289.866,27

Realisasi Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp183.512.289.866,27, mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp17.331.535.257,06 atau naik 10,43 persen dari realisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.315 Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bahan Pakai Habis	25.277.877.934,13	28.391.764.511,66	89,03
Beban Persediaan Bahan/ Material	100.189.417.739,14	69.745.100.204,55	143,65
Beban Cetak dan Penggandaan	16.249.025.382,00	18.102.688.558,00	89,76
Beban Makanan dan Minuman	33.762.675.436,00	42.416.706.730,00	79,60
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	683.274.250,00	831.772.000,00	82,15
Beban Pakaian Kerja	1.088.634.800,00	1.222.208.575,00	89,07
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.995.800,00	2.378.487.250,00	117,76
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	2.588.691,00	-
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	453.195.000,00	1.879.236.400,00	24,12
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	3.007.193.525,00	1.210.201.689,00	248,49
Jumlah	**183.512.289.866,27**	**166.180.754.609,21**	**110,43**

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan, terdapat selisih kurang sebesar Rp132.481.453.110,73 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.316 Perbandingan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Bahan Pakai Habis	25.277.877.934,13	13.740.542.182,00	11.537.335.752,13
Beban Bahan/ Material	100.189.417.739,14	48.138.279.607,00	52.051.138.132,14
Beban Cetak dan Penggandaan	16.249.025.382,00	4.479.681.234,00	11.769.344.148,00
Beban Makanan dan Minuman	33.762.675.436,00	22.426.903.347,00	11.335.772.089,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	683.274.250,00	596.416.250,00	86.858.000,00
Beban Pakaian Kerja	1.088.634.800,00	868.153.000,00	220.481.800,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.995.800,00	2.170.593.300,00	630.402.500,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	453.195.000,00	449.420.000,00	3.775.000,00
Beban Barang dan Jasa - Dana BOS	-	65.702.238.234,00	(65.702.238.234,00)
Beban Barang dan Jasa - Dana BLUD	-	157.421.515.823,00	(157.421.515.823,00)
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	3.007.193.525,00	-	3.007.193.525,00
Jumlah	**183.512.289.866,27**	**315.993.742.977,00**	**(132.481.453.110,73)**

Perbedaan sebesar Rp132.481.453.110,73 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.317 Perhitungan Beban Persediaan-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Barang dan Jasa - Persediaan	**315.993.742.977,00**
Menambah Beban Persediaan:	
Saldo Persediaan Tahun 2019	24.281.888.124,32
Saldo Persediaan 2020 yang bukan berasal dari Belanja Barjas Persediaan	3.993.304.429,00
Hibah Obat dan Bahan Yankes dari Provinsi Jawa Tengah ke Dinas Kesehatan	7.986.312.662,00
Utang Belanja Barjas-Persediaan 2020	1.877.546.594,00
Beban Barjas Ekstrakom (BM APBD/Hibah Tidak menjadi Aset)	3.007.193.525,00
Beban Persediaan dari Hibah Penanganan COVID	10.281.524.102,94
Beban Persediaan dari BTT Penanganan COVID	808.864.921,67
Mengurangi Beban Persediaan:	
Saldo Persediaan Tahun 2020	(27.326.792.739,46)
Persediaan 2019 bukan termasuk Beban Persediaan 2020	(4.695.505.788,00)
Belanja Barjas Persediaan menghasilkan Aset Tetap	(32.775.000,00)
Utang Belanja Barjas-Persediaan 2019 yang dibayar di 2020	(2.246.094.681,00)
Reklasifikasi Beban Non Persediaan BOS	(36.468.695.728,00)
Reklasifikasi Beban Non Persediaan BLUD	(113.948.223.533,20)
Beban Barang dan Jasa - Persediaan	**183.512.289.866,27**

V.4.b.2).a). Beban Bahan Pakai Habis _____Rp25.277.877.934,13

Nilai Beban Bahan Pakai Habis tahun 2020 sebesar Rp25.277.877.934,13, mengalami penurunan sebesar Rp3.113.886.577,53 atau turun 10,97 persen dari nilai Beban Bahan Pakai Habis tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Salah satu faktor yang menjadi peyebab penurunan tersebut adalah realokasi dan *refocusing* anggaran dalam

rangka penanganan dampak pandemi *covid-19* sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab III.

Tabel 5.318 Rincian Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Alat Tulis Kantor	11.152.205.901,67	12.854.328.450,66	86,76
Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.965.019.788,00	1.892.243.414,00	103,85
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	624.311.379,00	626.483.820,00	99,65
Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.143.551.980,46	2.620.331.308,00	119,97
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	890.153.131,00	1.197.341.072,00	74,34
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	37.175.000,00	37.725.300,00	98,54
Beban Pengisian Isi Tabung Gas	494.180.525,00	514.247.497,00	96,10
Beban Bendera/Umbul-Umbul/Layur	327.618.000,00	549.192.605,00	59,65
Beban Bahan Perlengkapan Kerja	489.063.000,00	690.315.226,00	70,85
Beban Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.794.836.240,00	2.035.806.225,00	88,16
Beban Perlengkapan Rumah Tangga	2.825.046.188,00	3.444.879.049,00	82,01
Beban Cenderamata/Karangan Bunga/Plakat	708.262.875,00	948.360.495,00	74,68
Beban Alat Peraga/Praktek Sekolah	826.453.926,00	980.510.050,00	84,29
Jumlah	**25.277.877.934,13**	**28.391.764.511,66**	**89,03**

Realisasi Beban Bahan Pakai Habis terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6.685.412.977,00 atau 26,45 persen dari total Beban Bahan Pakai Habis sedangkan realisasi Beban Bahan Pakai habis terkecil terdapat pada Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp4.262.500,00 atau hanya 0,02 persen dari total Beban Bahan Pakai Habis sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.319 Lima SKPD Beban Bahan Pakai Habis Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.685.412.977,00	26,45
2	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	2.427.959.049,00	9,61
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	1.767.271.119,00	6,99
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.678.313.750,00	6,64
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	1.678.245.750,00	6,64

V.4.b.2).b). Beban Bahan/ Material _____Rp100.189.417.739,14

Nilai Beban Bahan/Material tahun 2020 sebesar Rp100.189.417.739,14, mengalami kenaikan sebesar Rp30.444.317.534,59 atau naik 43,65 persen dari nilai Beban Bahan/Material tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Salah satu faktor yang menjadi peyebab kenaikan tersebut adalah penerimaan hibah persediaan dari masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional poin V.4.a.3).a).(3).

Tabel 5.320 Rincian Beban Bahan/Material Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Bahan Baku Bangunan	3.956.771.425,00	5.912.626.750,00	66,92
Beban Bahan/Bibit Tanaman	517.962.700,00	924.354.600,00	56,04

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Bibit Ternak	345.000,00	250.000,00	138
Beban Bahan Obat-obatan	26.536.994.797,26	29.089.710.227,61	91,22
Beban Bahan Kimia	638.257.882,00	415.498.460,00	153,61
Beban Makanan Pokok	83.670.160,00	-	-
Beban Bahan Percontohan	664.466.950,00	978.990.607,00	67,87
Beban Bahan Pelayanan Kesehatan	32.068.498.840,88	16.579.387.588,44	193,42
Bahan Pakan Ternak/Ikan	69.659.500,00	80.067.000,00	87
Beban Penghargaan	67.419.150,00	485.936.800,00	13,87
Beban Bahan Bibit Ikan	32.640.000,00	146.845.000,00	22,23
Beban Bahan Pangan	27.908.157.399,00	6.160.997.984,00	452,98
Beban Perlengkapan Kantor	2.150.754.414,00	4.895.726.054,00	43,93
Beban Bahan Laboratorium	5.493.819.521,00	4.074.709.133,50	134,83
Jumlah	**100.189.417.739,14**	**69.745.100.204,55**	**143,65**

Realisasi Beban Bahan/Material terbesar terdapat pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yaitu sebesar Rp27.853.046.535,00 atau 27,80 persen dari total Beban Bahan/Material sedangkan realisasi Beban Bahan/Material terkecil terdapat pada Kecamatan Karanganyar sebesar Rp50.000,00.

Tabel 5.321 Lima SKPD Beban Bahan/Material Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RSUD Goeteng Taroenadibrata	27.853.046.535,00	27,80
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.863.566.104,00	21,82
3	Dinas Kesehatan	15.546.256.226,64	15,52
4	RSUD Panti Nugroho	6.006.147.275,00	5,99
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.994.151.976,00	2,99

V.4.b.2).c). Beban Cetak dan Penggandaan _____Rp16.249.025.382,00

Nilai Beban Cetak dan Penggandaan tahun 2020 sebesar Rp16.249.025.382,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.853.663.176,00 atau turun 10,24 persen dari nilai Beban Cetak dan Penggandaan tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.322 Rincian Beban Cetak dan Penggandaan Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Cetak	11.676.439.693,00	11.744.775.041,00	99,42
Beban Penggandaan	4.572.585.689,00	6.357.913.517,00	71,92
Jumlah	**16.249.025.382,00**	**18.102.688.558,00**	**89,76**

Realisasi Beban Cetak dan Penggandaan terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu total sebesar Rp8.042.877.846,00 atau 49,50 persen dari total Beban Cetak dan Penggandaan sedangkan realisasi Beban Cetak dan Penggandaan terkecil terdapat pada TK Negeri Pembina Bobotsari yang hanya sebesar Rp150.000,00.

Tabel 5.323 Lima SKPD Beban Cetak dan Penggandaan Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.042.877.846,00	49,50
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	701.350.977,00	4,32
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	558.818.742,00	3,44
4	Badan Keuangan Daerah	421.983.925,00	2,60
5	Sekretariat DPRD	378.074.500,00	2,33

V.4.b.2).d). Beban Makanan dan Minuman _____Rp33.762.675.436,00

Nilai Beban Makanan dan Minuman tahun 2020 sebesar Rp33.762.675.436,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.654.031.294,00 atau turun 20,40 persen dari nilai Beban Makanan dan Minuman tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penurunan yang sangat signifikan tersebut salah satunya terjadi karena di tahun 2020, frekuensi kegiatan pertemuan dan rapat-rapat berkurang sangat drastis sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Tabel 5.324 Rincian Beban Makanan dan Minuman Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.837.362.938,00	1.679.071.487,00	109,43
Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.747.747.322,00	28.513.977.024,00	69,26
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.726.905.802,00	7.218.617.793,00	79,34
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	10.656.000,00	520.276.000,00	2,05
Beban Makanan dan Minuman Harian	4.571.033.600,00	2.211.612.000,00	206,68
Beban Makanan dan Minuman Pasien	1.868.969.774,00	2.273.152.426,00	82,22
Jumlah	**33.762.675.436,00**	**42.416.706.730,00**	**79,60**

Realisasi Beban Makanan dan Minuman terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu total sebesar Rp5.450.325.913,00 atau 16,14 persen dari total Beban Makanan dan Minuman sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp594.900,00. Realisasi Beban Makanan dan Minuman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mayoritas merupakan belanja makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rantang Berkah yang diberikan kepada para lansia di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 5.325 Lima SKPD Beban Makanan dan Minuman Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.450.325.913,00	16,14
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.594.268.400,00	13,61
3	Sekretariat DPRD	4.243.702.650,00	12,57
4	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	3.482.278.047,00	10,31
5	RSUD Goeteng Taroenadibrata	2.870.681.953,00	8,50

V.4.b.2).e). Beban Pakaian Dinas dan Atributnya _____Rp683.274.250,00

Nilai Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 sebesar Rp683.274.250,00, mengalami penurunan sebesar Rp148.497.750,00 atau turun 17,85 persen dari nilai

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.326 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	37.956.250,00	34.836.500,00	108,96
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	174.208.000,00	149.525.000,00	116,51
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.460.000,00	144.000.000,00	37,13
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	327.650.000,00	458.410.500,00	71,48
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	90.000.000,00	45.000.000,00	200,00
Jumlah	**683.274.250,00**	**831.772.000,00**	**82,15**

Realisasi Beban Pakaian Dinas dan Atributnya terbesar terdapat pada Sekretariat DPRD yaitu total sebesar Rp321.600.000,00 atau 47,07 persen dari total Beban Pakaian Dinas dan Atributnya sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.490.000,00.

Tabel 5.327 Lima SKPD Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	321.600.000,00	47,07
2	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	91.416.250,00	13,38
3	Satuan Polisi Pamong Praja	90.520.000,00	13,25
4	RSUD Goeteng Taroenadibrata	61.708.000,00	9,03
5	UPTD Puskesmas Pengadegan	25.150.000,00	3,68

V.4.b.2).f). Beban Pakaian Kerja _____Rp1.088.634.800,00

Nilai Beban Pakaian Kerja tahun 2020 sebesar Rp1.088.634.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp133.573.775,00 atau turun 10,93 persen dari nilai Beban Pakaian Kerja tahun 2019.

Realisasi Beban Pakaian Kerja terdapat pada 21 SKPD, dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinas Perhubungan yaitu total sebesar Rp343.825.000,00 atau 31,58 persen dari total Beban Pakaian Kerja. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kelurahan Mewek sebesar Rp2.310.000,00.

Tabel 5.328 Rincian Beban Pakaian Kerja per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Perhubungan	343.825.000,00	31,58
2	Satuan Polisi Pamong Praja	201.822.000,00	18,54
3	Dinas Lingkungan Hidup	167.006.000,00	15,34
4	RSUD Goeteng Taroenadibrata	123.623.900,00	11,36
5	RSUD Panti Nugroho	63.367.900,00	5,82
6	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.760.000,00	5,21
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.100.000,00	3,22
8	UPTD Puskesmas Kemangkon	27.500.000,00	2,53
9	Dinas Pertanian	16.790.000,00	1,54
10	Kelurahan Kalikabong	11.640.000,00	1,07

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Kelurahan Kandanggampang	11.200.000,00	1,03
12	Kelurahan Bancar	10.200.000,00	0,94
13	Dinas Kesehatan	6.000.000,00	0,55
14	UPTD Puskesmas Pengadegan	5.990.000,00	0,55
15	Kelurahan Penambongan	3.000.000,00	0,28
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.500.000,00	0,23
17	Kelurahan Mewek	2.310.000,00	0,21
	Jumlah	**1.088.634.800,00**	**100,00**

V.4.b.2).g). Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu _____Rp2.800.995.800,00

Nilai Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu tahun 2020 sebesar Rp2.800.995.800,00, mengalami kenaikan sebesar Rp422.508.550,00 atau naik 17,76 persen dari nilai Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu tahun 2019.

Realisasi Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu terdapat pada 69 SKPD dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu total sebesar Rp343.825.000,00 atau 16,94 persen dari total Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada TK Negeri Pembina Bukateja yaitu sebesar Rp810.000,00.

Tabel 5.329 Lima SKPD Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	474.524.800,00	16,94
2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	394.438.500,00	14,08
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.797.200,00	8,35
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	224.900.000,00	8,03
5	Dinas Kesehatan	126.155.000,00	4,50

V.4.b.2).h). Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat _____Rp453.195.000,00

Nilai Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp453.195.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.426.041.400,00 atau turun 75,88 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan yang sangat besar tersebut merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilakukannya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan perlombaan, pentas seni dan budaya serta kegiatan lain yang sejenis.

Realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat terdapat pada 9 SKPD dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp227.600.000,00 atau 50,22 persen dari total Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Kaligondang yaitu sebesar Rp720.000,00.

Di tahun 2019, realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 2 kali lipat dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp 528.700.000,00.

Tabel 5.330 Rincian Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.600.000,00	50,22
2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	140.250.000,00	30,95
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.500.000,00	8,72
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	28.050.000,00	6,19
5	Kelurahan Purbalingga Wetan	7.300.000,00	1,61
6	Dinas Kesehatan	5.000.000,00	1,10
7	UPTD Puskesmas Kejobong	3.775.000,00	0,83
8	Kecamatan Rembang	1.000.000,00	0,22
9	Kecamatan Kaligondang	720.000,00	0,16
		453.195.000,00	**100,00**

V.4.b.2).i). Beban Barang dan Jasa Ekstrakom _____Rp3.007.193.525,00

Nilai Beban Barang dan Jasa Ekstrakom tahun 2020 sebesar Rp3.007.193.525,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.796.991.836,00 atau naik 148,49 persen dari realisasi tahun 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan Beban Barang dan Jasa Ekstrakom adalah proses penyesuaian kode aset tetap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 yang salah satunya adalah perubahan klasifikasi aset pada kelompok Aset Tetap Lainnya menjadi kelompok Peralatan dan Mesin sehingga aset dengan nilai di bawah Rp500.000,00 akan tereliminasi menjadi aset ekstrakomptabel.

Realisasi Beban Barang dan Jasa Ekstrakom terdapat pada 70 SKPD dengan realisasi terbesar terdapat pada Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar Rp1.599.468.899,00 atau 50,22 persen dari total Beban Barang dan Jasa Ekstrakom. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPT SMP Negeri 3 Purbalingga yaitu sebesar Rp170.000,00.

Tabel 5.331 Lima SKPD Beban Barang dan Jasa Ekstrakom Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Keuangan Daerah	1.599.468.899,00	53,19
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	739.319.599,00	24,59
3	Dinas Perhubungan	283.362.215,00	9,42
4	UPTD Puskesmas Bojong	37.805.950,00	1,26
5	UPT SMP Negeri 1 Bukateja	28.850.000,00	0,96

V.4.b.3). Beban Jasa_____Rp141.494.892.679,12

Realisasi Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp 141.494.892.679,12, mengalami penurunan sebesar Rp19.719.228.064,08 atau turun 12,23 persen dari realisasi tahun 2019, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.332 Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Kantor	117.017.368.338,78	143.758.131.387,80	81,40
Beban Premi Asuransi	16.054.748.170,39	888.567.009,40	1.806,81
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	259.085.000,00	583.940.000,00	44,37
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.355.756.400,00	1.850.857.334,00	73,25
Beban Sewa Alat Berat	-	173.400.000,00	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.281.425.811,95	4.644.181.879,00	49,12
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.339.212.000,00	2.924.635.200,00	45,79
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	265.500.000,00	-
Beban Jasa Konsultasi	3.187.296.958,00	6.124.907.933,00	52,04
Jumlah	**141.494.892.679,12**	**161.214.120.743,20**	**87,77**

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa, terdapat selisih lebih sebesar Rp39.718.416.918,12 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.333 Perbandingan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Jasa Kantor	117.042.868.338,78	80.057.582.462,00	36.985.285.876,78
Beban Premi Asuransi	16.054.748.170,39	15.632.799.933,00	421.948.237,39
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	259.085.000,00	204.480.000,00	54.605.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.355.756.400,00	1.015.290.000,00	340.466.400,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.281.425.811,95	1.941.498.814,00	339.926.997,95
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.187.296.958,00	1.611.112.552,00	1.576.184.406,00
Beban Jasa Konsultansi	1.339.212.000,00	1.339.212.000,00	-
Jumlah	**141.520.392.679,12**	**101.801.975.761,00**	**39.718.416.918,12**

Perbedaan sebesar Rp39.718.416.918,12 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.334 Perhitungan Beban Jasa-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	**(2)**
Belanja Jasa-LRA	**101.801.975.761,00**
Menambah Beban Jasa :	
Utang Belanja Jasa tahun 2020	446.513.060,76
Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Barjas BLUD	25.001.042.360,20
Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Barjas BOS	25.497.642.683,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2019	239.005.529,74
Mengurangi Beban Jasa :	
Reklasifikasi Beban Jasa ke Beban Pegawai pada Dinas Kesehatan	(10.939.740.253,00)
Utang Belanja Jasa Tahun 2019 yang dibayar di Tahun 2020	(154.590.821,00)
Belanja Jasa menghasilkan Aset	(139.350.000,00)
Beban Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020	(232.105.641,58)
Beban Jasa-LO	**141.520.392.679,12**

V.4.b.3).a). Beban Jasa Kantor _____Rp117.042.868.338,78

Nilai Beban Jasa Kantor tahun 2020 sebesar Rp117.042.868.338,78, mengalami penurunan sebesar Rp26.715.263.049,02 atau turun 18,58 persen dari nilai Beban Jasa Kantor tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.335 Rincian Beban Jasa Kantor Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Jasa telepon	461.056.706,00	605.961.064,00	76,09
Beban Jasa air	1.119.760.969,00	1.342.360.776,00	83,42
Beban Jasa listrik	17.518.578.154,78	16.568.415.821,80	105,73
Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	-	3.102.000,00	-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.130.693.352,00	1.052.842.884,00	107,39
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	7.055.863.543,00	3.313.553.424,00	212,94
Beban Jasa Paket/Pengiriman	12.102.900,00	55.123.538,00	21,96
Beban Jasa Sertifikasi	361.070.920,00	84.948.240,00	425,05
Beban Jasa Transaksi Keuangan	932.003.687,00	5.736.815.165,00	16,25
Beban Jasa Pihak Ketiga	10.084.375.936,00	15.737.312.509,00	64,08
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	11.925.858.609,00	8.333.004.928,00	143,12
Beban Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	3.755.563.298,00	8.766.904.379,00	42,84
Beban Jasa Dokumentasi	304.302.187,00	311.015.846,00	97,84
Beban Jasa Publikasi	2.716.671.660,00	2.905.855.980,00	93,49
Beban Pengobatan Pasien Tidak Mampu	-	23.120.288.967,00	-
Beban Jasa Akomodasi	145.278.964,00	721.285.394,00	20,14
Beban Jasa Dekorasi	181.053.400,00	527.996.364,00	34,29
Beban Jasa Pengamanan	782.750.000,00	899.272.000,00	87,04
Beban Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.574.271.833,00	3.665.108.917,00	70,24
Beban Jasa Hiburan / Rias	691.157.810,00	1.724.317.500,00	40,08
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7.988.268.820,00	6.509.505.785,00	122,72
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.408.410.250,00	4.947.562.600,00	109,31
Beban Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	3.215.997.175,00	2.402.323.000,00	133,87
Beban Jasa Pengemudi	618.400.000,00	520.696.345,00	118,76
Beban Jasa Operator	7.078.289.791,00	6.024.625.500,00	117,49
Beban Jasa Tenaga Pemungut Pendapatan	59.400.000,00	66.000.000,00	90,00
Beban Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.590.508.374,00	22.904.532.461,00	111,73
Beban Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan	5.331.180.000,00	4.907.400.000,00	108,64
Jumlah	**117.042.868.338,78**	**143.758.131.387,80**	**81,42**

Realisasi Beban Jasa Kantor terdapat pada semua SKPD, dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp32.076.479.581,00 atau 27,41 persen dari total Beban Jasa Kantor sedangkan realisasi terkecil terdapat pada TK Negeri Pembina Bukateja sebesar Rp7.578.840,00 atau hanya 0,01 persen dari total Beban Jasa Kantor sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Realisasi Beban Jasa Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk di dalamnya adalah realisasi Beban Jasa Kantor yang dibiayai dari dana BOS pada 459 SD Negeri di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 5.336 Lima SKPD Beban Jasa Kantor Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.076.479.581,00	27,41
2	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	12.477.622.869,00	10,66
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	12.090.260.398,00	10,33
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah	5.260.995.400,00	4,49
5	RSUD Panti Nugroho	4.727.833.924,00	4,04

V.4.b.3).b). Beban Premi Asuransi _____Rp16.054.748.170,39

Nilai Beban Premi Asuransi tahun 2020 sebesar Rp16.054.748.170,39, mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp15.166.181.160,99 atau naik 1.706,81 persen dari nilai Beban Premi Asuransi tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Kenaikan paling tinggi dicatatkan oleh Beban Premi Asuransi Kesehatan yang mencapai 17.096,86 persen dari realiasi tahun 2019 sebagaimana telah dijelaskan di bagian Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.b.1).f).(4).

Tabel 5.337 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	15.303.904.523,00	88.992.410,00	17.196,86
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	503.530.442,10	693.119.848,40	72,65
Beban Premi Asuransi Tanggung Gugat	145.169.333,33	102.127.000,00	142,15
Beban Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	48.654.261,28	4.327.751,00	1.124,24
Beban Premi Asuransi Kematian	53.489.610,68	-	-
Jumlah	**16.054.748.170,39**	**888.567.009,40**	**1.806,81**

Realisasi Beban Premi Asuransi terdapat pada 32 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Kesehatan yaitu Rp13.897.375.717,00 atau 86,56 persen dari total Beban Premi Asuransi sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp4.366.800,00 atau hanya 0,03 persen dari total Beban Premi Asuransi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.338 Lima SKPD Beban Premi Asuransi Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	13.897.375.717,00	86,56
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	902.490.400,00	5,62
3	Badan Keuangan Daerah	495.349.564,10	3,09
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	173.836.418,00	1,08
5	RSUD Goeteng Taroenadibrata	154.303.216,00	0,96

V.4.b.3).c). Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir _____Rp259.085.000,00

Nilai Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2020 sebesar Rp259.085.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp324.855.000,00 atau turun 55,63 persen dari nilai Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.339 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	3.000.000,00	-	100,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	223.920.000,00	511.055.000,00	43,82
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.265.000,00	58.185.000,00	38,27
Beban Sewa Tanah	9.900.000,00	14.700.000,00	67,35
Jumlah	**259.085.000,00**	**583.940.000,00**	**44,37**

Realisasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terdapat pada 19 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Kesehatan yaitu Rp103.000.000,00 atau 39,76 persen dari total Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp500.000,00 atau hanya 0,19 persen dari total Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.340 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	103.000.000,00	39,76
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51.250.000,00	19,78
3	UPTD Puskesmas Kalikajar	44.090.000,00	17,02
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	22.550.000,00	8,70
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.980.000,00	3,85
6	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.150.000,00	2,37
7	UPTD Puskesmas Kejobong	4.000.000,00	1,54
8	Kelurahan Karangmanyar	3.000.000,00	1,16
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.500.000,00	0,96
10	Satuan Polisi Pamong Praja	2.300.000,00	0,89
11	UPTD Puskesmas Karanganyar	2.250.000,00	0,87
12	UPTD Puskesmas Rembang	1.500.000,00	0,58
13	Kecamatan Karangmoncol	1.500.000,00	0,58
14	UPT SMP Negeri 1 Purbalingga	1.170.000,00	0,45
15	UPT SMP Negeri 1 Padamara	1.045.000,00	0,40
16	Kelurahan Mewek	1.000.000,00	0,39
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	750.000,00	0,29
18	UPTD Puskesmas Pengadegan	550.000,00	0,21
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000,00	0,19
		259.085.000,00	**100,00**

V.4.b.3).d). Beban Sewa Sarana Mobilitas _____Rp1.355.756.400,00

Nilai Beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 sebesar Rp1.355.756.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp495.100.934,00 atau turun 26,75 persen dari nilai Beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2019 sebesar Rp1.850.857.334,00 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5.341 Rincian Beban Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.355.756.400,00	1.850.857.334,00	73,25
Jumlah	**1.355.756.400,00**	**1.850.857.334,00**	**73,25**

Realisasi Beban Sewa Sarana Mobilitas terdapat pada 85 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Sekretariat DPRD yaitu Rp877.500.000,00 atau 64,72 persen dari total Beban Sewa Sarana Mobilitas sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPT SMP Negeri 2 Kutasari sebesar Rp60.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Sewa Sarana Mobilitas sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.342 Lima SKPD Beban Sewa Sarana Mobilitas Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	877.500.000,00	64,72
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.351.000,00	15,66
3	UPT SMP Negeri 4 Karangmoncol	25.270.000,00	1,86
4	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	19.970.000,00	1,47
5	UPT SMP Negeri 4 Rembang	19.414.000,00	1,43

V.4.b.3).e). Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ___Rp2.281.425.811,95

Nilai Beban Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020 sebesar Rp2.281.425.811,95, mengalami penurunan sebesar Rp2.362.756.067,05 atau turun 50,88 persen dari nilai Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2019 sebesar Rp1.850.857.334,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.343 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Sewa Meja Kursi	196.332.500,00	562.923.400,00	34,88
Beban Sewa Komputer dan Printer	4.055.000,00	28.080.000,00	14,44
Beban Sewa Proyektor	15.000.000,00	48.000.000,00	31,25
Beban Sewa Generator	61.500.000,00	180.485.000,00	34,07
Beban Sewa Tenda	632.463.000,00	1.409.353.000,00	44,88
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	60.520.000,00	400.553.220,00	15,11
Beban Sewa Sound System	534.685.000,00	883.505.000,00	60,52
Beban Sewa Peralatan Praktek	23.953.000,00	1.746.000,00	1.371,88
Beban Sewa Panggung	62.972.000,00	441.579.500,00	14,26
Beban Sewa Peralatan Kerja	-	3.650.000,00	-
Beban Sewa Peralatan Lainnya	689.945.311,95	684.306.759,00	100,82
Jumlah	**2.281.425.811,95**	**4.644.181.879,00**	**49,12**

Realisasi Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor terdapat pada 59 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Sekretariat DPRD yaitu Rp770.322.250,00 atau 33,76 persen dari total Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPT SMP Negeri 4 Kemangkon sebesar Rp90.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.344 Lima SKPD Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	770.322.250,00	33,76
2	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	543.964.445,00	23,84
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	249.247.375,00	10,93
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.673.000,00	10,77
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56.300.000,00	2,47

V.4.b.3).f). Beban Jasa Konsultansi _____Rp1.339.212.000,00

Nilai Beban Jasa Konsultansi tahun 2020 sebesar Rp1.339.212.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.585.423.200,00 atau turun 54,21 persen dari nilai Beban Jasa Konsultansi tahun 2019 sebesar Rp2.924.635.200,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Penurunan tersebut terjadi seiring berkurangnya jumlah dan nilai pekerjaan konstruksi di Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 sebagai dampak dari realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Tabel 5.345 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	992.163.000,00	2.004.045.200,00	49,51
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	347.049.000,00	920.590.000,00	37,70
Jumlah	**1.339.212.000,00**	**2.924.635.200,00**	**45,79**

Realisasi Beban Jasa Konsultansi terdapat pada 3 SKPD yaitu DPUPR, Dinrumkim dan Dinperindag sebagaimana dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.346 Rincian Beban Jasa Konsultansi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.187.766.000,00	88,69
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	138.621.000,00	10,35
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	12.825.000,00	0,96
	Jumlah	**1.339.212.000,00**	**100,00**

V.4.b.3).g). Beban Pelatihan PNS _____Rp3.187.296.958,00

Nilai Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 sebesar Rp3.187.296.958,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.937.610.975,00 atau turun 47,96 persen dari nilai Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2019 sebesar Rp6.124.907.933,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.347 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	2.336.639.202,00	4.036.856.811,00	57,88
Beban Sosialisasi	300.000,00	13.599.000,00	2,21
Beban Bimbingan Teknis	848.230.006,00	1.920.409.622,00	44,17
Beban Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	2.127.750,00	154.042.500,00	1,38
Jumlah	**3.187.296.958,00**	**6.124.907.933,00**	**52,04**

Realisasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS terdapat pada 85 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Sekretariat DPRD yaitu Rp1.453.000.000,00 atau 45,59 persen dari total Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPTD Puskesmas Kemangkon sebesar Rp3.500,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.348 Lima SKPD Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	1.453.000.000,00	45,59
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.187.084.420,00	37,24
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	242.394.850,00	7,61
4	RSUD Panti Nugroho	68.339.636,00	2,14
5	Bagian Organisasi dan Tata Laksana - Sekretariat Daerah	39.362.268,00	1,23

V.4.b.4). Beban Pemeliharaan Rp52.047.628.877,00

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp52.047.628.877,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.229.777.236,00 atau naik 2,42 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp50.817.851.641,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.349 Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.347.474.146,00	10.857.333.723,00	76,88
Beban Pemeliharaan	43.700.154.731,00	39.960.517.918,00	109,36
Jumlah	**52.047.628.877,00**	**50.817.851.641,00**	**102,42**

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan, terdapat selisih lebih sebesar Rp14.365.077.991,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.350 Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.347.474.146,00	7.832.207.041,00	515.267.105,00
Beban Pemeliharaan	43.700.154.731,00	29.850.343.845,00	13.849.810.886,00
Jumlah	**52.047.628.877,00**	**37.682.550.886,00**	**14.365.077.991,00**

Perbedaan sebesar Rp14.365.077.991,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.351 Perhitungan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Belanja Pemeliharaan-LRA	**37.682.550.886,00**
Menambah Beban Pemeliharaan:	
Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 pada RSUD Panti Nugroho	15.416.000,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Beban Barjas BLUD	6.321.433.813,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Beban Barjas BOS	8.089.675.657,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal BOS pada Dindikbud	14.030.000,00
Beban Pemeliharaan berasal dari Persediaan BBM Tahun 2019 pada Pelaksana BPBD	5.793.600,00
Mengurangi Beban Pemeliharaan:	
Belanja Barjas - Pemeliharaan BOS dan BLUD menghasilkan Aset	(37.558.500,00)
Utang Belanja Jasa Tahun 2019 yang dibayar di Tahun 2020 pada Pelaksana BPBD	(14.079.829,00)
Belanja Pemeliharaan menghasilkan Persediaan BBM dan Suku Cadang	(29.632.750,00)
Beban Pemeliharaan-LO	**52.047.628.877,00**

V.4.b.4).a). Beban Perawatan Kendaraan Bermotor _____Rp8.347.474.146,00

Nilai Beban Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2020 sebesar Rp8.347.474.146,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.509.859.577,00 atau turun 23,12 persen dari nilai Beban Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2019 sebesar Rp10.857.333.723,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.352 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Jasa Service	736.126.838,00	975.330.849,00	75,47
Beban Penggantian Suku Cadang	1.411.959.378,00	2.229.280.176,00	63,34
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.736.718.690,00	7.183.584.422,00	79,86
Beban Jasa KIR	932.820,00	4.474.625,00	20,85
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	236.818.001,00	235.581.826,00	100,52
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	224.918.419,00	229.081.825,00	98,18
Jumlah	**8.347.474.146,00**	**10.857.333.723,00**	**76,88**

Realisasi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor terdapat pada 88 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu Rp1.244.373.850,00 atau 14,91 persen dari total Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPT SMP Negeri 3 Purbalingga sebesar Rp330.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.353 Lima SKPD Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.244.373.850,00	14,91
2	Satuan Polisi Pamong Praja	692.775.336,00	8,30
3	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	638.361.931,00	7,65
4	Sekretariat DPRD	526.413.124,00	6,31
5	Dinas Perhubungan	346.609.000,00	4,15

V.4.b.4).b). Beban Pemeliharaan _____Rp43.700.154.731,00

Nilai Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp43.700.154.731,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.739.636.813,00 atau naik 9,36 persen dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp39.960.517.918,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.354 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.349.034.651,00	5.812.059.177,00	92,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.392.231.854,00	12.480.124.846,00	107,31
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.433.173.176,00	21.062.596.960,00	116,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	525.715.050,00	605.736.935,00	86,79
Jumlah	**43.700.154.731,00**	**39.960.517.918,00**	**109,36**

Realisasi Beban Pemeliharaan terdapat pada 148 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Rp20.185.040.080,00 atau 46,19 persen dari total Beban Pemeliharaan. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Karanganyar sebesar Rp1.731.250,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Pemeliharaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.355 Lima SKPD Beban Pemeliharaan Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.185.040.080,00	46,19
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.631.969.199,00	12,89
3	RSUD Goeteng Taroenadibrata	3.618.179.433,00	8,28
4	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	1.000.985.990,00	2,29
5	Dinas Perhubungan	687.902.900,00	1,57

V.4.b.5). Beban Perjalanan Dinas_____Rp36.620.004.198,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp36.620.004.198,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp24.122.811.077,00 atau turun 39,71 persen dari realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.356 Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.659.154.238,00	23.967.885.061,00	73,68
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.960.849.960,00	36.743.972.254,00	51,60
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	30.957.960,00	-
Jumlah	**36.620.004.198,00**	**60.742.815.275,00**	**60,29**

Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya refocusing terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk mendukung pendanaan terhadap penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) melalui pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 (*refocusing I*).

Jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas, terdapat selisih lebih sebesar Rp3.253.001.732,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.357 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.659.154.238,00	14.570.747.650,00	3.088.406.588,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.960.849.960,00	18.796.254.816,00	164.595.144,00
Jumlah	**36.620.004.198,00**	**33.367.002.466,00**	**3.253.001.732,00**

Perbedaan sebesar Rp3.253.001.732,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.358 Perhitungan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Perjalanan Dinas	**33.367.002.466,00**
Menambah Beban Perjalanan Dinas	
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Barjas BOS	2.881.377.388,00
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Barjas BLUD	371.624.344,00
Beban Perjalanan Dinas	**36.620.004.198,00**

V.4.b.5).a). Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah _____Rp17.659.154.238,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2020 sebesar Rp17.659.154.238,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.308.730.823,00 atau turun 26,32 persen dari nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2019 sebesar Rp23.967.885.061,00. Selain karena pembatasan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, penurunan realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah juga karena adanya realokasi anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdapat pada 150 SKPD dengan realisasi terbesar pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yaitu Rp2.929.090.000,00 atau 16,59 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.260.000,00 atau hanya 0,01 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.359 Lima SKPD Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	2.929.090.000,00	16,59
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.229.200.388,00	12,62
3	Dinas Kesehatan	1.157.605.000,00	6,56
4	Inspektorat Daerah	723.615.000,00	4,10
5	Satuan Polisi Pamong Praja	647.230.000,00	3,67

V.4.b.5).a). Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah _____Rp18.960.849.960,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2020 sebesar Rp18.960.849.960,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.783.122.294,00 atau turun 48,40 persen dari nilai Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2019 sebesar Rp36.743.972.254,00. Selain karena pembatasan kegiatan di Pemerintah Pusat maupun Pemerinah Provinsi sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, penurunan realisasi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah juga terjadi karena adanya realokasi anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdapat pada 105 SKPD dengan realisasi terbesar pada Sekretarait DPRD yaitu Rp12.806.594.825,00 atau 67,54 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah sedangkan realisasi terkecil terdapat pada UPT SMP Negeri 4 Purbalingga sebesar Rp70.000,00 atau hanya 0,00037 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.360 Lima SKPD Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Tertinggi Tahun 2020

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
1	Sekretariat DPRD	12.806.594.825,00	67,54
2	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	767.940.668,00	4,05
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	430.864.297,00	2,27
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	332.808.814,00	1,76
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	295.757.332,00	1,56

V.4.b.6). Beban Subsidi_____Rp2.378.814.568,00

Realisasi Beban Subsidi sebesar Rp2.378.814.568,00 merupakan Beban subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Perwira untuk program diskon rekening air dan subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggara bagian V.

Beban Subsidi rekening air merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.392.314.722,00 dibandingkan saldo 2019 atau naik 141,14 persen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.361 Realisasi Beban Subsidi-LO Tahun 2020

Uraian	2020 (*Audited*)	2019 (*Audited*)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Subsidi	1.383.814.568,00	-	
Beban Subsidi Bunga	995.000.000,00	986.499.846,00	100,86
Jumlah	**2.378.814.568,00**	**986.499.846,00**	**241,14**

V.4.b.7). Beban Hibah_____Rp96.238.205.151,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas pemberian hibah yang dilakukan di tahun 2020.

Realisasi Beban Hibah tahun 2020 sebesar Rp96.238.205.151,00 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar

Rp58.887.095.400,00 atau naik 157,66 persen dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya Beban Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun 2020 yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu.

Tabel 5.362 Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 (*Audited*)	2019 (*Audited*)	persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Hibah kepada Pemerintah	2.574.757.000,00	243.200.000,00	1.058,70
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	17.427.828.522,00	11.109.288.308,00	156,88
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.180.323.629,00	13.539.221.443,00	156,44
Beban Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.138.496.000,00	190.000.000,00	21.651,84
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	10.384.800.000,00	10.286.700.000,00	100,95
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	3.532.000.000,00	1.982.700.000,00	178,14
Jumlah	**96.238.205.151,00**	**37.351.109.751,00**	**257,66**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020, terdapat selisih lebih sebesar Rp17.427.828.522,00 pada kelompok Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.363 Perbandingan Realisasi Beban Hibah-LO dengan Belanja Hibah-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Hibah kepada Pemerintah	2.574.757.000,00	2.574.757.000,00	-
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	17.427.828.522,00	-	17.427.828.522,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.180.323.629,00	21.180.323.629,00	-
Beban Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.138.496.000,00	41.138.496.000,00	-
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	10.384.800.000,00	10.384.800.000,00	-
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	3.532.000.000,00	3.532.000.000,00	-
Total	**96.238.205.151,00**	**78.810.376.629,00**	**17.427.828.522,00**

Perbedaan sebesar Rp17.427.828.522,00 pada tabel di atas terjadi karena adanya Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat tidak hanya mencatat realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat akan tetapi juga termasuk di dalamnya reklasifikasi Belanja Bibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2020 serta saldo Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2019 dan 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.364 Perhitungan Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat -LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Hibah - LRA 2020	**78.810.376.629,00**
(+) Pendapatan Hibah Barang yang Akan Diberikan pada Pihak Ketiga pada DINSOSDALDUKKBP3A	1.779.852.560,00
(+) Jurnal Balik atas Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada Pihak Ketiga 2019	4.674.962.188,00
(+) Belanja Hibah Barang Jasa yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat APBD	12.230.586.853,00
(+) Belanja Hibah Barang Jasa yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat BLUD	123.609.000,00
(-) Saldo Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada Pihak Ketiga 2020	(1.381.182.079,00)
Beban Hibah - LO 2020	**96.238.205.151,00**

Penjelasan atas Beban Hibah dapat dilihat pada penjelasan atas Belanja Hibah pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.4.b.8). Beban Bantuan Sosial_____Rp9.037.665.500,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp9.037.665.500,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2019 yaitu sebesar Rp18.376.202.300,00 atau turun 67,03 persen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini. Penurunan tersebut terjadi karena di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka pendanaan penanganan covid-19, salah satunya adalah Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin yang pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 dikurangi sebesar Rp12.000.000.000,00 sehingga hanya tersisa alokasi anggaran sebesar Rp48.000.000,00 yang tidak terealisasi di tahun 2020.

Tabel 5.365 Realisasi Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bantuan PAMSIMAS	1.735.000.000,00	1.980.000.000,00	87,63
Beban Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Panti Wreda	490.000.000,00	610.000.000,00	80,33
Beban Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	20.000.000,00	-	
Beban Beasiswa Kurang Mampu	1.464.150.000,00	1.252.750.000,00	116,87
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.185.715.500,00	2.285.617.800,00	95,63
Beban Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	937.800.000,00	903.000.000,00	103,85
Beban Bantuan Sosial kepada PPCI	-	20.000.000,00	-
Beban Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	-	18.000.000.000,00	-
Beban Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)	2.205.000.000,00	2.362.500.000,00	93,33
Jumlah	**9.037.665.500,00**	**27.413.867.800,00**	**32,97**

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020, terdapat selisih kurang sebesar Rp467.915.500,00 pada kelompok Bantuan Sosial kepada Masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.366 Perbandingan Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Bantuan PAMSIMAS	1.735.000.000,00	1.735.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Panti Wreda	490.000.000,00	490.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	
Beban Beasiswa Kurang Mampu	1.464.150.000,00	1.464.150.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.185.715.500,00	1.717.800.000,00	467.915.500,00
Beban Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	937.800.000,00	937.800.000,00	-
Beban Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	-
Jumlah	**9.037.665.500,00**	**8.569.750.000,00**	**467.915.500,00**

Perbedaan sebesar Rp467.915.500,00 tersebut berasal pengakuan atas Belanja Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2020, pengakuan persediaan Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2020 serta jurnal balik persediaan Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB dan P3A dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.367 Perhitungan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2020

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Bansos - LRA 2020	**8.569.750.000,00**
(+) Reklasifikasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	458.818.500,00
(+) Jurnal Balik Persediaan Bansos Tahun 2019 pada Dinsos	14.750.000,00
(-) Persediaan Bansos yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	(5.653.000,00)
Beban Bansos - LO 2020	**9.037.665.500,00**

Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Bantuan Sosial, bisa merujuk pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran-Belanja Bantuan Sosial.

V.4.b.9). Beban Penyusutan dan Amortisasi_____Rp172.018.110.549,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 sebesar Rp172.018.110.549,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.388.064.373,34 atau naik 9,82 persen dari Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 5.368 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.645.447.197,34	51.672.163.128,98	101,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.228.019.142,22	27.898.804.928,44	79,67
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	96.972.582.959,44	75.202.289.951,26	128,95
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	1.676.440.416,98	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	172.061.250,00	180.347.750,00	95,41
Jumlah	**172.018.110.549,00**	**156.630.046.175,66**	**109,82**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Purbaligga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual, terhitung mulai tahun 2020 aset tetap dalam kondisi rusak berat yang direklasifikasi ke dalam kelompok aset lain-lain tidak dikenakan beban penyusutan.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.63, sedangkan Rincian Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020 disajikan dalam Lampiran 5.64.

V.4.b.10). Beban Penyisihan Piutang_____Rp183.426.560,45

Beban penyisihan piutang merupakan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada setiap periode akuntansi yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Nilai Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp183.426.560,45, mengalami kenaikan sebesar Rp17.493.538,05 atau naik 10,54 persen dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.369 Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	26.751.805,60	19.684.304,55	135,90
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	44.525.100,00	36.567.500,00	121,76
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	112.149.654,85	109.681.217,85	102,25
Jumlah	**183.426.560,45**	**165.933.022,40**	**110,54**

Beban Penyisihan Piutang dihitung dengan cara mengurangkan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2020 sesuai dengan perhitungan umur piutang dengan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2019.

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.65.

V.4.b.11) Beban Transfer _____Rp148.822.589.000,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Beban Transfer tahun 2020 sebesar Rp148.822.589.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.629.512.600,00 atau naik 19,83 persen dari saldo Beban Transfer tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini. Kenaikan Beban Transfer tersebut terjadi karena adanya peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan penyelenggaraan pilkades pada 7 desa dan bantuan penyelenggaraan pilkada untuk seluruh desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

Tabel 5.370 Realisasi Beban Transfer-LO tahun 2020

Uraian	2020	2019	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.107.254.000,00	109,64
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.538.695.000,00	86,97
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	140.644.246.000,00	116.329.816.900,00	120,90
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.605.000,00	1.217.310.500,00	101,91
Jumlah	**148.822.589.000,00**	**124.193.076.400,00**	**119,83**

Realisasi Beban Transfer tahun 2020 sebesar Rp148.822.589.000,00, berbeda dengan realisasi Transfer-LRA tahun 2020 yang mencapai Rp394.456.655.648,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp245.634.066.648,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.371 Perbandingan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer-LRA Tahun 2020

Uraian	2020		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.599.500.000,00	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.338.238.000,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	140.644.246.000,00	386.278.312.648,00	(245.634.066.648,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.240.605.000,00	1.240.605.000,00	-
Jumlah	**148.822.589.000,00**	**394.456.655.648,00**	**(245.634.066.648,00)**

Selisih kurang tersebut berasal dari kebijakan pengakuan Dana Desa dimana sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO.

Demikian juga pada saat transfer Dana Desa ke desa tidak disajikan sebagai bagian dari Beban Transfer-LO tetapi hanya dicatat dalam kelompok Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Selain itu, selisih kurang tersebut juga berasal dari pengakuan Utang Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang berupa kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp41.137.352,00 sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Neraca poin V.3.b.1).c).

Tabel 5.372 Selisih Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer-LRA Tahun 2020

Uraian	Nilai
Dana Desa	(245.675.204.000,00)
Utang Transfer Alokasi Dana Desa	41.137.352,00
Jumlah	**(245.634.066.648,00)**

V.4.b.11).a) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah _____Rp5.599.500.000,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar Rp5.599.500.000,00, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.373 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.107.254.000,00	109,64
Jumlah	**5.599.500.000,00**	**5.107.254.000,00**	**109,64**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 224 desa yang ada di 18 Kecamatan, sebagaimana dijelaskan dalam poin 1.c.1).a).

V.4.b.11).b) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ___Rp1.338.238.000,00

Realisasi Beban Transer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2020 sebesar Rp1.338.238.000,00, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan realiasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.374 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.538.695.000,00	86,97
Jumlah	**1.338.238.000,00**	**1.538.695.000,00**	**86,97**

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tersebut merupakan bagi hasil Retribusi Daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran poin 1.c.1).b).

V.4.b.11).c) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa _____Rp140.603.108.648,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2020 sebesar Rp140.603.108.648,00, mengalami peningkatan sebesar Rp24.273.291.748,00 atau naik 20,87 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ini berbeda dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa. Perbedaan tersebut karena dalam Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tidak termasuk realisasi transfer Dana Desa sebesar Rp245.675.204.000,00.

Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual yang mengatur bahwa Transfer Dana Desa ke RKUD tidak dicatat sebagai Beban sebagaimana Pendapatan Transfer Dana Desa-LO juga tidak dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Transfer Dana Desa-LO.

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.375 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Bankeu ke Desa-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Alokasi Dana Desa (ADD)	118.995.608.648,00	96.584.816.900,00	123,20
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	19.732.000.000,00	19.745.000.000,00	99,93
Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	307.500.000,00	0,00	
Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	1.568.000.000,00	0,00	
Jumlah	**140.603.108.648,00**	**116.329.816.900,00**	**120,87**

Penjelasan atas Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada pejelasan atas Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan pada poin 1.c.2).b).

V.4.b.11).c) Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Parpol _Rp1.240.605.000,00

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2020 sebesar Rp1.240.605.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp23.294.500,00 atau naik 1,91 persen dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.376 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.605.000,00	1.217.310.500,00	101,91
Jumlah	**1.240.605.000,00**	**1.217.310.500,00**	**101,91**

Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realiasi Anggaran poin 1.c.2).c).

V.4.c. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI _____(Rp1.932.479.503,68)

Dengan total realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp1.719.603.208.372,16 dan Beban sebesar Rp1.721.535.687.875,84 maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Defisit dari Kegiatan Operasi sebesar Rp1.932.479.503,68.

Nilai ini jauh menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mengalami surplus, yaitu menurun sebesar Rp186.856.951.721,98 atau turun 101,05 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.377 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LO Tahun 2020

Uraian	2020	2019	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasi	1.719.603.208.372,16	1.874.134.032.333,77	91,75
Beban Operasi	1.721.535.687.875,84	1.689.209.560.115,47	101,91
Surplus/(Defisit) dari Operasi	**(1.932.479.503,68)**	**184.924.472.218,30**	**(10,16)**

Kondisi ini jauh berbeda dengan realisasi Surplus Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran yang nilainya mencapai Rp57.873.771.894,00.

V.4.d. KEGIATAN NON OPERASIONAL_____(Rp34.736.440.930,31)

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan entitas pelaporan baik yang berupa pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.

Saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 sebesar (Rp34.736.440.930,31), mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp33.577.462.022,82 atau meningkat 2.897,16 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2019.

Tabel 5.378 Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	(34.736.440.930,31)	(1.158.978.907,49)	2.997,16
Jumlah	**(34.736.440.930,31)**	**(1.158.978.907,49)**	**2.997,16**

Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas penghapusan Aset Lain-Lain milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019 *(Audited)*. Defisit ini terjadi karena aset lain-lain yang dihapuskan masih memiliki nilai ekonomis atau akumulasi penyusutannya belum sama besar dengan nilai aset lain-lain yang dihapuskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Total nilai aset lain-lain yang dihapuskan adalah sebesar Rp57.241.396.865,00 sebagaimana Suirat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/348 Tahun 2020 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2019 pada Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, Laboratorium Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, SMP dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan total akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dihapuskan adalah sebesar Rp22.504.955.934,69 sehingga defisit penghapusan aset lainnya adalah sebesar Rp34.736.440.930,31 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.379 Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Aset Lain-lain yang dihapus	57.241.396.865,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang dihapus	(22.504.955.934,69)
Defisit Penghapusan Aset Lainnya	**34.736.440.930,31**

Rincian saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.66.

V.4.e. SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (Rp36.668.920.433,99)

Saldo Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp36.668.920.433,99 diperoleh dari hasil pengurangan nilai Defisit dari Operasi sebesar Rp1.932.479.503,68 dengan saldo Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp34.736.440.930,31.

Saldo Defisit Sebelum Pos Luar Biasa ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp220.434.413.744,80 atau turun 119,95 persen dibandingkan saldo tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.380 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Surplus/Defisit dari Operasi	(1.932.479.503,68)	184.924.472.218,30	(1,05)
Surplus/Defisit Non Operasional	(34.736.440.930,31)	(1.158.978.907,49)	2.997,16
Jumlah	**(36.668.920.433,99)**	**183.765.493.310,81**	**(19,95)**

V.4.f. POS LUAR BIASA (Rp18.616.013.862,01)

Pos Luar Biasa merupakan pos yang menyajikan kejadian luar biasa yang terjadi pada entitas pelaporan yang mempunyai karakteristik (i) tidak dapat diramalkan akan terjadi pada awal tahun anggaran; (ii) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (iii) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

V.4.f.1). Pendapatan Luar Biasa-LO_____Rp0,00

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa-LO tahun 2020, dikarenakan nilai investasi permanen pada BUMD di tahun 2020 justru mengalami penurunan dibandingkan nilai investasi permanen tahun 2019.

V.4.f.2). Beban Luar Biasa_____Rp18.616.013.862,01

Saldo Beban Luar Biasa per tahun 2020 sebesar Rp18.616.013.861,01 mengalami kenaikan sebesar Rp18.409.203.431,01 atau naik 8.901,49 persen dari saldo tahun 2019. Saldo tersebut berasal dari realisasi Beban Tak Terduga tahun 2020 sebesar Rp8.975.302.857,33 dan Beban Penurunan Nilai Investasi Permanen tahun 2020 sebesar Rp9.640.711.004,68 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.381 Beban Luar Biasa Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Tak Terduga	8.975.302.857,33	206.810.430,00	4.339,87
Beban Luar Biasa Lainnya	9.640.711.004,68	-	-
Jumlah	**18.616.013.862,01**	**206.810.430,00**	**9.001,49**

Nilai Beban Tak Terduga sebesar Rp8.975.302.857,33 berbeda dari realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.913.347.179,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp938.044.321,67. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengakuan atas aset tetap maupun persediaan yang berasal dari Belanja Tak Terduga yaitu masing-masing senilai Rp129.179.400,00 berupa aset tetap dan Rp808.864.921,67 yang berupa persediaan.

Sedangkan terkait dengan Beban Luar Biasa Lainnya sebesar Rp9.640.711.004,68 merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi Permanen tahun 2020 yang berasal dari selisih kurang atas nilai investasi permanen berdasarkan mutasi sebesar Rp289.605.953.349,08 dan nilai investasi permanen berdasarkan saldo ekuitas BUMD per 31 Desember 2020 sebesar Rp sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.382 Perhitungan Nilai Investasi Berdasarkan Mutasi Tahun 2020

BUMD	Status	Investasi Permanen 1 Jan 2020	Tambahan Modal	Bagian Laba / Rugi	Dividen	Investasi Permanen 31 Des 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3+4+5-6)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	A	25.817.969.176,46	500.000.000,00	4.833.319.242,75	2.840.872.344,00	28.310.416.075,21
PD BPR Artha Perwira	A	23.975.173.453,95	1.000.000.000,00	4.288.780.905,43	2.825.115.000,00	26.438.839.359,38
PT BPRS Buana Mitra Perwira	A	8.370.556.722,97	500.000.000,00	1.997.443.910,20	991.039.262,00	9.876.961.371,17
PD Purbalingga Ventura	L	225.343.003,00	-	-	-	225.343.003,00
Perumda OWABONG	A	81.283.295.366,00	2.000.000.000,00	(7.657.214.189,00)	4.545.876.456,00	71.080.204.721,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	A	103.346.849.527,00	3.300.000.000,00	7.038.658.260,00	3.579.085.030,00	110.106.422.757,00
Perumda Puspahastama	A	3.562.869.304,32	-	2.731.896.758,00	-	6.294.766.062,32
PT BPD Jawa Tengah *)	A	33.605.000.000,00	1.000.000.000,00	-	6.899.456.594,00	34.605.000.000,00
PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)	NA	2.540.000.000,00	-	-	-	2.540.000.000,00
PT PRPP JATENG	NA	128.000.000,00	-	-	1.027.700,00	128.000.000,00
Jumlah		**282.855.056.553,70**	**8.300.000.000,00**	**13.232.884.887,38**	**21.682.472.386,00**	**289.605.953.349,08**

Sedangkan nilai investasi permanen berdasarkan persentase atas ekuitas BUMD per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp279.965.242.344,40 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.383 Perhitungan Nilai Investasi Berdasarkan Persentase Kepemilikan Saham Tahun 2020

BUMD		Ekuitas BUMD 31 Des 2020	Persen Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2020
(1)		(2)	(3)	(4)=(2x3)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	A	65.372.050.290,00	41,14%	26.894.061.489,31
PD BPR Artha Perwira	A	24.959.582.677,43	100,00%	24.959.582.677,43
PT BPRS Buana Mitra Perwira	A	15.955.455.551,00	58,56%	9.343.514.770,67
Perumda OWABONG	A	66.720.751.418,00	100,00%	66.720.751.418,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	A	108.479.565.927,00	100,00%	108.479.565.927,00
Perumda Puspahastama	A	6.294.766.062,00	100,00%	6.294.766.062,00
PT BPD Jawa Tengah	A	73.106.133.918,00	0,92%	34.605.000.000,00
PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)	NA		0,70%	2.540.000.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	NA		0,00%	128.000.000,00
		360.888.305.843,43		**279.965.242.344,40**

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, maka PD Purbalingga Ventura resmi dibubarkan sehingga per 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak lagi melakukan pencatatan terhadap nilai investasi pada PD Purbalingga Ventura.

Dari dua perhitungan di atas, maka pada tahun 2020 terdapat penurunan nilai investasi permanen sebesar Rp9.640.711.004,68 yang berasal dari saldo investasi berdasarkan mutasi dikurangi dengan nilai investasi permanen berdasarkan nilai ekutas BUMD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.384 Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi Permanen Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(2)	
Nilai Investasi Permanen Berdasarkan Mutasi	289.605.953.349,08	258.486.660.571,25	112,04
Nilai Investasi Permanen Berdasarkan Ekuitas BUMD per 31 Desember 2020	279.965.242.344,40	282.855.056.553,70	98,98
Pendapatan / Beban Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi Permanen	**(9.640.711.004,68)**	**24.368.395.982,45**	**(39,56)**

V.4.f.3). Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa_____(Rp18.616.013.861,01)

Saldo Defisit Pos Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp18.616.013.861,01 berasal dari Pendapatan Luar Biasa-LO dikurangi Beban Luar Biasa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.385 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	-	24.368.395.982,45	-
Beban Luar Biasa	18.616.013.861,01	206.810.430,00	9.001,49
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	**(18.616.013.861,01)**	**24.161.585.552,45**	**(77,05)**

V.4.g. SURPLUS/(DEFISIT)-LO_____(Rp55.284.934.296,00)

Defisit-LO tahun 2020 sebesar Rp55.284.934.296,00 berasal dari total Defisit Kegiatan Operasi sebesar Rp1.932.479.503,68 dikurangi dengan Defisit Kegiatan Non Operasi

sebesar Rp34.736.440.930,31 dikurangi Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp18.616.013.861,01.

Realiasi kinerja operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang mengalami Defisit-LO merupakan pertama kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja tersebut menurun sangat signifikan yaitu sebesar Rp263.212.013.159,26 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang mengalami surplus sebesar Rp207.927.078.863,26.

Tabel 5.386 Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Defisit Dari Kegiatan Operasi	(1.932.479.503,68)	184.924.472.218,30	(1,05)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasi	(34.736.440.930,31)	(1.158.978.907,49)	2.997,16
Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	(18.616.013.862,01)	24.161.585.552,45	(77,05)
Jumlah	**(55.284.934.296,00)**	**207.927.078.863,26**	**(26,59)**

V.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

V.5.a. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kas yang dikelola oleh BLUD, dan kas BOS yang dikelola oleh Sekolah-Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan PSAP No. 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Paragraf 119 yang menyebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLU harus dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Unit Pemerintah Pusat/Daerah. Selain itu sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, bahwa Kas Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kas Pemerintah Daerah dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD. Sehingga Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah tidak hanya menyajikan arus kas masuk dan keluar ke dan dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi juga menyajikan arus kas masuk dan keluar milik Pemerintah Daerah baik yang meliputi RKUD, BLUD dan BOS serta kas lainnya (jika ada).

Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.387 Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	187.185.590.496,00	274.919.576.221,00	68,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(137.600.318.602,00)	(269.908.147.849,00)	50,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(24.545.411,00)	(10.189.380.722,00)	0,24
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	49.560.726.483,00	(5.177.952.350,00)	(957,15)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS	131.907.879.237,00	137.085.831.587,00	96,22
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS	181.468.605.720,00	131.907.879.237,00	137,57
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.096.156,00	391.454,00	280,02
Saldo Akhir Kas	**181.469.701.876,00**	**131.908.270.691,00**	**137,57**

V.5.b. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

V.5.b.1). Arus Kas dari Aktivitas Operasi_____Rp187.185.590.496,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang ecukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp187.185.590.496,00 berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas

operasi sebesar Rp1.951.727.003.035,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp1.764.541.412.539,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.1).a). Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi_____Rp1.951.727.003.035,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp1.951.727.003.035,00, mengalami penurunan sebesar Rp123.783.642.318,00 atau turun 5,96 persen dari realisasi tahun 2019. Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.388 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	58.829.669.048,00	62.233.743.866,00	94,53
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.072.934.345,00	14.876.108.528,00	74,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	21.682.472.386,00	20.642.144.098,00	105,04
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	221.011.314.763,00	207.097.340.907,00	106,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.144.405.027.431,00	1.271.720.206.430,00	89,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	276.353.798.000,00	281.054.092.000,00	98,33
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	104.798.564.062,00	112.012.678.024,00	93,56
Bantuan Keuangan - LRA	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00	143,19
Pendapatan Hibah - LRA	100.000.750.000,00	96.395.840.000,00	103,74
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**1.951.727.003.035,00**	**2.075.510.645.353,00**	**94,04**

(1) Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp58.829.669.048,00 atau 94,53 persen dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2019.

Tabel 5.389 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Pajak Hotel	433.869.168,00	422.831.757,00	102,61
Pajak Restoran	4.646.266.278,00	5.391.772.457,00	86,17
Pajak Hiburan	2.081.448.629,00	4.105.266.734,00	50,70
Pajak Reklame	716.728.899,00	922.968.876,00	77,65
Pajak Penerangan Jalan	20.724.090.463,00	22.721.003.244,00	91,21
Pajak Parkir	79.470.763,00	115.691.131,00	68,69
Pajak Air Tanah	598.602.660,00	569.254.200,00	105,16
Pajak MBL dan Batuan	561.639.555,00	1.278.419.930,00	43,93
Pajak Bumi dan Bangunan	20.353.125.817,00	19.641.820.930,00	103,62
BPHTB	8.634.426.816,00	7.064.714.607,00	122,22
Jumlah	**58.829.669.048,00**	**62.233.743.866,00**	**94,53**

(2) Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp11.072.934.345,00 atau 74,43 persen dari pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019.

Tabel 5.390 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	2.098.286.140,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	490.068.500,00	457.108.400,00	107,21
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.532.558.000,00	2.006.142.000,00	76,39

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Retribusi Pelayanan Pasar	2.514.293.400,00	3.330.114.800,00	75,50
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.364.500,00	656.138.999,00	61,02
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	854.561.250,00	-	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.998.402.810,00	2.584.930.180,00	77,31
Retribusi Terminal	80.791.500,00	121.065.500,00	66,73
Retribusi Tempat Khusus Parkir	890.985.000,00	1.325.550.000,00	67,22
Retribusi Rumah Potong Hewan	37.650.000,00	76.710.000,00	49,08
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	75.494.835,00	346.698.670,00	21,78
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	615.790.000,00	608.084.000,00	101,27
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.268.061.050,00	904.314.639,00	140,22
Retribusi Izin Gangguan	-	100.000,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	82.757.000,00	151.079.000,00	54,78
Retribusi Perpanjangan IMTA	145.478.500,00	118.062.200,00	123,22
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi	85.678.000,00	91.724.000,00	93,41
Jumlah	**11.072.934.345,00**	**14.876.108.528,00**	**74,43**

(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp21.682.472.386,00 atau 105,04 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.391 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	2.840.872.344,00	2.571.113.438,00	110,49
PD BPR Artha Perwira	2.825.115.000,00	2.622.609.000,00	107,72
PT BPRS Buana Mitra Perwira	991.039.262,00	838.645.793,00	118,17
Perumda Owabong	4.545.876.456,00	4.291.132.428,00	105,94
Perumda Air Minum Tirta Perwira	3.579.085.030,00	3.317.426.196,00	107,89
PT Bank BPD Jawa Tengah	6.899.456.594,00	7.001.217.243,00	98,55
PT PRPP Jawa Tengah	1.027.700,00	-	
Jumlah	**21.682.472.386,00**	**20.642.144.098,00**	**105,04**

(4) Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp221.011.314.763,00 atau 106,72 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.392 Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Penerimaan Jasa Giro	1.457.488.597,00	2.534.405.073,00	57,51
Pendapatan Bunga	10.163.972.505,00	13.213.798.545,00	76,92
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	-	67.578.300,00	0,00
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	47.232.409,00	1.235.016.041,00	3,82
Pendapatan Denda Pajak	65.982.040,00	64.988.445,00	101,53
Pendapatan Denda Retribusi	103.269.010,00	15.470.690,00	667,51
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.893.351.010,00	303.703.350,00	623,42
Pendapatan dari Pengembalian	580.908.044,00	2.991.902.653,00	19,42
Pendapatan BLUD	206.689.165.359,00	186.153.036.869,00	111,03
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.945.789,00	517.440.941,00	1,92
Jumlah	**221.011.314.763,00**	**207.097.340.907,00**	106,72

Nilai Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp221.011.314.763,00 tidak sama dengan nilai Lain-Lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp222.033.613.002,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp1.022.298.239,00.

Perbedaan tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan yang disajikan sebagai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

(5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar Rp1.144.405.027.431,00 atau 89,99 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.393 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Bagi Hasil Pajak	30.248.715.500,00	19.449.562.955,00	155,52
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1.799.423.282,00	1.332.044.780,00	135,09
Dana Alokasi Umum	841.051.988.000,00	918.228.685.000,00	91,60
Dana Alokasi Khusus	271.304.900.649,00	332.709.913.695,00	81,54
Jumlah	**1.144.405.027.431,00**	**1.271.720.206.430,00**	89,99

(6) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2020 sebesar Rp276.353.798.000,00 atau 98,33 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.394 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Dana Insentif Daerah - LRA	30.678.594.000,00	43.832.487.000,00	69,99
Dana Desa - LRA	245.675.204.000,00	237.221.605.000,00	103,56
Jumlah	**276.353.798.000,00**	**281.054.092.000,00**	98,33

(7) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 sebesar Rp104.798.564.062,00 atau 93,56 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.395 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	24.589.643.223,00	29.529.105.058,00	83,27
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.806.909.375,00	19.018.701.352,00	56,82
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.563.275.603,00	26.971.974.639,00	68,82
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	111.209.932,00	115.216.688,00	96,52
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	50.727.525.929,00	36.377.680.287,00	139,45
Jumlah	**104.798.564.062,00**	**112.012.678.024,00**	**93,56**

(8) Bantuan Keuangan - LRA

Arus Kas yang berasal dari Bantuan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp13.572.473.000,00 atau 143,19 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.396 Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Bantuan Keuangan	13.572.473.000,00	9.478.491.500,00	143,19
Jumlah	**13.572.473.000,00**	**9.478.491.500,00**	**143,19**

(9) Pendapatan Hibah - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah tahun 2020 sebesar Rp100.000.750.000,00 atau 103,74 persen dari pendapatan tahun 2019.

Tabel 5.397 Pendapatan Hibah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.300.000.000,00	4.500.000.000,00	95,56
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri - LRA	62.442.900.000,00	55.447.840.000,00	112,62
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri - LRA	33.187.850.000,00	29.809.000.000,00	111,33
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi - LRA	-	4.434.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja - LRA	-	2.205.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	70.000.000,00	-	
Jumlah	**100.000.750.000,00**	**96.395.840.000,00**	**103,74**

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.1).b). Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi _____Rp1.764.541.412.539,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 sebesar Rp1.764.541.412.539,00, mengalami penurunan sebesar Rp36.049.656.593,00 atau turun 2,00 persen dari realisasi tahun 2019.

Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.398 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2020

Uraian	2020	2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Pegawai	768.877.791.072,00	817.816.299.448,00	94,02
Belanja Barang dan Jasa	501.534.677.443,00	566.575.338.765,00	88,52
Belanja Subsidi	2.378.814.568,00	986.499.846,00	241,14
Belanja Hibah	78.810.376.629,00	26.241.821.443,00	300,32
Belanja Bantuan Sosial	8.569.750.000,00	27.349.617.800,00	31,33
Belanja Tak Terduga	9.913.347.179,00	206.810.430,00	4.793,45
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.107.254.000,00	109,64
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.538.695.000,00	86,97
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	386.278.312.648,00	353.551.421.900,00	109,26
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.240.605.000,00	1.217.310.500,00	101,91
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	**1.764.541.412.539,00**	**1.800.591.069.132,00**	**98,00**

(1) Belanja Pegawai

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar Rp768.877.791.072,00 atau 94,02 persen dari Belanja Pegawai tahun 2019.

Tabel 5.399 Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Gaji dan Tunjangan	658.454.032.593,00	689.888.610.456,00	95,44
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	56.817.250.372,00	66.703.489.582,00	85,18
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00	6.490.500.000,00	100,49
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	791.323.800,00	2.343.308.600,00	33,77
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	191.300.057,00	445.121.059,00	42,98
Uang Lembur	570.728.300,00	699.097.685,00	81,64

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Pegawai BLUD	9.492.395.750,00	9.562.622.900,00	99,27
Belanja Honorarium PNS	14.932.283.000,00	19.023.674.950,00	78,49
Belanja Honorarium Non PNS	14.965.420.250,00	14.655.525.000,00	102,11
Belanja Pegawai Dana BOS	6.141.056.950,00	8.004.349.216,00	76,72
Jumlah	**768.877.791.072,00**	**817.816.299.448,00**	94,02

(2) Belanja Barang dan Jasa

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp501.534.677.443,00 atau 88,52 persen dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2019.

Tabel 5.400 Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Bahan Pakai Habis	13.740.542.182,00	16.037.179.854,00	85,68
Belanja Bahan/Material	48.138.279.607,00	36.749.660.458,00	130,99
Belanja Jasa Kantor	80.057.582.462,00	91.809.717.319,00	87,20
Belanja Premi Asuransi	15.632.799.933,00	719.004.901,00	2.174,23
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.832.207.041,00	10.256.875.061,00	76,36
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.479.681.234,00	7.217.066.514,00	62,07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	204.480.000,00	540.935.000,00	37,80
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.015.290.000,00	1.063.028.000,00	95,51
Belanja Sewa Alat Berat	-	173.400.000,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.941.498.814,00	4.121.251.727,00	47,11
Belanja Makanan dan Minuman	22.426.903.347,00	28.192.439.348,00	79,55
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	596.416.250,00	804.566.500,00	74,13
Belanja Pakaian Kerja	868.153.000,00	1.180.538.200,00	73,54
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.170.593.300,00	2.038.881.000,00	106,46
Belanja Perjalanan Dinas	33.367.002.466,00	55.544.665.587,00	60,07
Belanja Pemeliharaan	29.850.343.845,00	70.282.505.280,00	42,47
Belanja Jasa Konsultansi	1.339.212.000,00	2.924.635.200,00	45,79
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	253.500.000,00	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.611.112.552,00	4.688.817.614,00	34,36
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	65.702.238.234,00	64.622.575.319,00	101,67
Belanja Hibah Barang atau Jasa	12.230.586.853,00	9.846.176.519,00	124,22
Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa	458.818.500,00	-	
Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	157.421.515.823,00	155.643.969.364,00	101,14
Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	449.420.000,00	1.863.950.000,00	24,11
Jumlah	**501.534.677.443,00**	**566.575.338.765,00**	**88,52**

(3) Belanja Subsidi

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Subsidi tahun 2020 sebesar Rp2.378.814.568,00 atau 241,14 persen dari Belanja Subsidi tahun 2019.

Tabel 5.401 Arus Kas Keluar untuk Belanja Subsidi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Subsidi kepada BUMD	1.383.814.568,00	-	
Subsidi Bunga kepada UMKM	995.000.000,00	986.499.846,00	100,86
Jumlah	**2.378.814.568,00**	**986.499.846,00**	**241,14**

(4) Belanja Hibah

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Hibah tahun 2020 sebesar Rp78.810.376.629,00 atau 300,32 persen dari Belanja Hibah tahun 2019.

Tabel 5.402 Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Hibah kepada Pemerintah	2.574.757.000,00	243.200.000,00	1.058,70
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.180.323.629,00	13.539.221.443,00	156,44
Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41.138.496.000,00	190.000.000,00	21.651,84
Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	10.384.800.000,00	10.286.700.000,00	100,95
Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	3.532.000.000,00	1.982.700.000,00	178,14
Jumlah	**78.810.376.629,00**	**26.241.821.443,00**	**300,32**

(5) Belanja Bantuan Sosial

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp8.569.750.000,00 atau 31,33 persen dari Belanja Bantuan Sosial tahun 2019.

Tabel 5.403 Arus Kas Keluar untuk Belanja Bansos Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Bansos kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.245.000.000,00	2.590.000.000,00	86,68
Belanja Bansos kepada Masyarakat	6.324.750.000,00	24.759.617.800,00	25,54
Jumlah	**8.569.750.000,00**	**27.349.617.800,00**	**31,33**

(6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Tak Terduga Tahun 2020 sebesar Rp9.913.347.179,00 atau 4.793,45 persen dari Belanja Tak Terduga tahun 2019 sebesar Rp206.810.430,00. Kenaikan tersebut terkait dengan kegiatan penanggulangan covid-19 di tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 5.404 Arus Kas Keluar untuk Belanja Tak Terduga Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Belanja Tak Terduga	9.913.347.179,00	206.810.430,00	4.793,45
Jumlah	**9.913.347.179,00**	**206.810.430,00**	**4.793,45**

(7) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Arus Kas Keluar untuk keperluan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp5.599.500.000,00 atau 109,64 persen dari nilai Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp5.107.254.000,00.

Tabel 5.405 Arus Kas Keluar untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.599.500.000,00	5.107.254.000,00	109,64
Jumlah	**5.599.500.000,00**	**5.107.254.000,00**	**109,64**

(8) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Arus Kas Keluar untuk keperluan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2020 sebesar Rp1.338.238.000,00 atau 86,97 persen dari nilai Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2019.

Tabel 5.406 Arus Kas Keluar untuk Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.338.238.000,00	1.538.695.000,00	86,97
Jumlah	**1.338.238.000,00**	**1.538.695.000,00**	**86,97**

(9) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Arus Kas Keluar untuk keperluan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 sebesar Rp386.278.312.648,00 atau 109,26 persen dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2019 sebesar Rp353.551.421.900,00.

Tabel 5.407 Arus Kas Keluar untuk Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	118.995.608.648,00	96.584.816.900,00	123,20
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	19.732.000.000,00	19.745.000.000,00	99,93
Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	307.500.000,00	-	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Dana Desa	245.675.204.000,00	237.221.605.000,00	103,56
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	1.568.000.000,00	-	
Jumlah	**386.278.312.648,00**	**353.551.421.900,00**	**109,26**

(10) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Arus Kas Keluar untuk keperluan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp1.240.605.000,00 atau 101,91 persen dari Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2019 sebesar Rp1.217.310.500,00.

Tabel 5.408 Arus Kas Keluar untuk Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.605.000,00	1.217.310.500,00	101,91
Jumlah	**1.240.605.000,00**	**1.217.310.500,00**	**101,91**

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.2). Arus Kas dari Aktivitas Investasi_____(Rp137.600.318.602,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar (Rp137.600.318.602,00) berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Investasi sebesar Rp1.033.798.239,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp138.634.116.841,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.2).a). Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi _____Rp1.033.798.239,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp1.033.798.239,00, mengalami penurunan sebesar Rp280.835.204,00 atau turun 21,36 persen dari realisasi tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.409 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	533.941.239,00	57.032.760,00	936,20
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	361.357.000,00	1.116.178.700,00	32,37
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	127.000.000,00	128.600.000,00	98,76
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	11.500.000,00	12.821.983,00	89,69
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**1.033.798.239,00**	**1.314.633.443,00**	**78,64**

(1) Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Peralatan/Mesin tahun 2020 sebesar Rp533.941.239,00 atau hanya 936,20 persen dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin tahun 2019 sebesar Rp57.032.760,00. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena di tahun 2020, transaksi penjualan aset tetap berupa kendaraan dinas bisa dilaksanakan dan juga penjualan aset lain-lain yang cukup besar.

(2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp361.357.000,00. Saldo ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp754.821.700,00 atau turun 67,63 persen. Kondisi ini terjadi karena di tahun 2020 banyak kegiatan konstruksi bangunan yang batal dilaksanakan karena adanya realokasi dan *refocusing* anggaran.

(3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp127.000.000,00 atau 98,76 persen dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp128.600.000,00.

(4) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2020 sebesar Rp11.500.000,00 atau 89,69 persen dari pendapatan tahun 2019 sebesar Rp12.821.983,00.

Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.

V.5.b.2).b). Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi_____Rp138.634.116.841,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp138.634.116.841,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp132.588.664.451,00 atau turun 48,89 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp271.222.781.292,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.410 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Modal Tanah	3.232.345.287,00	2.050.826.204,00	157,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.243.387.999,00	49.772.239.568,00	119,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.004.314.147,00	123.387.881.139,00	23,51
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.129.574.150,00	75.366.234.024,00	37,32
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.724.495.258,00	11.559.600.357,00	92,78
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00	9.086.000.000,00	91,35
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	**138.634.116.841,00**	**271.222.781.292,00**	**51,11**

(1) Belanja Modal Tanah

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Tanah tahun 2020 sebesar Rp3.232.345.287,00 atau 157,61 persen dari Belanja Modal Tanah tahun 2019 sebesar Rp2.050.826.204,00.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp59.243.387.999,00 atau 119,03 persen dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp49.772.239.568,00.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp29.004.314.147,00 atau 23,51 persen dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 sebesar Rp123.387.881.139,00.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp28.129.574.150,00 atau 37,32 persen dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 sebesar Rp75.366.234.024,00.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp10.724.495.258,00 atau 92,78 persen dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp11.559.600.357,00.

(6) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Arus Kas Keluar untuk keperluan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar Rp8.300.000.000,00 atau hanya 91,35 persen dari realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2019 sebesar Rp9.086.000.000,00.

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.3). Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan_____Rp0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan

perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 karena tidak ada transaksi pendanaan selama tahun 2020.

V.5.b.4). Arus Kas dari Aktivitas Transitoris _____(Rp24.545.411,00)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta koreksi SiLPA.

Termasuk ke dalam kategori Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus kas yang terkait dengan transaksi PFK pada Bendahara BOS maupun Bendahara BLUD.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar (Rp24.545.411,00) berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp118.992.301.033,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp129.181.681.755,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.4).a). Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris_____(Rp105.542.263.381,00)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp105.542.263.381,00 berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah sebesar Rp105.432.290.103,00, Penerimaan Fihak Ketiga BLUD sebesar Rp92.654.813,00, dan Penerimaan PFK BOS sebesar Rp17.318.465,00.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.450.037.652,00 atau turun 11,30 persen dari saldo tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.411 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah	105.432.290.103,00	118.798.329.849,00	88,75
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD	92.654.813,00	126.793.926,00	73,08
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BOS	17.318.465,00	19.321.888,00	89,63
Sisa UP Tahun Sebelumnya	-	47.855.370,00	-
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**105.542.263.381,00**	**118.992.301.033,00**	**88,70**

(1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp105.432.290.103,00, terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipotong dan disetorkan oleh PPKD selama tahun anggaran 2020. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp13.366.039.746,00 atau menurun 11,25 persen dari realisasi tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.412 Ikhtisar Penerimaan PFK pada Kas Daerah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan PFK Kas Daerah	**105.432.290.103,00**	**118.798.329.849,00**	**88,75**
Iuran Wajib Pegawai	33.801.466.188,00	36.425.190.620,00	92,80
Taperum	488.964.000,00	680.960.945,00	71,80
Askes	23.666.934.907,00	11.116.252.349,00	212,90
Pajak Penghasilan Ps 21	26.276.908.011,00	30.411.512.282,00	86,40
Pajak Penghasilan Ps 22	1.221.408.517,00	1.270.314.582,00	96,15
Pajak Penghasilan Ps 23	432.937.662,00	1.122.326.545,00	38,58
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.375.145.475,00	4.418.585.004,00	31,12
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15.089.444.350,00	30.141.537.532,00	50,06
Iuran Jaminan Kematian	2.308.214.613,00	2.408.895.653,00	95,82
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	770.866.380,00	802.754.337,00	96,03

(2) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD (*neto*)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD tahun 2020 sebesar Rp92.593.893,00, mengalami penurunan sebesar Rp34.200.033,00 atau turun 26,97 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD ini terdiri dari retensi BLUD dan iuran BPJS Pegawai pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadirata yang baru akan disetorkan di bula Januari 2021 sebagaimana terlihat ada tabel di bawah.

Tabel 5.413 Ikhtisar Penerimaan PFK pada BLUD Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan PFK BLUD	**92.593.893,00**	**126.793.926,00**	**73,03**
Penerimaan Retensi BLUD	14.185.400,00	49.297.225,00	28,78
Iuran BPJS Pegawai	78.408.493,00	76.900.201,00	101,96
Klaim BPJS Pihak Ketiga	-	596.500,00	-

(3) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BOS (neto)

Merupakan penerimaan pajak pusat yang berasal dari Dana BOS yang sampai dengan akhir tahun masih belum disetorkan ke rekening Kas Negara. Realisasi penerimaan PFK Dana BOS (neto) tahun 2020 sebesar Rp17.318.465,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.003.423,00 atau turun 10,37 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019.

(4) Sisa Uang Persediaan Tahun Sebelumnya

Saldo UP tahun 2019 sudah seluruhnya disetorkan di tahun 2019 dan tidak ada yang baru disetorkan di tahun 2020.

(5) Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya

Di tahun 2020 tidak ada koreksi atas pencatatan SILPA Tahun Sebelumnya.

V.5.b.4).b). Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris_____Rp105.566.808.792,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 berasal dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS, dan Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.414 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah	105.432.290.103,00	129.018.667.124,00	81,72
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD	111.796.801,00	61.918.000,00	180,56
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS	19.321.888,00	96.196.631,00	20,09
Sisa UP Tahun Berjalan	-	-	-
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	3.400.000,00	4.900.000,00	69,39
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	**105.566.808.792,00**	**129.181.681.755,00**	**81,72**

(1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah sebesar Rp105.432.290.103,00, mengalami penurunan sebesar Rp23.586.377.021,00 atau turun 18,28 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp129.018.667.124,00. Nilai tersebut merupakan penyetoran pajak pusat yang dipotong oleh PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.415 Ikhtisar Pengeluaran PFK Kas Daerah Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pengeluaran PFK Kas Daerah	**105.432.290.103,00**	**129.018.667.124,00**	**81,72**
Iuran Wajib Pegawai	33.801.466.188,00	36.425.190.620,00	92,80
Askes	488.964.000,00	680.960.945,00	71,80
Pajak Penghasilan Ps 21	23.666.934.907,00	11.116.252.349,00	212,90
Pajak Penghasilan Ps 22	26.276.908.011,00	30.411.512.282,00	86,40
Pajak Penghasilan Ps 23	1.221.408.517,00	1.270.314.582,00	96,15
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	432.937.662,00	1.122.326.545,00	38,58
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.375.145.475,00	4.418.585.004,00	31,12
Taperum	15.089.444.350,00	30.141.537.532,00	50,06
Iuran Jaminan Kematian	2.308.214.613,00	2.408.895.653,00	95,82
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	770.866.380,00	802.754.337,00	96,03
Retensi (Jaminan Pemeliharaan)	-	10.220.337.275,00	-

(2) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD

Pengeluaran perhitungan fihak ketiga BLUD tahun 2020 sebesar Rp111.796.801,00 merupakan jumlah jaminan pemeliharaan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang disudah dicairkan oleh rekanan di tahun 2020, penerimaan Iuran BPJS Pegawai RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan pencairan klaim BPJS Pihak Ketiga pada Laboratorium Kesehatan sebagaiman terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.416 Ikhtisar Pengeluaran PFK BLULD Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(2):(3)**
Pengeluaran PFK BLUD	**111.796.801,00**	**61.918.000,00**	**180,56**
Pengeluaran Retensi BLUD	34.300.100,00	61.918.000,00	55,40
Iuran BPJS Pegawai	76.900.201,00	-	100,00
Klaim BPJS Pihak Ketiga	596.500,00	-	100,00

(3) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS

Merupakan penyetoran atas utang pajak tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.321.888,00.

(4) Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan yang belum disetorkan di tahun tahun 2020.

(5) Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya

Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp3.400.000,00 merupakan koreksi lebih saji saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2019 pada SMP Negeri 2 Mrebet sebagai tindak lanjut dari Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 2 terkait kelebihan transfer Dana BOS Reguler tahun 2020. Kelebihan tersebut sudah disetorkan kembali ke RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli 2020.

Koreksi SILPA ini akan menyebabkan saldo Kas di Bendahara BOS berkurang sehingga harus dicatat sebagai bagian dari arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

V.5.b.5). Kenaikan/(Penurunan) Kas _____Rp49.560.726.483,00

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp187.185.590.496,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp137.600.318.602,00), dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp24.545.411,00), maka pada tahun 2020 terdapat kenaikan bersih kas sebesar Rp49.560.726.483,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp54.738.678.833,00 atau naik 1.057,15 persen dibandingkan nilai tahun 2019

V.5.b.6). Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS_____Rp131.907.879.237,00

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp131.907.879.237,00 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp110.610.754.109,00, Kas di BLUD sebesar Rp13.377.457.666,00, dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 7.919.667.462,00.

V.5.b.7). Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS_____Rp181.468.605.720,00

Dengan adanya saldo awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp131.907.879.237,00 serta kenaikan Kas Bersih sebesar Rp49.560.726.483,00, maka total Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS, per 31 Desember 2020 menjadi Rp181.468.605.720,00.

V.5.b.8).Saldo Akhir Kas_____Rp181.469.701.876,00

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp181.469.701.876,00 merupakan total Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp181.468.605.720,00 ditambah dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.096.156,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.417 Saldo Kas Per 31 Desember 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kas di Kas Daerah	127.536.210.567,00	110.610.754.109,00	115,30
Kas di Bendahara Penerimaan	103.737.220,00	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.096.156,00	391.454,00	280,02
Kas di BLUD	43.842.705.785,00	13.377.457.666,00	327,74
Kas di Bendahara BOS	9.971.602.148,00	7.919.667.462,00	125,91
Kas Lainnya	14.350.000,00	-	-

Jumlah	**181.469.701.876,00**	**131.908.270.691,00**	**137,57**

V.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

V.6.a. EKUITAS AWAL_____Rp2.821.986.130.961,66

Ekuitas awal tahun 2020 merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp2.821.986.130.961,66, yaitu sebesar Ekuitas di Neraca tahun 2019.

V.6.b. SURPLUS/(DEFISIT)-LO_____(Rp55.284.934.296,00)

Defisit-LO tahun 2020 sebesar Rp55.284.934.296,00 berasal dari total Defisit Kegiatan Operasi sebesar Rp1.932.479.503,68 dikurangi dengan Defisit Kegiatan Non Operasi sebesar Rp34.736.440.930,31 dikurangi Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp18.616.013.862,01.

Defisit-LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp263.212.013.159,26 atau turun 126,59 persen dari Surplus-LO tahun 2019.

V.6.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR_____(Rp37.555.369.939,72)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi maupun transaksi selama tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2020.

Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan tahun 2020 sebesar (Rp37.555.369.939,72), mengalami penurunan sebesar Rp68.958.027.196,62 atau turun 219,59 persen dari saldo tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.418 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020

Uraian	2020 *(Audited)*	2019 *(Audited)*	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Koreksi Mutasi Aset Tetap	(61.865.663.019,61)	32.491.120.203,91	(190,41)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban	(1.762.248.034,53)	-	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang	189.800.930,00	118.748.746,00	
Koreksi Ekuitas Lainnya	495.580.598,75	(1.024.474.644,25)	159,83
Koreksi karena Kesalahan Pencatan Utang	(55.175.389,00)	529.589.820,20	(48,37)
Koreksi karena Saldo Awal	25.442.334.974,67	(712.326.868,96)	(10,42)
Jumlah	**(37.555.369.939,72)**	**31.402.657.256,90**	**(119,59)**

V.6.c.1). Koreksi Mutasi Aset Tetap_____(61.865.663.019,61)

Nilai Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap sebesar (61.865.663.019,61) merupakan total nilai transaksi yang berasal dari mutasi aset tetap, baik antar SKPD maupun keluar dari entitas pemerintah daerah.

Atas transaksi mutasi aset tetap, dilakukan koreksi terhadap nilai ekuitas sebesar nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap per SKPD tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.67.

V.6.c.2). Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban_____ (Rp1.762.248.034,53)

Nilai Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban tahun 2020 sebesar (Rp1.762.248.034,53), merupakan koreksi atas pencatatan beban penyusutan di tahun 2019 karena adanya penyesuaian terhadap pencatatan aset tetap maupun aset lainnya.

Koreksi kesalahan pencatatan beban tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta 69 SKPD lainnya sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.419 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.935.492,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,33
3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	(95.000,00)
4	SKPD Lain (69)	(1.867.088.526,86)
	Jumlah	**(1.762.248.034,53)**

Koreksi kesalahan pencatatan beban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan koreksi atas nilai beban penyusutan tahun 2019 karena adanya pemecahan aset tetap Jalan Tidu-Bandara dari semula dicatat seluruhnya sebagai aset Jalan kemudian pada tahun 2020 dilakukan pemecahan sesuai jenis aset tetapnya yaitu Jalan dan Lampu Penerangan Jalan.

Koreksi kesalahan pencatatan beban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa terjadi karena kesalahan pencatatan beban akumulasi penyusutan barang rusak berat tahun 2019.

Sedangkan koreksi kesalahan pencatatan beban pada 69 SKPD Lainnya terjadi karena adanya reklasifikasi aset tetap untuk menyesuaikan dengan kodifikasi aset tetap yang baru sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, terutama untuk aset yang semula tercatat di KIB E kemudian reklasifikasi ke KIB B.

V.6.c.3). Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang _____Rp189.800.930,00

Nilai Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Piutang sebesar Rp189.800.930,00 berasal dari pencatatan penerimaan piutang yang realisasinya lebih besar dari piutang tercatat di tahun 2019 sebesar Rp199.712.930,00 dikurangi dengan pencatatan penerimaan piutang yang realisasinya lebih kecil dari piutang tercatat di tahun 2019 sebesar Rp9.912.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Penerimaan atas piutang pendapatan tahun 2020 yang realisasinya ***lebih besar*** dari saldo piutang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp199.712.930,00 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.420 Selisih Lebih Penerimaan Piutang Tahun 2020

No	SKPD	Nilai
(1)	(1)	(2)
1	UPTD Puskesmas Kalimanah	9.633.000,00
2	UPTD Puskesmas Kaligondang	323.600,00
3	RSUD Panti Nugroho (BLUD)	179.924.700,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500,00
5	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	9.831.130,00
	Jumlah	**199.712.930,00**

(b) Penerimaan atas Piutang Pendapatan tahun 2020, yang realisasinya ***lebih kecil*** dari saldo piutang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2019 dengan total selisih sebesar Rp9.912.000,00 sehingga mengurangi saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.421 Selisih Kurang Penerimaan Piutang Tahun 2020

No	SKPD	2020
(1)	(1)	(2)
1	UPTD Puskesmas Kutasari	(3.500,00)
2	UPTD Puskesmas Kejobong	(490.000,00)
3	UPTD Puskesmas Pengadegan	(1.517.000,00)
4	UPTD Puskesmas Bukateja	(20.500,00)
5	UPTD Puskesmas Rembang	(7.000,00)
6	UPTD Puskesmas Karanganyar	(553.500,00)
7	UPTD Puskesmas Karangmoncol	(3.500,00)
8	UPTD Puskesmas Karangtengah	(10.500,00)
9	UPTD Puskesmas Bobotsari	(6.642.000,00)
10	UPTD Puskesmas Mrebet	(7.000,00)
11	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	(10.500,00)
12	UPTD Puskesmas Karangreja	(643.500,00)
13	UPTD Puskesmas Karangjambu	(3.500,00)
	Jumlah	**(9.912.000,00)**

V.6.c.4). Koreksi Ekuitas Lainnya_____Rp495.580.598,75

Nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp495.580.598,75 merupakan koreksi ekuitas karena pencatatan koreksi saldo dana bergulir diragukan tertagih untuk dana bergulir yang telah diterima pengembaliannya di tahun 2020 sebesar Rp11.500.000,00 dan transaksi reklasifikasi utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp484.080.598,75 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.422 Rincian Transaksi Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2020

No	Uraian/SKPD	2020
(1)	(2)	(3)
1	**Koreksi Penerimaan Dana bergulir Tahun 2020**	**11.500.000,00**
	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	11.500.000,00
2	**Koreksi atas reklasifikasi pengakuan utang jangka panjang lainnya**	**484.080.598,75**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	484.080.598,75
	Jumlah	**495.580.598,75**

V.6.c.5). Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang ___(Rp55.175.389,00)

Nilai Koreksi ekuitas karena kesalahan pencatatan utang sebesar (Rp55.175.389,00) karena adanya selisih antara utang yang tercatat di tahun 2019 dengan pencairan SP2D di tahun 2020, baik selisih lebih maupun selisih kurang.

(a) Pembayaran utang belanja tahun 2020 yang realisasinya ***lebih kecil*** dari saldo utang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp68.783.139,00 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.423 Selisih Kurang Pembayaran Utang Tahun 2020

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.074.957,00
2	UPTD Puskesmas Kutasari	4.938.750,00
3	UPTD Puskesmas Kalimanah	1.235.393,00
4	UPTD Puskesmas Padamara	665.112,00
5	UPTD Puskesmas Bukateja	7.978.250,00
6	UPTD Puskesmas Kutawis	915.000,00
7	UPTD Puskesmas Karanganyar	3.529.025,00
8	UPTD Puskesmas Karangtengah	3.287.032,00
9	UPTD Puskesmas Bobotsari	77.705,00
10	UPTD Puskesmas Mrebet	1.790.158,00
11	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	229.710,00
12	Dinas SosialdaldukKBP3A	57.054,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	376.921,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	934.460,00
15	Dinas Pertanian	1.100,00
16	Sekretariat DPRD	25.500.000,00
17	Kelurahan Penambongan	178.500,00
18	Kecamatan Mrebet	14.012,00
	Jumlah	**68.783.139,00**

(b) Pembayaran utang belanja tahun 2020 yang realisasinya ***lebih besar*** dari saldo utang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp123.958.528,00 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.424 Selisih Lebih Pembayaran Utang Tahun 2020

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	UPT SMP Negeri 2 Padamara	(2.241.008,00)
2	UPT SMP Negeri 4 Bobotsari	(118.750,00)
3	Dinas Kesehatan	(438.867,00)
4	UPTD Puskesmas Kalikajar	(149.632,00)
5	UPTD Puskesmas Kejobong	(720.400,00)
6	UPTD Puskesmas Pengadegan	(5.015.726,00)
7	UPTD Puskesmas Karangmoncol	(1.103.240,00)
8	UPTD Puskesmas Karangreja	(24.224.900,00)
9	RSUD Panti Nugroho	(4.414.067,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(813.250,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(143.231,00)

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(1.403.530,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(764.815,00)
14	DPRD	(25.500.000,00)
15	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	(575.391,00)
16	Kelurahan Purbalingga Kidul	(1.433.973,00)
17	Kelurahan Mewek	(1.416.292,00)
18	Inspektorat Daerah	(153.512,00)
19	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	(53.327.944,00)
	Jumlah	**(123.958.528,00)**

V.6.c.6). Koreksi Ekuitas Karena Koreksi Saldo Awal _____Rp25.442.334.974,67

Koreksi ekuitas karena koreksi atas saldo awal sebesar Rp25.442.334.974,67 merupakan koreksi atas penyajian saldo awal tahun akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lain-lain tahun 2020.

Rincian atas masing-masing transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan tahun 2020

Koreksi tersebut terdapat pada 66 SKPD dengan total nilai sebesar Rp24.866.196.876,39. Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan tahun 2019 tersebut terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap kodefikasi aset tetap untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

Selain itu juga terdapat kesalahan pemilihan kode barang dalam aplikasi SIM Aset terutama beberapa gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kesalahan pemilihan kode barang tersebut menyebabkan umur ekonomis aset tetap menjadi tidak akurat yang seharusnya 50 tahun menjadi hanya tercatat 1 tahun atau 25 tahun sehingga nilai akumulasi penyusutan di tahun-tahun sebelumnya menjadi *overstated*.

(b) Koreksi atas Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Koreksi atas pencatatan saldo awal Aset Lain-Lain tahun 2020 terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD dengan total nilai sebesar Rp576.138.098,28.

Rincian Saldo Koreksi Ekuitas Karena Koreksi Saldo Awal sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.68.

V.6.d. EKUITAS AKHIR_____Rp2.729.145.826.725,94

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.729.145.826.725,94 yang berasal dari ekuitas awal Rp2.821.986.130.961,66 dikurangi defisit-LO sebesar Rp55.284.934.296,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp37.555.369.939,72.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp92.840.304.235,72 atau turun 3,29 persen dari nilai ekuitas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

a. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibentuk melalui UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Kantor Bupati Purbalingga beralamatkan di Jl. Onje No. 1B, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 yang diangkat untuk masa jabatan 2016-2021 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-984 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M,M. secara resmi dan definitif ditetapkan sebagai Bupati Purbalingga untuk sisa masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019, menggantikan H. Tasdi, S.H., M.M. yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-694 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019.

Memperhatikan bahwa sisa masa jabatan yang tidak lama lagi, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pengangkatan Wakil Kepala Daerah untuk sisa periode masa jabatan 2016-2021 sehingga untuk periode taun 2019-2021, di Kabupaten Purbalingga hanya ada Bupati tanpa Wakil Bupati.

c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelantikan anggota DPRD dilaksanakan pada hari Senin, 19 Agustus 2019.

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2019-2024 terdiri dari:

Tabel 6.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	HR. Bambang Irawan, S.H.	Ketua
2	H. Aman Waliyudin, M.Si.	Wakil Ketua
3	Hj. Tenny Juliawaty, S.E.	Wakil Ketua
4	H. Adi Yuwono, S.H.	Wakil Ketua

d. Geografis

1) Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 hektar atau 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha). Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 74,49 km² sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 14,72 km².

Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Luas Wilayah Purbalingga Menurut Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km²)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	45,13	5,80
2	Bukateja	42,40	5,45
3	Kejobong	39,99	5,14
4	Pengadegan	41,75	5,37
5	Kaligondang	50,54	6,50
6	Purbalingga	14,72	1,89
7	Kalimanah	22,51	2,89
8	Padamara	17,27	2,22
9	Kutasari	52,90	6,80
10	Bojongsari	29,25	3,76
11	Mrebet	47,89	6,16
12	Bobotsari	32,28	4,15
13	Karangreja	74,49	9,58
14	Karangjambu	46,09	5,93
15	Karanganyar	30,55	3,93
16	Kertanegara	38,02	4,89
17	Karangmoncol	60,27	7,75
18	Rembang	91,59	11,78
	Purbalingga	**777,64**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Secara geografis dan administratif, Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah Barat.

Bagian selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah), terletak pada posisi 109º11’ - 109º35’ Bujur Timur dan 7º10’ – 7º29’ Lintang Selatan, di bagian Barat Daya Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kabupaten di sekitarnya antara lain: (i) Semarang, 191 km; (i) Purwokerto, 20 km; (iii) Cilacap 60 km; (iv) Banjarnegara 45 km; dan (v) Wonosobo, 75 km.

Peta wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 6.3 Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga

2) Kondisi Topografi dan Geomorfologi

Secara topografi, Kabupaten Purbalingga yang berada di sebelah Timur hingga Timur Laut Gunung Slamet, pada bagian utara termasuk dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah lebih dari 40 persen dan ketinggian mencapai lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kemudian berangsur-angsur melandai kearah Selatan dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 25 persen, adapaun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit–bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja,

Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Iklim tropis dan curah hujan di Purbalingga merupakan penentu keberhasilan dalam sektor pertanian, apalagi Purbalingga masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20 °C – 32.88 °C dengan rata-rata 24.49 °C. Selama tahun 2015 Purbalingga memiliki rata-rata curah hujan 2.502 mm yang terendah selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2015 ada satu bulan yang benar-benar tidak turun hujan di bulan tersebut, yaitu pada bulan September. Sedangkan banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret.

Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15–25 m (0,56 %), 25–100 m (27,02 %), 100–500 (44,13 %), 500–1000 m (23,05 %), diatas 1000 m (5,24 %).

Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogo Tahun 1969. Persentase jenis tanah dan luasannya adalah latosol coklat dan regosol 19,22 %, aluvial coklat tua 17,79 %, latosol coklat dari bahan induk vulkanik 10,92 %, latosol merah kuning 5,78 %, latosol coklat tua 8,02 %, andosol coklat 7,28 %, litosol 0,74 %, padmolik merah-kuning 12,92 %, grumusol kelabu 17,33 %.

Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada serta topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kemampuan tanah untuk menyimpan (*storage*) dan meloloskan air (porositas tanah).

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab, Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

3) Administratif dan Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi atas 18 kecamatan yang yang membawahi 224 desa dan 15 kelurahan. Pada tahun 2017 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Kantor Desa maupun Kantor Kelurahan. Jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 5.092 RT dan rukun warga (RW) sebanyak 1.558 RW .

Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 hektar, merupakan wilayah terluas dengan 12 desa, 68 RW dan 338 RT. Sementara itu, luas wilayah yang paling sedikit adalah Kecamatan Purbalingga, yaitu 1.472 hektar, terdiri dari dua desa dan 11 kelurahan. Rukun Warga di Kecamatan Purbalingga sebanyak 66 buah dan Rukun Tetangga sebanyak 235 buah.

Daftar nama Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4 Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
33.03.09	Bobotsari	16	Banjarsari
			Bobotsari
			Dagan
			Gandasuli
			Gunungkarang
			Kalapacung
			Karangduren
			Karangmalang
			Karangtalun
			Limbasari
			Majapura
			Pakuncen
			Palumbungan
			Palumbungan Wetan
			Talagening
			Tlagayasa
33.03.14	Bojongsari	13	Banjaran
			Beji
			Bojongsari
			Brobot
			Bumisari
			Galuh
			Gembong
			Kajongan
			Karangbanjar
			Metenggeng
			Pagedangan
			Patemon
			Pekalongan
33.03.02	Bukateja	14	Bajong
			Bukateja
			Cipawon
			Karangcengis
			Karanggedang
			Karangnangka
			Kebutuh
			Kedungjati
			Kembangan
			Kutawis
			Majasari
			Penaruban
			Tidu
			Wirasaba
33.03.04	Kaligondang	18	Arenan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Brecek
			Cilapar
			Kaligondang
			Kalikajar
			Kembaran Wetan
			Lamongan
			Pagerandong
			Penaruban
			Penolih
			Selakambang
			Selanegara
			Sempor Lor
			Sidanegara
			Sidareja
			Sinduraja
			Slinga
			Tejasari
33.03.06	Kalimanah	14	Babakan
			Blater
			Grecol
			Jompo
			Kalimanah Kulon
			Kalimanah Wetan
			Karangpetir
			Karangsari
			Kedungwuluh
			Klapasawit
			Manduraga
			Rabak
			Selabaya
			Sidakangen
33.03.11	Karanganyar	13	Banjarkerta
			Brakas
			Buara
			Bungkanel
			Jambudesa
			Kabunderan
			Kalijaran
			Kaliori
			Karanganyar
			Karanggedang
			Lumpang
			Maribaya
			Ponjen
33.03.17	Karangjambu	6	Danasari
			Jingkang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Karangjambu
			Purbasari
			Sanguwatang
			Sirandu
33.03.12	Karangmoncol	11	Baleraksa
			Grantung
			Karangsari
			Kramat
			Pekiringan
			Pepedan
			Rajawana
			Sirau
			Tajug
			Tamansari
			Tunjungmuli
33.03.10	Karangreja	7	Gondang
			Karangreja
			Kutabawa
			Serang
			Siwarak
			Tlahab Kidul
			Tlahab Lor
33.03.03	Kejobong	13	Bandingan
			Gumiwang
			Kedarpan
			Kejobong
			Krenceng
			Lamuk
			Langgar
			Nangkasawit
			Nangkod
			Pandansari
			Pangempon
			Sokanegara
			Timbang
33.03.01	Kemangkon	19	Bakulan
			Bokol
			Gambarsari
			Jetis
			Kalialang
			Karangkemiri
			Karangtengah
			Kedungbenda
			Kedunglegok
			Kemangkon
			Majasem

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Majatengah
			Muntang
			Panican
			Pegandekan
			Pelumutan
			Senon
			Sumilir
			Toyareka
33.03.18	Kertanegara	11	Adiarsa
			Condong
			Darma
			Karang Tengah
			Karangasem
			Karangpucung
			Kasih
			Kertanegara
			Krangean
			Langkap
			Margasana
33.03.07	Kutasari	14	Candinata
			Candiwulan
			Cendana
			Karangaren
			Karangcegak
			Karangjengkol
			Karangklesem
			Karanglewas
			Karangreja
			Kutasari
			Limbangan
			Meri
			Munjul
			Sumingkir
33.03.08	Mrebet	19	Binangun
			Bojong
			Campakoah
			Cipaku
			Karang Nangka
			Karangturi
			Kradenan
			Lambur
			Mangunegara
			Mrebet
			Onje
			Pager Andong
			Pengalusan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sangkanayu
			Selaganggeng
			Serayu Karanganyar
			Serayu Larangan
			Sindang
			Tangkisan
33.03.15	Padamara	13	Bojanegara
			Dawuhan
			Gemuruh
			Kalitinggar
			Kalitinggar Kidul
			Karanggambas
			Karangjambe
			Karangpule
			Mipiran
			Padamara
			Prigi
			Purbayasa
			Sokawera
33.03.16	Pengadegan	9	Bedagas
			Karangjoho
			Larangan
			Pangadegan
			Panunggalan
			Pasunggingan
			Tegalpingen
			Tetel
			Tumanggal
33.03.05	Purbalingga	2	Jatisaba
			Toyareja
33.03.13	Rembang	12	Bantarbarang
			Bodas Karangjati
			Gunungwuled
			Karangbawang
			Losari
			Makam
			Panusupan
			Sumampir
			Tanalum
			Wanogara Wetan
			Wlahar
			Wonogara Kulon
	Jumlah	**224**	

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat sebanyak 6.979 orang terdiri dari 3.901 orang laki-laki dan 3.991 orang perempuan.

Dari jumlah tersebut, jumlah pegawai golongan I (satu) sebanyak 100 orang, golongan II (dua) sebanyak 1.004 orang, golongan III (tiga) sebanyak 3.989 orang dan golongan IV (empat) sebanyak 1.886 orang dengan rincia sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
						TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4
Golongan IV/c	-	25	1	-	-	3	3	1	-	33
Golongan IV/b	-	3	44	2	-	77	7	4	-	137
Golongan IV/a	-	-	74	42	-	1.540	38	9	7	1.710
JUMLAH	**-**	**29**	**119**	**44**	**-**	**1.620**	**53**	**14**	**7**	**1.886**
Golongan III/d	-	-	10	264	-	385	211	41	67	978
Golongan III/c	-	-	1	124	-	471	160	19	121	896
Golongan III/b	-	-	-	37	-	711	120	11	290	1.169
Golongan III/a	-	-	-	8	-	303	106	17	512	946
JUMLAH	**-**	**-**	**11**	**433**	**-**	**1.870**	**597**	**88**	**990**	**3.989**
Golongan II/d	-	-	-	-	-	8	186	1	222	417
Golongan II/c	-	-	-	-	-	12	2	30	303	347
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	178	178
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	9	53	62
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**188**	**40**	**756**	**1.004**
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**
TOTAL	**-**	**29**	**130**	**477**	**-**	**3.510**	**838**	**142**	**1.853**	**6.979**

Pada sisi kualitas pegawai, data terakhir menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Purbalingga termasuk berkualitas tinggi, dimana jumlah pegawai yang berpendidikan S3/S2/S1/DIV dan Diploma, jauh lebih besar dari kumulatif pegawai yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

VI.2. ENTITAS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 151 Satuan Kerja, baik yang berupa Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit Pelaksana Teknis.

Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Daftar lengkap entitas akuntansi adalah sebagai berikut

Tabel 6.6 Jumlah Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	TK Negeri Pembina Kabupaten Purbalingga
3.	UPT SMP Negeri 1 Purbalingga
4.	UPT SMP Negeri 2 Purbalingga
5.	UPT SMP Negeri 3 Purbalingga
6.	UPT SMP Negeri 4 Purbalingga
7.	UPT SMP Negeri 5 Purbalingga
8.	UPT SMP Negeri 1 Kalimanah
9.	UPT SMP Negeri 2 Kalimanah
10.	UPT SMP Negeri 3 Kalimanah
11.	UPT SMP Negeri 1 Padamara
12.	UPT SMP Negeri 2 Padamara
13.	UPT SMP Negeri 1 Kutasari
14.	UPT SMP Negeri 2 Kutasari
15.	UPT SMP Negeri 3 Kutasari
16.	UPT SMP Negeri 4 Kutasari
17.	UPT SMP Negeri 1 Karangreja
18.	UPT SMP Negeri 2 Karangreja
19.	UPT SMP Negeri 3 Karangreja
20.	UPT SMP Negeri 1 Karangjambu
21.	UPT SMP Negeri 2 Karangjambu
22.	UPT SMP Negeri 1 Kemangkon
23.	UPT SMP Negeri 2 Kemangkon
24.	UPT SMP Negeri 3 Kemangkon
25.	UPT SMP Negeri 4 Kemangkon
26.	UPT SMP Negeri 1 Bukateja
27.	UPT SMP Negeri 2 Bukateja
28.	UPT SMP Negeri 3 Bukateja
29.	UPT SMP Negeri 1 Kejobong

No	Entitas Akuntansi
30.	UPT SMP Negeri 2 Kejobong
31.	UPT SMP Negeri 1 Kaligondang
32.	UPT SMP Negeri 2 Kaligondang
33.	UPT SMP Negeri 1 Pengadegan
34.	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan
35.	UPT SMP Negeri 3 Pengadegan
36.	UPT SMP Negeri 1 Rembang
37.	UPT SMP Negeri 2 Rembang
38.	UPT SMP Negeri 4 Rembang
39.	UPT SMP Negeri 1 Karangmoncol
40.	UPT SMP Negeri 2 Karangmoncol
41.	UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol
42.	UPT SMP Negeri 1 Karanganyar
43.	UPT SMP Negeri 1 Kertanegara
44.	UPT SMP Negeri 2 Kertanegara
45.	UPT SMP Negeri 1 Bojongsari
46.	UPT SMP Negeri 2 Bojongsari
47.	UPT SMP Negeri 1 Mrebet
48.	UPT SMP Negeri 2 Mrebet
49.	UPT SMP Negeri 3 Mrebet
50.	UPT SMP Negeri 4 Mrebet
51.	UPT SMP Negeri 5 Mrebet
52.	UPT SMP Negeri 1 Bobotsari
53.	UPT SMP Negeri 2 Bobotsari
54.	UPT SMP Negeri 3 Bobotsari
55.	UPT SMP Negeri 4 Bobotsari
56.	TK Negeri Pembina Bobotsari
57.	TK Negeri Pembina Bojongsari
58.	TK Negeri Pembina Bukateja
59.	UPT SMP Negeri 4 Karangmoncol
60.	Dinas Kesehatan
61.	UPTD Puskesmas Purbalingga
62.	UPTD Puskesmas Bojong
63.	UPTD Puskesmas Kutasari
64.	UPTD Puskesmas Bojongsari
65.	UPTD Puskesmas Kalimanah
66.	UPTD Puskesmas Padamara
67.	UPTD Puskesmas Kemangkon
68.	UPTD Puskesmas Kaligondang
69.	UPTD Puskesmas Kalikajar

No	Entitas Akuntansi
70.	UPTD Puskesmas Kejobong
71.	UPTD Puskesmas Pengadegan
72.	UPTD Puskesmas Bukateja
73.	UPTD Puskesmas Kutawis
74.	UPTD Puskesmas Rembang
75.	UPTD Puskesmas Karanganyar
76.	UPTD Puskesmas Karangmoncol
77.	UPTD Puskesmas Karangtengah
78.	UPTD Puskesmas Bobotsari
79.	UPTD Puskesmas Mrebet
80.	UPTD Puskesmas Serayu Larangan
81.	UPTD Puskesmas Karangreja
82.	UPTD Puskesmas Karangjambu
83.	UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten
84.	RSUD Goeteng Taroenadibrata
85.	RSKBD Panti Nugroho
86.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87.	Dinas Perumahan dan Permukiman
88.	Satuan Polisi Pamong Praja
89.	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
90.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
91.	Dinas Tenaga Kerja
92.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
93.	Dinas Lingkungan Hidup
94.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
95.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
96.	Dinas Perhubungan
97.	Dinas Komunikasi dan Informatika
98.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
99.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
101.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
102.	Dinas Pertanian
103.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
104.	Bagian Umum - Sekretariat Daerah
105.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana - Sekretariat Daerah
106.	Bagian Hukum - Sekretariat Daerah
107.	Bagian Pemerintahan - Sekretariat Daerah
108.	Bagian Perekonomian - Sekretariat Daerah
109.	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah

No	Entitas Akuntansi
110.	Bagian Administrasi Pembangunan - Sekretariat Daerah
111.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Sekretariat Daerah
112.	Bagian Humas dan Protokol - Sekretariat Daerah
113.	Sekretariat DPRD
114.	Kecamatan Kemangkon
115.	Kecamatan Bukateja
116.	Kecamatan Kejobong
117.	Kecamatan Kaligondang
118.	Kecamatan Purbalingga
119.	Kelurahan Bojong
120.	Kelurahan Kedungmenjangan
121.	Kelurahan Bancar
122.	Kelurahan Purbalingga Wetan
123.	Kelurahan Purbalingga Kulon
124.	Kelurahan Purbalingga Kidul
125.	Kelurahan Purbalingga Lor
126.	Kelurahan Penambongan
127.	Kelurahan Kandanggampang
128.	Kelurahan Kembaran Kulon
129.	Kelurahan Wirasana
130.	Kecamatan Kalimanah
131.	Kelurahan Mewek
132.	Kelurahan Karangmanyar
133.	Kelurahan Kalikabong
134.	Kecamatan Kutasari
135.	Kecamatan Mrebet
136.	Kecamatan Bobotsari
137.	Kecamatan Karangreja
138.	Kecamatan Karanganyar
139.	Kecamatan Karangmoncol
140.	Kecamatan Rembang
141.	Kecamatan Bojongsari
142.	Kecamatan Padamara
143.	Kelurahan Karangsentul
144.	Kecamatan Pengadegan
145.	Kecamatan Karangjambu
146.	Kecamatan Kertanegara
147.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
148.	Inspektorat Daerah
149.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Entitas Akuntansi
150.	Badan Keuangan Daerah
151.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah

VI.4. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020.

Dengan berlakunya Permendagri 24/2020 dan Permendikbud 19/2020, terdapat beberapa ketentuan baru dalam pengelolaan dana BOS, antara lain:

a. Penyaluran dana BOS dilaksanakan secara langsung dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah, tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaiamana tahun-tahun sebelumya.
b. Dalam rangka pelaporan belanja dana BOS, sekolah hanya mengajukan permohonan pengesahan belanja kepada BUD melalui SP2B (Surat Permohonan Pengesahan Belanja) untuk kemudian diterbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB).
c. Sedangkan pengesahan pendapatan hibah dana BOS dilakukan langsung oleh BUD dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapata Hibah (SP2H).

VI.5. Kebijakan Penerapan Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Pasal 59 huruf h mengatur bahwa pencairan dana jaminan pemeliharaan /retensi atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2017 dilaksanakan dengan pengajuan permohonan pencairan dari Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan kepada Kepala Bakeuda melalui Kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100% (seratus persen).

Lebih lanjut Pasal 59 huruf g mengatur bahwa penyedia barang/jasa yang tidak mengajukan permohonan pencairan dana jaminan pemeliharaan/retensi sampai akhir tahun anggaran 2019 atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2018, maka dana jaminan pemeliharaan/retensi yang ditampung di Rekening Kas Umum Daerah secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah. Proses eksekusi dana jaminan pemeliharaan/retensi atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun anggaran 2018 telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 melalui surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 900/6798/2019 tentang Permohonan Pemindahan Dana.

Kemudian pada Pasal 59 huruf i, dijelaskan bahwa atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, dana Jaminan Pemeliharaan/Retensi wajib diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sampai dengan akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak memiliki saldo utang retensi.

VI.6. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah

Pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak peraturan tersebut diundangkan atau selambat-lambatnya tahun 2019 sudah harus diterapkan.

Akan tetapi di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melakukan implementasi terhadap Permendagri tersebut sehingga penyajian aset tetap dalam LKPD Tahun 2019 masih menggunakan penggolongan dan kodefikasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga melaksanakan sensus BMD untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 serta untuk memperoleh data aset-aset milik Pemerintah Daerah yang lebih valid dan akurat sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan terkait dengan penyajian aset tetap dalam pemeriksaan atas LKPD di tahun-tahun sebelumnya.

Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 baru dilaksanakan di tahun 2020 sehingga akan terjadi penyesuaian terhadap saldo awal aset tetap tahun 2020 sesuai dengan kodifikasi aset tetap yang baru yang diikuti dengan penyesuaian atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebagai akibat dari adanya perubahan kodifikasi dan umur ekonomis aset tetap.

VI.7. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 mengamanatkan beberapa ketentuan baru terkait dengan penyusutan barang milik daerah, diantaranya adalah ketentuan mengenai periode penyusutan aset tetap yang sekurang-kurangnya dilaksanakan secara semesteran.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.

BAB VII
PENUTUP

Dengan laporan keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Pemerintah Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap selain Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI